



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - b. bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum dan dalam rangka memanfaatkan potensi berupa modal pembangunan dan menjawab tantangan sosiologis di Daerah perlu direspon oleh perencanaan pembangunan jangka panjang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.
- (2) RPJP Daerah bertujuan:
 - a. menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah; dan
 - b. menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 3

RPJP Daerah berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKP Daerah.

- (3) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 2), sepanjang mengatur mengenai RPJP Daerah tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 10 SERI E NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 10-206/2024



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan yang merupakan pedoman dan penentu arah pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan pedoman dan arah pembangunan daerah dalam bentuk visi dan misi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dijabarkan lebih lanjut dan terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, memuat prioritas pembangunan daerah dan rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam upaya memberikan pedoman dan untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, adalah untuk:

1. mendukung koordinasi antar pelaku dalam pembangunan Daerah;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun Pusat dan Daerah dalam pembangunan Daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan Daerah;
4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pembangunan Daerah; dan
5. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10/2024



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RPJPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
2.3. Aspek Daya Saing	II-72
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-155
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-172
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana	II-174
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-196
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2. Isu Strategis.....	III-26
3.3. Tantangan Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung bagi Pembangunan Daerah	III-63
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
4.1. Visi Daerah	IV-1
4.2. Misi Daerah	IV-7
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1. Arah Kebijakan Daerah.....	V-1
5.2. Sasaran Pokok.....	V-5
BAB VI PENUTUP	VI-1





DAFTAR TABEL

	<i>halaman</i>
Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo	II-2
Tabel 2.2. Data DAS di Kabupaten Purworejo	II-5
Tabel 2.3. Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo	II-5
Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo	II-7
Tabel 2.5. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022	II-9
Tabel 2.6. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2022	II-9
Tabel 2.7. Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo	II-11
Tabel 2.8. Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo	II-16
Tabel 2.9. Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo	II-18
Tabel 2.10. Capaian Pengolahan Sampah Kabupaten Purworejo 2019-2023 ...	II-31
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 Berdasarkan <i>Sex Ratio</i>	II-37
Tabel 2.12. Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023.....	II-37
Tabel 2.13. Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo	II-39
Tabel 2.14. Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023....	II-45
Tabel 2.15. Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023....	II-46
Tabel 2.16. Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-52
Tabel 2.17. Jumlah Kasus Malaria dan API di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-53
Tabel 2.18. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-54
Tabel 2.19. <i>Universal Health Coverage</i> di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	II-55
Tabel 2.20. Angka iBangga Kabupaten Purworejo beserta Dimensinya.....	II-56
Tabel 2.21. Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-58





Tabel 2.22.	Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-65
Tabel 2.23.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-66
Tabel 2.24.	Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.25.	Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2022.....	II-68
Tabel 2.26.	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 - 2023.....	II-69
Tabel 2.27.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Tahun 2019-2023	II-70
Tabel 2.28.	Data dan Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023.....	II-71
Tabel 2.29.	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo.....	II-72
Tabel 2.30.	Analisis <i>SLQ</i> dan <i>Shift Share Netto</i> Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo.....	II-74
Tabel 2.31.	Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	II-76
Tabel 2.32.	Penanganan Desa Rawan/ Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	II-77
Tabel 2.33.	Perkembangan Skor PPH Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	II-79
Tabel 2.34.	Analisis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2022.....	II-81
Tabel 2.35.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022	II-86
Tabel 2.36.	Tabel 2.36 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022	II-87
Tabel 2.37.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja SelamaSeminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo	II-89
Tabel 2.38.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023.....	II-89
Tabel 2.39.	Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.....	II-90





Tabel 2.40.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023	II-97
Tabel 2.41.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-100
Tabel 2.42.	Dana Pihak Ketiga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-100
Tabel 2.43	Data Kredit Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-101
Tabel 2.44.	<i>Return on Asset</i> (ROA) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-102
Tabel 2.45.	Laju dan Proporsi PMTB Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....	II-105
Tabel 2.46.	Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023	II-107
Tabel 2.47.	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.....	II-115
Tabel 2.48.	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.....	II-118
Tabel 2.49.	Kondisi Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-119
Tabel 2.50.	Panjang dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2023	II-120
Tabel 2.51.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	II-122
Tabel 2.52.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.53.	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo	II-133
Tabel 2.54.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	II-135
Tabel 2.55.	Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo	II-137
Tabel 2.56.	Rincian Intervensi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh per Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023.....	II-138
Tabel 2.57.	Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023	II-140
Tabel 2.58.	Ketersediaan Alat Pengaman Pengguna Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023	II-141
Tabel 2.59.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024	II-142
Tabel 2.60.	Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-144





Tabel 2.61.	Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo ..	II-145
Tabel 2.62.	Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-145
Tabel 2.63.	Jaringan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Pedesaan, dan Angkutan Perbatasan Kabupaten Purworejo	II-146
Tabel 2.64.	Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.	II-148
Tabel 2.65.	Capaian Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2.66.	Data Desa <i>Blank Spot</i> di Kabupaten Purworejo	II-163
Tabel 2.67.	Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	II-165
Tabel 2.68.	Opini BPK Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2023.....	II-167
Tabel 2.69.	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo 2019 - 2021	II-171
Tabel 2.70.	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-172
Tabel 2.71.	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025.....	II-173
Tabel 2.72.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo	II-175
Tabel 2.73.	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo	II-176
Tabel 2.74.	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purworejo	II-179
Tabel 2.75.	Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Purworejo	II-181
Tabel 2.76.	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo	II-183
Tabel 2.77.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal Kabupaten Purworejo	II-185
Tabel 2.78.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Purworejo.....	II-187
Tabel 2.79.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Purworejo	II-189
Tabel 2.80.	Proyeksi Persampahan Kabupaten Purworejo	II-191
Tabel 2.81.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purworejo ..	II-191
Tabel 2.82.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Purworejo ..	II-193
Tabel 3.1.	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Dimensi Pembangunan	III-13
Tabel 3.2.	Inti Masalah Jangka Panjang Kabupaten Purworejo	III-23
Tabel 3.3.	Tabulasi Silang (<i>Crosstab</i>) Isu Strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.....	III-45
Tabel 3.4.	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo	III-64
Tabel 3.5.	Proporsi Sektor Emisi GRK di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2022.....	III-65





Tabel 3.6.	Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Kabupaten Purworejo Tahun 2030 dan 2045.....	III-67
Tabel 4.1.	Penyusunan Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.....	IV-2
Tabel 4.2.	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-4
Tabel 4.3.	Sasaran Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4.4.	Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	IV-6
Tabel 4.5.	Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045...	IV-7
Tabel 4.6.	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-12
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan Umum RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.....	V-2
Tabel 5.2.	Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN	V-2
Tabel 5.3.	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045	V-3
Tabel 5.4.	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045	V-6
Tabel 5.5.	Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045	V-7
Tabel 5.6.	enyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah	V-8
Tabel 5.7.	Indikator Utama Pembangunan dan Target per Periode RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.....	V-11
Tabel 5.8.	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045	V-16
Tabel 5.9.	Penyelarasan Isu Strategis, Visi, Sasaran Visi, Indikator Sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045....	V-26





DAFTAR GAMBAR

	<i>halaman</i>
Gambar 1.1.	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah.....I-5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten PurworejoII-2
Gambar 2.2.	Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo.....II-3
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten PurworejoII-4
Gambar 2.4.	Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo.....II-5
Gambar 2.5.	Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo II-11
Gambar 2.6.	Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo II-12
Gambar 2.7.	Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten PurworejoII-13
Gambar 2.8.	Peta Rawan Bencana Kabupaten PurworejoII-15
Gambar 2.9.	Jumlah Kejadian Kebakaran dan Jumlah Kejadian Kebakaran yang ditangani Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....II-15
Gambar 2.10.	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten PurworejoII-17
Gambar 2.11.	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten PurworejoII-19
Gambar 2.12.	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Purworejo II-20
Gambar 2.13.	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten PurworejoII-21
Gambar 2.14.	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Purworejo II-22
Gambar 2.15.	Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Purworejo II-22
Gambar 2.16.	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Purworejo II-23
Gambar 2.17.	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Purworejo II-24
Gambar 2.18.	Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab. Purworejo II-25
Gambar 2.19.	Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Purworejo II-25
Gambar 2.20.	Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo II-26
Gambar 2.21.	Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor Kab. Purworejo II-26
Gambar 2.22.	Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Purworejo II-27
Gambar 2.23.	Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Purworejo II-27





Gambar 2.24.	Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2016 – 2023	II-28
Gambar 2.25.	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-30
Gambar 2.26.	Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo 2018-2022	II-32
Gambar 2.27.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2015- 2023.....	II-34
Gambar 2.28.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2020- 2023.....	II-35
Gambar 2.29.	Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....	II-36
Gambar 2.30.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....	II-36
Gambar 2.31.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2011-2023.....	II-40
Gambar 2.32.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2011-2023.....	II-41
Gambar 2.33.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, serta Kabupaten Sekitar Tahun 2005-2023.....	II-42
Gambar 2.34.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, serta Kabupaten Sekitar Tahun 2005-2023.....	II-43
Gambar 2.35.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2023 (dalam ribu jiwa).....	II-44
Gambar 2.36.	Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 (dalam rupiah).....	II-45
Gambar 2.37.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017 – 2023	II-47
Gambar 2.38.	Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2010- 2023.....	II-48
Gambar 2.39.	Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023.....	II-49
Gambar 2.40.	Grafik Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....	II-50
Gambar 2.41.	Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten Purworejo Tahun 2015- 2023.....	II-51
Gambar 2.42.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Succes Rate</i>) di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	II-54





Gambar 2.43.	Grafik Angka iBangga Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2022-2023.....	II-56
Gambar 2.44.	Grafik IKG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018-2023.....	II-57
Gambar 2.45.	Grafik IPG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023.....	II-58
Gambar 2.46.	Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023.....	II-59
Gambar 2.47.	Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2024	II-60
Gambar 2.48.	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023.....	II-61
Gambar 2.49.	Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023	II-61
Gambar 2.50.	Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) menurut Jenis Kelamin (Ribu rupiah/orang/tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023	II-62
Gambar 2.51.	Grafik IDG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023.....	II-63
Gambar 2.52.	Grafik Komponen IDG Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023	II-64
Gambar 2.53.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 (Persen).....	II-73
Gambar 2.54.	Analisis SLQ dan Shift Netto Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo	II-75
Gambar 2.55.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	II-75
Gambar 2.56.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023.....	II-77
Gambar 2.57.	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2010 – 2023	II-78
Gambar 2.58.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Purworejo Tahun 2019–2023... ..	II-80
Gambar 2.59.	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023	II-80
Gambar 2.60.	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023.....	II-82
Gambar 2.61.	Laju Populasi Ternak di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023	II-82
Gambar 2.62.	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023	II-83





Gambar 2.63.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023	II-84
Gambar 2.64.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023 (jiwa) ..	II-85
Gambar 2.65.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (%)	II-85
Gambar 2.66.	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....	II-91
Gambar 2.67.	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023	II-92
Gambar 2.68.	Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023	II-92
Gambar 2.69.	Kunjungan Wisatawan Tahun 2010-2023.....	II-93
Gambar 2.70.	Laju PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.....	II-94
Gambar 2.71.	<i>Trade Balance</i> Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023.....	II-95
Gambar 2.72.	Capaian Kinerja Perkoperasian di Kabupaten Purworejo.....	II-96
Gambar 2.73.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023.....	II-97
Gambar 2.74.	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023.....	II-98
Gambar 2.75.	Upah Minimum Kabupaten Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (ribu rupiah).....	II-99
Gambar 2.76.	Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (%)	II-103
Gambar 2.77.	Pengeluaran Per Kapita Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2022 (ribu rupiah per orang per tahun)	II-104
Gambar 2.78.	Realisasi Penanaman Modal (Milyar Rupiah} berdasarkan Layanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023.....	II-106
Gambar 2.79.	Realisasi Penanaman Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-107





Gambar 2.80.	Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023.....	II-108
Gambar 2.81.	Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2022.....	II-109
Gambar 2.82.	Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun, 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023.....	II-111
Gambar 2.83.	Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2023.....	II-112
Gambar 2.84.	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023	II-112
Gambar 2.85.	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2023.....	II-113
Gambar 2.86.	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023	II-114
Gambar 2.87.	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2023.....	II-114
Gambar 2.88.	Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023	II-117
Gambar 2.89.	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan ...	II-117
Gambar 2.90.	Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks).....	II-119
Gambar 2.91.	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023.....	II-121
Gambar 2.92.	Peta Persebaran DI Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Purworejo.....	II-123
Gambar 2.93.	Persentase Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengurangan Genangan DI Kewenangan Kabupaten Tahun 2016-2023	II-124
Gambar 2.94.	Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023	II-125
Gambar 2.95.	Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023.....	II-127
Gambar 2.96.	Peta Layanan Sebaran Air Minum PDAM	II-128
Gambar 2.97.	Capaian Akses Air Minum Aman di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023.....	II-128
Gambar 2.98.	<i>System Planning</i> Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo ..	II-129





Gambar 2.99. <i>Raw Water Supply</i> Bendungan Bener dengan SPAM Regional Keburejo dan SPAM Regional Kamijoro	II-130
Gambar 2.100. Capaian Akses Air Minum Layak dan Akses Perpipaan di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-130
Gambar 2.101. Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023	II-132
Gambar 2.102. Persentase Capaian Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023	II-132
Gambar 2.103. Persentase Kebutuhan rumah (<i>backlog</i>) Tahun 2016-2023 Di Kabupaten Purworejo	II-134
Gambar 2.104. Persentase RTLH di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2023 ..	II-135
Gambar 2.105. Peta Kawasan Kumuh Di Kabupaten Purworejo.....	II-137
Gambar 2.106. Terminal Tipe A Purworejo	II-143
Gambar 2.107. Terminal Tipe B Purworejo.....	II-143
Gambar 2.108. Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan)	II-144
Gambar 2.109. Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023.....	II-149
Gambar 2.110. Indeks Kerukunan Umat Beragama Jawa tengah Tahun 2018-2023.....	II-150
Gambar 2.111. Konflik Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023	II-151
Gambar 2.112. Jumlah Kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Purworejo dibandingkan daerah sekitarnya Tahun 2018-2023.....	II-152
Gambar 2.113. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2018- 2023 (%)	II-153
Gambar 2.114. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2018- 2023 (indeks).....	II-153
Gambar 2.115. Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP Tahun 2018-2023 (izin) ..	II-154
Gambar 2.116. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	II-155
Gambar 2.117. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-156
Gambar 2.118. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.....	II-157
Gambar 2.119. Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo tahun 2022-2023....	II-159
Gambar 2.120. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021- 2023.....	II-159
Gambar 2.121. Indeks SPBE Kabupaten Purworejo dan Daerah Sekitar	II-161
Gambar 2.122. Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan oleh	





Pemkab Purworejo Tahun 2018-2023	II-162
Gambar 2.123. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-163
Gambar 2.124. Persentase Penduduk yang Menguasai atau Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Purworejo	II-165
Gambar 2.125. Pendapatan Asli Daerah (milyar) Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023.....	II-166
Gambar 2.126. Utilisasi Aset (milyar) Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022.....	II-167
Gambar 2.127. Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	II-168
Gambar 2.128. Jenis Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023	II-169
Gambar 2.129. Survei Penilaian Integritas Kabupaten Purworejo tahun 2021-2023.....	II-170
Gambar 2.130. Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purworejo	II-181
Gambar 2.131. Piramida Penduduk pada Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purworejo.....	II-182
Gambar 2.132. Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Jawa	II-198
Gambar 2.133. Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo.....	II-199
Gambar 2.134. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.....	II-203
Gambar 2.135. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.....	II-205
Gambar 2.136. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Purworejo	II-208
Gambar 3.1. Grafik Tren Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kab, Purworejo Tahun 2019 – 2022	III-65
Gambar 3.2. Skenario Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2045	III-66





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan menyerukan upaya bersama (kolaborasi) guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk manusia dan bumi. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah, disamping itu juga mewajibkan kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan/ kebijakan daerah dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Agar pembangunan berkelanjutan jangka panjang dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dokumen RPJPD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana





Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam upaya menjaga komitmen skenario 20 (dua puluh) tahun ke depan terkait pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan kinerja, keterpaduan dan sinergitas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo serta sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo harus menyusun RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan arah pembangunan Nasional serta memperhatikan dokumen RTRW dan KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan





- Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);





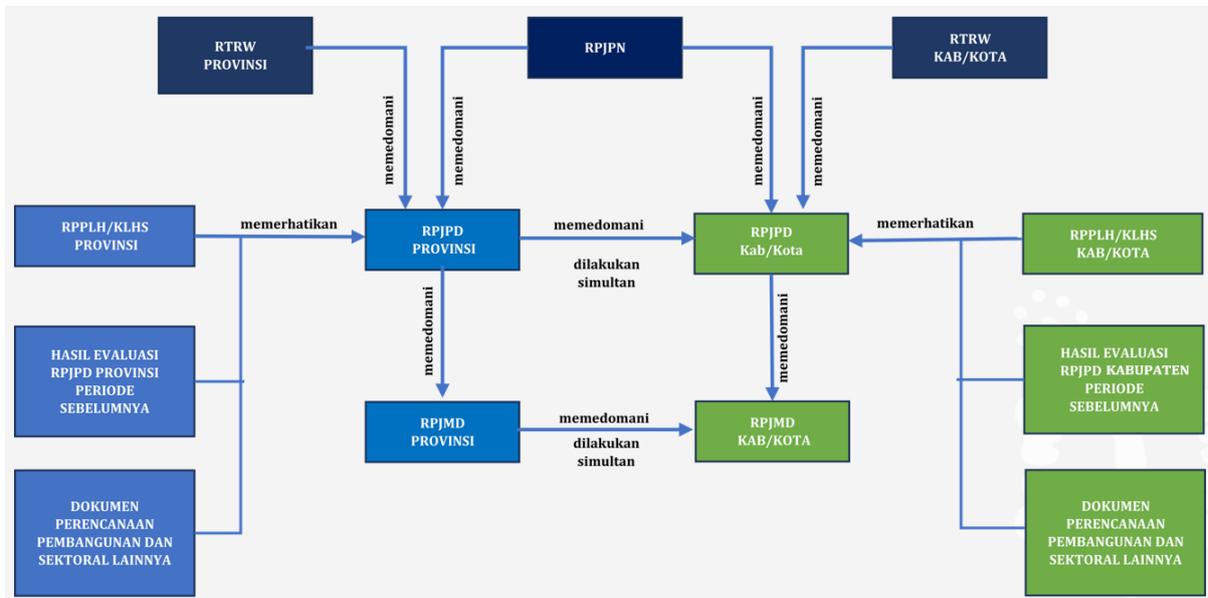
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Purworejo merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.





Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lain

Sumber: Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maupun Kabupaten Purworejo.

RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan





pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dimaksudkan adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Adapun tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purworejo, dan akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya.

1.5. Sistematika Dokumen RPJPD

Sistematika RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2045 disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD yang meliputi latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi kabupaten Purworejo sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan.





BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Purworejo selama 20 (dua puluh) tahun ke depan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat empat tahapan arah kebijakan, sasaran pokok pembangunan daerah disertai indikator kinerja pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD empat periode ke depan.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025. Data di dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Berikut ini adalah deskripsi yang lebih detail tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purworejo.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini menjelaskan tentang kondisi atau keadaan suatu wilayah yang meliputi fisik wilayah dan interaksi wilayah dengan lingkungannya serta kondisi kependudukan wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan faktor penting dalam mengidentifikasi potensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Pemahaman karakteristik kewilayahan Kabupaten Purworejo didiskripsikan mengenai letak geografis, kondisi fisik wilayah, dan penggunaan lahan. Kondisi kependudukan digambarkan dengan informasi dinamika kependudukan suatu wilayah dilihat dari jumlah, struktur dan komposisi penduduk.

2.1.1. Aspek Geografi

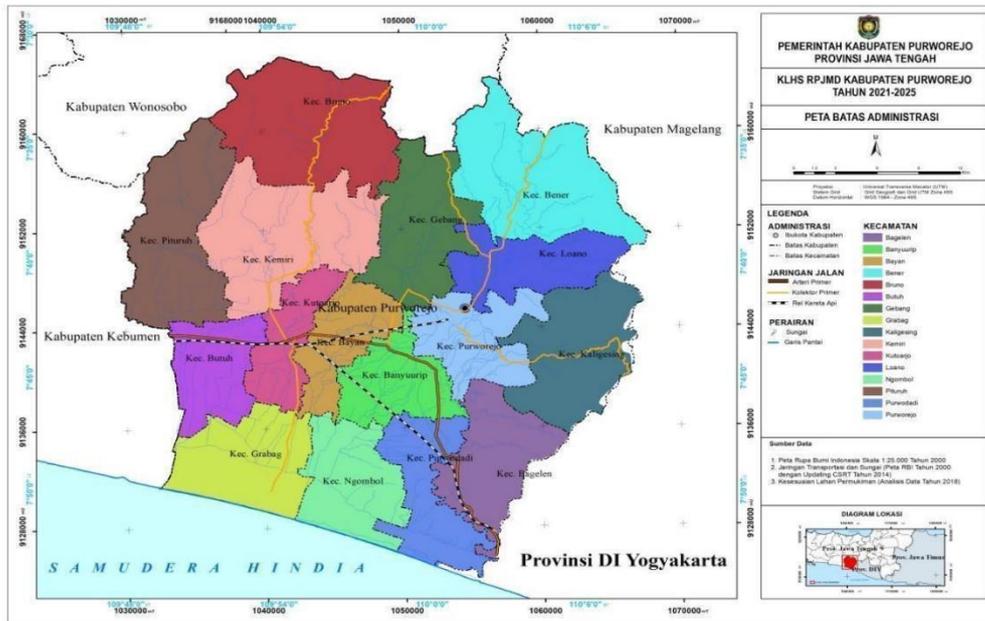
Identifikasi wilayah ditinjau dari kondisi geografi digunakan sebagai dasar untuk memahami keruangan suatu wilayah sebagai hasil interaksi sosial dan fisik wilayah. Aspek Geografi Kabupaten Purworejo pada sub-bab ini diperinci pada tiga konsep utama yaitu konsep lokasi, geofisik dan biofisik lahan. Ketiga karakteristik tersebut dijadikan dasar untuk identifikasi potensi pengembangan wilayah dan kerawanan bencana di Kabupaten Purworejo.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47' 28" sampai 1100 8' 20" Bujur Timur dan 70 32' – 70 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.081,45 km². Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo:

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo & Kabupaten Magelang
Sebelah selatan : Samudera Indonesia
Sebelah barat : Kabupaten Kebumen
Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY





Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Luas administrasi Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.081,45 km². Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki persentase luas 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa.

Jumlah desa/kelurahan dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1. Dapat diamati bahwa Kecamatan Bruno (105,68 km²) merupakan kecamatan yang paling luas di tingkat kabupaten. Di samping itu, meski Kecamatan Ngombol luas daerahnya tidak begitu luas (59,33 km²), kecamatan ini memiliki jumlah desa paling banyak, yakni 57 desa.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

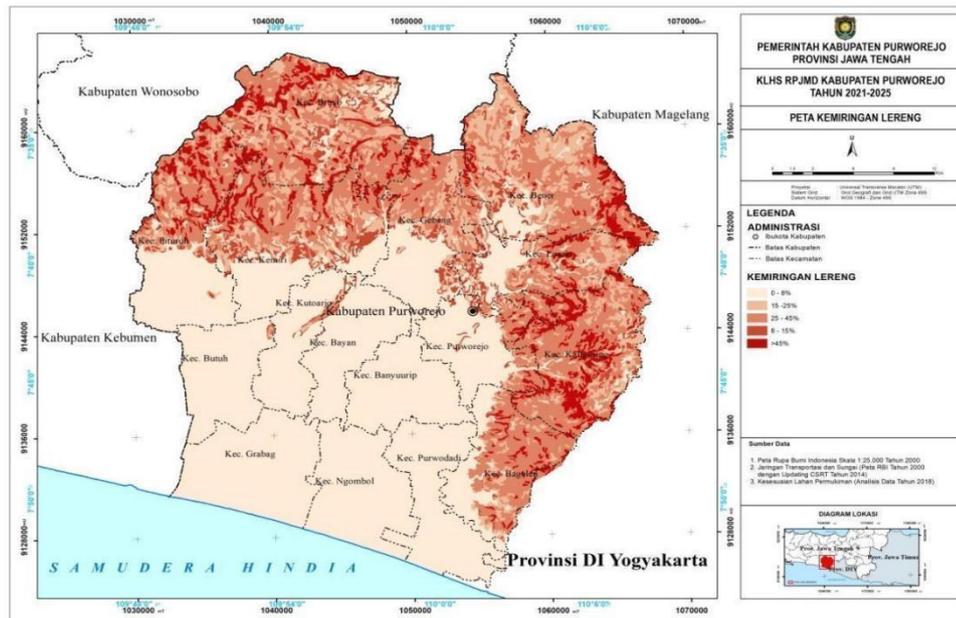
No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	2	3	4
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041





Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0–25 mdpl.



Gambar 2.2 Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

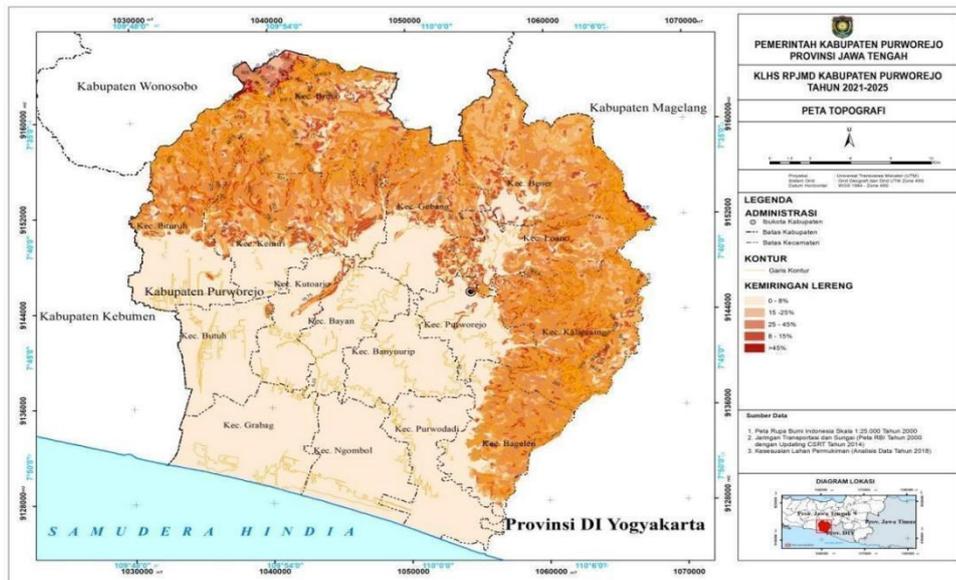
- Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo; Wilayah dengan kelas kelerengan datar ini juga didominasi oleh aktivitas budidaya yang meliputi permukiman, kegiatan produksi, pertanian lahan kering.
- Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
- Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
- Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 - 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut:

- Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1.064 meter di atas permukaan air laut.

Kenampakan kondisi topografi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.





Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Purworejo

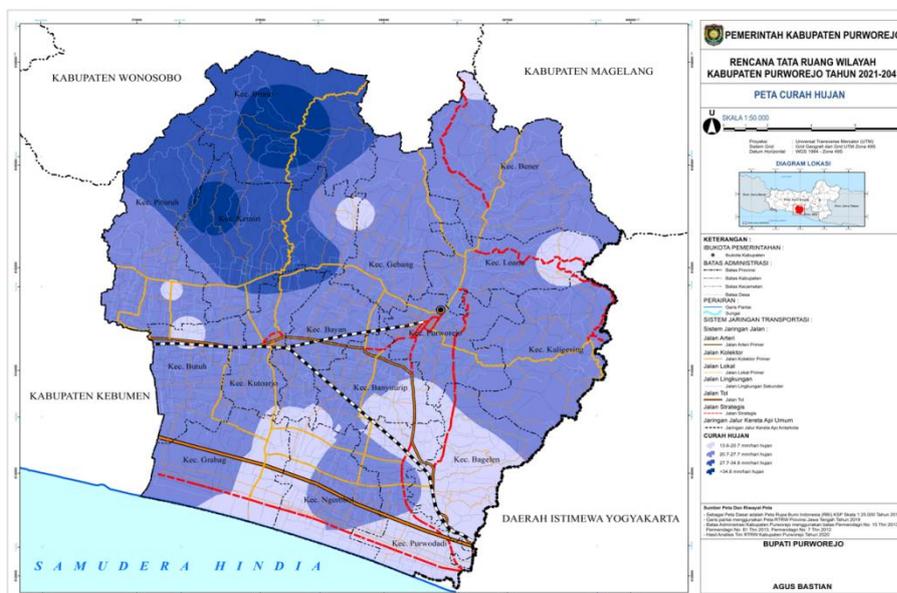
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Deskripsi mengenai iklim untuk Kabupaten Purworejo lebih dibatasi pada deskripsi mengenai curah hujan dan suhu, dengan pertimbangan bahwa kedua unsur iklim tersebut sangat dominan dengan kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana khususnya banjir, kekeringan, dan longsor. Di samping itu, aktivitas sektor pertanian yang menjadi sektor basis bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedua unsur iklim tersebut, khususnya curah hujan.

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara antara 19°C–28°C dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun, sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70%–90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 311 mm dan bulan Maret sebesar 289 mm. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjuanan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.





Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Purworejo terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yakni sungai, mata air, dan air waduk/bendungan yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.2 Data DAS di Kabupaten Purworejo

No.	Nama DAS	Debit Min (M ³ /Det)	Debit Max (M ³ /Det)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5
1	DAS Cokroyasan	251	541	35.100
2	DAS Wawar	245	1.347	78.000
3	DAS Bogowonto	600	1.187	59.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Selain sungai, bendung/waduk juga menjadi sumber air permukaan di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat juga menjadi salah satu sumber air yang dapat digunakan oleh kebutuhan masyarakat sehari-hari dan pengairan bagi pertanian. Di sisi lain, terdapat 59 titik mata air di Kabupaten Purworejo dengan total debit 169,2 m³/ detik. Berikut kawasan mata air di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.3 Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
1	Tuk Umbul	Medono	Bener	10,10
2	Siloko	Ngasinan	Bener	3,00





No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
3	Pening	Ngasinan	Bener	2,00
4	Sirebut	Benowo	Bener	10,00
5	Tuksiwaru	Limbangan	Bener	10,00
6	Tuk Siwuang	Limbangan	Bener	7,00
7	Tuk Mudal	Kalinongko	Loano	42,50
8	Simbar Joyo	Mudalrejo	Loano	27,78
9	Sedayu / Ngrau	Sedayu	Loano	3,40
10	Tuk Songo	Purworejo	Purworejo	7,00
11	Kedungkebo	Pangenrejo	Purworejo	4,64
12	Simbarjoyo	Mudalrejo	Purworejo	27,78
13	Sekalapan	Pakem	Gebang	1,50
14	Tirip	Rendeng	Gebang	1,70
15	Siranda	Girijoyo	Pituruh	5,00
16	Gondosuli I	Pamriyan	Pituruh	2,00
17	Gondosuli II	Pamriyan	Pituruh	3,00
18	Sipetung	Wonosido	Pituruh	3,00
19	Kedondong	Kaligondang	Pituruh	2,00
20	Andong	Brunosari	Bruno	3,00
21	Siglodak	Cempedak	Bruno	2,00
22	Pakisarum	Pakisarum	Bruno	1,00
23	Plipiran	Plipiran	Bruno	2,00
24	Tirip	Clapar	Bagelen	10,00
25	Beji	Clapar	Bagelen	5,00
26	Kaliputat	Clapar	Bagelen	3,00
27	Kali Clapar	Clapar	Bagelen	3,00
28	Nglegok	Soko	Bagelen	5,00
29	Lemah Putih	Soko	Bagelen	20,00
30	Sipoh	Semagung	Bagelen	5,00
31	Ngaglik	Semagung	Bagelen	4,00
32	Sekopek	Semono	Bagelen	4,00
33	Karangginem	Semono	Bagelen	4,00
34	Gandik	Semono	Bagelen	4,00
35	Depok	Semono	Bagelen	6,00
36	Klegen	Semono	Bagelen	3,00
37	Belik	Piji	Bagelen	5,00
38	Pernolo	Kemanukan	Bagelen	5,00
39	Jembangan	Kemanukan	Bagelen	3,00
40	Bawi	Kemanukan	Bagelen	3,00
41	Sipucung	Kemanukan	Bagelen	3,00
42	Sitolang	Sokoagung	Bagelen	2,00
43	Pucungsawit	Sokoagung	Bagelen	2,00
44	Sidandang	Hargorojo	Bagelen	10,00
45	Curug	Sokoagung	Bagelen	6,00
46	Pancuran	Tlogokotes	Bagelen	2,00
47	Singobarong	Somorejo	Bagelen	2,00
48	Pletuk Kidul	Dadirejo	Bagelen	2,00
49	Sudorogo 1	Sudorogo	Kaligesing	2,00
50	Sudorogo 2	Sudorogo	Kaligesing	2,00
51	Tawang Sari 1	Tawang Sari	Kaligesing	3,00
52	Tawang Sari 2	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
53	Tawang Sari 3	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
54	Tlogobulu 1	Tlogobulu	Kaligesing	3,00
55	Tlogobulu 2	Tlogobulu	Kaligesing	1,00
56	Purbowono 1	Purbowono	Kaligesing	2,00
57	Purbowono 2	Purbowono	Kaligesing	3,00
58	Purbowono 3	Purbowono	Kaligesing	2,00
59	Kaliglagah	Kaliglagah	Kemiri	2,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041





Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Potensi air bawah tanah Kabupaten Purworejo berada pada cekungan air bawah tanah (CAT) Kebumen-Purworejo meliputi daerah Gombong bagian barat sampai Kabupaten Purworejo bagian Timur. Luas CAT Kebumen-Purworejo ini adalah 109.800 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/ dangkal sebesar 269,6 juta m³ per tahun. Sedangkan luas cekungan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Purworejo adalah 48.480 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/dangkal 119,04 juta m³/tahun.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai.

Kabupaten Purworejo dikenal sebagai daerah agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian. Kabupaten Purworejo memiliki potensi pengembangan wilayah di bidang perkebunan dan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo yang didominasi oleh lahan perkebunan dan pertanian. Lahan perkebunan di Kabupaten Purworejo seluas 32.685,74 Ha, sedangkan lahan pertanian seluas 30.311,89 Ha yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	2	3
1	Belukar	286,10
2	Hutan	18.936,40
3	Kebun	32.685,74
4	Permukiman	21.910,27
5	Rawa	8,35
6	Sawah Irigasi	25.134,81
7	Sawah Tadah Hujan	5.177,08
8	Sungai	779,54
9	Tambak	369,28
10	Tanah Ladang	3.137,99
Total		108.425,57

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kawasan Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang dengan arah





pengembangan untuk mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan pengembangan wilayah diarahkan pada sektor-sektor unggulan meliputi pertanian, pariwisata, perdagangan jasa, dan industri.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kawasan Purwomanggung diarahkan untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan Cultural Heritage Masterpiece - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan mancanegara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung. Berdasarkan Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019, tema pembangunan Kawasan Purwomanggung berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan yang dimiliki adalah "Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan."

Kondisi eksisting konektivitas Purwomanggung didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 2 PKW dan 10 PKL. Pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat yaitu jalan nasional dan jalur kereta api. Peningkatan konektivitas untuk mendukung KSPN Borobudur dan sekitarnya memerlukan strategi yang mampu menghubungkan simpul kedatangan wisatawan melalui Bandara Adisutjipto dan Bandara Internasional Yogyakarta (DI Yogyakarta), Bandara Adi Soemarmo (Boyolali), dan Bandara Ahmad Yani (Semarang). Perlu pengembangan Jalan Bedah Menoreh (Bandara Internasional Yogyakarta-Borobudur), jalur kereta api Semarang- Ambarawa-Magelang-Yogyakarta serta peningkatan jalan nasional.

Keberadaan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi simpul utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi antara Purwomanggung dengan kawasan lainnya. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi daya tarik ekonomi pariwisata dan ditetapkannya sebagai UNESCO World Cultural Heritage diharapkan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini tentunya harus didukung dengan pembangunan jalur transportasi guna memperlancar aksesibilitas yaitu dengan pembangunan jalan ringroad timur Purworejo, peningkatan jalan akses ke Badan Otorita Borobudur (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano), dan peningkatan jalan Banyuasin – Tridadi – Pucungroto – Batas DIY. Selain itu pembangunan infrastruktur pendukung lain juga dilaksanakan guna mendukung pengembangan wilayah ini yaitu rencana pembangunan SPAM Regional Keburejo (JDU), pembangunan IKK SPAM Bagelen, serta pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purworejo terdapat lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi, dan potensi rawan bencana kekeringan. Berdasarkan data yang





dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan dari BNPB, diketahui dari tahun 2010-2023 Kabupaten Purworejo telah mengalami berbagai jenis kejadian bencana alam, yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, dan kekeringan. Bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.

Tabel 2.5 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Tahun	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang	Puting Beliung	Kekeringan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
2010	6	2	0	0	0	8
2011	0	4	0	1	0	5
2012	2	0	0	0	3	5
2013	1	2	1	2	1	7
2014	5	12	0	4	0	21
2015	3	9	0	1	0	13
2016	3	7	0	5	0	15
2017	5	13	0	13	0	31
2018	0	8	1	3	1	13
2019	2	6	0	10	1	19
2020	62	69	0	68	176	375
2021	0	2	0	2	0	4
2022	45	47	0	48	52	198
2023	0	8	0	34	685	727
Jumlah	134	189	2	191	919	1441

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2024

Selama enam tahun terakhir terdapat 1336 kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo. Di mana bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana kekeringan dan angin puting beliung. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kejadian bencananya, berikut dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.6 Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 - 2023

Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan								
		Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah	Fas. Pendidikan	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018													
Tanah Longsor	8	0	0	16	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Gelombang Pasang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Puting Beliung	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	1	0	0	8.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019													
Banjir	2	0	0	39.931	3	2	0	0	0	0	1	0	1
Tanah Longsor	6	0	0	162	81	0	0	0	0	0	0	0	0





Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan									
		Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah	Fas. Pendidikan	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Puting Beliung	10	0	3	1.700	60	0	0	1	0	0	0	0	0	
Kekeringan	1	0	0	70.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kebakaran Hutan dan Lahan	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020														
Banjir	62	0	0	150	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Tanah Longsor	69	0	2	0	75	1	0	2	0	0	1	0	1	
Puting Beliung	68	1	0	70	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021														
Tanah Longsor	2	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Puting Beliung	2	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022														
Banjir	45	0	0	18.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanah Longsor	47	2	0	120	36	0	0	1	0	0	0	0	0	
Puting Beliung	48	0	0	55	36	0	0	0	0	0	0	0	1	
Kekeringan	52	0	0	2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023														
Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanah Longsor	8	0	0	35	10	0	0	0	2	0	0	0	0	
Gelombang Pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Puting Beliung	34	0	1	58	17	0	0	0	12	0	0	1	0	
Kebakaran Hutan/Lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kekeringan	685	0	0	25.740	6435	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gempa Bumi	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2023

Bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo enam tahun terakhir antara lain banjir sebanyak 109 kali, tanah longsor sebanyak 140 kali, puting beliung sebanyak 165 kali, serta kekeringan 915 kali. Pada tahun 2023, bencana di Kabupaten Purworejo telah mengakibatkan beberapa korban baik korban jiwa maupun rumah hingga rusaknya infrastruktur yang ada. Korban jiwa yang paling banyak disebabkan oleh bencana kekeringan yang menyebabkan 25.740 orang menderita.





1) Potensi Rawan Bencana Tanah Longsor

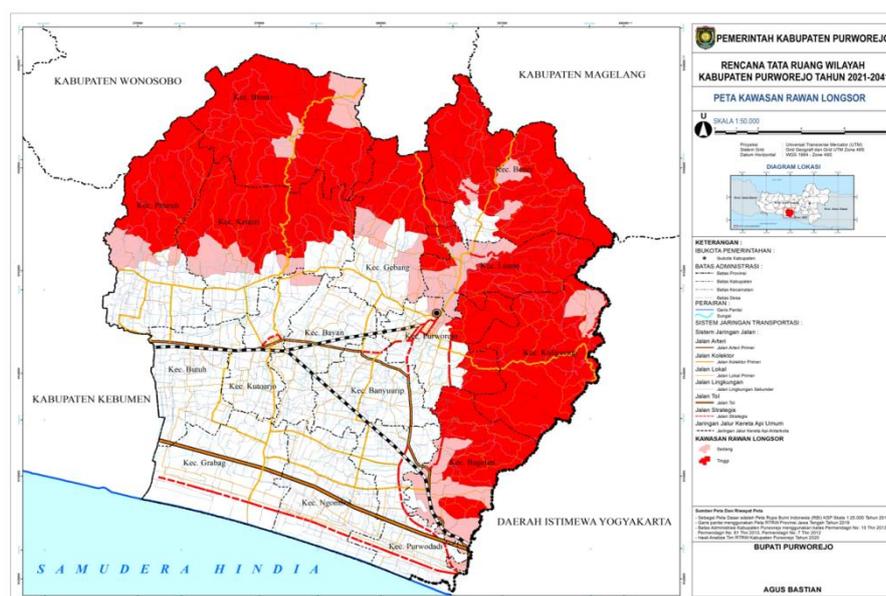
Potensi rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo terdapat di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Loano, Bener, Gebang, Bruno, Kemiri, Pituruh dan Kutoarjo. Hal ini tersaji pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4
Grabag	0	0	0
Ngombol	0	0	0
Bagelen	7	1	9
Kaligesing	16	5	0
Purworejo	8	1	16
Banyuurip	0	0	0
Bayan	0	0	0
Kutoarjo	3	1	23
Butuh	0	0	0
Pituruh	9	4	36
Kemiri	17	5	18
Bruno	15	3	0
Gebang	9	5	11
Loano	15	6	0
Bener	21	3	4
Jumlah	120	34	117

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa pada wilayah dataran tinggi memiliki bahaya tanah longsor yang tinggi, hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak.



Gambar 2.5 Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

2) Potensi Rawan Bencana Banjir

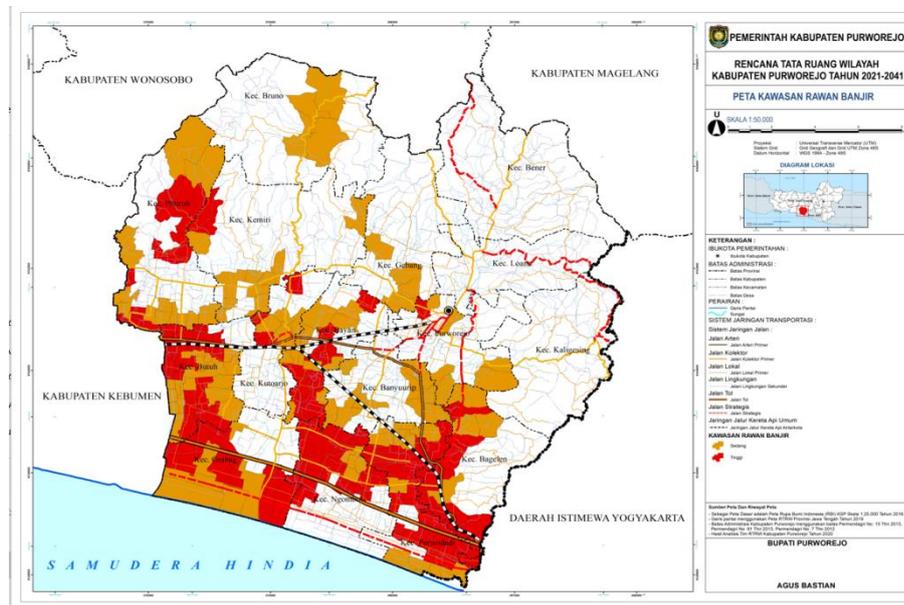
Potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi,





Bagelen, Banyuurip, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Gebang, Loano, dan Bener. Kawasan ini memiliki topografi yang rendah dan rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Diantara kecamatan yang rawan banjir, Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi dan Bagelen adalah kecamatan yang sering terdampak banjir karena posisinya yang paling rendah. Genangan banjir di kawasan ini dapat bertahan lebih dari 1 minggu dan selain merendam kawasan permukiman, banjir juga merendam kawasan pertanian sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen di kawasan tersebut.



Gambar 2.6 Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

3) Potensi Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami

Potensi rawan gelombang pasang dan tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di pesisir Pantai Selatan yang kawasannya berada di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-musim tertentu. Sedangkan kawasan rawan tsunami adalah tempat-tempat yang terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran tanah.

Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama perjalanan dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut

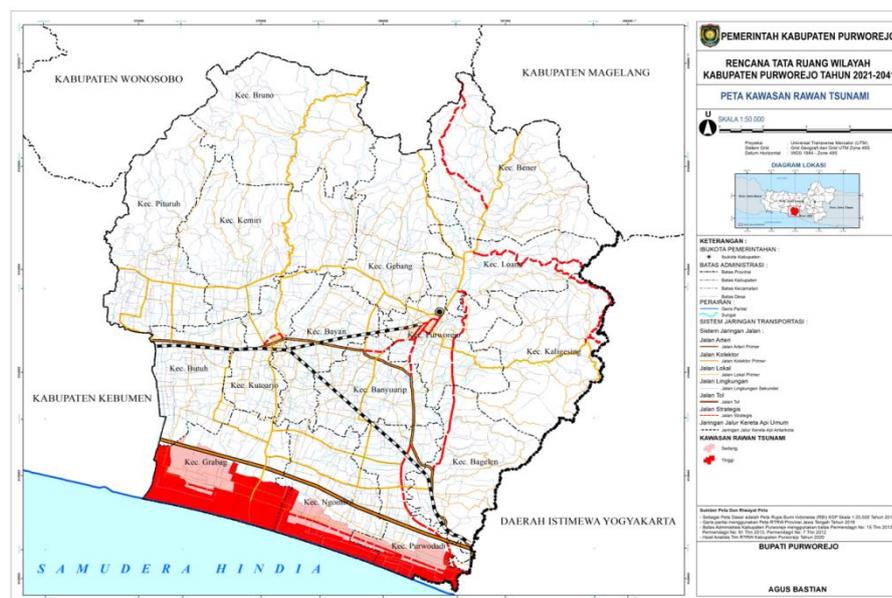




setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke laut. Sampai saat ini, di Kabupaten Purworejo belum memiliki alat deteksi dini tsunami dan baru mengandalkan gejala alam saja.

Pada jarak 0-500 m dari pantai terdapat 11 desa yang berpotensi rawan terhadap bencana gelombang pasang. Ketika gelombang pasang terjadi, air laut yang masuk tidak dapat kembali ke laut sehingga membanjiri kawasan di sekitarnya. Hal ini dikarenakan di kawasan pesisir Kabupaten Purworejo terdapat gumuk-gumuk pasir dan di muara sungai sudah tertutup sedimentasi. Air laut yang bercampur dengan air sungai menjadikan air bersifat payau. Bencana gelombang pasang ini selain merusak kawasan pertanian dan pertambakan, juga mengganggu aktivitas kawasan permukiman di sekitarnya yang ikut terendam luapan air. Banjir baru dapat surut setelah sedimentasi di muara sungai dibuka dan air dapat mengalir kembali ke laut. Usaha pembangunan jetty di muara sungai Wawar dan Cokroyasan untuk mengatasi sedimentasi pasir hanya efektif selama 1 tahun. Setelah itu, arah gelombang berubah dan sedimentasi di muara tetap terjadi.

Berbeda halnya dengan bencana gelombang pasang, bencana tsunami berpotensi melanda kawasan yang lebih luas. Dari pengalaman bencana tsunami yang pernah terjadi di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, ketinggiannya mencapai 15 m dan mencapai radius $\pm 1,5$ km dari tepi pantai. Dari asumsi ini, maka desa yang potensi rawan bencana tsunami mencapai ± 33 desa. Tetapi bila prediksi dibuat lebih besar dengan radius mencapai ± 5 km dari tepi pantai, maka desa yang berpotensi rawan bencana tsunami berkembang menjadi 56 desa.



Gambar 2.7 Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

4) Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga menyebabkan dislokasi/pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, runtuhnya tanah, aktivitas





gunung berapi, dan ledakan nuklir. Energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan korban jiwa. Potensi rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo.

5) Potensi Rawan Bencana Kekeringan

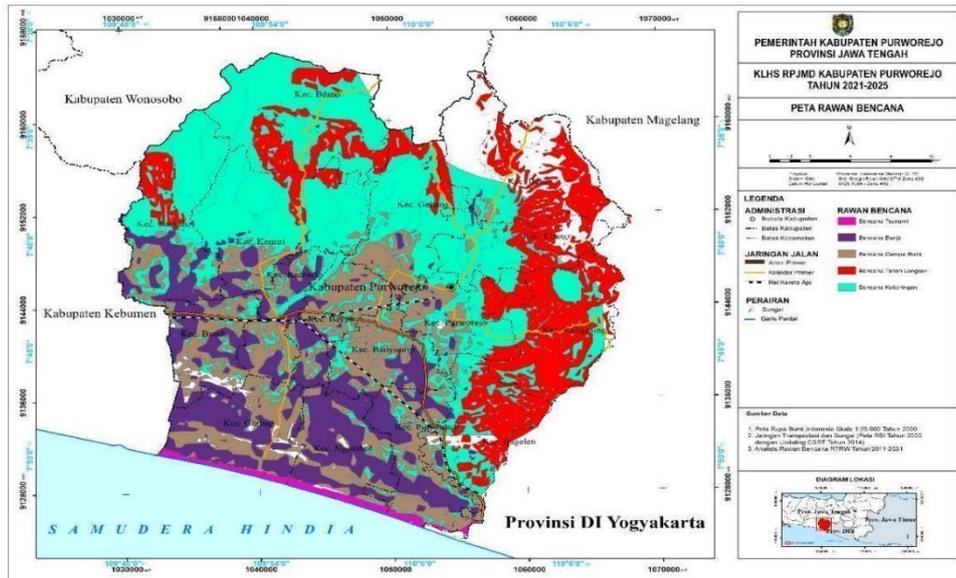
Potensi rawan bencana kekeringan ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung *control point*. Sedangkan kekeringan dari aspek air bersih berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahal biaya memperoleh air bersih.

Kekeringan pada daerah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air, tingginya kebocoran pada saluran, tidak adanya saluran tersier, tidak taatnya jadwal pola tanam, kelembagaan P3A tidak berjalan dengan baik, pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk bertanam palawija, dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi.

Debit sungai terbesar terdapat pada Sungai Bogowonto karena sungai ini merupakan aliran primer dari DAS Bogowonto. Debit sungai dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan kurangnya sistem penyimpanan air akibat berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Hal ini berdampak pada musim kemarau, terdapat sungai/kali yang tidak memiliki debit air bahkan sampai kering hingga musim hujan berikutnya.

Sementara itu, potensi rawan bencana kekeringan air bersih hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Untuk daerah pegunungan, pada beberapa kasus sumber air bersih berada jauh di bawah permukiman penduduk sehingga perlu upaya untuk menaikkan air ke atas dengan pompa. Sementara itu pada beberapa desa di tepi pantai airnya payau/asin dan keruh. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan yang panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut.





Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo
(Sumber: DPUPR Kab. Purworejo, 2023)

6) Potensi Rawan Bencana Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dicapai melalui Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak, serta Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.



Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kebakaran dan Jumlah Kejadian Kebakaran yang ditangani Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023
(Sumber: Satpol PP Damkar, 2024)

Berdasarkan data jumlah kebakaran dari tahun 2011 hingga tahun 2023 jumlah kejadian kebakaran terbanyak terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 73 kejadian kebakaran. Kejadian bencana sejak tahun 2017 tertangani sesuai dengan jumlah kejadian yang terjadi. Salah satu hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran yakni karena adanya pertumbuhan Kabupaten Purworejo yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya wilayah





permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif. Peningkatan pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah permukiman. Semakin tingginya permintaan akan permukiman oleh masyarakat perkotaan yang tidak diimbangi oleh penyediaan lahan permukiman menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran sebagai lokasi tempat tinggal.

Meningkatnya jumlah penduduk menjadi Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, demikian juga bagi masyarakat di wilayah pedesaan perlu memahami akan bahaya pemakaian api dan benda lainnya yang mudah terbakar. Sosialisasi akan bahaya kebakaran dan cara mengatasi kebakaran yang paling efektif belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Purworejo dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan daya dukung dan status daya dukung air per Kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bagelen	76430872.27	40445758.63	35985113.64	Surplus	89.20%	10.80%
2.	Banyuurip	68802508.24	75965451.34	-7162943.1	Defisit	38.39%	61.61%
3.	Bayan	58060611.69	50080960.67	7979651.019	Surplus	63.86%	36.14%
4.	Bener	137837334.7	62720731.75	75116602.95	Surplus	92.10%	7.90%
5.	Bruno	138547401.5	50578048.54	87969352.96	Surplus	91.88%	8.12%
6.	Butuh	65701892.15	72407573.28	-6705681.13	Defisit	37.90%	62.10%
7.	Gebang	86366251.68	67506593.33	18859658.35	Surplus	79.51%	20.49%
8.	Grabag	78257277.05	74895209.34	3362067.709	Surplus	58.28%	41.72%
9.	Kaligesing	96156365.13	32397216.57	63759148.56	Surplus	99.02%	0.98%
10.	Kemiri	123085698.4	83008307.97	40077390.43	Surplus	83.16%	16.84%





No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Kutoarjo	43925313.71	45659111.56	-1733797.85	Defisit	44.67%	55.33%
12.	Loano	63489700.25	44248786.82	19240913.43	Surplus	85.49%	14.51%
13.	Ngombol	74848076.54	86460583.38	-11612506.8	Defisit	36.63%	63.37%
14.	Pituruh	113708131.1	62941683.96	50766447.14	Surplus	71.89%	28.11%
15.	Purwodadi	63034715.13	68117331.83	-5082616.7	Defisit	44.65%	55.35%
16.	Purworejo	59290523.72	48403913.83	10886609.89	Surplus	70.75%	29.25%
Total		1347542673	965837262.8	381705410.2	Surplus	72.58%	27.42%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan dalam kondisi surplus sebesar (381.705.410,52 m3/tahun) dengan total ketersediaan airnya sebesar 1.347.542.673,30 m3/tahun sementara kebutuhan air mencapai 965.837.262,8 m3/tahun. Jumlah kebutuhan air di Kabupaten Purworejo hanya 2/3 dari ketersediaan air yang ada. Kondisi surplus ini menyebabkan potensi ketersediaan air yang belum terlampaui di Kabupaten Purworejo masih tinggi yaitu sebesar 72,58%. Jika dilihat per kecamatan terdapat 5 (lima) kecamatan yang memiliki daya dukung air dengan status defisit sedangkan 11 (sebelas) kecamatan lainnya berstatus surplus. Wilayah dengan kondisi defisit tertinggi berada di Kecamatan Ngombol sebesar 63,37%, Kecamatan Butuh sebesar 62,10%, dan Banyuurip sebesar 61,61%. Gambaran spasial status daya dukung air di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.10 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045





2) Daya Dukung Pangan

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purworejo masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Purworejo masih mempunyai potensi sawah yang luas. Hasil perhitungan daya dukung pangan per kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

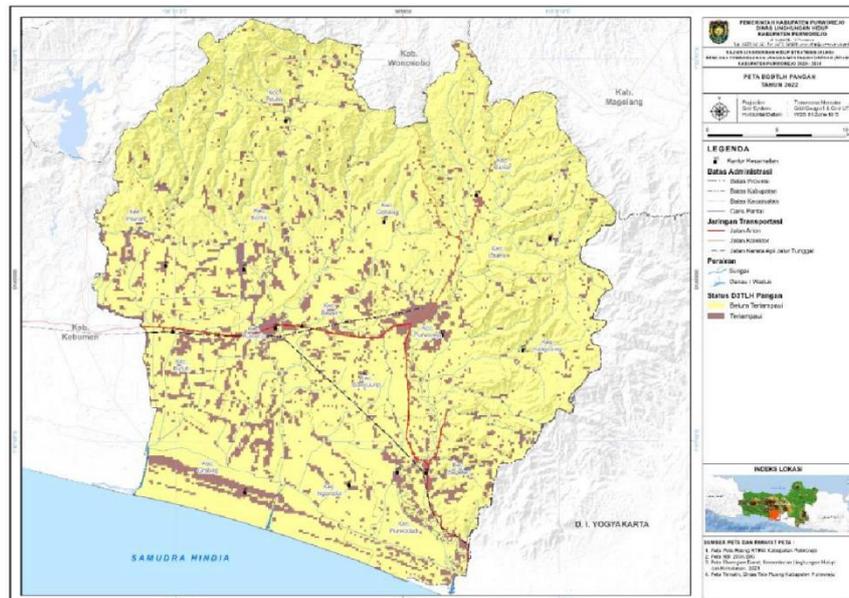
Tabel 2.9 Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bagelen	8495,48	3.832,23	4.663,24	Surplus	80,83%	19,17%
2.	Banyuurip	9.933,65	4.046,05	5.887,60	Surplus	87,78%	12,22%
3.	Bayan	8.003,95	3.640,92	4.363,03	Surplus	81,18%	18,82%
4.	Bener	14.995,44	3.720,29	11.275,15	Surplus	95,71%	4,29%
5.	Bruno	13.422,27	2.914,94	10.507,34	Surplus	94,03%	5,97%
6.	Butuh	9.520,64	4.277,55	5.243,09	Surplus	80,65%	19,35%
7.	Gebang	10.651,55	2.879,10	7.772,46	Surplus	93,47%	6,53%
8.	Grabag	10.995,70	5.191,51	5.804,19	Surplus	77,63%	22,37%
9.	Kaligesing	9.076,40	2.180,58	6.895,82	Surplus	95,14%	4,86%
10.	Kemiri	13.929,60	4.536,33	9.393,27	Surplus	87,17%	12,83%
11.	Kutoarjo	6.270,56	3.184,61	3.085,95	Surplus	73,77%	26,23%
12.	Loano	7.150,07	2.046,33	5.103,73	Surplus	95,14%	4,86%
13.	Ngombol	10.867,62	4.036,10	6.831,51	Surplus	88,21%	11,79%
14.	Pituruh	12.853,06	4.535,96	8.317,11	Surplus	88,01%	11,99%
15.	Purwodadi	8.963,11	3.952,18	5.010,93	Surplus	82,29%	17,71%
16.	Purworejo	7.672,91	3.705,88	3.967,03	Surplus	78,33%	21,67%
Total		162.802	58.680,58	104.121,42	Surplus	87,62%	12,38%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan masih surplus sebesar 3.967,03 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 7.672,91 ton dan kebutuhan pangan hanya 3.705,88 ton. Dalam kondisi surplus tersebut juga terdapat 21,67% wilayah yang sudah terlampaui untuk kondisi daya dukung pangannya. Jika dilihat per kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo masuk kedalam status daya dukung surplus. Kecamatan dengan persentase belum terlampaui tertinggi yaitu Kecamatan Bener dengan nilai persentase belum terlampaui sebesar 95,71%. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan untuk sawah masih mendominasi wilayah dan juga jumlah penduduknya tidak setinggi kecamatan lainnya.





Gambar 2.11 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

b. Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Lingkungan Hidup

1) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

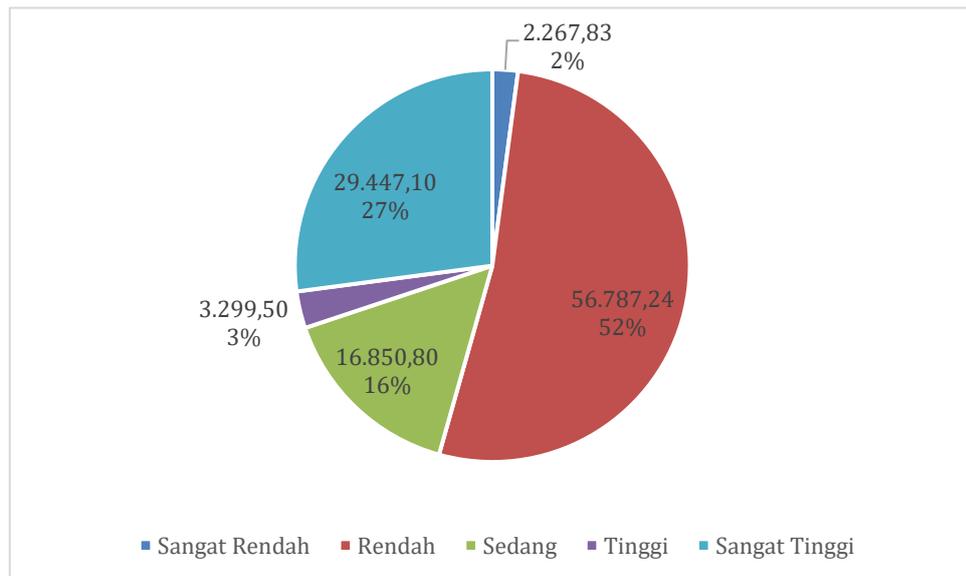
Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan (P1) berkaitan dengan kemampuan ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air, yaitu berupa ikan. Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah ekoregion bentanglahan dan tutupan lahan. Ekoregion bentanglahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain ekoregion bentanglahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan ekosistem dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia. Semakin rapat tutupan lahan, maka semakin besar pula potensi penyediaan bahan pangan yang dapat dihasilkan oleh ekosistem karena keberadaan berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan.

Layanan ekosistem pangan ini mencakup pangan dari hutan seperti tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan serta hasil peternakan. Tujuan dari analisis daya dukung lahan layanan ekosistem pangan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan dalam arti luas. Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Oleh





sebab itu manusia dituntut secara hukum atau menurut undang - undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan.

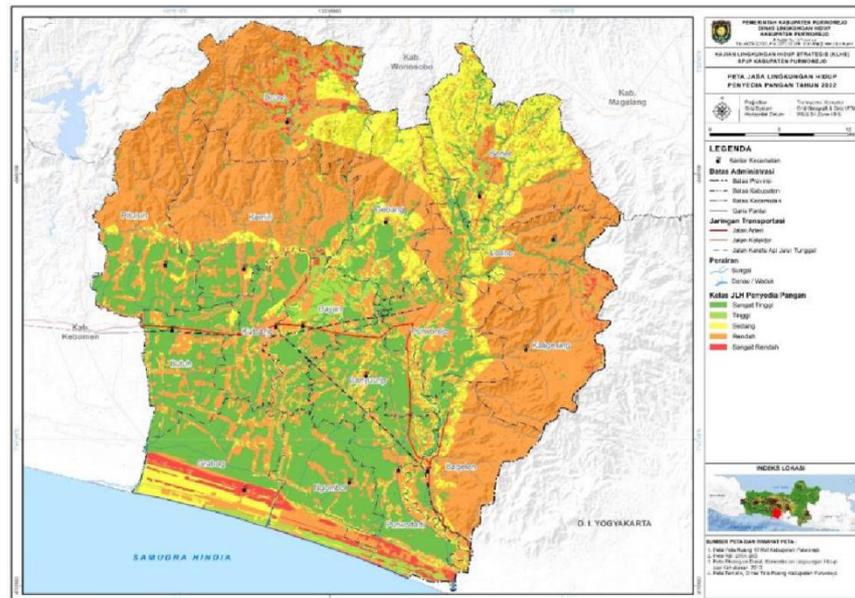


Gambar 2.12 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2053

Berdasarkan peta dan tabel hasil analisis daya dukung lingkungan hidup aspek penyediaan bahan pangan, diketahui bahwa kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sedang mayoritas mendominasi di daerah Kabupaten Purworejo bagian selatan seperti Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Banyuurip, dan Kecamatan Bayan. Secara umum, kemampuan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Purworejo memiliki kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sedang dengan persentase 52%, persentase kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sangat tinggi sebesar 27%, dan sisanya memiliki kemampuan penyediaan bahan pangan kelas rendah sedang, tinggi, dan sangat rendah. Wilayah Kabupaten Purworejo yang memiliki kelas penyedia pangan sangat tinggi dominan berada pada daerah dengan topografi yang relatif datar yang sangat cocok untuk penggunaan lahan sawah dibandingkan dengan sisi utara dan Timur Purworejo yang memiliki topografi yang relatif heterogen berupa pegunungan. Berikut peta kemampuan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Purworejo.





Gambar 2.13 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Purworejo
 Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

2) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berhubungan dengan segala jenis sumber air yang dapat berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jasa ekosistem penyedia air bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.

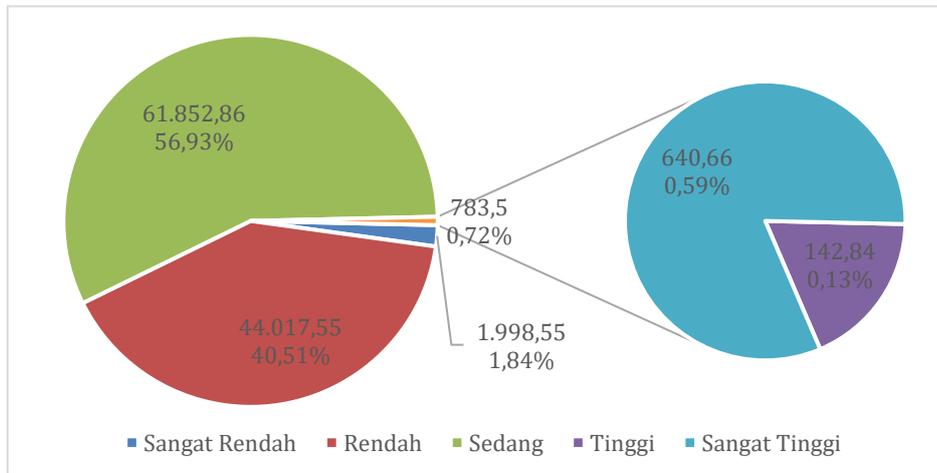
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ketersediaannya menjadi penting sebagai *recharge area* di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 41 6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang





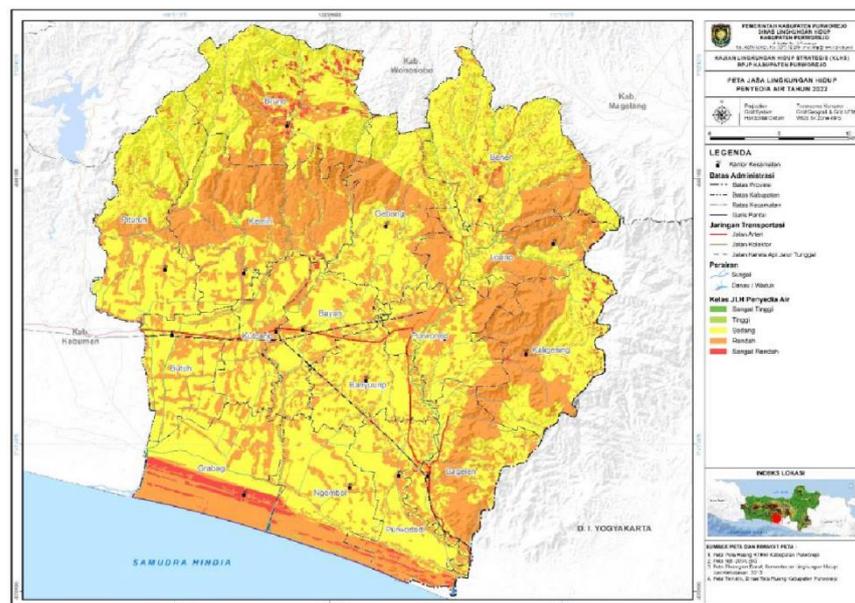
digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.



Gambar 2.14 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2053

Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Diagram tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo memiliki kelas jasa ekosistem yang masih cukup terjaga. Hal ini dibuktikan dengan persentase kelas jasa ekosistem terbesar yaitu 57% adalah kelas jasa ekosistem sedang. Hutan, perkebunan dan jenis lahan basah lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo mampu menampung, menyerap, dan mengelola air hujan hingga tidak menjadi bencana banjir. Hutan juga dapat menyaring limbah berbahaya yang tercampur ke dalam air dan membersihkan limbah berbahaya yang berlangsung secara terus menerus. Berikut disajikan peta daya dukung berbasis jasa ekosistem penyedia air.



Gambar 2.15 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

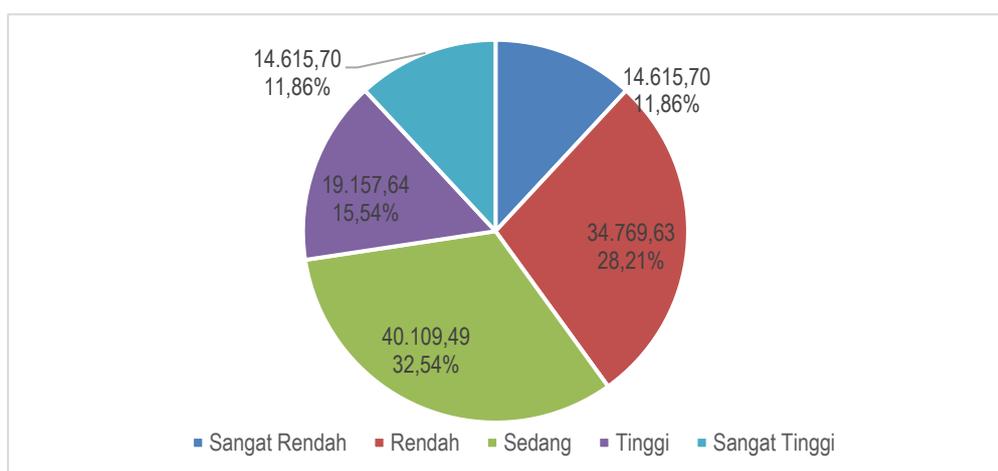




3) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuklahan.

Kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman dan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

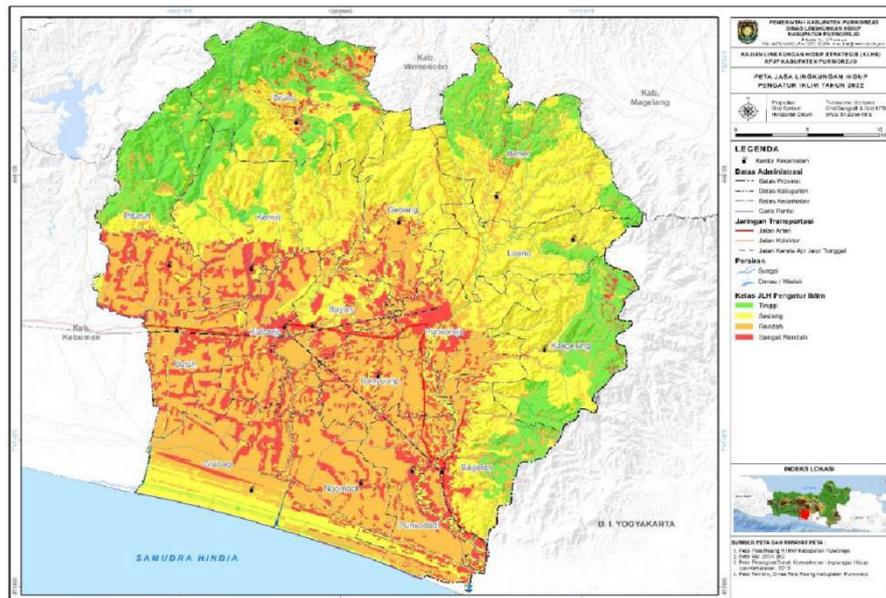


Gambar 2.16 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kelas jasa pengatur iklim dominan di Kabupaten Purworejo berada di kelas sedang (37%), dan rendah (32%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Purworejo masih cukup terjaga karena penggunaan lahan yang masih berupa kebun terutama di wilayah utara dan timur Kabupaten Purworejo. Selain itu juga masih terdapat wilayah yang memiliki kelas JLH pengatur iklim yang masuk kedalam kelas tinggi. Untuk wilayah dengan kelas JLH pengatur iklim di Kabupaten Purworejo kelas rendah dan sangat rendah dominan berada di wilayah tengah dan sisi barat yang topografinya relatif datar. Penggunaan lahan terbangun yang cenderung ada di wilayah topografi datar dan penggunaan lahan sawah memiliki kelas pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah. Secara lengkap distribusi spasial kelas JLH pentaur iklim di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





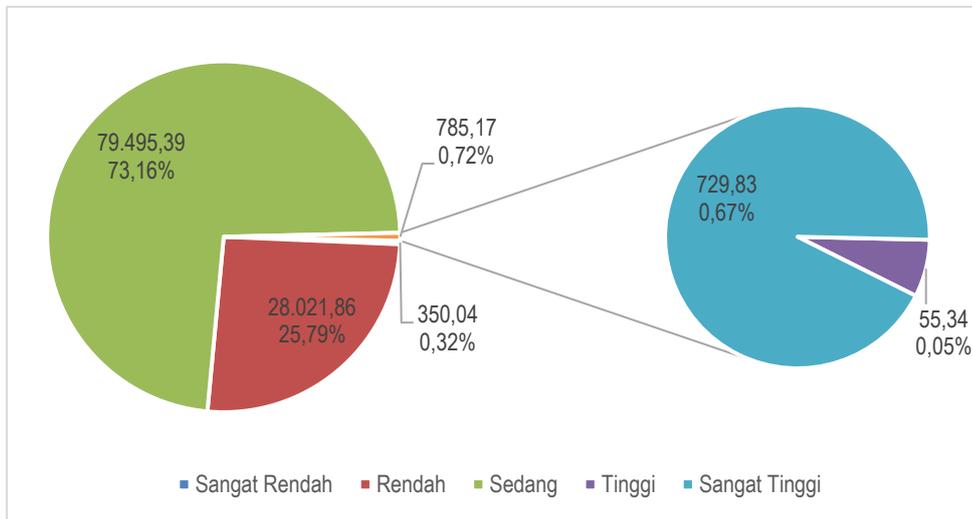
Gambar 2.17 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Purworejo
 Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

4) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Aliran Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah. Semakin rapat tutupan lahan, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu, kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan.

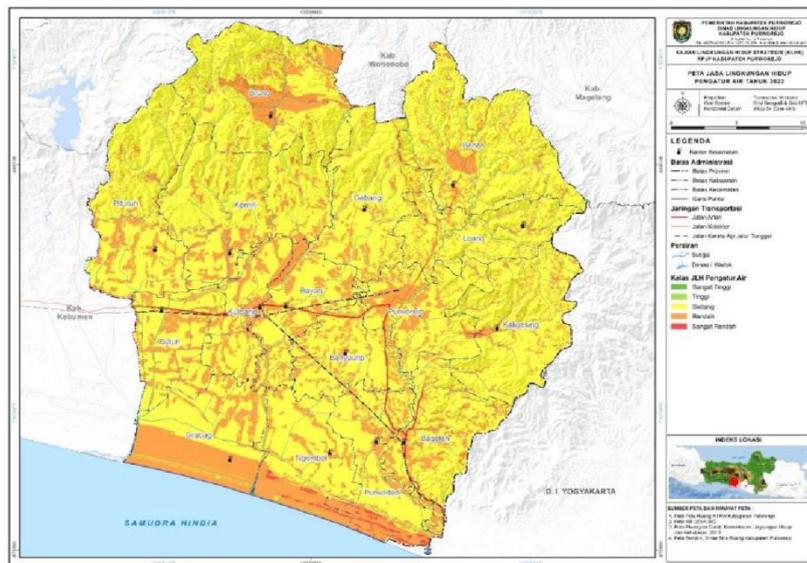
Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.





Gambar 2.18 Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab. Purworejo
 Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Jasa tersebut sebagai perwujudan bahwa wilayah tersebut masih memiliki fungsi pengaturan tata air yang baik. Keberadaan sungai-sungai dan bendungan yang membelah daratan mampu menjadi daya dukung siklus hidrologi terhadap keluar dan masuknya air sehingga berperan sebagai sarana menetralsisir limbah dan pencemaran air. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari sungai ordo satu hingga ordo tiga. Berikut disajikan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan tata aliran air.



Gambar 2.19 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Purworejo
 Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

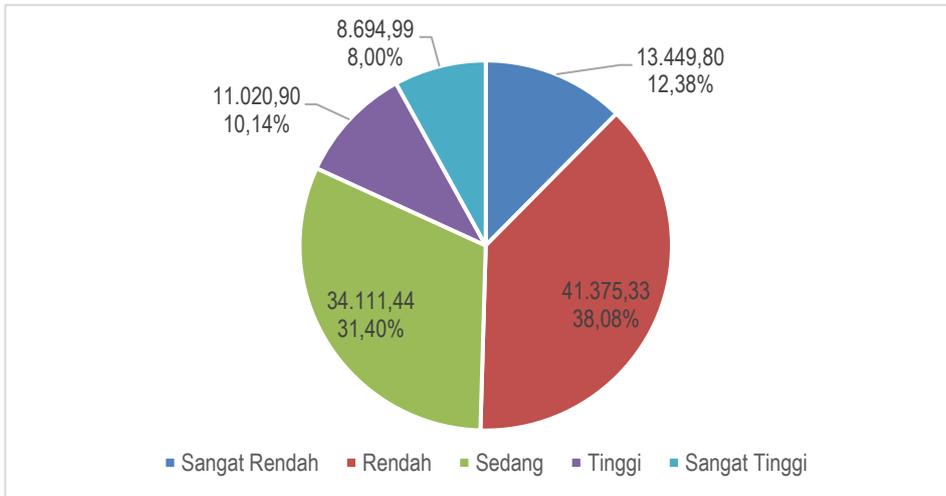
5) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor adalah kapasitas lingkungan dalam bentuk ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana tanah longsor. Seperti halnya bencana banjir, bencana longsor juga dapat dicegah oleh tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat. Selain itu bentuk lahan secara





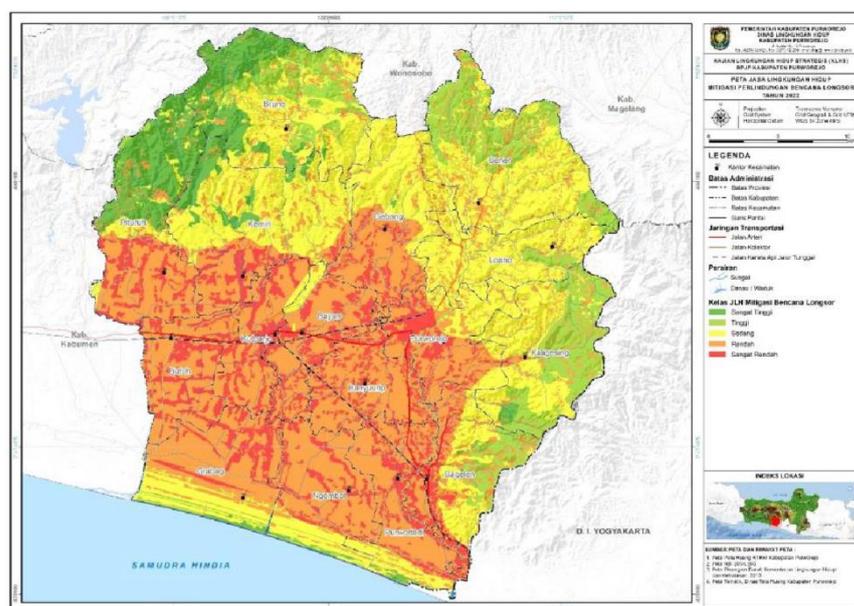
spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana. Sebagai contoh, bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi, dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor.



Gambar 2.20 Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Purworejo Tahun 2023-2053

Berdasarkan hasil perhitungan jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana tanah longsor dengan menggunakan peta penutupan lahan terbangun 2022, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo berada di kelas sangat rendah sebesar 38,08% atau setara dengan 41.375,33 Ha. Sementara itu juga terdapat 31,40% atau setara dengan 34.111,44 Ha wilayah pada kelas sedang, kondisi tersebut dipengaruhi oleh topografi dan juga penggunaan lahan yang sebagian besar memiliki kemiringan rendah terutama di wilayah selatan hingga pesisir Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.21 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Longsor Kab. Purworejo

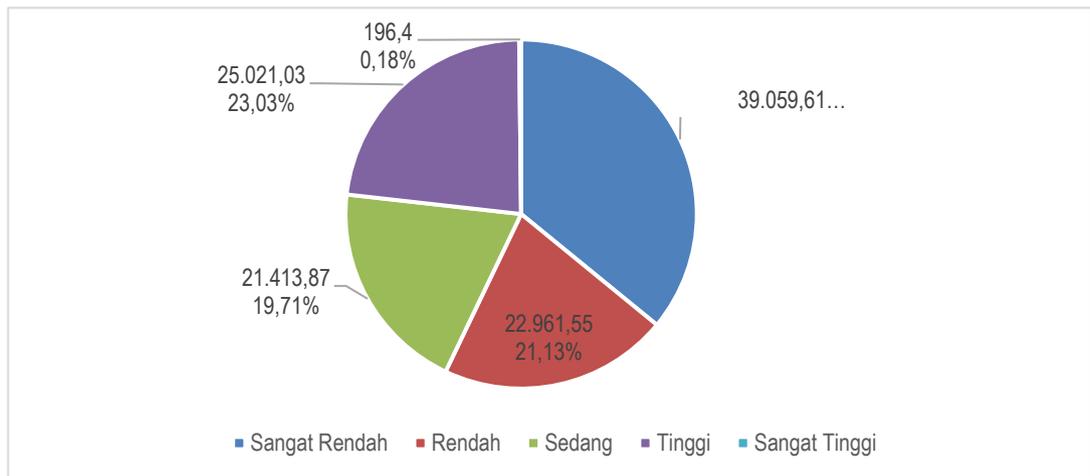
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045



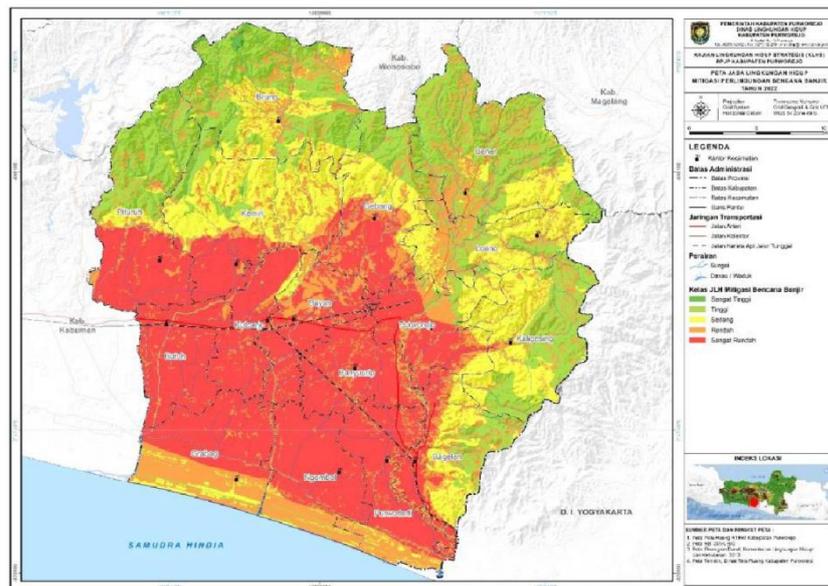


6) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana banjir di Kabupaten Purworejo didominasi oleh kelas rendah seluas 39.059,61 Ha atau 35,09% dari total luas wilayah Kabupaten Purworejo, kelas sangat tinggi seluas 23,03% atau setara dengan 25.021,03 Ha. Jika dilihat dari jumlah kejadian banjir selama 5 (lima) tahun terakhir, kejadian banjir di Kabupaten Purworejo hanya ada 6 kejadian yang tercatat. Rendahnya kejadian banjir di Kabupaten Purworejo ini karena luasan wilayah Kabupaten Purworejo yang masuk kedalam kelas sangat tinggi relatif luas.



Gambar 2.22 Diagram Kelas JLH Pengatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Purworejo
 Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

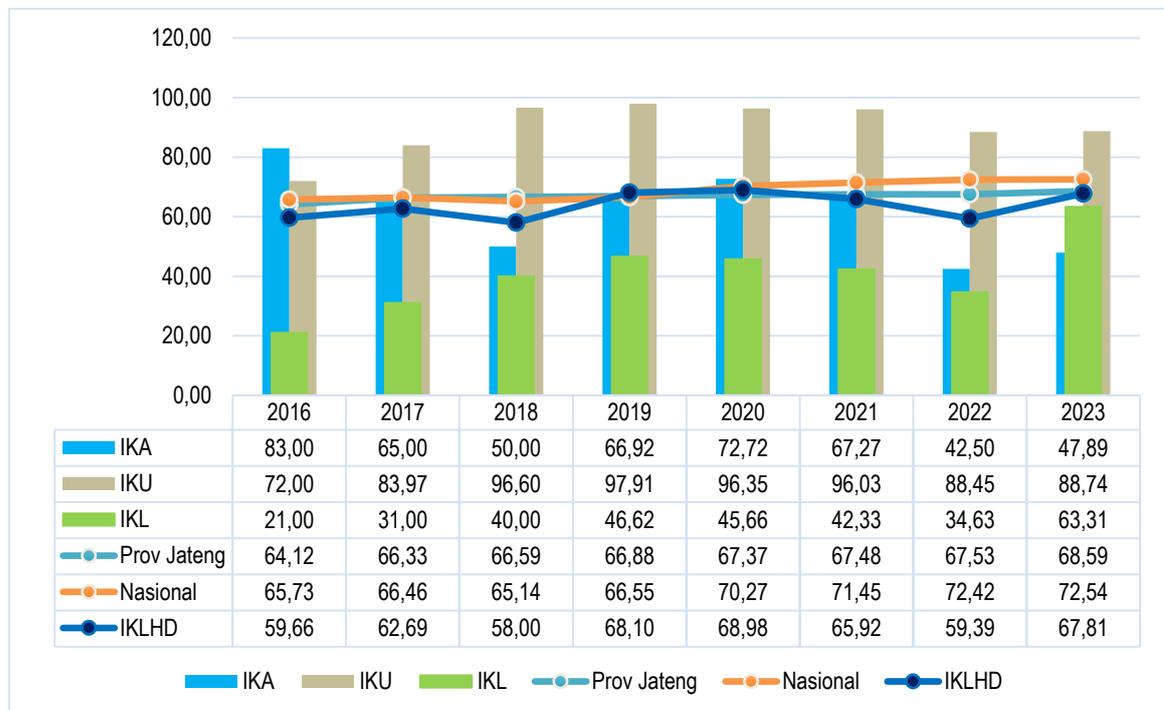


Gambar 2.23 Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Purworejo
 Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

2.1.1.5. Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dibangun dari komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada diagram berikut:





Gambar 2.24 Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2016 – 2023

(Sumber: KemenLHK, Bappeda Prov Jateng, DLHP Kabupaten Purworejo, 2023)

Dari tahun 2016-2023 terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo terendah terjadi pada tahun 2018 dan kualitas lingkungan hidup tertinggi berada pada tahun 2020. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas akibat pandemi covid-19 yang meningkatkan kualitas udara. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang lebih rendah dari tahun 2016. Perhitungan IKLH sejak tahun 2022 telah dilakukan penyempurnaan dimana Kementerian LHK melakukan perhitungan yang terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. IKLH Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 meningkat karena adanya peningkatan yang cukup signifikan dari komponen Indeks Kualitas Lahan yang disebabkan adanya perubahan metode pengumpulan data tutupan lahan dari tabular menjadi data spasial. Meskipun kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 meningkat namun kualitas air di Kabupaten Purworejo perlu menjadi perhatian karena masih terdapat pencemaran di beberapa titik di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, IKLH Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan IKLH di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan guna perhitungan target IKLH pada tahun 2025 sampai 2045 dilakukan dengan mendasarkan pada Surat Sekditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 bahwa pada tahun 2023 dilakukan konversi perhitungan IKLH dengan nilai konversi IKLH pada tahun 2023 untuk Kabupaten Purworejo menjadi 75.7.

IKLH Kabupaten Purworejo tahun 2023 mendapatkan predikat sedang, dimana komponen IKA mendapatkan predikat kurang, IKL mendapatkan predikan sedang, sedangkan IKU berada pada predikat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo diperlukan intervensi khusus pada kualitas air dan kualitas lahan. Oleh karena itu, cukup rendahnya kualitas lingkungan hidup





di Kabupaten Purworejo ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya pencemaran air dan udara, menurunnya kualitas tutupan lahan, belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah terpadu, dan adaptasi mitigasi perubahan iklim yang belum optimal.

IKA diperoleh dari pemantauan pada 3 sungai besar di Kabupaten Purworejo. Beberapa sungai di Kabupaten Purworejo melebihi parameter pada TSS, BOD, COD, NO₃, Fecal Coli dan T-P. Permukiman berkontribusi terhadap tingginya parameter tersebut. BOD bersumber dari kegiatan domestik (pemukiman) yang menghasilkan bahan organik. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan BOD. Penentuan hasil mutu air badan air diperbandingkan dengan baku mutu air mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II. Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai tahun 2023 di 15 titik pada 3 sungai di Kabupaten Purworejo, yaitu Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali dalam 2 (dua) periode yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada periode 1 (musim hujan) hasil pemantauan kualitas air menunjukkan di tiga Sungai tersebut berstatus cemar ringan, dimana parameter fecal coliform hampir diseluruh titik melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Pada periode 2 (musim kemarau) menunjukkan hasil yang cukup berbeda dari pemantauan pada periode 1 di mana Sungai Bogowonto berstatus memenuhi di 4 titik, cemar ringan di 6 titik, dan cemar sedang 1 titik. Kemudian Sungai Jali berstatus cemar berat di 1 titik dan cemar ringan di 3 titik lainnya. Terakhir Sungai Wawar berstatus cemar berat 2 titik dan cemar ringan 3 titik. Parameter yang melebihi status mutu seperti parameter COD, Total Fosfat, dan Fecal Coliform. Selain itu, masih banyak ditemukan sampah di ketiga sungai tersebut yang juga turut mempengaruhi indeks kualitas air. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus guna mengendalikan pencemaran air permukaan di Kabupaten Purworejo.

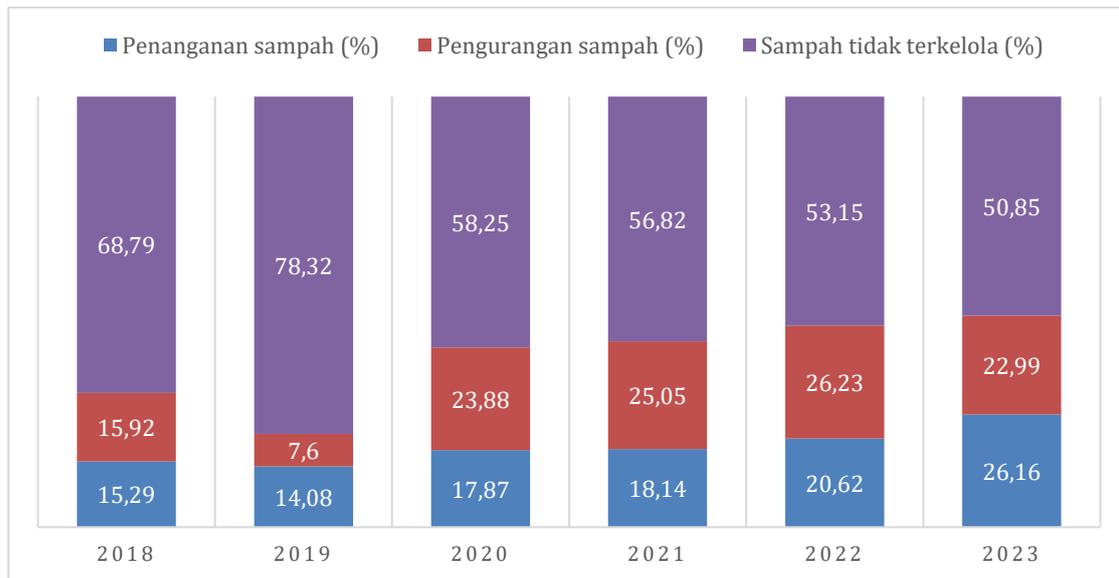
Sedangkan untuk kualitas udara, pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Pusat di Komplek GOR Sarwo Edi Wibowo dan DLHP Kabupaten Purworejo di Jl. Raya Kutoarjo/Grantung Legok No 85 Km 6 Dukuhrejo Kec Bayan. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara tahun 2023, rata-rata hasil uji di kedua lokasi tersebut berturut-turut adalah parameter NO₂ sebesar 9,48 μ /m³ dan 11,92 μ /m³ (nilai baku mutu sebesar 40 μ /m³), serta parameter SO₂ sebesar 7,10 μ /m³ dan 9,16 μ /m³ (nilai baku mutu sebesar 20 μ /m³). Kedua parameter tersebut masih memenuhi baku mutu. Meskipun masih memenuhi baku mutu, namun tren penurunan kualitas udara ditunjukkan dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Penurunan kualitas udara tersebut disebabkan rendahnya pengendalian polusi dari industri manufaktur melalui skema sirkular, belum optimalnya pengendalian emisi kendaraan bermotor, sistem angkutan massal yang menurun kualitas dan kuantitasnya, serta masih bergantungnya pada pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Disamping itu, turunnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Purworejo disebabkan berkurangnya luasan tutupan lahan dan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun.





Selain IKLH, pengelolaan sampah juga menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kinerja lingkungan hidup di suatu wilayah. Berikut capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2018-2023:



Gambar 2.25 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo menunjukkan kinerja yang terus meningkat dari tahun 2018-2023. Peningkatan cukup besar ditunjukkan dari indikator pengurangan sampah dimana hal ini menunjukkan bahwa capaian ini hampir mencapai target dalam Jakstrada yaitu 30 persen untuk pengurangan sampah. Capaian ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah sarana bank sampah dan TPS3R yang dibangun di Kabupaten Purworejo selama periode 2016-2023. Meskipun demikian, pengurangan sampah memerlukan keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya dengan membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang berpotensi menimbulkan sampah.

Sedangkan kinerja penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten Purworejo jauh masih dibawah 70 persen atau yang ditargetkan dalam Jakstrada pada tahun 2025. Hal tersebut disebabkan belum menyeluruhnya layanan persampahan di Kabupaten Purworejo. Layanan persampahan di Kabupaten Purworejo hanya meliputi kawasan perkotaan. Selain itu terbatasnya infrastruktur persampahan (kapasitas TPA dan armada pengangkutan) juga menjadi faktor penyebab belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut yang menjadi beberapa penyebab belum terkelolanya seluruh sampah di Kabupaten Purworejo. Dari tahun 2018-2023 pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo masih dibawah 50 persen. Pengelolaan sampah membutuhkan pelibatan seluruh pihak termasuk swasta dan masyarakat. Pelibatan swasta dan masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Pelibatan tidak hanya sebatas proses diskusi dan konsultasi, namun jauh lebih luas yakni





menginformasikan, konsultasi, kolaborasi hingga memberdayakan. Kurangnya pelibatan swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah juga menjadi salah satu penyebab belum terkelolanya seluruh sampah di Kabupaten Purworejo.

Di samping pengurangan dan penanganan sampah, kegiatan pengolahan sampah menjadi salah satu upaya untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:

1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dan sebagainya;
2. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Berikut capaian pengolahan sampah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2023:

Tabel 2.10 Capaian Pengolahan Sampah Kabupaten Purworejo 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pendaوران Ulang Sampah	7.970,92	24.826,38	24.466,33	25.671,40	25.982,51
2	Pengolahan Data	315,01	1.932,80	2.169,60	1.372,77	3.100,38
3	Timbulan Sampah	104.874,14	105.146,86	105.420,18	105.694,22	117.432,91
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	7,90	25,45	25,27	25,59	24,77

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh timbulan sampah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 sampai dengan 2023, sampah yang dapat terolah di fasilitas pengolahan sampah hanya mencapai dibawah 30 persen tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak sampah yang belum terolah pada fasilitas pengolahan sampah.

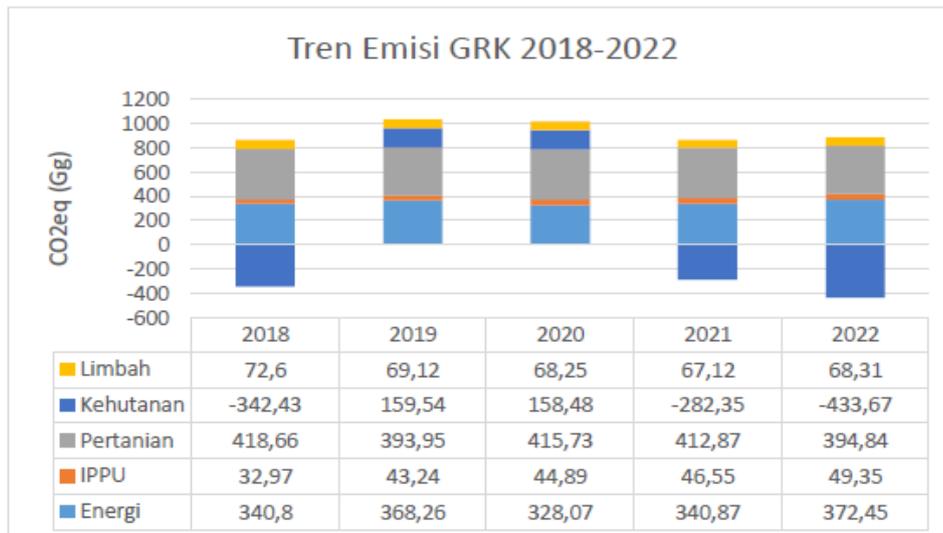
Selain kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, isu perubahan iklim juga menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebesar 451,28 Gg CO₂eq, dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2022 mengalami tren turun sebesar -13,65%. Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh sektor AFOLU (adanya perubahan lahan dan penurunan kegiatan pertanian), serta sektor pengelolaan limbah (berkurangnya aktivitas





pembakaran). Dalam kurun waktu 2018-2022, emisi tertinggi dihasilkan pada Tahun 2019 sebesar 1.034,11 CO₂eq, kemudian di Tahun 2020 terjadi penurunan emisi menjadi 1.015,42 CO₂eq karena adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat. Penurunan tersebut terjadi di sektor pengadaan dan penggunaan energi karena adanya perubahan penggunaan jenis BBM, terutama di Tahun 2021 sudah tidak ada penggunaan premium. Berikut ditampilkan total emisi berdasarkan sektor di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.26 Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo 2018-2022

Sumber: Dokumen IGRK Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022 mencapai 451,28 Gg CO₂eq dengan proporsi sumber emisi terbesar dari sektor energi mencapai 372,45 Gg CO₂eq (82,53%), sektor limbah mencapai 68,31 Gg CO₂eq (15,14%) dan sektor IPPU 49,35 Gg CO₂eq (10,94%). Sementara itu untuk sektor AFOLU terjadi penyerapan (38,83) Gg CO₂eq (-8,60%). Kondisi pada sektor energi sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan, konsumsi bahan bakar, dan jenis bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan transportasi maupun industri. Sementara itu untuk kegiatan residential penggunaan LPG dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo. Jumlah kendaraan di Kabupaten Purworejo selama 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 50,36 persen (120.428 unit), peningkatan tersebut didominasi oleh jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan penumpang (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Kegiatan yang paling berkontribusi terhadap emisi GRK di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan industri manufaktur dengan menyumbang emisi 60 persen dari total emisi, sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan transportasi sebesar 30,6 persen dari total emisi di sektor energi. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan dan mobilitas yang tinggi, sehingga tingkat konsumsi BBM juga akan mengalami peningkatan dan berdampak pada peningkatan emisi GRK. Kontribusi ketiga di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan residential dalam penggunaan LPG sebesar 7,9 persen dari total emisi di sektor energi. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi LPG di residential.





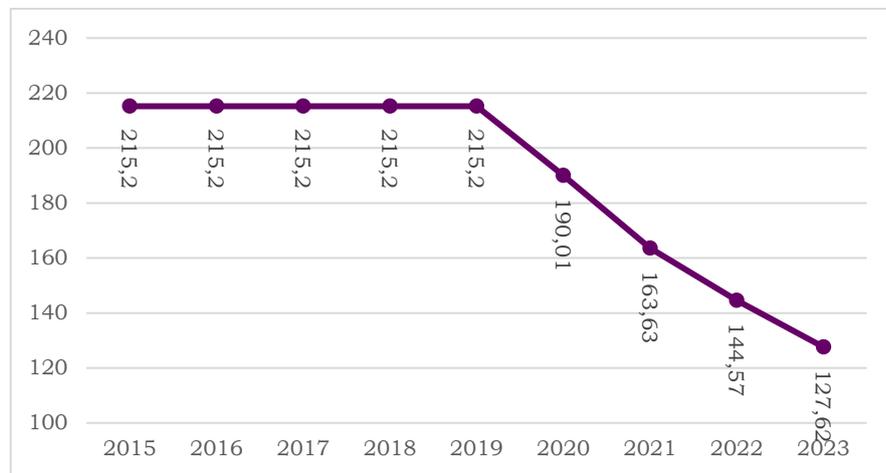
Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi emisi di sektor AFOLU diantaranya jumlah luasan panen sawah, tanaman pangan, penggunaan pupuk, jumlah ternak, serta luasan vegetasi. Dalam kurun waktu 2018-2022 terjadi penurunan emisi GRK, akibat berkurangnya jumlah luasan panen dan penurunan penggunaan pupuk untuk pupuk urea, dan pupuk ZA. Sementara itu untuk sub sektor peternakan, untuk beberapa ternak mengalami peningkatan jumlah populasi seperti sapi potong, domba, kambing, ayam. Selain itu, perubahan lahan yang ada di Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi terhadap penyerapan emisi sebesar 433,67 Gg CO₂eq yang dipengaruhi oleh luasan vegetasi yang ada di Kabupaten Purworejo berupa hutan dan lahan pertanian. Sedangkan kegiatan yang paling berpotensi menimbulkan emisi di Kabupaten Purworejo adalah kegiatan industri manufaktur, lahan, dan transportasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian emisi pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Di samping inventarisasi GRK, capaian penurunan emisi gas rumah kaca sejak tahun 2021 sampai Juli 2024 telah dilakukan aksi penurunan emisi GRK kumulatif yang sampai saat ini terlapor dalam aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebesar 6.421,48 ton CO₂eq. Realisasi ini cukup jauh gapnya dengan jumlah emisi yang berhasil diinventarisasi pada tahun 2022. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan dalam rangka pelaporan aksi penurunan emisi gas rumah kaca pada Aplikasi AKSARA Bappenas. Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode Tahun 2010-2045 di wilayah Kabupaten Purworejo adalah 12.083.414,89 TonCO₂e yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah.

2.1.1.6. Kebencanaan

Kebencanaan digambarkan melalui perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRBI) memberikan informasi tingkat risiko bencana pada tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil pengkajian risiko bencana terbagi menjadi empat bagian. Pertama, tingkat bahaya. Kedua, tingkat kerentanan. Ketiga, tingkat kapasitas. Tingkat kapasitas ini lebih mengarah pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam dan non-alam yang terjadi di tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Keempat, tingkat risiko. Tingkat risiko ini kemudian terbagi menjadi tiga bagian yakni, rendah, sedang, dan tinggi.





Gambar 2.27 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

Sumber: Inarisk, 2024

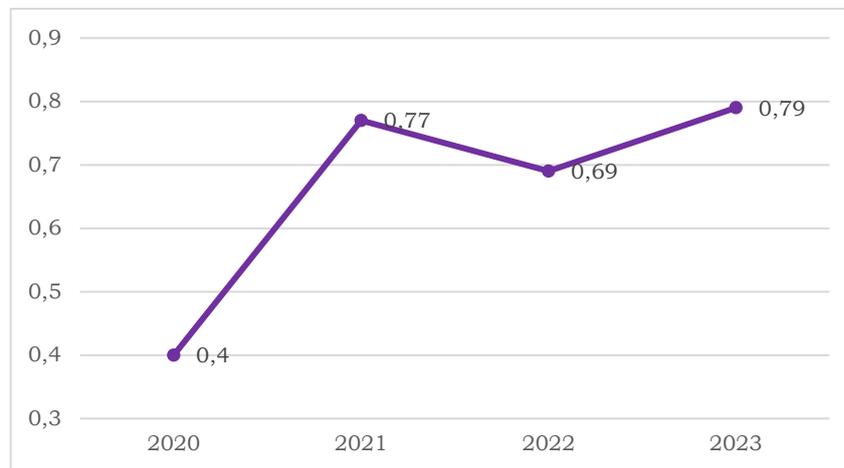
Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang secara geografis merupakan daerah multi ancaman bencana. Terdapat berbagai jenis bencana yang terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan angin puting beliung. Menurut perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), berdasarkan perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-7 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan kelas risiko sedang. Peningkatan nilai ini didukung dengan semakin meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana yang dilakukan di Kabupaten Purworejo.

Penurunan angka IRB di Kabupaten Purworejo didukung dengan adanya bertambahnya dokumen pendukung dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kebencanaan. Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan pra bencana hingga pasca bencana ini dapat mengurangi tingkat bahaya, kerentanan, meningkatkan kapasitas daerah maupun masyarakatnya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko bencana.

Dokumen pendukung dan sarana prasarana yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan daerah yang secara geografis memiliki tingkat bahaya tinggi menjadi penghambat dalam menurunkan angka IRBI untuk mengatasi masalah ini maka perlu adanya respon yang cepat antara keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, tepat, efisien dan efektif.

Indeks Resiko Bencana (IRBI) memiliki korelasi dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana jika IRBI turun maka IKD meningkat. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. IKD di Kabupaten Purworejo mulai dihitung sejak tahun 2020.





Gambar 2.28 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023

Sumber: BPBD, 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk melihat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, IKD Kab Purworejo meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan menunjukkan bahwa Indeks Resiko Bencana (IRBI) Kabupaten Purworejo menurun. Hal yang mendorong meningkatnya nilai IKD Kabupaten Purworejo adalah adanya komitmen baik dari pemerintah maupun masyarakat yang sadar akan kebencanaan untuk menanggulangi bencana maupun dampak bencana.

Adapun penghambatnya yakni banyaknya daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana sehingga belum seluruh masyarakat memperoleh sosialisasi maupun pelatihan kesiapsiagaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya meminimalisir risiko bencana.

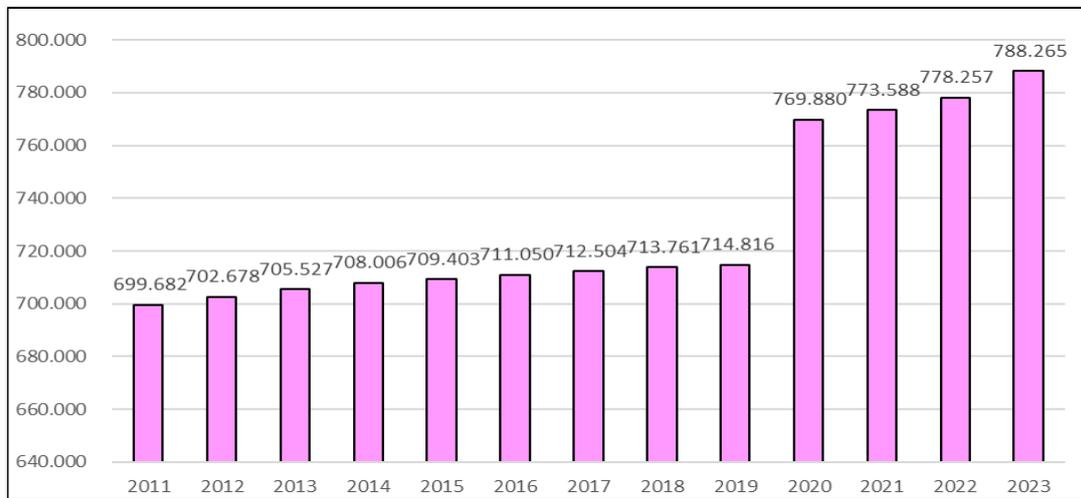
2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah memiliki sifat yang dinamis karena adanya perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari wilayah tersebut. Data demografi di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, distribusi penduduk dan struktur penduduk.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berfluktuasi dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Peningkatan penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 cukup tinggi. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam gambar berikut ini.



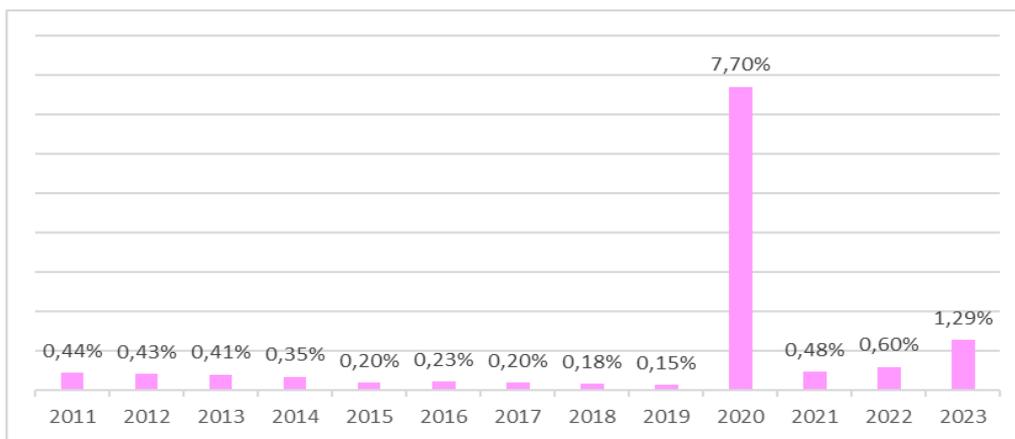


Gambar 2.29 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2023, diolah

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, Hal ini dikarenakan meningkatnya angka kelahiran dan tingginya angka migrasi datang lebih besar dari yang keluar. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya PHK/tutupnya usaha, membuat banyaknya penduduk yang merantau pulang kembali, bahkan ada beberapa yang terus menetap sampai sekarang, meskipun sebagian besar kembali ke perantauan.

Laju Pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor nonalami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2011 sampai dengan 2023 tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.30 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS 2024, diolah

Pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk kabupaten Purworejo itu selalu negatif, hal ini berkaitan dengan jumlah kelahiran (fertilitas) lebih rendah dari kematian (mortalitas). Namun pada tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid-19, jumlah kelahiran (fertilitas) lebih tinggi dari kematian (mortalitas) serta tingginya angka migrasi datang lebih besar dari yang keluar hal ini karena banyaknya PHK/tutupnya usaha, membuat banyaknya penduduk yang merantau pulang kembali, bahkan ada beberapa yang terus menetap sampai sekarang, meskipun sebagian besar kembali ke perantauan.





2.1.2.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data *sex ratio* di wilayah tersebut. Data *sex ratio* menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan *sex ratio* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 Berdasarkan Sex Ratio

Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo				
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2010	343.570	353.037	696.607	97,32%
2011	345.119	354.563	699.682	97,34%
2012	346.621	356.057	702.678	97,35%
2013	348.009	357.518	705.527	97,34%
2014	349.197	358.809	708.006	97,32%
2015	350.038	359.365	709.403	97,40%
2016	350.870	360.180	711.050	97,42%
2017	351.603	360.901	712.504	97,42%
2018	352.236	361.525	713.761	97,43%
2019	352.767	362.049	714.816	97,44%
2020	385.266	384.614	769.880	100,17%
2021	387.047	386.541	773.588	100,13%
2022	389.302	388.955	778.257	100,09%
2023	394.698	393.567	788.265	100,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2023)

Dilihat dari persebarannya jumlah penduduk perempuan selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki selama tahun 2011 hingga tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 jumlah penduduk laki-laki berbalik menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kenaikan angka *sex ratio* mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dari bayi perempuan, bertambahnya jumlah penduduk laki-laki melalui migrasi masuk, dan/atau adanya penurunan jumlah perempuan di wilayah tersebut.

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023 tersaji pada tabel berikut. Penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan usia tahun 2015-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

Kelompok Umur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usia 0-4	6,85	7,39	7,04	6,92	6,76	6,70	6,67	6,59	7,03
Usia 5-9	8,45	7,81	7,79	7,65	7,54	6,74	6,71	6,63	6,55
Usia 10-14	8,92	8,72	8,21	8,19	8,07	7,21	7,18	7,07	6,83
Usia 15-19	7,68	7,65	8,03	7,89	7,79	7,50	7,46	7,35	7,25
Usia 20-24	5,08	5,41	5,95	6,06	6,01	7,64	7,61	7,44	7,53





Kelompok Umur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usia 25-29	6,16	5,77	5,27	5,39	5,34	7,34	7,30	7,20	7,58
Usia 30-34	6,67	6,54	5,67	5,54	5,47	7,18	7,14	7,07	7,21
Usia 35-39	5,94	5,84	6,54	6,40	6,30	6,63	6,60	6,57	6,83
Usia 40-44	7,48	7,06	7,47	7,39	7,34	6,67	6,64	6,61	6,45
Usia 45-49	7,93	8,30	7,77	7,64	7,65	6,76	6,73	6,76	6,49
Usia 50-54	7,51	7,03	7,37	7,34	7,42	7,12	7,09	7,12	6,64
Usia 55-59	5,63	6,33	6,20	6,33	6,56	6,63	6,60	6,71	6,64
Usia 60-64	4,93	5,26	4,66	4,85	5,02	5,68	5,66	5,78	5,81
Usia 65-69	3,14	3,12	4,04	4,22	4,40	4,30	4,28	4,42	4,62
Usia 70-74	3,36	3,10	3,27	3,33	3,40	2,69	2,67	2,83	3,04
Usia 75+	4,27	4,67	4,70	4,85	4,93	3,69	3,67	3,85	3,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2023

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata persentase penduduk terbanyak pada rentang usia 10-14 tahun. Sementara rata-rata persentase yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 70-74 tahun. Pada tabel menunjukkan bahwa mayoritas penduduk produktif lebih banyak dari penduduk berusia non produktif.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Purworejo tahun 2015-2023 dapat diamati pada tabel di atas. Kabupaten Purworejo Dalam Angka tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Purworejo memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,43% atau sebanyak 539.385 jiwa. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2023 adalah 46,14% yang artinya 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 46-47 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 keatas). Hal ini menunjukkan kondisi bonus demografi, yakni jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non produktif.





2.1.2.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo pada tahun terakhir tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tahun 2010		Tahun 2016		Tahun 2021		Tahun 2023	
		Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Grabag	67,8	42.706	630	43.582	643	49.303	727	50.573	778
Ngombol	59,33	30.831	520	31.495	531	35.026	590	35.826	648
Purwodadi	56,15	36.496	650	37.276	664	41.364	737	42.291	783
Bagelen	63,44	28.757	453	29.304	462	30.507	481	30.829	483
Kaligesing	78,33	29.156	372	29.751	380	31.838	406	32.339	432
Purworejo	53,25	83.046	1.560	84.835	1.593	85.107	1.598	85.483	1.621
Banyuurip	47,78	40.052	838	40.920	856	43.339	907	43.951	975
Bayan	44,66	45.714	1.024	46.695	1.046	51.583	1.155	52.699	1.220
Kutoarjo	39,2	58.274	1.487	59.452	1.517	62.151	1.585	62.866	1.686
Butuh	47,21	38.853	823	39.647	840	42.120	892	42.728	937
Pituruh	89,01	45.745	514	46.663	524	51.495	579	52.587	679
Kemiri	103,15	50.697	491	51.709	501	58.724	569	60.272	654
Bruno	105,68	43.346	410	44.257	419	52.698	499	54.551	503
Gebang	70,51	39.897	566	40.743	578	43.539	617	44.220	615
Loano	53,51	34.603	647	35.315	660	38.213	714	38.891	724
Bener	102,44	48.434	473	49.406	482	56.581	552	58.159	618

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2010-2023

Kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo mengalami tren peningkatan selama periode 2010 hingga 2023. Kecamatan Purworejo merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Purworejo, yakni mencapai 1.621 pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 1.621 jiwa yang menempati Kecamatan Purworejo per tiap kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Kaligesing yakni 432 pada tahun 2023. Penyebab perbedaan kepadatan penduduk tersebut salah satunya adalah luas wilayah. Namun, salah satu penyebab yang paling mempengaruhi tingkat kepadatan adalah akses terhadap wilayah tersebut. Kecamatan Purworejo merupakan pusat Kabupaten Purworejo yang cenderung mudah diakses dari segi infrastruktur maupun fasilitas, sedangkan Kecamatan Kaligesing merupakan daerah berbukit-bukit dengan Kemiringan > 40%, sehingga lebih sulit untuk diakses. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pemerataan infrastruktur, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Namun juga mencakup aspek yang lebih esensial seperti halnya ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan, hal ini karena semakin banyaknya penduduk menyebabkan semakin banyaknya pengangguran dan menyebabkan manusia mengeksploitasi alam karena ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup.





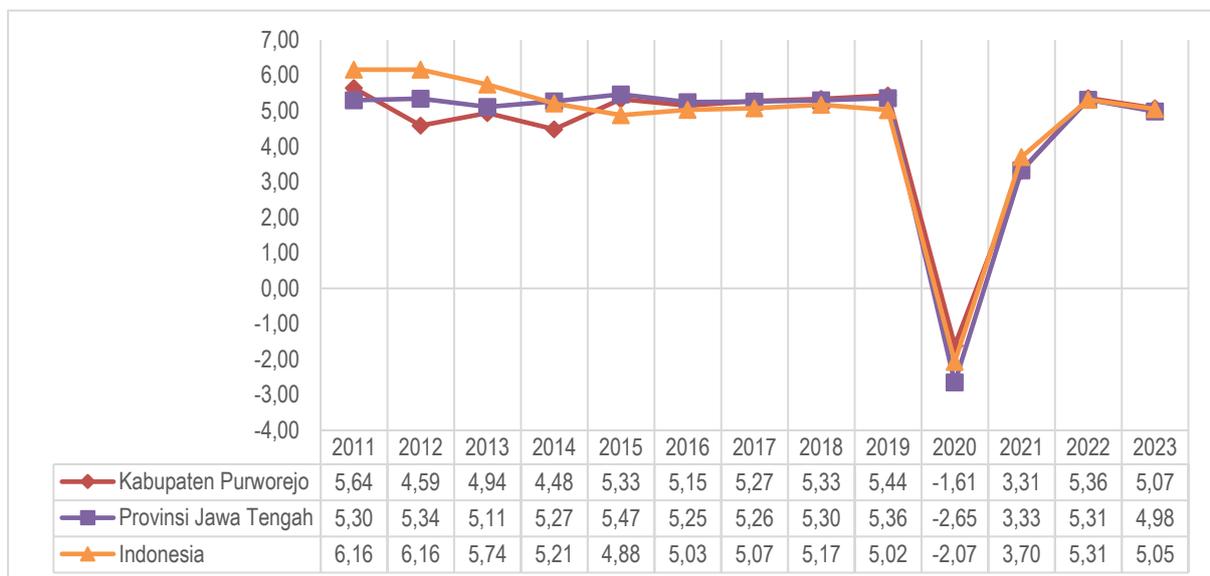
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pembangunan daerah yang mampu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, mandiri secara perekonomian, merata, serta berkelanjutan. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo selama 20 (dua puluh) tahun terakhir dapat dianalisis melalui 5 (lima) indikator makro pembangunan sebagai berikut.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada suatu wilayah tertentu. Berikut merupakan grafik yang menjelaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2011-2023.



Gambar 2.31 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2023

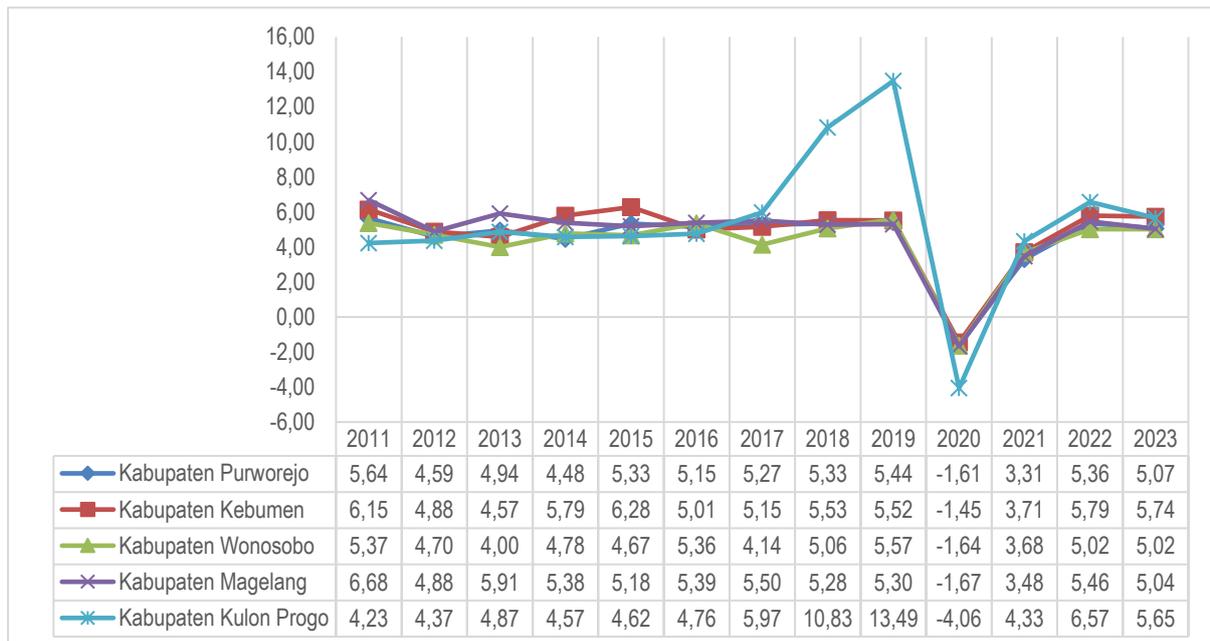
Kondisi perekonomian Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2011-2023 mengalami fluktuasi dengan penurunan terbesar pada tahun 2020 akibat pembatasan sosial ekonomi masyarakat guna menekan penyebaran virus Covid-19. Kondisi ini semakin membaik hingga tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Hal ini menunjukkan gerak cepat Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pemulihan ekonomi hingga mencapai angka 5,07% pada tahun 2023. Meskipun demikian capaian ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pandemi pada tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama tiga belas tahun terakhir, Kabupaten Purworejo menempati posisi kedua terendah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48%. Rata-rata laju pertumbuhan





tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 5,40% disusul Kabupaten Kebumen sebesar 4,82%, Kabupaten Magelang sebesar 4,75% sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 4,29%. Perkembangan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dengan kabupaten di sekitarnya dapat diamati dalam grafik berikut.



Gambar 2.32 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten di Sekitarnya Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2023

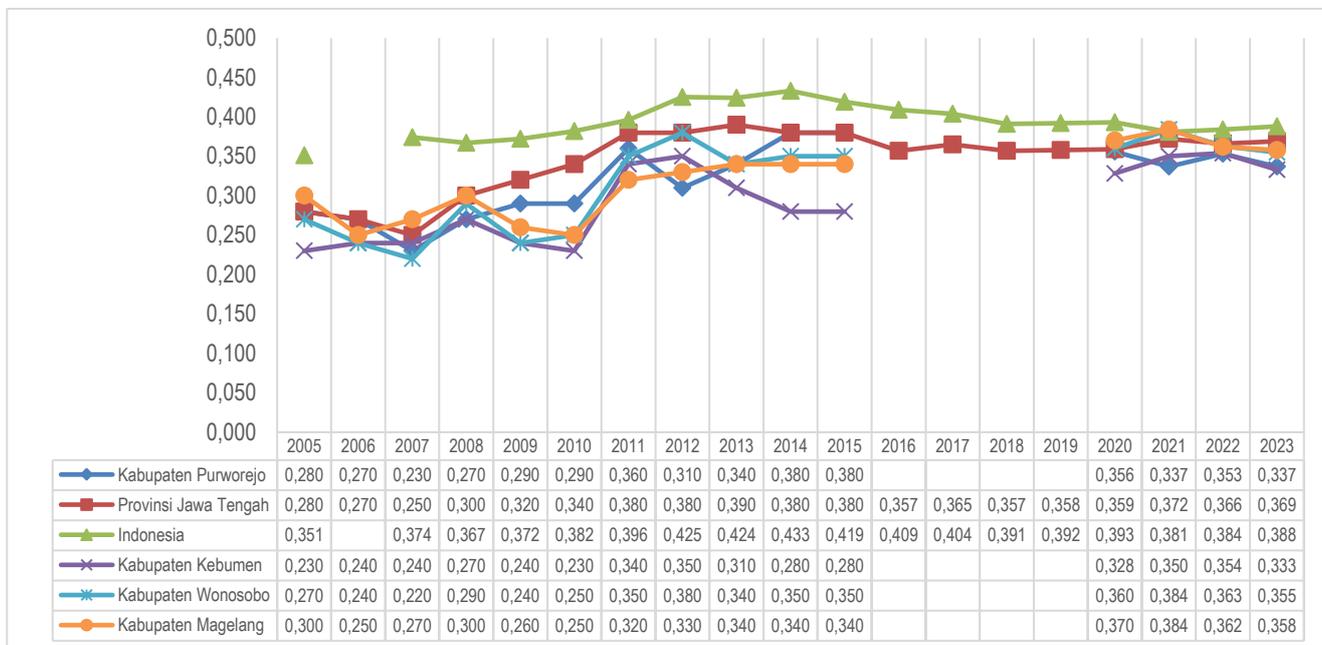
Kabupaten Kebumen dan Kulon Progo memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kabupaten Purworejo. Meski demikian, dapat diamati dalam grafik di atas bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelum adanya pandemi tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum berjalan dengan maksimal sehingga masih perlu didorong dengan upaya yang lebih keras pada dua puluh tahun ke depan.

2.2.1.2. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Faktor ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi makro ekonomi suatu wilayah. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi antara lain kondisi demografi, kondisi alam, politik, dan budaya dari wilayah yang bersangkutan. Semakin besar ketimpangan yang terbentuk antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti bahwa kemiskinan semakin meluas. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan.

Kondisi perkembangan indeks gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta dengan kabupaten di sekitarnya dapat diamati dalam grafik berikut.





Gambar 2.33 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, serta Kabupaten Sekitar Tahun 2005-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

Distribusi pendapatan untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan sangat timpang jika angka Gini terletak antara 0,5 sampai 0,7; kategori sedang jika angka Gini antara 0,3-0,5; dan relatif rendah ketimpangannya jika angka Gini berada di bawah 0,3. Indeks Gini Kabupaten Purworejo relatif stabil berada pada kisaran angka 0,300 sejak tahun 2011 hingga tahun 2023 yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purworejo tergolong sedang. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, capaian Indeks Gini Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 hingga 2023 cenderung berada di bawah provinsi dan nasional yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Purworejo lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia.

Dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, rata-rata laju pertumbuhan indeks gini Kabupaten Purworejo adalah sebesar 2,54% per tahun, lebih tinggi dari Kabupaten Magelang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89%, dan lebih rendah dari Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 3,07% dan 3,27% per tahunnya. Peningkatan indeks gini terbesar dialami Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 ke tahun 2011 dengan persentase sebesar 24,14% yang disebabkan karena peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo, seiring dengan peningkatan terbesar nilai IPM Kabupaten Purworejo pada tahun tersebut. Sedangkan peningkatan indeks gini terendah terjadi pada tahun 2006 ke tahun 2007 dengan persentase sebesar -14,81%.

Secara keseluruhan, kondisi indeks gini Kabupaten Purworejo relatif stabil dengan rata-rata capaian sebesar 0,319 dalam kurun waktu tahun 2005-2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita di Kabupaten Purworejo tergolong dalam kategori sedang. Kondisi ini perlu dijaga pada periode 20 (dua puluh) tahun ke depan supaya tidak meningkat menjadi ketimpangan yang tinggi, melainkan harus ditekan





sehingga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Purworejo menjadi lebih rendah.

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Pengukuran kemiskinan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2005-2022 tergambar dalam tabel dan grafik berikut.



Gambar 2.34 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia, serta Kabupaten Sekitar Tahun 2005-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2023

Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia dengan perkembangan yang sangat fluktuatif meskipun cenderung menurun. Penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi pada periode tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari 13,81% turun menjadi 11,67% yang disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Sedangkan peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo yang paling besar terjadi pada periode tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 11,78% naik menjadi 12,40% yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat tentu menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian dan berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga angka kemiskinan kembali meningkat. Namun kondisi ini dengan cepat dipulihkan hingga tahun 2023 sehingga angka kemiskinan kembali dapat





ditekan meskipun masih berada di atas kondisi sebelum mewabahnya Covid-19 pada tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo secara stabil menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Magelang dengan *gap* yang semakin menipis diantara keduanya. Meskipun tingkat kemiskinan menempati posisi kedua terendah, namun laju penurunan kemiskinan Kabupaten Purworejo berada di posisi pertama dibandingkan kabupaten di sekitarnya yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar 3,65% per tahun, disusul oleh Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 3,58% per tahun, Kabupaten Kebumen sebesar 3,19%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,78% dan Kabupaten Magelang sebesar 1,66%. Hal ini menunjukkan bahwa program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan. Apabila diamati dari perspektif perbandingan kondisi tingkat kemiskinan pada tahun pertama (2005) dan tahun terakhir (2023) analisis, terdapat penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 50,24% dari kondisi awal tingkat kemiskinan sebesar 22,77% pada tahun 2005 menjadi 11,33% pada tahun 2023.

Dalam menganalisis kondisi kemiskinan secara menyeluruh, selain tingkat kemiskinan, juga perlu diamati melalui jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks keparahan, serta indeks kedalaman kemiskinan supaya langkah strategis yang akan dirumuskan berdampak lebih besar pada upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami *tren* penurunan dalam rentang waktu tahun 2006 hingga tahun 2023. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo tercatat sejumlah 162,30 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 81,28 ribu jiwa sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 2.35 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2023 (dalam ribu jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2006-2023

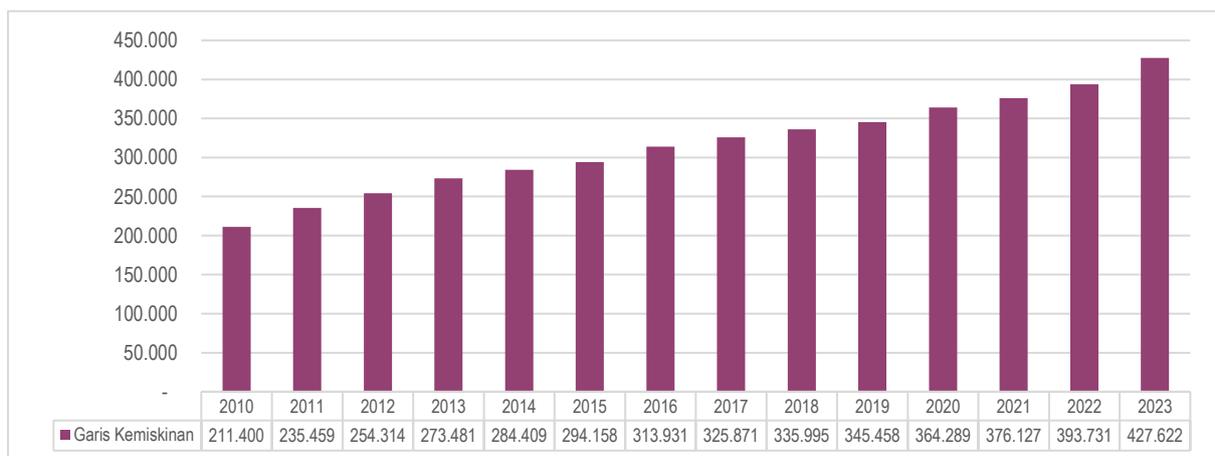
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum





makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tahun 2010 tercatat Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp 211.400, mengalami peningkatan sebesar 102,28% menjadi sebesar Rp 427.622 pada tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 2.36 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 (dalam rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2010-2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purworejo dan daerah di sekitarnya, serta Jawa Tengah, dan Indonesia dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Kedalaman Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,84	0,98	1,36	1,31	1,78
Kab. Kebumen	2,58	2,62	3,24	3,41	2,89
Kab. Wonosobo	2,44	2,42	2,75	3,18	2,60
Kab. Magelang	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73
Kab. Kulon Progo	2,72	3,32	3,01	2,32	2,54
Prov. Jawa Tengah	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75
Indonesia	1,55	1,61	1,71	1,56	1,53

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada rentang tahun 2019-2023 seperti halnya angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan secara umum cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Di tahun terakhir, Kabupaten Purworejo memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan cenderung lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya, meskipun masih berada di atas Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, yakni 1,78%. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yakni 0,43% yang dapat diamati pada tabel di bawah ini.





Tabel 2.15 Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Keparahan Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,10	0,12	0,28	0,24	0,43
Kab. Kebumen	0,65	0,55	0,88	1,02	0,75
Kab. Wonosobo	0,46	0,47	0,65	0,86	0,63
Kab. Magelang	0,17	0,20	0,35	0,41	0,41
Kab. Kulon Progo	0,61	0,86	0,75	0,56	0,61
Prov. Jawa Tengah	0,30	0,34	0,45	0,42	0,42
Indonesia	0,37	0,38	0,42	0,38	0,38

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

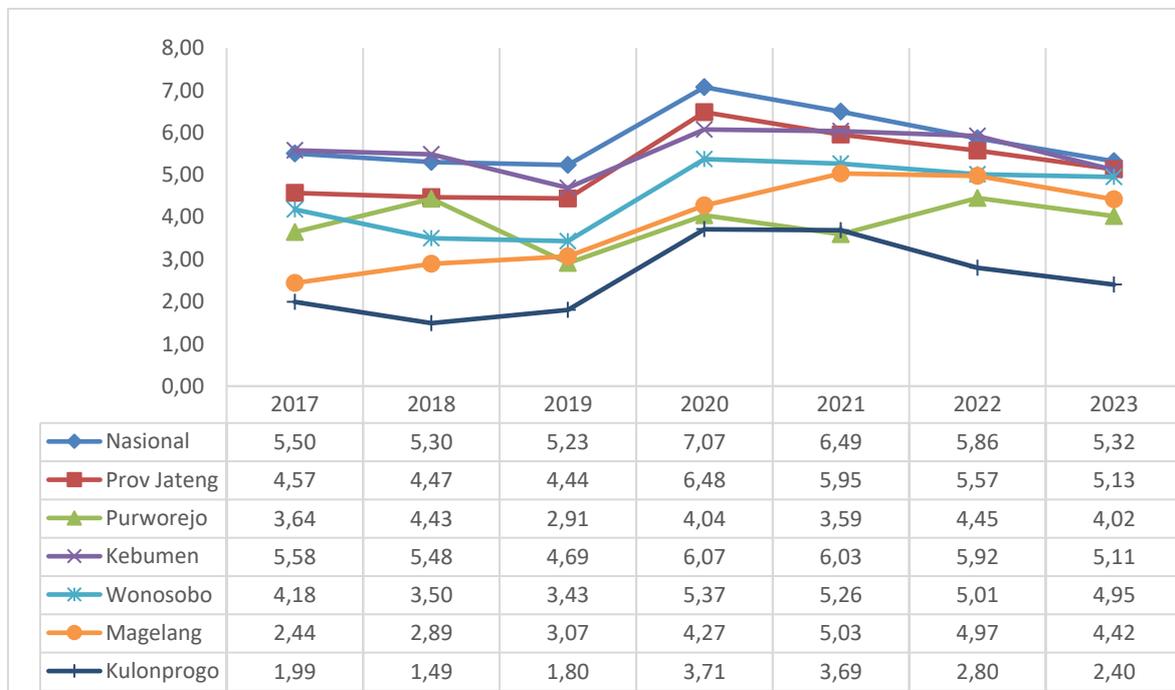
Kondisi di tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Purworejo, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung lebih rendah daripada daerah di sekitarnya, namun masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah serta di tingkat nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo cenderung terus menurun meskipun masih belum berhasil mencapai angka satu digit. Beberapa penyebab yang perlu menjadikan perhatian dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan pada periode ke depan antara lain adalah rendahnya kapasitas tenaga kerja (*low skilled workers*) yang sangat rentan di era reformasi teknologi, dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan penghasilan menengah ke bawah, status pekerjaan utama masyarakat yang didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, serta perlunya peningkatan akurasi basis data kelompok miskin dan rentan yang menyebabkan pemberian penanganan dan bantuan yang tidak tepat sasaran.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. TPT di Kabupaten Purworejo relatif lebih baik jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2017-2023. Begitu pula jika dibandingkan kabupaten sekitarnya, TPT Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, TPT Kabupaten Purworejo bersama sama dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017-2023. Dari tahun 2017-2023, TPT Kabupaten Purworejo relatif meningkat sebesar 0,38 persen.





Gambar 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017 – 2023

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Peningkatan TPT di Kabupaten Purworejo disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja (rata-rata sebesar 1,7 persen per tahun) yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pendidikannya, TPT pada tingkat pendidikan menengah ke atas (8,54 pada tahun 2023) dan pendidikan tinggi (4,84 pada tahun 2023) lebih tinggi dibandingkan TPT pada tingkat pendidikan SMP ke bawah (1,7 pada tahun 2023). Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasi permasalahan pengangguran.

Di sisi lain penduduk bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah (sebesar 58,34 persen pada tahun 2023) yang merupakan *low skilled workers* dimana rentan terhadap otomatisasi di era reformasi teknologi. Selain itu, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk bekerja di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pekerja informal sebesar 70,07 persen. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak guncangan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Purworejo diperlukan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun non formal serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

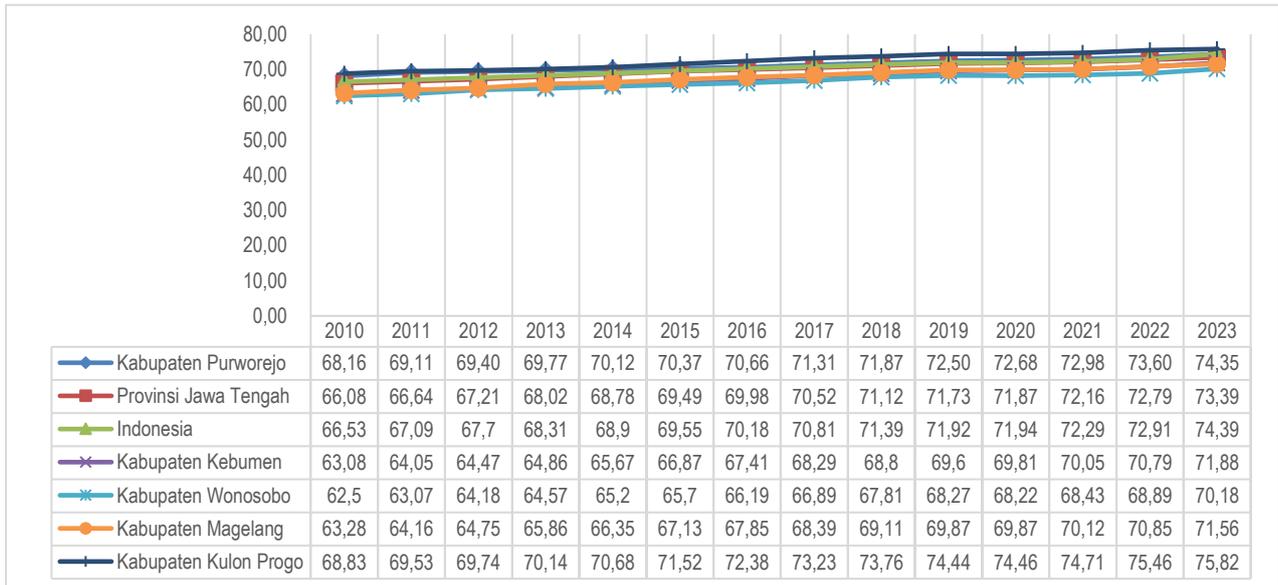
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. IPM mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup,





tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2010-2023 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun serta selalu berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.



Gambar 2.38 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2024

Laju pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tersebut rata-rata adalah sebesar 0,67%. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 1,39% pada tahun 2010 menuju tahun 2011 karena didukung dengan anggaran dan program-program pemerintah serta meningkatnya kesadaran sebagian besar penduduk terhadap arti penting pendidikan. Laju pertumbuhan terendah sebesar 0,25% pada tahun 2019 menuju tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya angka kematian sehingga memperpendek usia harapan hidup pada periode tersebut. Selain itu, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi juga berperan dalam menurunnya angka pengeluaran per kapita penduduk sehingga turut menurunkan total nilai IPM secara keseluruhan. Namun kondisi ini dapat dengan cepat dipulihkan sehingga laju pertumbuhan IPM pada tahun 2022 menuju tahun 2023 kembali meningkat sebesar 1,02% menjadi 74,35.

Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, nilai IPM Kabupaten Purworejo berada di peringkat yang lebih tinggi dibanding Kabupaten Kebumen, Wonosobo, dan Magelang, namun masih berada di bawah Kabupaten Kulon Progo. Meskipun Capaian IPM Kabupaten Purworejo cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo menjadi yang paling lambat dibanding yang lainnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama periode 2010 hingga 2023 hanya melonjak sebesar angka 6,19%. Kondisi tersebut masih berada di bawah pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen





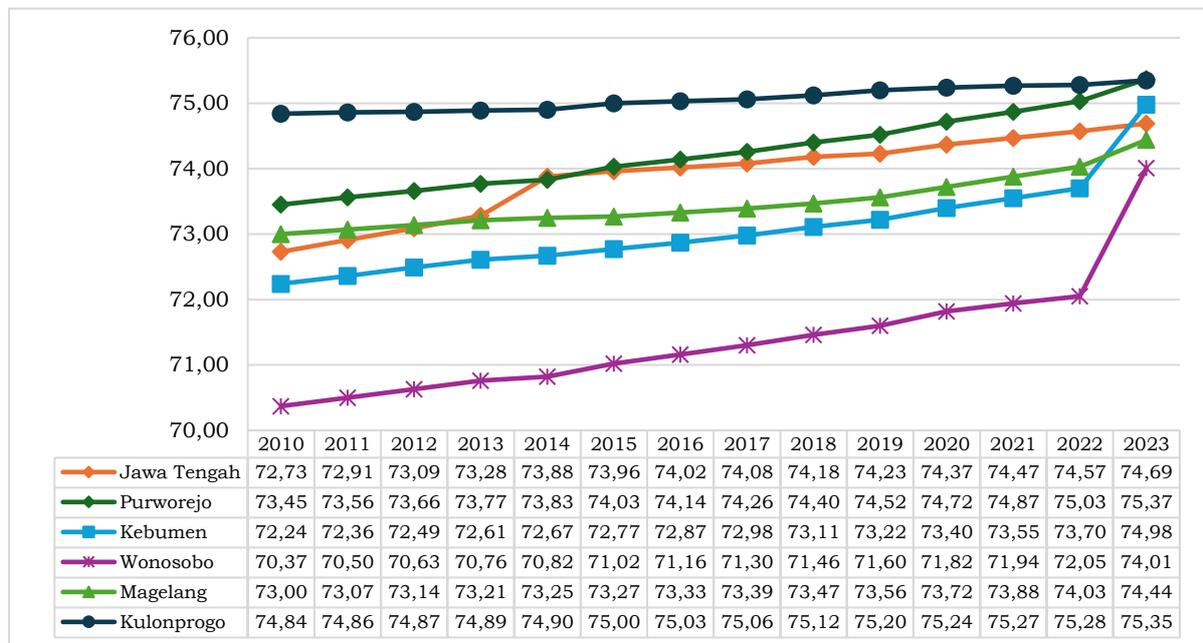
yang mencapai angka 8,80%, Kabupaten Magelang 8,28%, Kabupaten Wonosobo 7,68% dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 6,99%.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mendongkrak laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo sehingga tidak kalah saing dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya untuk periode dua puluh tahun ke depan. Pembangunan manusia yang baik akan menciptakan pertumbuhan yang positif baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan masyarakat dapat menikmati umur panjang dan sehat serta berkehidupan layak dan produktif dapat terwujud.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Indikator ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.



Gambar 2.39 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2024)

Pada tahun 2023, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi Jawa Tengah serta beberapa kabupaten sekitar di wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten Kulonprogo. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purworejo selalu meningkat dari tahun 2010-2023. Hal ini menunjukkan harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Purworejo semakin tinggi dan mengindikasikan semakin membaiknya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo. Membaiknya tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo disebabkan berbagai faktor diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan sejak bayi oleh keluarga dekat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

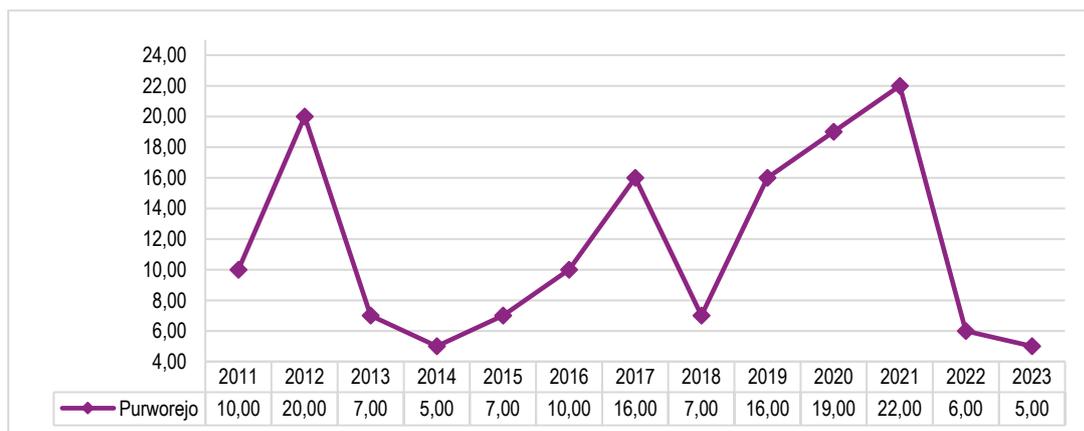




Namun berdasarkan data di atas pertumbuhan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purworejo menunjukkan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan AHH ini antara lain masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah gizi yang dialami oleh anak-anak. Selain itu, angka kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) juga masih tinggi, yang turut berkontribusi terhadap lambatnya peningkatan AHH.

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Tingkat kesehatan masyarakat akan memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun nilai UHH Kabupaten Purworejo cukup baik namun masih terdapat permasalahan terkait sistem layanan kesehatan primer dan rujukan diantaranya SDM kesehatan belum sesuai kebutuhan dari sisi jumlah dan jenis ketenagaan, sarana prasarana belum memadai, alat kesehatan belum terpenuhi sesuai standar, serta belum ada regulasi daerah terkait Sistem Layanan Kesehatan Primer. Selain dari akses, fasilitas, dan SDM kesehatan di Kabupaten Purworejo juga belum tersedia pelayanan untuk lansia sejalan dengan akan semakin banyaknya usia lansia dalam 20 tahun mendatang. Hal ini sesuai dengan nilai UHH Kabupaten Purworejo yang selalu meningkat.

Jumlah Kasus Kematian Ibu merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah kasus kematian ibu dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.



Gambar 2.40 Grafik Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2024)

Jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan masih banyaknya kasus kematian ibu adalah kehamilan risiko tinggi, frekuensi kunjungan ibu hamil kurang, banyaknya persalinan di non fasilitas Kesehatan dan persalinan dengan dukun bayi, Gerakan Sayang Ibu dan Anak belum maksimal, sehingga diperlukan peran serta lintas sektor dalam

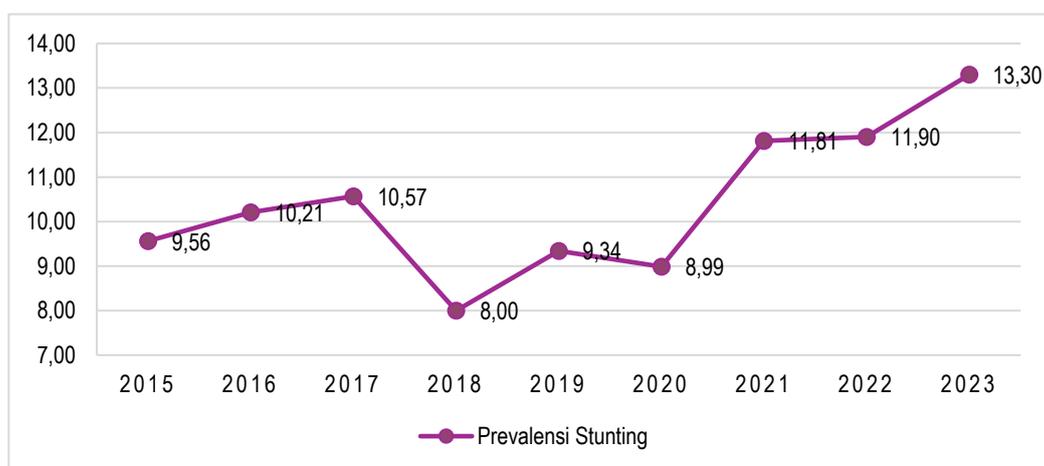




menangulangi hal tersebut. Di beberapa wilayah sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman. Capaian SPM bidang kesehatan tahun 2023 untuk pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 98,37% dan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 99,69%, keduanya belum dapat mencapai 100%.

Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi *stunting* mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Stunting dan gizi buruk adalah dua kondisi kesehatan yang berbeda meskipun keduanya berhubungan dengan masalah gizi pada anak-anak. Stunting mengacu pada bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Akibatnya, tinggi dan berat badan mereka lebih rendah dari anak sebayanya.



Gambar 2.41 Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Purworejo (2024)

Prevalensi Balita Pendek (*stunting*) berdasarkan ePPGBM menunjukkan angka yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar 9,34% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 13,30% dengan cakupan kurang dari 95%. Prevalensi Stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kemenkes pada tahun 2021 sebesar 15,7% dan naik menjadi 21,2% pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 Kemenkes melakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang hasilnya prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo turun menjadi 20,75%. Diperlukan upaya keras dalam mengatasi permasalahan terkait penurunan angka stunting di Kabupaten Purworejo. Perbedaan utama antara stunting dan gizi buruk terletak pada fokusnya. Stunting lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan fisik, khususnya tinggi badan, sementara gizi buruk





mencakup berbagai defisiensi nutrisi yang mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan.

Penyebab terjadinya stunting yaitu kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, pemberdayaan keluarga masih kurang serta masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang beresiko melahirkan bayi *stunting*. Meningkatnya prevalensi ibu hamil dengan anemia dari tahun 2018-2020 juga turut berpengaruh dalam meningkatkan risiko *stunting*.

Selain itu, dalam pelaksanaan strategi konvergensi, peran banyak pihak terkait untuk menyosialisasikan delapan aksi masih sangat kurang. Aksi cegah stunting tersebut mencakup analisis situasi terkait stunting, penyusunan rencana kegiatan, serta melaksanakan rembuk stunting untuk melibatkan semua pihak yang terkait. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan berbagai program pencegahan yang diterapkan diharapkan prevalensi stunting dapat menurun dan generasi penerus di Kabupaten Purworejo dapat tumbuh dengan sehat dan hebat.

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Secara efektif dan efisien. Penyakit menular berpotensi menjadi wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.16 Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	TBC (+)	592	544	546	935	914
2	Pneumonia	211	109	54	171	248
3	HIV (kasus baru)	63	64	51	83	64
4	Diare	4.650	3.983	1.162	3.402	4.516
5	Kusta	6	6	8	14	9
6	Frambusia	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Purworejo bersifat fluktuatif. Penyakit menular dengan jumlah penderita terbanyak di Kabupaten Purworejo adalah diare kemudian TBC. Semua penyakit menular mengalami peningkatan di tahun 2022 kecuali penyakit frambusia yang sejak tahun 2019-2022 tidak ada penderitanya di Kabupaten Purworejo. Secara umum, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 perilaku hidup bersih di masyarakat yang membudaya. Pada saat terjadi pandemi covid-19 masyarakat terbiasa dengan PHBS namun setelah pandemi berakhir kebiasaan tersebut tidak berlanjut. Selain itu juga dikarenakan oleh cakupan skrining yang semakin luas. Kasus TBC yang sudah turun di tahun 2021 kembali naik signifikan pada tahun 2022 disebabkan kegiatan skrining yang belum optimal, kader TB terlatih belum mencakup semua desa.

HIV di Kabupaten Purworejo meningkat dikarenakan meningkatnya





perilaku seks yang menyimpang dan hubungan seks yang berisiko, edukasi dan cakupan skrining yang belum luas, juga masih rendahnya pengobatan dikarenakan adanya stigma dan unsur malu. Selain itu, terdapat kesulitan untuk masuk pada populasi kunci sehingga terkendala dalam pelaksanaan deteksi dini.

Sementara untuk penyakit Diare dan kusta adalah penyakit berbasis lingkungan yang salahsatu pendorongnya adalah belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Purworejo yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengembangan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Penyakit ini berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian kelompok rentan yaitu ibu hamil/melahirkan bayi dan balita.

Tabel 2.17 Jumlah Kasus Malaria dan API di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kasus Malaria	25	5	535	561	41
2	API	0,0	0,0	0,69	0,7	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Kabupaten Purworejo terletak di kawasan perbukitan Menoreh, habitat alami nyamuk Anopheles yang merupakan vektor malaria. Kabupaten Purworejo pernah menjadi salah satu penyumbang kasus malaria tertinggi di Pulau Jawa. Pada 2015, Dinas Kesehatan mencatat sekitar 1400 kasus malaria dalam setahun. Mulai 2018, jumlah kasus malaria turun menjadi 186 kasus lokal (*indigeneous*) dan tujuh kasus dari luar wilayah (impor). Pada 2019, kabupaten tersebut mencatat 0 kasus lokal dan 26 kasus impor, dan pada 2020 hanya tercatat tujuh kasus impor, 0 kasus lokal.

Pada tahun 2022, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya Kabupaten Purworejo yang belum eliminasi malaria. Lonjakan kasus malaria terjadi berawal dari kejadian KLB malaria di Desa Wadas pada tahun 2021, yang hingga akhir tahun 2021 kemudian ditemukan sebanyak 535 kasus. Sedangkan tahun 2022 hingga Desember minggu kedua, ada 502 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, 10 Puskesmas dan 58 desa wilayah Kabupaten Purworejo, dengan kasus tertinggi di Kecamatan Kaligesing.

Salah satu cara untuk mengurangi penularan malaria adalah dengan penemuan kasus sedini mungkin untuk diobati dan pengendalian vektor (nyamuk) yang tepat. Kabupaten Purworejo memiliki relawan Gebrak Malaria yang terdiri dari 158 relawan yang beroperasi di wilayah malaria di 58 desa. Tugas mereka adalah melaporkan kepada Juru Malaria Desa (JMD) dan Puskesmas ketika ada warga yang menunjukkan gejala malaria seperti panas, demam, dan sakit kepala, serta mendata setiap ada warga atau pendatang dari daerah endemis malaria. Penanggulangan malaria oleh Relawan Gebrak Malaria dilakukan melalui upaya promotif, preventif, dan





kuratif, yang bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mencegah kejadian luar biasa (KLB). Namun, tantangan yang dihadapi termasuk mobilitas penduduk yang tinggi dan tidak dapat dibatasi, serta kasus migrasi yang tidak tertangani dengan baik, yang menyebabkan tingginya kasus indigenous dan penularan. Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kelambu berinsektisida masih rendah, sehingga upaya pencegahan tidak berjalan maksimal.

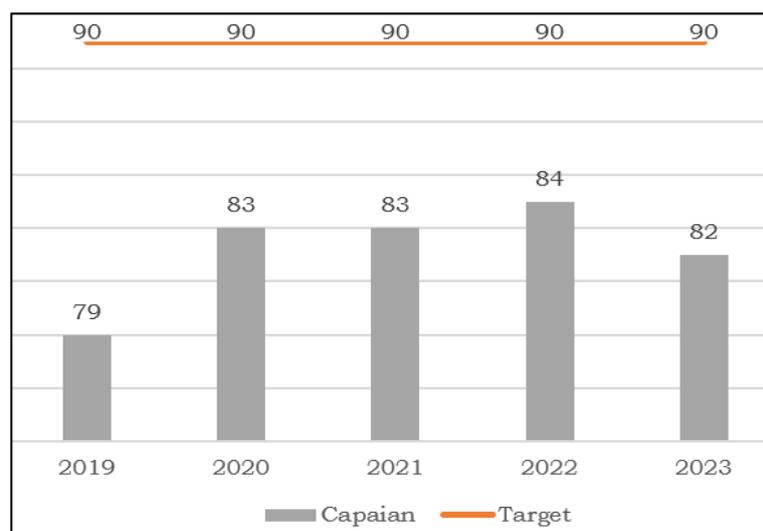
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) merupakan persentase tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut merupakan data penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.18 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Tahun	Perkiraan Kasus	Ditemukan	Diobati	Treatment Coverage
1	2	3	4	5	6
1	2019	1.849	822	535	29%
2	2020	1.567	591	565	36%
3	2021	1.736	546	543	31%
4	2022	1.742	944	914	52%
5	2023	1.753	905	887	51%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*) merupakan persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.



Gambar 2.42 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate) di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Declaration of Human Right pada tahun 1948 telah menyatakan bahwa perawatan kesehatan serta pelayanan sosial merupakan hak azasi manusia yang mendasar dan diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Berdasarkan pada deklarasi tersebut, maka beberapa negara pun mulai mengembangkan sistem jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (*Universal Health Coverage*). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ditentukan haruslah memiliki standar kualitas pelayanan yang tinggi,





terjangkau dalam hal biaya, mudah diakses, dan juga menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan indikator yang menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan dimana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. *Universal Health Coverage* merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Tabel 2.19 Universal Health Coverage di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UHC	69,45	75,96	78,23	83,18	87,27	96,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Aspek utama lain yang tidak kalah penting adalah pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan. Disamping implementasi skema *Universal Health Coverage* (UHC), Dinas Kesehatan memberikan jasa perawatan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). UHC diterapkan untuk mencakup siapa saja warga yang mau ditempatkan di kelas III. Pada tahun 2023 capaian *Universal Health Coverage* (UHC) 87,27%. Syarat UHC adalah kepesertaan mencapai 95%, keaktifan peserta JKN minimal 75%. Hal ini disebabkan terdapat banyak peserta BPJS yang mangkir terutama dari peserta mandiri. Dari total penduduk, peserta JKN yang dibiayai pemerintah mencapai 60% yang artinya banyak masyarakat yang bisa menjadi peserta mandiri tapi masih dibiayai pemerintah. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, sangat dibutuhkan peran dan juga dukungan dari berbagai sektor yang ikut serta menjamin kesehatan masyarakat termasuk pendidikan, transportasi, dan juga perencanaan perkotaan (WHO, 2012).

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat yang harus diwujudkan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat mempunyai peran pertama dan utama dalam menentukan kualitas hidup setiap anggota keluarga. Berikut angka iBangga Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.

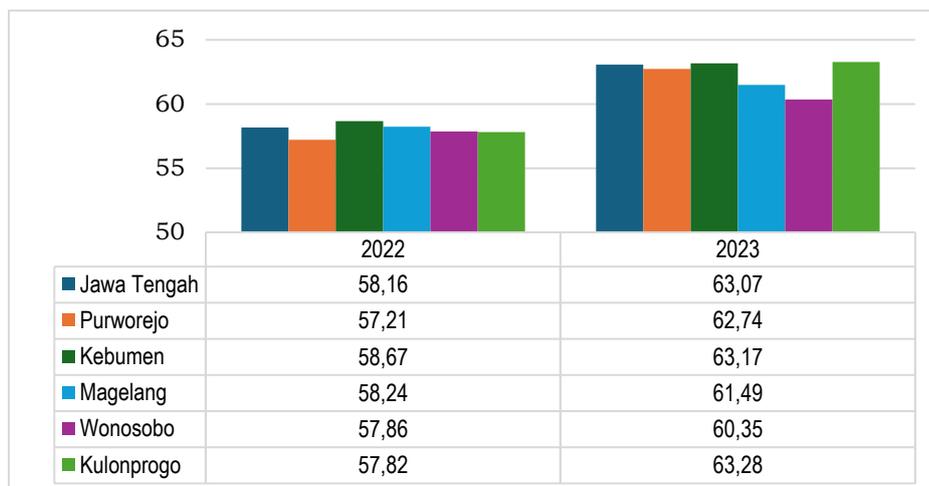


**Tabel 2.20 Angka iBangga Kabupaten Purworejo beserta Dimensinya**

Dimensi	Tahun	
	2022	2023
2	3	4
Dimensi Ketentraman	60,54	60,88
Dimensi Kemandirian	54,20	55,65
Dimensi Kebahagiaan	56,90	71,70
iBangga	57,21	62,74

Sumber : BKKBN, (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa angka iBangga Kabupaten Purworejo tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Selain itu angka tersebut juga sudah mencapai target nasional yaitu 57. Diantara ketiga dimensi tersebut, dimensi kemandirian mempunyai angka terendah dan belum maksimal. Dimensi kemandirian terdiri dari beberapa variabel, yaitu memiliki penghasilan, makan beragam, rumah layak huni, memiliki tabungan, tidak ada putus sekolah, tidak ada anggota rumah tangga sakit, dan akses media online. Diperlukan upaya dalam meningkatkan dimensi kemandirian keluarga dengan kolaborasi lintas sektor pembangunan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

**Gambar 2.43 Grafik Angka iBangga Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2022-2023**

Sumber : BKKBN, (2024)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 angka iBangga Kabupaten Purworejo terendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Namun pada tahun 2023 meningkat dan menjadi lebih tinggi dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Angka iBangga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, lebih meningkatkan komitmen dan sinergisitas antar kementerian/lembaga, serta perlu digencarkan sosialisasi iBangga hingga ke seluruh desa agar terwujud keluarga yang berkualitas.



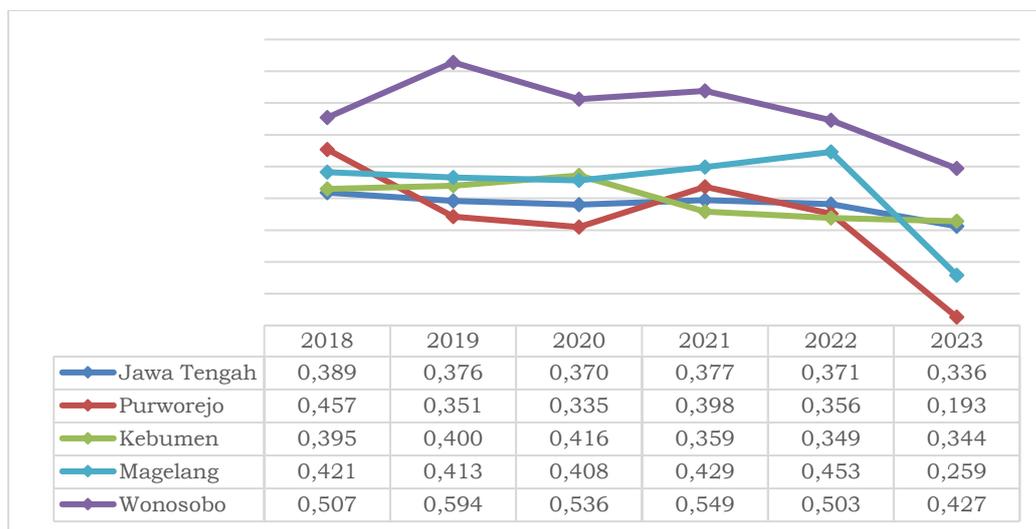


2.2.2.3. Pembangunan Gender

Kesetaraan gender (*gender equity*) dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.44 Grafik IKG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2023 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar terjadi perubahan peringkat. Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 memiliki ketimpangan gender lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo, namun kemudian menurun dengan lebih cepat di tahun 2019 sehingga ketimpangannya paling rendah. Sementara dengan Kabupaten Wonosobo nampak disparitas kesetaraan gender semakin melebar.

Pada tahun 2023, IKG di Kabupaten Purworejo menurun menjadi 0,193 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,356. Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Hal yang paling mempengaruhi penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Purworejo adalah penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023 proporsi tersebut kembali meningkat bahkan menjadi 0,000 yang juga menyebabkan peningkatan IKG Kabupaten Purworejo. Penurunan IKG di Kabupaten Purworejo selaras dengan perbaikan kondisi pembangunan manusia yang





juga semakin meningkat. Indeks ketimpangan gender dan komponen penyusunnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

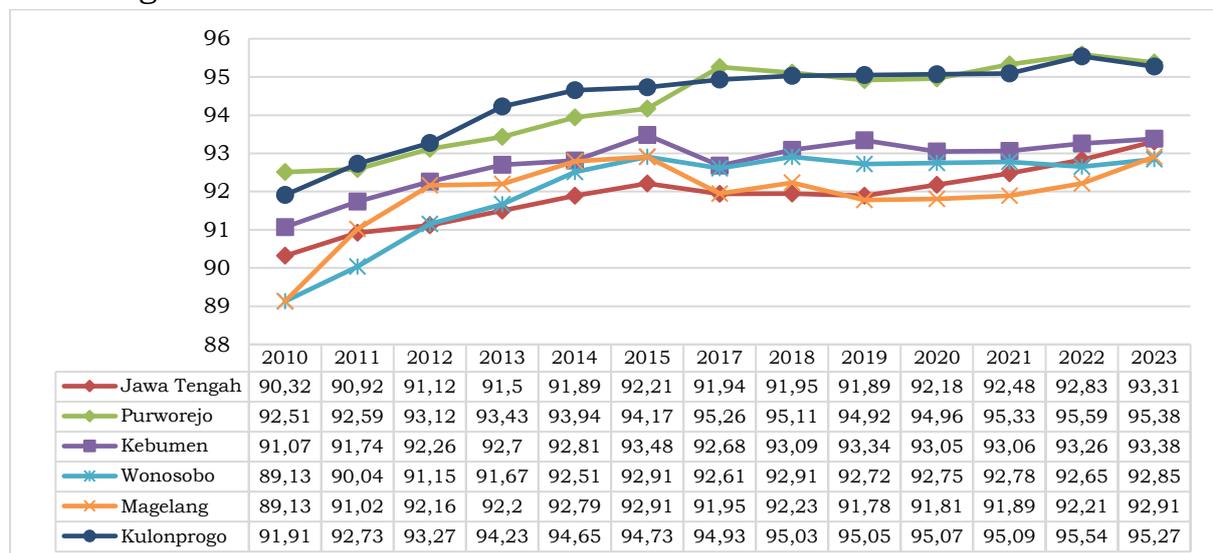
Tahun	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berumur <20th	Persentase Keterwakilan di Legislatif		Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKG
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	0,140	0,227	80,00	20,00	32,79	22,39	78,89	55,44	0,457
2019	0,029	0,223	82,22	17,78	35,31	26,12	81,96	52,32	0,351
2020	0,029	0,243	82,22	17,78	37,04	33,25	80,40	60,14	0,335
2021	0,080	0,193	82,22	17,78	37,25	31,46	84,49	62,57	0,398
2022	0,042	0,204	82,22	17,78	39,31	32,44	83,96	61,29	0,356
2023	0,000	0,199	80,00	20,00	40,59	32,97	85,74	63,86	0,193

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan data di atas, IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 termasuk mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan membaiknya semua aspek (kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja). Dalam lima tahun terakhir, aspek tenaga kerja yang dilihat dari indikator TPAK perempuan mengalami peningkatan lebih tinggi yaitu 11,54 dibandingkan dengan peningkatan TPAK laki-laki yaitu 3,78. Demikian halnya dengan indikator pendidikan, dalam lima tahun terakhir persentase penduduk usi 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas peningkatan perempuan yaitu 6,85 lebih tinggi dari laki-laki yaitu 5,28.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.



Gambar 2.45 Grafik IPG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)





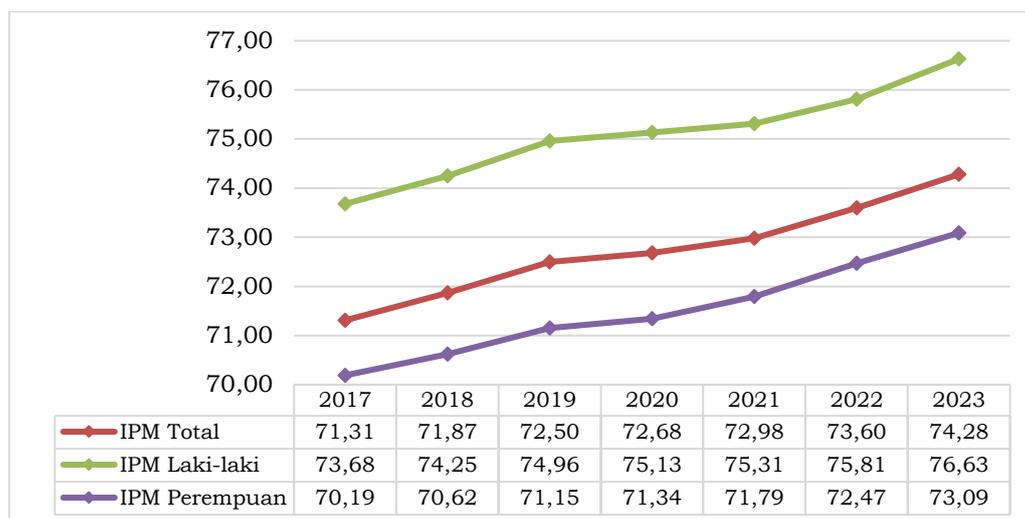
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo tahun 2023 mencapai 95,38. IPG Kabupaten Purworejo tercatat lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo sudah semakin menurun dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Namun meskipun nilai IPG Kabupaten Purworejo semakin meningkat, nilai IPG masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain: 1) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender; 2) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa; 3) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan 4) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

Dalam hal ini, nilai IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.46 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

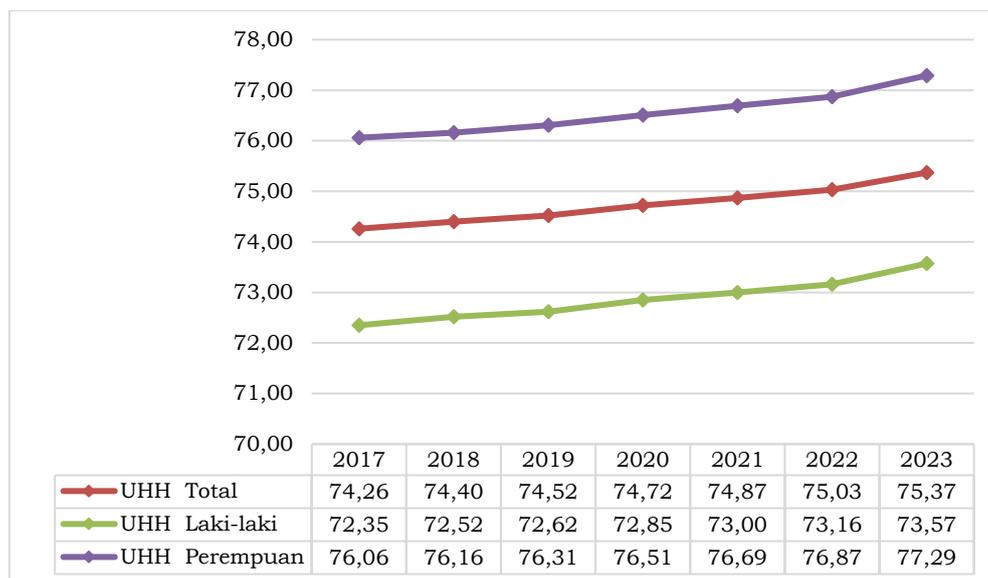
Berdasarkan grafik di atas, IPM laki-laki selalu lebih unggul dibandingkan dengan IPM perempuan. IPM laki-laki berada lebih unggul juga dengan IPM total. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian





pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan IPG Kabupaten Purworejo masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2010 hingga sekarang.

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Berikut grafik UHH menurut jenis kelamin di Kabupaten Purworejo tahun 2017-2023.



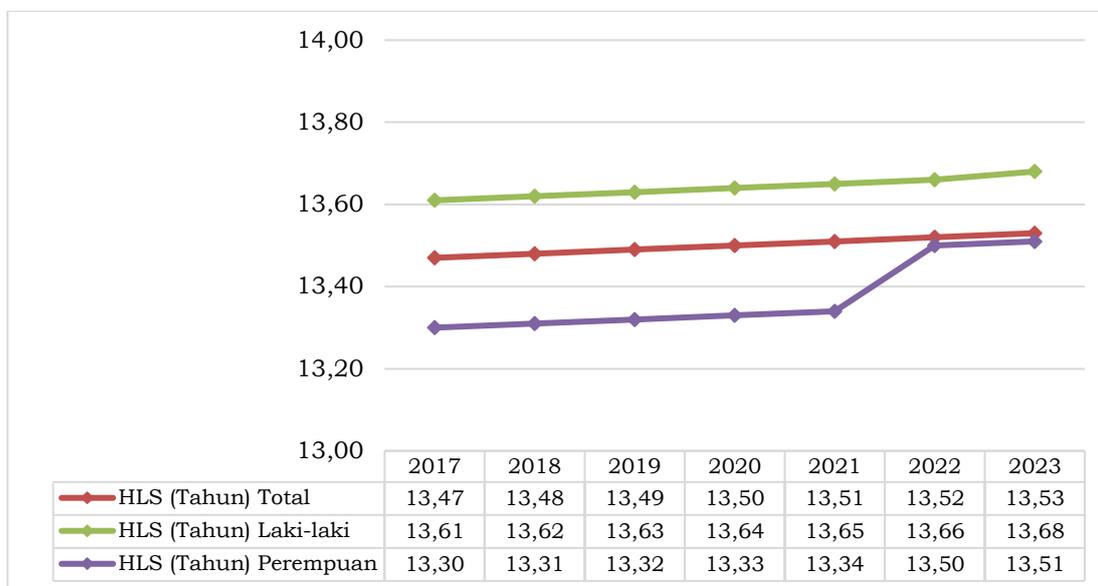
Gambar 2.47 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pada tahun 2017 sampai dengan 2023, UHH Perempuan di Kabupaten Purworejo lebih unggul dari UHH laki-laki dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. UHH perempuan di atas UHH total, sedangkan UHH laki-laki di bawah UHH total. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan serta akses perempuan dalam bidang kesehatan yang tinggi atau tidak ada diskriminasi.

Adapun HLS menurut jenis kelamin yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang serta menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



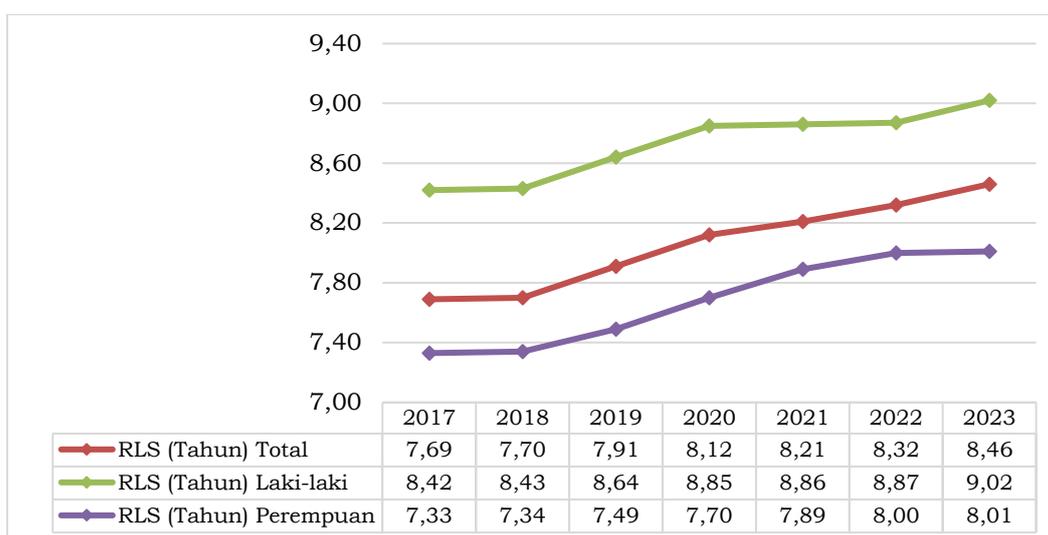


Gambar 2.48 Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, HLS laki-laki pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 selalu lebih unggul dibandingkan dengan HLS perempuan. Pada tahun 2023 HLS perempuan nilainya mendekati HLS total dan kesenjangan dengan HLS laki-laki semakin berkurang. Meskipun terdapat kesenjangan namun keduanya sama-sama memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas. Dengan nilai pencapaian tersebut, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan telah dapat diwujudkan secara merata.

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.



Gambar 2.49 Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023

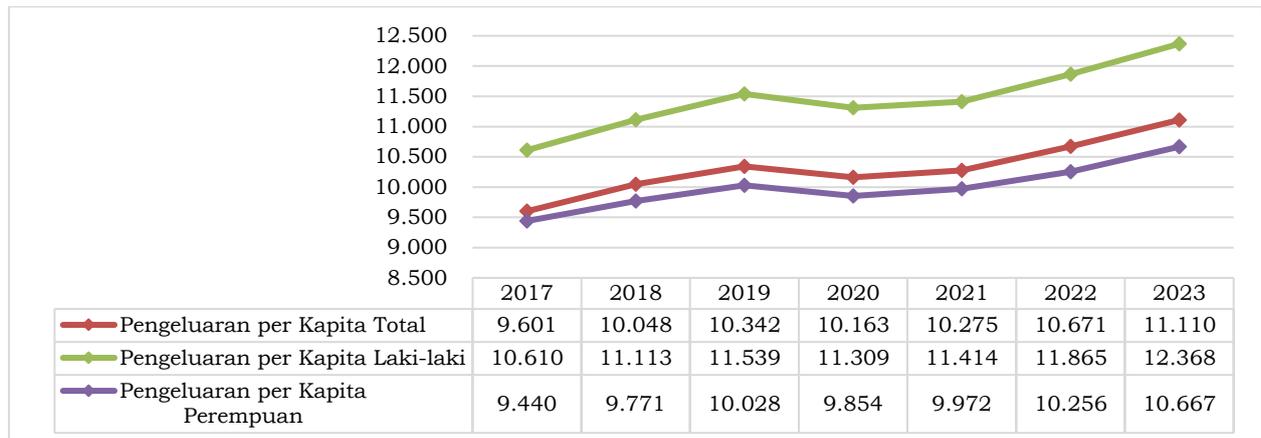
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023)





Berdasarkan data di atas, RLS laki-laki di Kabupaten Purworejo lebih unggul dibandingkan dengan RLS perempuan maupun RLS total. RLS laki-laki 1 tahun lebih lama dibandingkan dengan perempuan dari tahun 2017-2023. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Purworejo berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX, sedangkan perempuan hingga kelas VIII.

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Berikut grafik data pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin pada tahun 2017-2023 di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.50 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) menurut Jenis Kelamin (Ribuan rupiah/orang/tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Dalam grafik di atas tampak bahwa meskipun pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun laki-laki masih mendominasi dan lebih unggul bahkan jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita secara total. Selama periode 2017 hingga 2023, nilai pengeluaran per kapita perempuan pada tahun 2023 jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

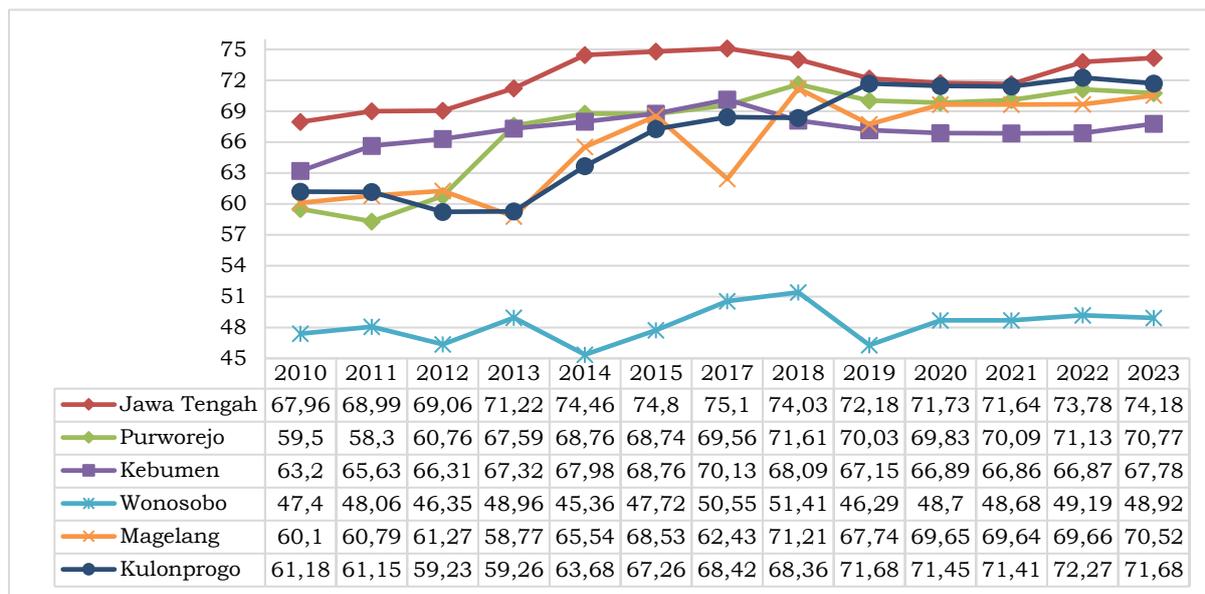
Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam





pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.



Gambar 2.51 Grafik IDG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Grafik di atas menunjukkan posisi Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. IDG Kabupaten Purworejo cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Meskipun begitu Kabupaten Purworejo selalu berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar Kabupaten Purworejo dalam 4 tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo, namun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Banjarnegara. IDG tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kulonprogo dan terendah oleh Kabupaten Wonosobo.

Berikut grafik data komponen pembentuk IDG di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023.





Gambar 2.52 Grafik Komponen IDG Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, perempuan sebagai tenaga profesional seperti manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan fluktuasi, setelah sempat meningkat pada tahun 2021 kemudian turun menjadi 46,81 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo peran laki-laki sebagai tenaga profesional lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun 2022 setelah sebelumnya cenderung seimbang bahkan lebih tinggi perempuan. Sementara sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2017 sampai dengan 2023 cenderung stabil dengan peningkatan yang sangat sedikit. Sumbangan pendapatan dari laki-laki jauh lebih tinggi dari sumbangan perempuan.

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Selama ini, parlemen di Purworejo masih didominasi oleh laki-laki. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Keterlibatan perempuan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tercatat sebesar 17,78. Angka ini jika dilihat dalam lingkup Kabupaten Purworejo cenderung turun jika dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 20,00 persen dan sama sejak tahun 2019 yaitu 17,78 persen..

2.2.2.4. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan langkah strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.





a. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo memiliki 129 guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan yang tersebar pada satuan pendidikan SMP. Guru mengajar tersebut mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai yaitu pendidikan bahasa daerah/sastra jawa atau pendidikan seni. Guru tersebut mengajarkan mulok mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan pada tahun 2023 sebesar 47,20% atau sebesar 42 dari 89 satuan pendidikan SMP.

b. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan.

Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan merupakan cakupan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan/atau pembinaan.

Tabel 2.22 Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2			3	4	
1	Objek DiDuga CB	284	284	284	284	284
2	CB	20	20	43	55	65
3	Objek DiDuga WBTB	2	2	3	3	3
4	WBTB	2	2	3	3	3
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	7,69%	7,69%	16,03%	20,21%	23,69%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah Objek diDuga Cagar Budaya yang telah dimasukkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah 284. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dikarenakan tidak adanya penemuan baru. Sementara CB adalah ODCB yang telah dikaji dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Bupati Purworejo. Pada tahun 2020 Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan pengkajian ODCB sehingga jumlah CB tidak meningkat. Jumlah CB yang ditetapkan dari tahun 2020-2023 selalu meningkat. Dalam penetapan cagar budaya diperlukan tenaga ahli bersertifikasi untuk menjadi tim ahli. Di Kabupaten Purworejo, jumlah tenaga ahli cagar budaya bersertifikasi masih sangat terbatas. Sementara Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023 meningkat dari 2 menjadi 3. WBTB tersebut terdiri dari Tradisi Jolenan desa Somongari Kaligesing, Tari Dolalak, dan Tari Cing Po Ling.

Kendala yang dihadapi dalam pengusulan WBTB adalah sangat minimnya Naskah Akademik dari OD WBTB yang mengandung kajian dari





aspek sejarah, fungsi, makna, dan narasumber. Upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi di Kabupaten Purworejo masih rendah sehingga pelaksanaan pemajuan kebudayaan belum optimal. Hal ini menyebabkan pula pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo belum memberikan dukungan dalam pembangunan.

c. Pengunjung Tempat Bersejarah

Kabupaten Purworejo memiliki beberapa lokasi bersejarah, diantaranya Lingga Bulat Telur, Situs Goa Silawang, Situs Goa Silumbu, Situs Perigi, Gereja Kyai Sadrach, Memorial House WR. Soepratman, Situs Goa Gong, Gereja GPIB Purworejo, Masjid Al Iman Loano, Masjid Jatisalam, Museum Tosan Aji. Berikut merupakan data jumlah pengunjung lokasi bersejarah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.23 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

NO	Tempat Bersejarah	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2			3	4	
1	Lingga Bulat Telur	21	175	127	160	146
2	Situs Goa Silawang	595	307	167	160	144
3	Situs Goa Silumbu	254	146	99	101	116
4	Situs Perigi	239	66	646	1.472	1.725
5	Gereja Kyai Sadrach	32	66	25	55	35
6	Memorial House WR. Soepratman	30	50	105	210	237
7	Situs Goa Gong	947	2.190	924	1.025	1.159
8	Gereja GPIB Purworejo	4.661	3.760	4.090	4.060	4.141
9	Masjid Al Iman Loano		156	976	845	878
10	Masjid Jatisalam	300	400	500	400	300
11	Museum Tosan Aji	3.483	2.221	952	6.118	48.957
	TOTAL Pengunjung	7.079	7.316	7.659	13.581	57.838

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Purworejo selalu meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, kunjungan pada museum tosan aji melonjak karena adanya kerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Adanya kerjasama dalam pemanfaatan tempat sejarah terutama museum tosan ajo melalui program pendidikan mampu meningkatkan kunjungan dari siswa sekolah guna menunjang muatan sejarah lokal di sekolah masing-masing.

d. Persentase Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif

Pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mendorong pembangunan terutama dimensi ekonomi dalam hal ini melalui keaktifan kelompok kesenian dalam pertunjukan kesenian. Persentase kelompok kesenian yang aktif menggambarkan cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota,





kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor. Berikut merupakan data jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.

Tabel 2.24 Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

NO	Kelompok Kesenian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2			3	4	
1	Jumlah Kelompok Kesenian ber-SKT	709	774	878	1044	1155
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang Aktif	222	143	284	463	953
	Persentase kelompok kesenian yang aktif	31,3%	31,4%	32, %	44,4%	82,5%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT atau memiliki Surat Keterangan Terintegrasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 selalu meningkat. Begitu juga untuk kelompok kesenian yang aktif juga selalu meningkat. Namun peningkatan jumlah kelompok yang aktif tidak sebanding dengan jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT. Kelompok kesenian yang aktif adalah kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan masih perlu ditingkatkan. Namun masih diperlukan upaya pembinaan kepada kelompok kesenian yang ada untuk meningkatkan keaktifannya. Upaya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Seni, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan adanya peran dan sinergi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Salah satu agenda pembangunan yakni menciptakan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Peluang bonus demografi yang sedang terjadi di Kabupaten Purworejo pada saat ini menuntut lahirnya generasi muda cerdas dalam mengambil peran dan peluang. Menyadari urgensi peran yang melekat pada pemuda, pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16





sampai 30 tahun. Hasil Susenas 2022, jumlah pemuda di Kabupaten Purworejo sebanyak 168 ribu jiwa atau sebanyak 21,61 persen dari total penduduk.

Tabel 2.25 Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemuda (%)	18,36	17,63	19,44	18,63	18,37	18,79	19,06	21,61
2	Persentase Pemuda menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (%)								
	• Tidak/ belum pernah sekolah	0,56	0,19	0,56	0	0	0	1,33	0,44
	• Tidak punya ijazah SD	3,81	1,51	2,93	5,33	3,82	1,09	7,37	0,19
	• SD/ setara	61,62	10,36	10,07	16,9	10,09	10,84	22,57	12,86
	• SMP/ setara	29,71	43,39	51,23	42,63	45,75	48,07	56,83	38,23
	• SMA ke atas	4,29	44,55	35,21	35,13	40,33	40,00	11,89	48,27
3	Angka Kesakitan Pemuda (%)	10,51	8,2	14,03	8,79	9,92	9,69	8,26	13,87
4	TPT Pemuda (%)	14,14	N/A	N/A	N/A	N/A	13,86	8,53	11,88
5	TPAK Pemuda (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63,13	63,69	58,16

Sumber: Statistik Pemuda Jawa Tengah Tahun 2015-2023

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemuda di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tingginya jumlah pemuda pada suatu daerah menggambarkan tingginya potensi sumber daya manusia dalam proses pembangunannya. Meskipun demikian, angka kesakitan pemuda di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Sedangkan partisipasi pemuda di Kabupaten Purworejo dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan dengan banyaknya proporsi pemuda yang bekerja sudah cukup besar dan menurunnya angka TPT pemuda dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Meskipun demikian, TPT pemuda pada tahun 2022 (11,88) masih lebih tinggi jika dibandingkan TPT secara keseluruhan (4,02) di Kabupaten Purworejo. Selain itu angka kesakitan pemuda juga cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tingginya pengangguran terbuka dan angka kesakitan pada kelompok umur pemuda ini perlu menjadi perhatian karena pemuda merupakan aset pembangunan atau agen perubahan.

2.2.2.8. Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan





hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2.26 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Anak Balita Terlantar (ABT)	176	279	113	71
Anak Terlantar (AT)	170	107	83	53
Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	55	89	38	25
Anak Jalanan	26	20	19	15
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	410	840	667	639
Anak dengan Disabilitas Fisik	280	606	235	200
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	147	352		
a.2. Mata (Tuna Netra)	57	155		
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	76	99		
Disabilitas Sensorik			109	106
Disabilitas Mental	94	162	223	229
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	85	141		
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	9	21		
Disabilitas Mental dan Fisik	36	72	100	104
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	11	8	7	4
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11	8	18	8
Lanjut Usia Terlantar	3	9	2.079	1.466
Penyandang Disabilitas	6.403	7.435	6.547	6.434
Penyandang Disabilitas Fisik	5.057	5.365	2.437	2.385
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2.491	2.674		
a.2. Mata (Tuna Netra)	1.651	1.688		
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	915	1.003		
Penyandang Disabilitas Sensorik			1.232	1.129
Disabilitas Mental	1.027	1.738	2.410	2.485
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	674	903		
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	353	835		
Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	319	332	468	435
Tuna Susila (TS)	131	79	80	63
Gelandangan	42	35	35	35
Pengemis	76	58	57	49
Pemulung	80	101	102	105
Kelompok Minoritas/Waria	1	2	1	-
Waria	-	-	1	-
Gay	-	-	-	-
Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	357	255	230	195
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3	8	8	7
Korban Penyalahgunaan NAPZA	9	10	10	6
Korban Trafficking	1	2	2	1
Korban Tindak Kekerasan	23	18	15	3
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	2	15	-
Korban Bencana Alam	3	20	20	18
Korban Bencana Sosial	2	2	2	2





Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	959	965	906	664
Fakir Miskin	123.000	129.779	112.545	121.993
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	30	36	40	28
Komunitas adat Terpencil	-	-	-	-
JUMLAH	131.984	140.167	123.626	131.884

Sumber : Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di atas, menunjukkan bahwa PPKS terbanyak di Kabupaten Purworejo adalah keluarga fakir miskin, dan lanjut usia terlantar.

Tabel 2.27 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PPKS yang tertangani	81.459	83.436	84.436	88.676	131.884
2	Jumlah seluruh PPKS yang ada	81.459	83.436	84.436	88.676	131.884
3	Persentase PPKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data capaian pada tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa jumlah PPKS dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat besar terjadi di tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat PPKS menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Persentase PPKS yang tertangani telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% selama 5 tahun. Penanganan dan pemberdayaan PPKS yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dan target akhir yang ditentukan dapat terlampaui. Penanganan dilakukan pada PPKS yang terdata dan adanya bantuan dari pemerintah pusat serta provinsi dalam intervensi PPKS di Kabupaten Purworejo. Namun penanganan tersebut ternyata tidak mengurangi jumlah PPKS di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purworejo, yaitu belum maksimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Perlindungan sosial yang belum optimal ini mencakup kurangnya akses PPKS untuk berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Partisipasi yang rendah ini mengakibatkan terbatasnya peluang bagi PPKS untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif. Kemudian, masih tingginya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) mencerminkan kondisi hidup yang kurang memadai, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Belum optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS juga menjadi tantangan. Sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan dukungan





yang diperlukan oleh PPKS. Penanganan PPKS di Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada strategi yang bersifat pro-job dan pro-growth. Sementara program pro-poor seperti proteksi dan afirmasi lewat bantuan sosial serta jaminan sosial sangat relevan dan memberikan dampak positif, perlu dikedepankan program-program yang mendukung penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) untuk membantu warga miskin menjadi mandiri.

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Data dan Jenis PSKS Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28 Data dan Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023

No	Jenis	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Pekerja Sosial Profesional	13	9	11	33
2	Pekerja Sosial Masyarakat	129	129	1167	1166
3	Taruna Siaga Bencana	36	29	60	35
4	Pendamping PKH	122	113	104	95
5	Karang Taruna	224	224	339	509
6	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	0	286	308
7	Penyuluh Sosial	1	1	3	74
8	TKSK	16	16	16	17
9	LKS	12	12	0	7
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1
11	Keluarga Pioner	0	0	86	84
12	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	1	1	10	17
13	Dunia Usaha	1	0	28	28
14	Family Care Unit	0	0	0	0
15	SLRT	-	-	-	494

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di atas, menunjukkan bahwa tidak semua jenis PSKS terdapat di Kabupaten Purworejo. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif dalam beberapa aspek, namun masih terdapat area yang memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk memastikan semua potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo dapat dimaksimalkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Terdapat lima jenis layanan yang harus dipenuhi Kabupaten Purworejo dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi terakhir di tahun 2022, hanya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yang capaiannya mencapai 100%. Empat jenis layanan lain perlu diupayakan di





tahun berikutnya, terlebih layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial karena capaiannya sebesar 100,00%. Lebih lanjut hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	40%	40%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2024

2.3. Aspek Daya Saing

Daya saing didefinisikan sebagai suatu wilayah menunjukkan kemampuan menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Daya saing daerah dapat dijabarkan pada beberapa fokus: daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah, serta daya saing iklim investasi.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

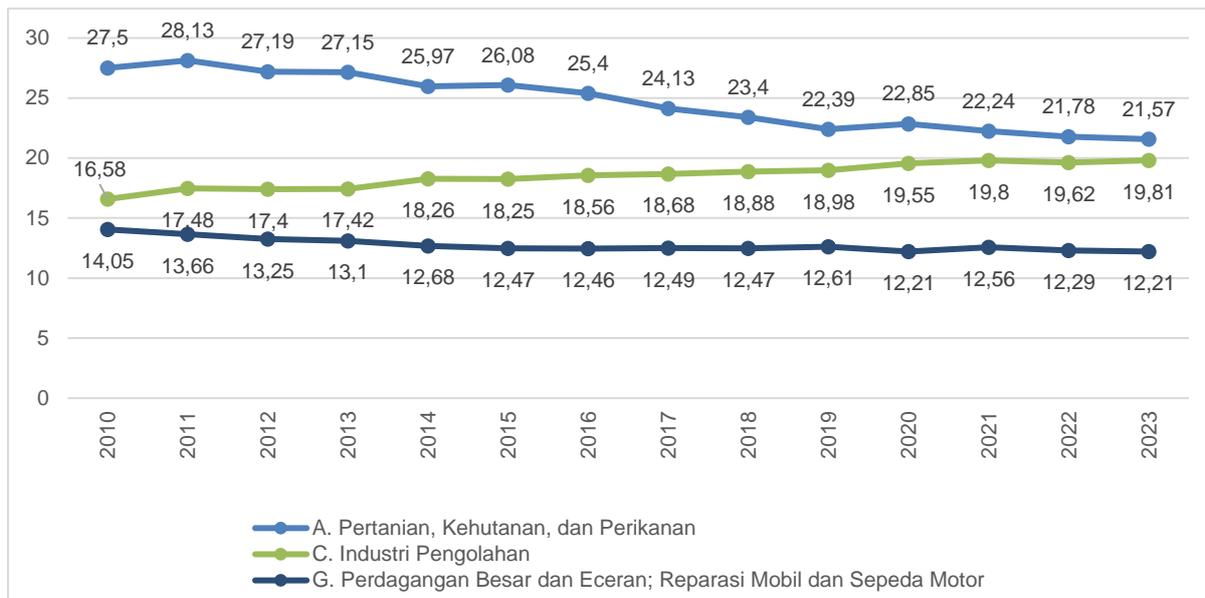
Pada subbab ini, dijelaskan mengenai struktur ekonomi dan analisis sektor unggulan Kabupaten Purworejo yang menjadi penopang perekonomian, serta sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah, maka perlu diketahui sektor ekonomi apa yang paling besar pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan arahan yang tepat dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha/kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap kategori. Struktur ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 didominasi oleh sektor





Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan. Struktur ekonomi tersebut tidak berubah hingga tahun 2023 ini. Meskipun secara kontribusi tetap ketiga sektor tersebut yang dominan, namun dari tahun 2010 hingga tahun 2023 terdapat pergeseran yang dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 2.53 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 memiliki 3 (tiga) sektor yang dipandang akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Purworejo: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada tipologi sektor potensial, sehingga banyak hal yang dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas sektor ini melalui berbagai kebijakan di tingkat daerah. Sektor industri pengolahan berada pada tipologi berkembang, yang berarti sektor ini belum basis bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perlu terobosan kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif apabila sektor industri pengolahan diharapkan untuk menjadi unggulan, begitu pula dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Terdapat 2 metode dalam menganalisis sektor ekonomi, yang pertama adalah konsep ekonomi basis. Sektor Basis merupakan sektor atau kegiatan ekonomi yang tidak hanya melayani pasar domestik tetapi juga sampai pasar luar daerah (ekspor). Sedangkan Sektor Non Basis adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar domestik atau bisa disebut juga sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani (*service*) kegiatan produksi sektor basis.

Kedua sektor (basis dan non-basis) saling berhubungan, jika permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Berkembangnya sektor basis akan mendorong perkembangan sektor non-basis dan perkembangan kedua sektor tersebut akan menumbuhkembangkan perekonomian wilayah melalui proses





penggandaan. Metode yang kedua adalah analisis shift share yaitu menganalisis perubahan sektor/kegiatan ekonomi (produksi dan kesempatan kerja) pada periode waktu tertentu.

Hasil analisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya dan juga melihat perkembangan dari sektor perekonomian suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas. Secara lebih singkat, *Statistic Location Quotient* (SLQ) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur suatu sektor yang merupakan sektor unggulan (sektor basis) atau tidak bagi suatu daerah. Melalui analisis SLQ dan *shift share netto*, dapat diketahui sektor ekonomi yang merupakan basis di Kabupaten Purworejo, serta sektor ekonomi apa yang terindikasi progresif maupun mundur. Tabel berikut menunjukkan analisis SLQ dan *shift share netto* 17 sektor ekonomi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.30 Analisis SLQ dan Shift Share Netto Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo

No	Sektor Ekonomi	Shift Share Netto	SLQ	Interpretasi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.110.500,19	1,6823	basis, progresif
2	Pertambangan Dan Penggalian	-20.368,76	0,3481	non basis, mundur
3	Industri Pengolahan	183.925,14	0,5090	non basis, progresif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.917,07	0,8479	non basis, progresif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.374,52	0,9868	non basis, mundur
6	Konstruksi	24.448,60	0,8498	non basis, progresif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-98.670,50	0,9388	non basis, mundur
8	Transportasi Dan Pergudangan	117.492,35	1,8203	basis, progresif
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	25.994,46	0,7114	non basis, progresif
10	Informasi dan Komunikasi	535.875,37	1,4324	basis, progresif
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	175.590,71	1,0359	basis, progresif
12	Real Estate	-197.300,74	1,5524	basis, mundur
13	Jasa Perusahaan	9.696,52	0,7972	non basis, progresif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-188.244,84	1,5020	basis, mundur
15	Jasa Pendidikan	334.703,44	2,0282	basis, progresif
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	76.189,22	1,9224	basis, progresif
17	Jasa Lainnya	24.355,00	1,4820	basis, progresif

Keterangan:

- SLQ > 1 : sektor basis
- Shift Share Netto > 0 : sektor progresif
- Shift Share Netto < 0 : sektor mundur

Sumber: Analisis, 2023

Pada tabel di atas diketahui bahwa tiga sektor basis teratas Kabupaten Purworejo ialah sektor jasa pendidikan (2,0282), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,9224), serta sektor transportasi dan pergudangan (1,8203). Di bawah ketiga sektor tersebut, terdapat sektor pertanian (1,6823) yang merupakan penyumbang PDRB Kabupaten Purworejo tertinggi selama ini.

Selanjutnya, tiga sektor teratas di Kabupaten Purworejo yang paling progresif antara lain sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, serta sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil





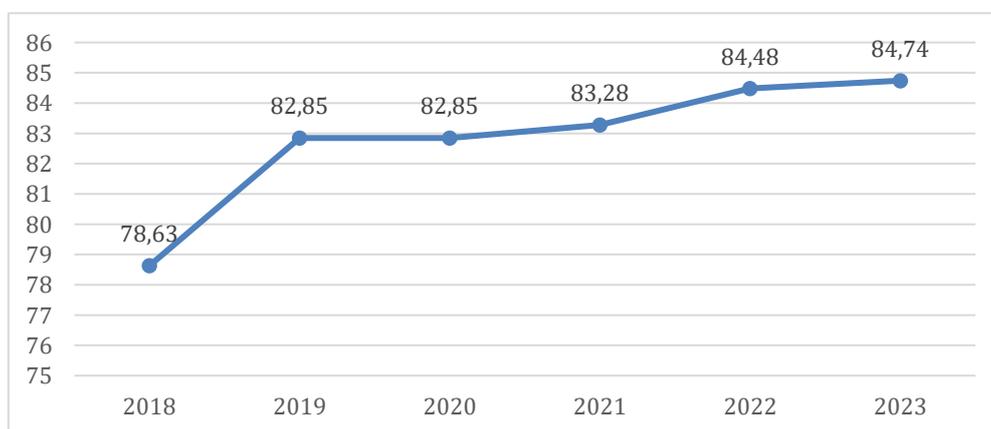
dan sepeda motor yang merupakan penyumbang PDRB tinggi di Kabupaten Purworejo ternyata terindikasi sebagai sektor yang mundur. Hal yang menarik ini dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan pengkategorian dalam 4 tipologi: sektor berkembang, sektor unggulan, sektor potensial, dan sektor terbelakang, ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Shift Netto > 0	
<p>Sektor Berkembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Konstruksi 4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5. Jasa Perusahaan <p>SLQ < 1</p>	<p>Sektor Unggulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi Pergudangan 2. Informasi dan Komunikasi 3. Jasa Keuangan dan Asuransi 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6. Jasa Lainnya <p>SLQ > 1</p>
<p>Sektor Terbelakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 	<p>Sektor Potensial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Real Estate 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Shift Netto < 0	

Gambar 2.54 Analisis SLQ dan Shift Netto Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo
 Sumber: Analisis, 2023

2.3.1.1. Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional yang mengadopsi dari (*Global Food Security Index - GFSI*) dan disesuaikan dengan ketersediaan data di Indonesia. IKP disusun mempertimbangkan tiga pilar yaitu pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Berdasarkan hasil analisis dari Badan Pangan Nasional, IKP Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023:



Gambar 2.55 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023
 Sumber: <https://fsva.badanpangan.go.id/>, 2024





Berdasarkan data indeks ketahanan pangan tersebut, Kabupaten Purworejo dari tahun 2018 hingga tahun 2023 selalu meningkat ketahanan pangannya dan selalu berada pada kelompok dengan ketahanan pangan yang baik di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Indonesia, IKP Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 menempati peringkat ke-64 dari 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ketahanan pangan yang baik di Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh faktor pengeluaran untuk pangan, akses listrik, akses air bersih, angka harapan hidup, dan rasio tenaga kerja terhadap kepadatan penduduk. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap turunnya indeks keterjangkauan pangan adalah masih tingginya angka kemiskinan. Selain itu, harga pangan juga rentan mengalami fluktuasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan faktor yang menyebabkan turunnya indeks ketersediaan adalah menurunnya produksi tanaman pangan dan daya dukung pangan.

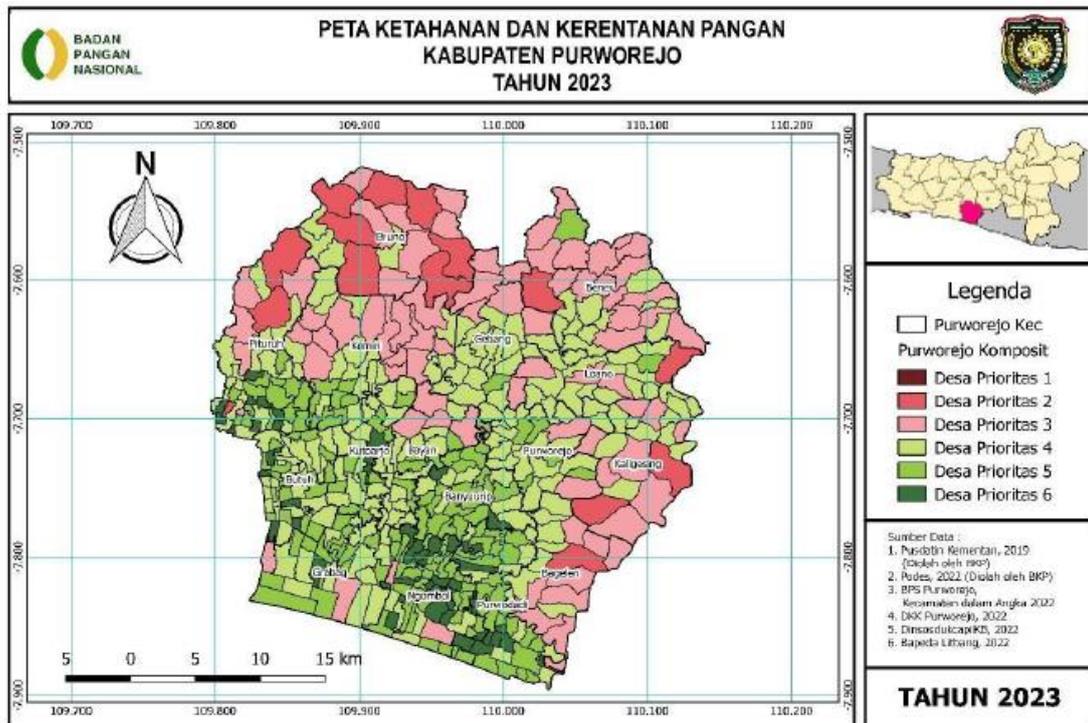
Meskipun IKP di Kabupaten Purworejo menunjukkan nilai yang baik, namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa semua kecamatan, desa, serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Untuk dapat mengidentifikasi daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level kecamatan dan desa, diperlukan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta provinsi dan kabupaten hingga unit wilayah terkecil. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) pada tahun 2022 terdapat 109 desa atau 19,85% termasuk dalam kategori rentan pangan (prioritas 1-3) di Kabupaten Purworejo, sedang sisanya merupakan kategori tahan (prioritas 4-6). Berikut hasil analisis FSVA di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023.

Tabel 2.31 Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Prioritas	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Prioritas 1 (Sangat Rentan)	0	0
2	Prioritas 2 (Rentan)	15	3,04
3	Prioritas 3 (Agak Rentan)	77	15,59
4	Prioritas 4 (Agak Tahan)	192	38,87
5	Prioritas 5 (Tahan)	167	33,81
6	Prioritas 6 (sangat tahan)	43	8,70

Sumber: Dokumen FSVA Kabupaten Purworejo Tahun 2023





Gambar 2.56 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Sumber: Dokumen FSVa Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Peta di atas menunjukkan bahwa desa rentan/rawan pangan yang berada di prioritas 1, 2, dan 3 didominasi pada wilayah-wilayah perbatasan dataran tinggi. Prioritas 1 paling banyak berada di Kecamatan Bruno. Desa-desa yang dalam posisi prioritas 2-3 merupakan desa-desa dengan rasio lahan baku sawah yang rendah, daya beli masyarakat yang rendah, memiliki lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, dan mengalami kendala untuk mendapatkan akses air bersih.

Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya menangani desa rentan/rawan pangan melalui beberapa cara yaitu menyalurkan cadangan pangan pada desa rawan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Selain penyaluran cadangan pangan, pada desa-desa tersebut juga dilakukan pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan lokal. Berikut penanganan desa rawan/ rentan pangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023:

Tabel 2.32 Penanganan Desa Rawan/ Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa Rawan/ Rentan Pangan	45	147	142	142	142
2.	Desa Rawan/ Rentan Pangan yang Tertangani	6	13	6	8	28
3.	Persentase Penanganan Desa Rawan/Rentan Pangan	13,33	8,84	4,93	5,63	19,72

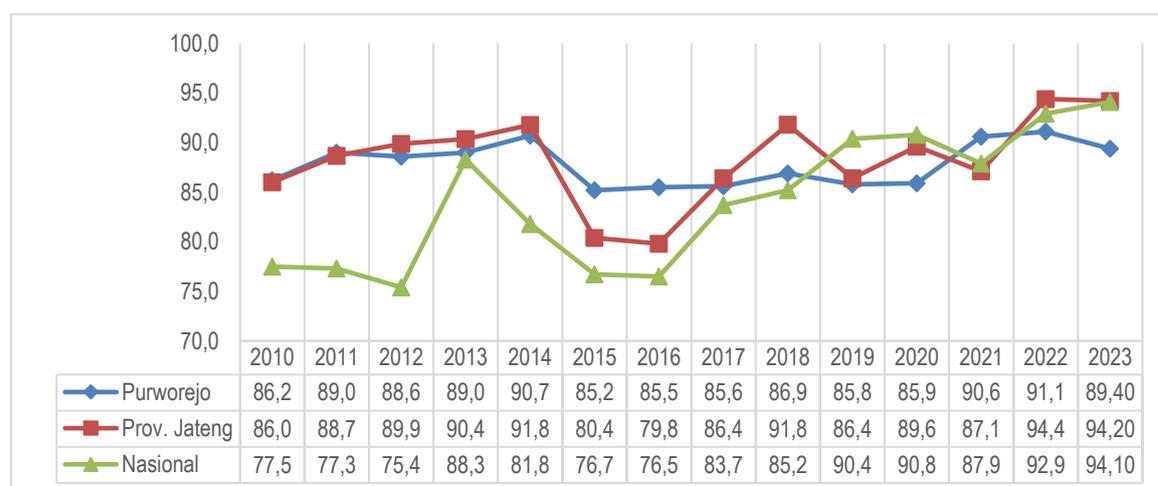
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024





Meskipun telah dilakukan penanganan namun jumlah desa rentan pangan belum menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penanganan desa rentan/rahan pangan di Kabupaten Purworejo yang dilakukan belum komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor penyebab desa rentan/rahan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan yang meliputi akses ekonomi, akses fisik/ infrastruktur, dan akses sosial, serta pemanfaatan pangan dengan indikator akses terhadap air bersih dan rasio tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar sektor yang terkait dalam penanganan desa rentan/rahan pangan di Kabupaten Purworejo.

Di sisi lain, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.



Gambar 2.57 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2010 – 2023

(Sumber: Bapanas, Bappeda Prov Jateng, DKPP Kabupaten Purworejo, 2023)

Skor PPH di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-2023 menunjukkan kondisi yang relatif membaik dan semakin mendekati skor 100. Meningkatnya skor PPH di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas dan beranekaragamnya konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo yang mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan skor PPH karena pada tahun 2023 mulai dilakukan perhitungan yang didasarkan pada data pengeluaran masyarakat pada kelompok pangan tersebut. Skor PPH Kabupaten Purworejo pada tahun juga relatif lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan lebih rendahnya tingkat konsumsi pada kelompok pangan hewani di Kabupaten Purworejo jika





dibandingkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Meningkatnya skor PPH di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas dan beranekaragamnya konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo yang mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Meskipun demikian skor PPH Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.33 Perkembangan Skor PPH Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

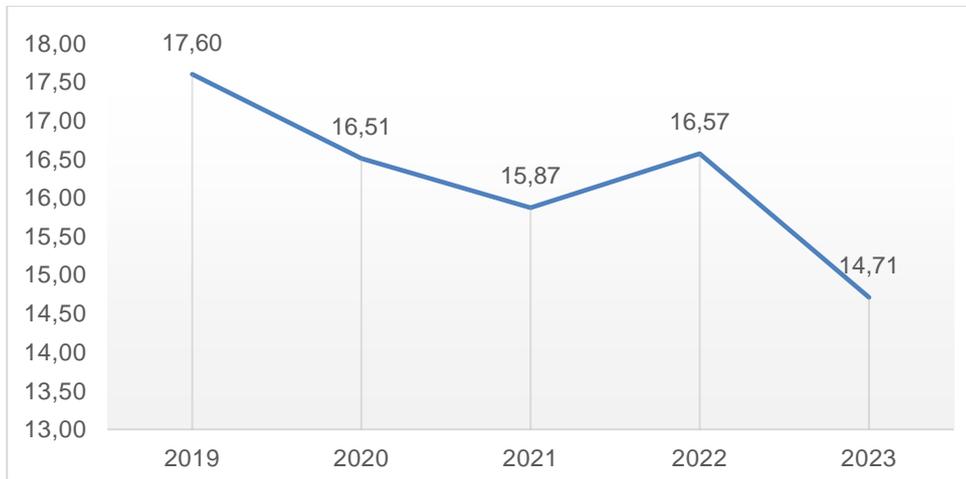
No	Kelompok Pangan	Standar	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padi-padian	25	23,4	22,7	25	25	24,1
2	Umbi-umbian	2,5	2	2,2	1,1	1,3	0,9
3	Pangan Hewani	24	16,8	16,8	17,9	18,6	19,2
4	Minyak dan Lemak	5	3,2	3,2	5	5	4,5
5	Buah/Biji Berminyak	1	1	1	1	1	0,9
6	Kacang-kacangan	10	10	10	8,2	7,7	7,8
7	Gula	2,5	1,7	1,7	2,4	2,5	2
8	Sayur dan Buah	30	27,7	28,3	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0
10	Skor PPH	100	85,8	85,9	90,6	91,1	89,4

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Jika dilihat lebih detail pada tahun 2023, skor PPH Kabupaten Purworejo menurun pada kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Sedangkan pada kelompok pangan hewani cenderung meningkat pada tahun 2023 meskipun masih sangat jauh dari nilai standarnya. Rendahnya konsumsi pada kelompok pangan hewani disebabkan masih adanya masyarakat di Kabupaten Purworejo yang lebih mengutamakan konsep kenyang (pemenuhan karbohidrat) dibandingkan pemenuhan gizi seimbang. Selain itu adanya keterbatasan kemampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan hewani yang cenderung lebih tinggi harganya dibandingkan kelompok pangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo terutama pada kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan yang saat ini kondisinya masih jauh dari standar skor PPH.

Untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan pada suatu wilayah dapat menggunakan indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Berikut capaian PoU di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023:



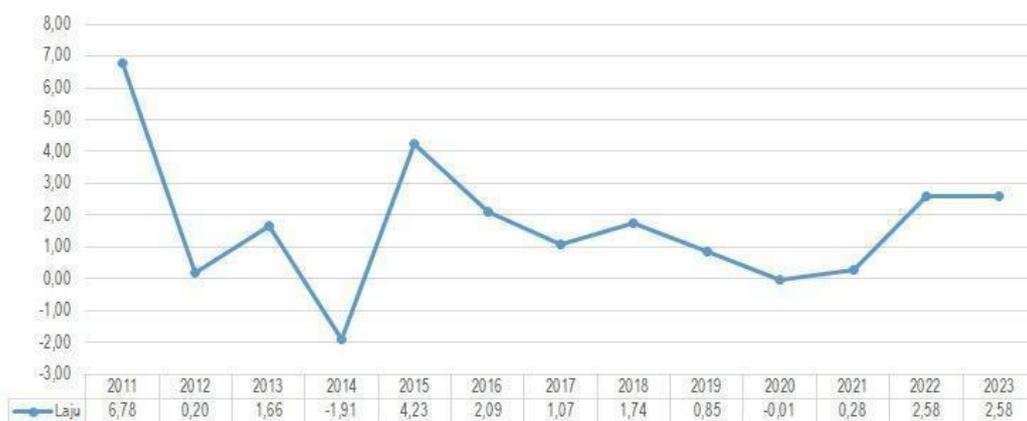


Gambar 2.58 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Kabupaten Purworejo Tahun 2019–2023
(Sumber: Bapanas, 2023)

PoU di Kabupaten Purworejo menempati posisi tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023 meskipun demikian secara tren, terdapat tren penurunan 4,22 persen per tahun dari tahun 2019-2023. Sedangkan jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 adalah sebesar 105.493 jiwa. Jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 menempati peringkat ke-15 jika dibandingkan Kabupaten dan Kota lain di Jawa Tengah.

2.3.1.2. Pertanian

Pertanian di Kabupaten Purworejo menjadi salah satu sektor basis dimana mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi cukup besar dalam struktur ekonomi. Berikut laju dan kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023:



Gambar 2.59 Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Meskipun berkontribusi cukup besar, namun dari tahun 2011 (28,13 persen) hingga tahun 2023 (21,57 persen) terjadi penurunan kontribusi rata-rata sebesar 1,92 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhannya relatif fluktuatif dimana laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 (6,78 persen) dan laju terendah terjadi pada tahun 2014 (-1,91 persen). Pada tahun 2020 dan 2021 saat pandemi covid-19 melanda di Kabupaten Purworejo,





sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontraksi namun tidak terlalu dalam (2020 berada pada angka -0,01 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purworejo cukup tangguh di tengah pandemi covid-19. Angka kontribusi yang semakin menurun dan laju yang cukup rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya, disebabkan oleh produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purworejo cenderung stagnan, lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian, rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian dan perikanan, skala usaha pertanian dan perikanan tidak sebanding dengan skala ekonominya, serta belum optimalnya modernisasi peralatan dan mesin pertanian.

Berdasarkan hasil analisis dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada publikasinya Analisis Ketimpangan Pengembangan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2022, dihasilkan bahwa Kabupaten Purworejo berada pada kuadran II yang merupakan daerah pertanian potensial karena memiliki kontribusi pertanian yang lebih besar dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah namun pertumbuhannya perlu untuk ditingkatkan. Sedangkan jika ditinjau sektor basis pada tiap subsektornya, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34 Analisis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2022

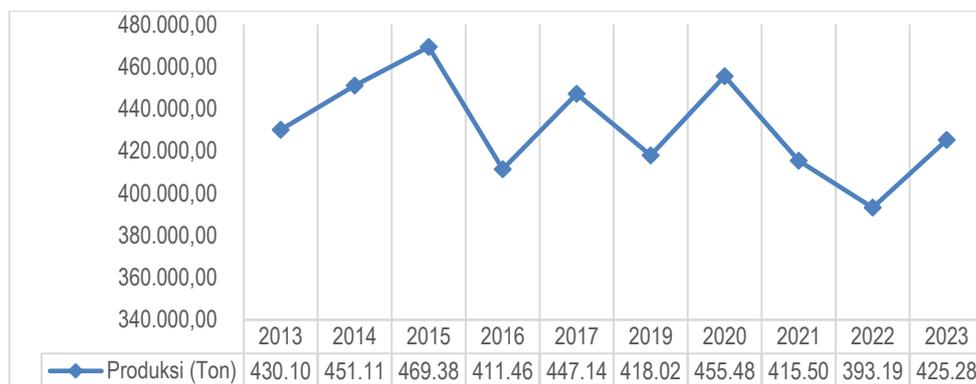
No	Subsektor	Tahun 2012		Tahun 2022	
		LQ	Keterangan	LQ	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tanaman Pangan	1,13	Basis	1,03	Basis
2	Hortikultura	-0,86	Non basis	-0,94	Non basis
3	Perkebunan	0,98	Non basis	1,67	Basis
4	Peternakan	-0,74	Non basis	-0,80	Non basis
5	Jasa Pertanian	1,07	Basis	1,12	Basis
6	Kehutanan	1,21	Basis	1,36	Basis
7	Perikanan	-0,52	Non basis	-0,56	Non basis

Sumber: BPS Prov. Jateng Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 subsektor pertanian yang basis adalah tanaman pangan, jasa pertanian, dan kehutanan. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi perubahan dimana terdapat empat subsektor yang berada pada kelompok basis, yaitu tanaman pangan, perkebunan, jasa pertanian, dan kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja pada bidang pertanian khususnya pada subsektor perkebunan, jasa pertanian, dan kehutanan. Meskipun demikian, terjadi penurunan nilai LQ pada subsektor Tanaman Pangan yang menyumbang kontribusi terbesar di Kabupaten Purworejo, sementara itu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan semakin terpuruk dari tahun 2012 hingga tahun 2022.

Berdasarkan data produksi pertanian untuk komoditas tanaman pangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2013-2023 terjadi penurunan produksi rata-rata 0,73 persen per tahun. Penurunan terjadi pada komoditas Jagung, kedelai, dan ubi jalar. Sedangkan pada komoditas lainnya seperti padi sawah, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang tanah mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2013-2023.





Gambar 2.60 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023
 Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Penurunan produksi pertanian di Kabupaten Purworejo tersebut disebabkan salah satunya oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi ruang yang lainnya. DPUPR Kabupaten Purworejo pada tahun 2011 mencatat 56.877 hektare di Kabupaten Purworejo merupakan lahan pertanian yang meliputi pertanian lahan basah dan lahan kering. Namun pada tahun 2021 lahan pertanian di Kabupaten Purworejo menjadi 46.857 hektar. Hal ini menunjukkan dalam dari tahun 2011 hingga tahun 2021 terjadi alih fungsi yang cukup signifikan yaitu sebesar 10.020 hektar dari lahan pertanian menjadi kawasan budidaya lainnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah berkurangnya daya dukung lahan pertanian, lambannya regenerasi petani, keterbatasan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian, perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pola tanam.

Sedangkan terkait peternakan, populasi ternak di Kabupaten Purworejo dari tahun 2012-2023 meningkat dengan laju rata-rata 21,65 persen per tahun dengan laju terbesar pada ternak unggas. Hal ini disebabkan ternak unggas relatif lebih cepat bereproduksi jika dibandingkan ternak kecil dan ternak besar.



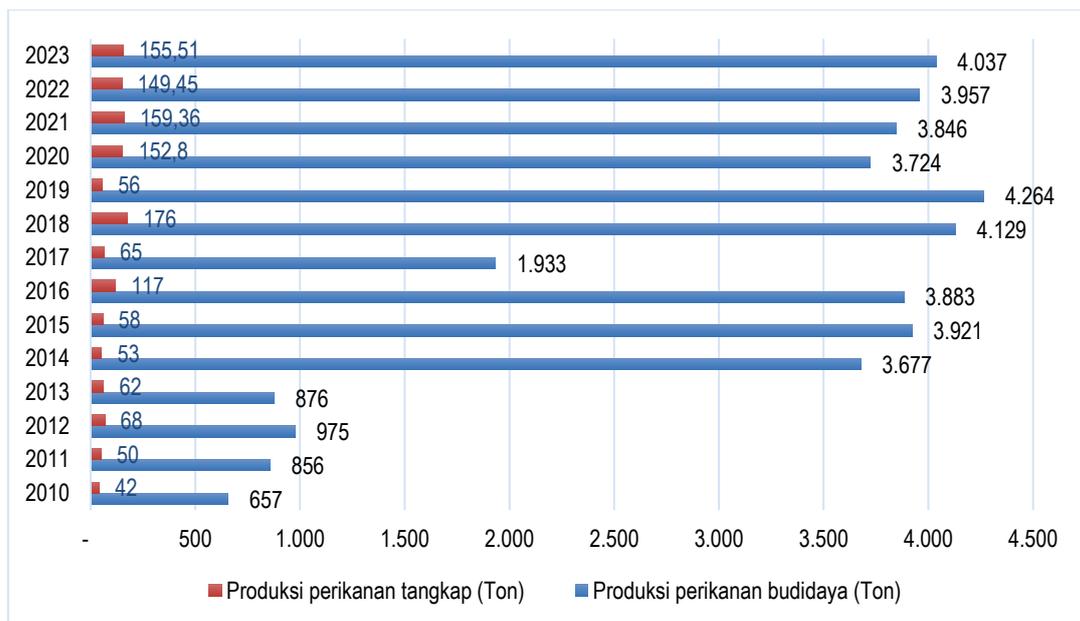
Gambar 2.61 Laju Populasi Ternak di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023
 Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki potensi di bidang Kelautan dan Perikanan. Secara umum produksi perikanan di Kabupaten Purworejo meningkat rata-rata 33,4 persen per tahun dari tahun 2010-2023. Meskipun demikian, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo memang tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan produksi perikanan





budidaya. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo meningkat rata-rata 30,92 persen per tahun dari tahun 2010-2023. Sedangkan produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata 34,97 persen per tahun dari tahun 2010-2023.



Gambar 2.62 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Peningkatan produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan alat penangkapan ikan modern, peningkatan pengetahuan nelayan, dan subsidi bahan bakar. Meskipun perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2010-2023, namun jumlahnya cukup rendah, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan agar dapat memperoleh hasil maksimal. Sedangkan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh pemberian bantuan bibit ikan pada kelompok-kelompok pembudidaya ikan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo masih perlu ditingkatkan lagi.

Peranan sektor perikanan di Kabupaten Purworejo belum signifikan dalam PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Hal tersebut disebabkan keterbatasan pembudidaya ikan dan nelayan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, masih kurang optimalnya manajemen usaha perikanan dan akses pemasaran, skala usaha perikanan yang tidak memenuhi skala ekonomis dan tidak menerapkan *supply chain system* secara terpadu, diversifikasi dan kualitas produk olahan hasil perikanan masih rendah.

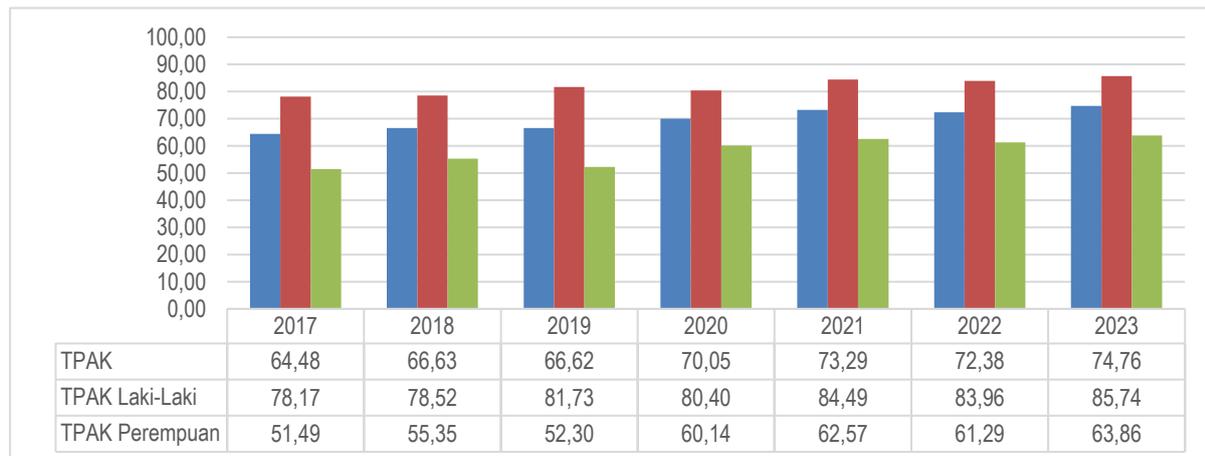
2.3.1.3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Besarnya persentase penduduk yang telah bekerja merupakan suatu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi atau belum. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan besarnya supply tenaga





kerja untuk dapat memproduksi barang dan jasa dalam suatu wilayah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2017 (64,48)-2023 (74,76). Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat. TPAK Laki-Laki Kabupaten Purworejo dari tahun 2017-2023 relatif lebih tinggi jika dibandingkan TPAK Perempuan.



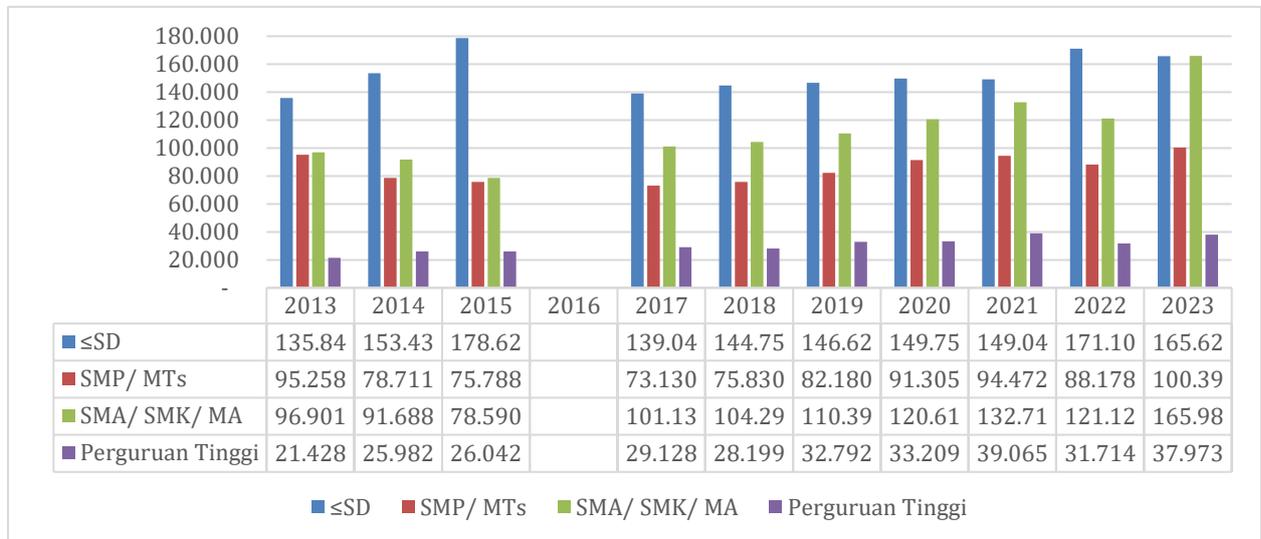
Gambar 2.63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Meskipun TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2017-2023 namun tidak diimbangi dengan peluang serapannya dalam pasar kerja. Secara alamiah pertumbuhan penduduk akan searah dengan pertumbuhan Angkatan Kerja. Namun, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru relatif berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua Angkatan Kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada gambar berikut ini merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Purworejo tahun 2013-2023. Data pada 2016 tidak tersedia karena tidak dilakukan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) waktu itu.

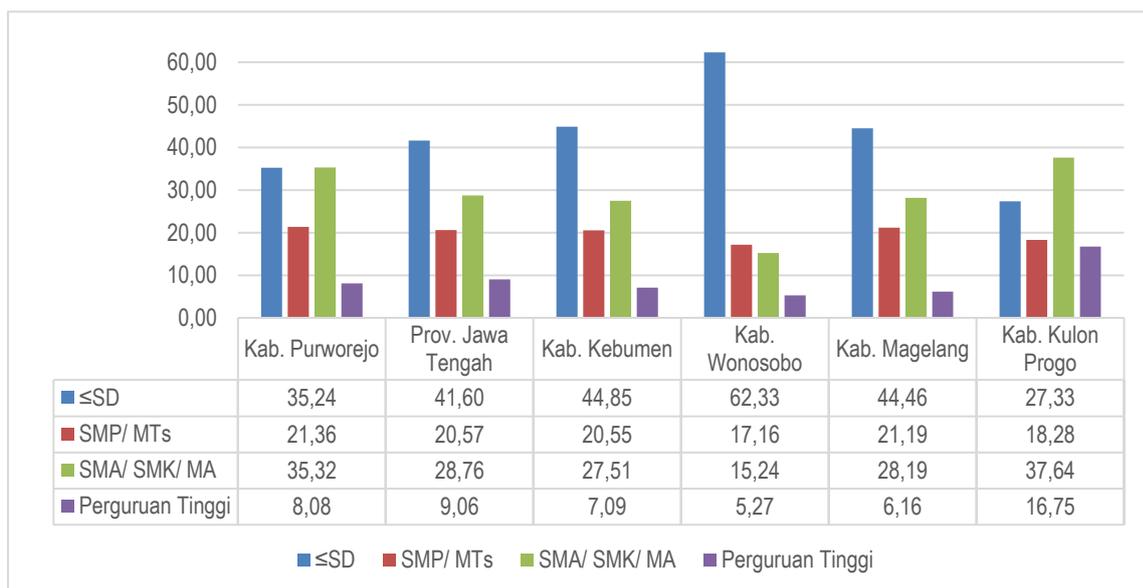




Gambar 2.64 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023 (jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dikategorikan dalam 4: ≤ SD, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA, serta perguruan tinggi. Pada 11 tahun terakhir secara *trend*, penduduk yang tamat perguruan tinggi relatif meningkat, sebesar 6,59%. Peningkatan juga relatif terjadi pada kelompok penduduk lain, terendah pada tamatan SMP/ MTs (0,92%). Hal positif ini disebabkan karena cukup baiknya kebijakan nasional maupun Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan SPM bidang pendidikan. Kondisi ini juga diprediksikan akan terus meningkat, setidaknya sampai tahun 2028 sebagai masa akhir bonus demografi Kabupaten Purworejo. Lebih lanjut mengenai perbandingan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Purworejo dengan daerah lain dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.65 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023





Kabupaten Purworejo memiliki penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 469.977 jiwa (pada tahun 2023), lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo (269.268 jiwa), namun lebih rendah bila dibandingkan dengan 3 kabupaten lain sekitarnya. Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulon Progo memiliki angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMA/ SMK/ MA, berbeda dengan daerah lain yang didominasi tamatan \leq SD. Secara regional, Kabupaten Purworejo memiliki daya saing yang cukup tinggi, dilihat dari banyaknya proporsi penduduk yang tamat perguruan tinggi (8,08%), lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen (6,01%), Kabupaten Wonosobo (5,27%), dan Kabupaten Magelang (6,16%). Hal ini juga didukung dengan proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat \leq SD di Kabupaten Purworejo (35,24%) yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (41,60%), Kabupaten Kebumen (44,85%), Kabupaten Wonosobo (62,33%), dan Kabupaten Magelang (44,46%). Kondisi ini tidak luput dari tingginya angka IPM Kabupaten Purworejo bila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, kecuali Kabupaten Kulon Progo.

Badan Pusat Statistik (BPS) membagi lapangan pekerjaan utama menjadi 14, terdapat pada publikasi “Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah”. Dalam identifikasi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, terdapat beberapa lapangan usaha yang digabung sehingga menjadi 14 lapangan pekerjaan utama. Tabel di bawah ini menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.35 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022

Lapangan Pekerjaan Utama	2018		2019		2020		2021		2022	
	jiwa	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	126.477	35,83	135.491	37,54	165.352	43,63	152.592	38,11	128.120	32,54
2. Pertambangan Dan Penggalian	1.285	0,36	1.034	0,29	0	0,00	499	0,12	402	0,10
3. Industri Pengolahan	49.228	13,95	54.873	15,20	49.321	13,02	59.166	14,78	65.397	16,61
4. Konstruksi	34.485	9,77	28.238	7,82	23.402	6,18	28.616	7,15	28.538	7,25
5. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	53.653	15,20	58.087	16,09	57.300	15,12	64.136	16,02	83.401	21,18
6. Transportasi Dan Pergudangan	10.913	3,09	4.178	1,16	5.638	1,49	7.966	1,99	7.669	1,95
7. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	15.999	4,53	22.547	6,25	21.387	5,64	20.393	5,09	24.106	6,12
8. Jasa Keuangan Dan Asuransi	4.604	1,30	1.495	0,41	1.934	0,51	3.039	0,76	1.379	0,35
9. Jasa Perusahaan	2.684	0,76	2.753	0,76	2.359	0,62	3.329	0,83	966	0,25
10. Administrasi Pemerintahan,	8.965	2,54	13.413	3,72	14.810	3,91	15.638	3,91	10.896	2,77





Lapangan Pekerjaan Utama	2018		2019		2020		2021		2022	
	jiwa	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib										
11. Jasa Pendidikan	14.383	4,07	15.551	4,31	11.993	3,16	18.304	4,57	22.000	5,59
12. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	9.285	2,63	5.075	1,41	6.684	1,76	8.165	2,04	4.426	1,12
13. Jasa Lainnya	16.775	4,75	16.238	4,50	13.510	3,57	15.036	3,76	13.034	3,31
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik Dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang; Informasi Dan Komunikasi; Real Estat)	4.253	1,20	1.992	0,55	5.261	1,39	3.522	0,88	3.441	0,87
Jumlah	352.989	100	360.965	100	378.951	100	400.401	100	393.775	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penduduk Kabupaten Purworejo berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal ini selaras dengan dominannya PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dua lapangan usaha utama lain yang mendominasi ialah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut dapat dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku untuk mengukur produktivitasnya. Didapatkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada sektor industri pengolahan (Rp5.339.656,25 per bulan per jiwa) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (Rp3.016.364,87 per bulan per jiwa) dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Rp2.621.171,61 per bulan per jiwa). Selanjutnya kondisi lapangan pekerjaan utama ini juga dapat dibandingkan dengan daerah sekitarnya, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Kab. Purworejo		Prov. Jawa Tengah		Kab. Kebumen		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	128.120	32,54	4.557.468	24,78	192.791	31,13	193.601	44,92	268.519	34,37
2. Pertambangan Dan Penggalian	402	0,10	84.993	0,46	5.276	0,85	2.359	0,55	3.198	0,41
3. Industri Pengolahan	65.397	16,61	4.025.810	21,89	141.251	22,81	57.722	13,39	136.441	17,47
4. Konstruksi	28.538	7,25	1.482.142	8,06	39.267	6,34	32.378	7,51	48.285	6,18
5. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	83.401	21,18	3.565.465	19,39	117.210	18,92	80.517	18,68	165.605	21,20
6. Transportasi Dan Pergudangan	7.669	1,95	512.175	2,79	11.578	1,87	9.161	2,13	10.299	1,32





Lapangan Pekerjaan Utama	Kab. Purworejo		Prov. Jawa Tengah		Kab. Kebumen		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	24.106	6,12	1.405.347	7,64	37.870	6,11	14.161	3,29	44.146	5,65
8. Jasa Keuangan Dan Asuransi	1.379	0,35	201.499	1,10	3.241	0,52	3.856	0,89	6.979	0,89
9. Jasa Perusahaan	966	0,25	177.173	0,96	3.150	0,51	1.910	0,44	3.575	0,46
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	10.896	2,77	357.097	1,94	11.561	1,87	2.989	0,69	17.064	2,18
11. Jasa Pendidikan	22.000	5,59	749.980	4,08	24.072	3,89	9.218	2,14	24.387	3,12
12. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	4.426	1,12	249.877	1,36	7.870	1,27	4.840	1,12	7.695	0,99
13. Jasa Lainnya	13.034	3,31	815.855	4,44	20.556	3,32	14.775	3,43	38.427	4,92
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik Dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang; Informasi Dan Komunikasi; Real Estat)	3.441	0,87	205.578	1,12	3.675	0,59	3.523	0,82	6.575	0,84
Jumlah	393.775	100	18.390.459	100	619.368	100	431.010	100	781.195	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara umum, karakteristik penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama hampir sama di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten sekitarnya, didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (>24%), begitu pula lapangan pekerjaan utama mayoritas kedua dan ketiga, antara sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dilihat dari produktivitasnya, Kabupaten Purworejo memiliki daya saing yang cukup tinggi di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (Rp3.016.364,87 per bulan per jiwa) jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (<Rp2.871.541,00 per bulan per jiwa), namun masih lebih rendah bila dibandingkan tingkat Provinsi Jawa Tengah (Rp3.862.613,00 per bulan per jiwa), sehingga perlu mengambil pembelajaran daerah lain di provinsi Jawa Tengah yang nilai produktivitasnya tinggi. Sektor industri pengolahan Kabupaten Purworejo tingkat produktivitasnya tergolong rata-rata (Rp5.339.656,25 per bulan per jiwa), namun produktivitas sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Rp2.621.171,61 per bulan per jiwa) termasuk rendah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti Kabupaten Kebumen (Rp3.416.568,00 per bulan per jiwa) dan Kabupaten Wonosobo (Rp3.728.361,00 per bulan per jiwa). Hal ini menunjukkan daya saing perdagangan Kabupaten Purworejo masih cukup rendah pada tingkat regional.

Selanjutnya, BPS melalui Sakernas juga mengukur penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama, dibagi atas penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/ karyawan/ pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, serta pekerja keluarga/ tak





dibayar. Penggambaran mengenai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama Kabupaten Purworejo selama rentang 2018-2023 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo

Status Pekerjaan Utama	2019		2020		2021		2022		2023	
	jiwa	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Berusaha sendiri	49.722	13,77	54.702	14,44	67.698	16,91	88.622	22,51	135.972	30,14
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	93.937	26,02	103.647	27,35	104.037	25,98	99.456	25,26	86.627	19,20
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	12.342	3,42	6.469	1,71	7.836	1,96	12.814	3,25	10.823	2,40
4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai	106.480	29,50	95.435	25,18	111.442	27,83	91.452	23,22	124.212	27,54
5 Pekerja bebas di pertanian	21.189	5,87	20.881	5,51	16.829	4,20	13.141	3,34	40.377	8,95
6 Pekerja bebas di non pertanian	23.983	6,64	20.192	5,33	23.129	5,78	23.448	5,95		
7. Pekerja keluarga/ tak dibayar	53.312	14,77	77.625	20,48	69.430	17,34	64.842	16,47	53.094	11,77
Jumlah	360.965	100	378.951	100	400.401	100	393.775	100	451.105	100

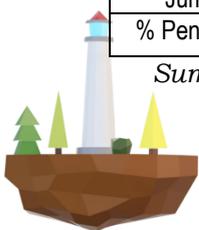
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Secara umum, Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan penduduk yang bekerja dalam 5 tahun terakhir, rata-rata sebesar 5,89%. Peningkatan tertinggi pada penduduk berusaha sendiri, sebesar 29,53% sehingga menjadi 135.972 jiwa di tahun terakhir (2023). Adapun penurunan terjadi pada penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (-1,65%). Kondisi ini juga dapat dibandingkan dengan daerah lain, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Kab. Purworejo		Prov. Jawa Tengah		Kab. Kebumen		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Berusaha sendiri	135.972	30,14	4.639.252	23,21	184.455	23,91	134.824	27,29	165.216	20,75
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	86.627	19,20	2.976.742	14,89	149.669	19,40	91.158	18,45	156.538	19,66
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10.823	2,40	591.544	2,96	22.424	2,91	12.126	2,45	19.018	2,39
4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai	124.212	27,54	7.326.685	36,65	218.047	28,26	122.569	24,81	169.951	21,34
5 Pekerja bebas di pertanian	40.377	8,95	2.170.136	10,86	75.180	9,74	58.243	11,79	69.259	8,70
6 Pekerja bebas di non pertanian										
7. Pekerja keluarga/ tak dibayar	53.094	11,77	2.284.516	11,43	121.807	15,79	75.165	15,21	116.325	14,61
Jumlah	451.105	100	19.988.875	100	771.582	100	494.085	100	796.325	100
Jumlah Penduduk	788.265		37.540.962		1.397.555		909.664		1.330.656	
% Penduduk Bekerja	57,23		53,24		55,21		54,32		59,84	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024





Kondisi penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 secara umum didominasi oleh buruh/ karyawan/ pegawai (36,65%), hal ini juga terjadi di Kabupaten Kabupaten Kebumen (28,26%) dan Kabupaten Magelang (21,34%). Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo yang didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri, masing-masing sebesar 30,14% dan 27,29%. Dilihat dari proporsi penduduk yang bekerja terhadap total penduduk, seluruh daerah memiliki penduduk yang bekerja >50%. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang sedang mengalami bonus demografi sehingga perlu dioptimalkan sebelum angka ketergantungan lebih tinggi dari 50%.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Berikut data *coverage* perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didapatkan dari BPS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.39 Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Segmentasi	Potensi Semesta	2022		2023	
			jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerima Upah	85.793	73.521	85,7	78.533	91,5
2	Bukan Penerima Upah	146.269	11.531	7,9	12.078	8,3
	Total	232.062	85.052	36,7	90.611	39,0

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Potensi semesta terpetakaan yang bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 232.062 jiwa. Pada tahun 2022, sejumlah 85.052 jiwa Kabupaten Purworejo telah memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaketeneau (36,7%). Jumlah ini meningkat pada tahun 2023, menjadi 39,0% atau sebanyak 90.611 jiwa. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak

2.3.1.4. Perindustrian

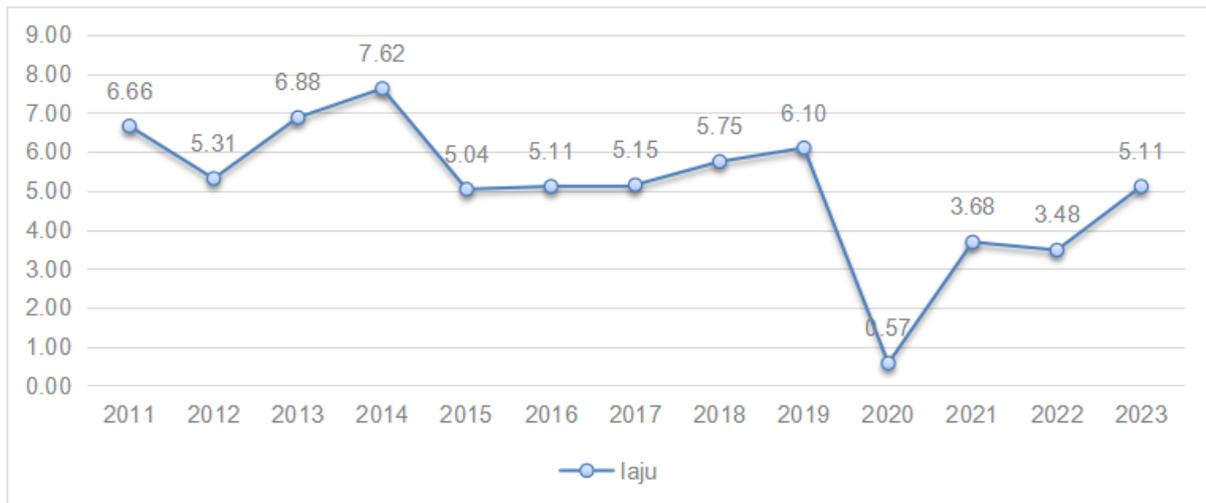
Perindustrian di Kabupaten Purworejo memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk struktur perekonomian dan meningkatkan laju perekonomian. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten





Purworejo merupakan penyumbang PDRB terbesar ke-2 setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Berdasarkan kontribusinya, sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan angka yang relatif meningkat dari tahun 2011 (17,48 persen) hingga tahun 2023 (19,81 persen). Dari tahun 2011 hingga tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo terhadap PDRB meningkat sebesar 1,07 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif. Meskipun pada tahun 2020, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan turut berkontraksi dan termasuk cukup tangguh karena tidak menyentuh angka minus. Hal ini disebabkan mayoritas industri di Kabupaten Purworejo merupakan industri skala mikro, kecil, dan menengah, yang bahan bakunya bersumber pada sektor pertanian sehingga pengaruh pembatasan aktivitas dapat dikendalikan.



Gambar 2.66 Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

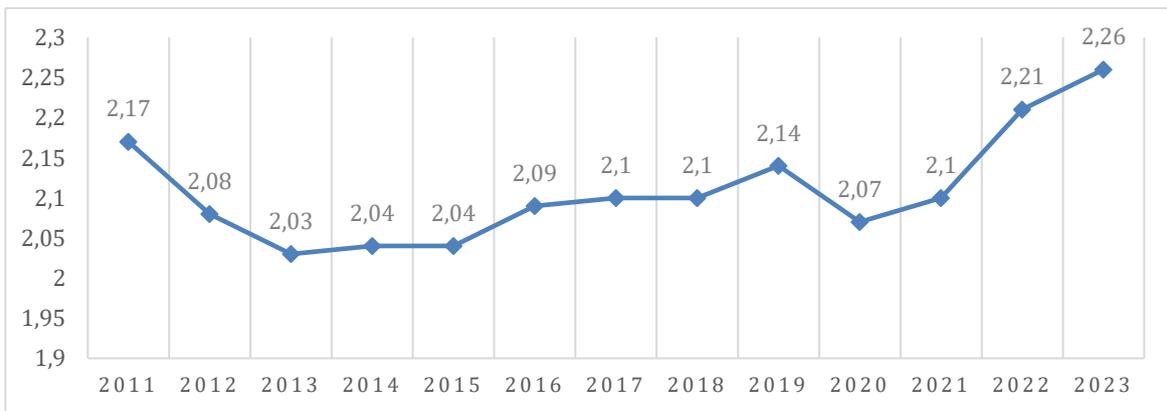
Meskipun demikian, tingginya laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder belum mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor primernya yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meskipun IKM yang ada didominasi oleh industri agro. Hal tersebut disebabkan industri agro di Kabupaten Purworejo masih berskala kecil dan rendah produktivitasnya dan belum berkembangnya kemitraan antara industri agro besar dan sedang dengan industri agro berskala kecil dan rumah tangga, lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir (*backward dan forward linkages*). Industri agro yang ada di Kabupaten Purworejo masih menggunakan teknologi dan sarana prasarana sederhana dalam pengolahan produknya serta mengalami keterbatasan kemampuan dalam manajemen usahanya. Selain itu, belum optimalnya dukungan kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri dalam pengembangan produk, peningkatan produktivitas, dan inovasi teknologi juga mempengaruhi belum optimalnya peran sektor industri pengolahan dalam mengakselerasi sektor primer di Kabupaten Purworejo.





2.3.1.5. Pariwisata

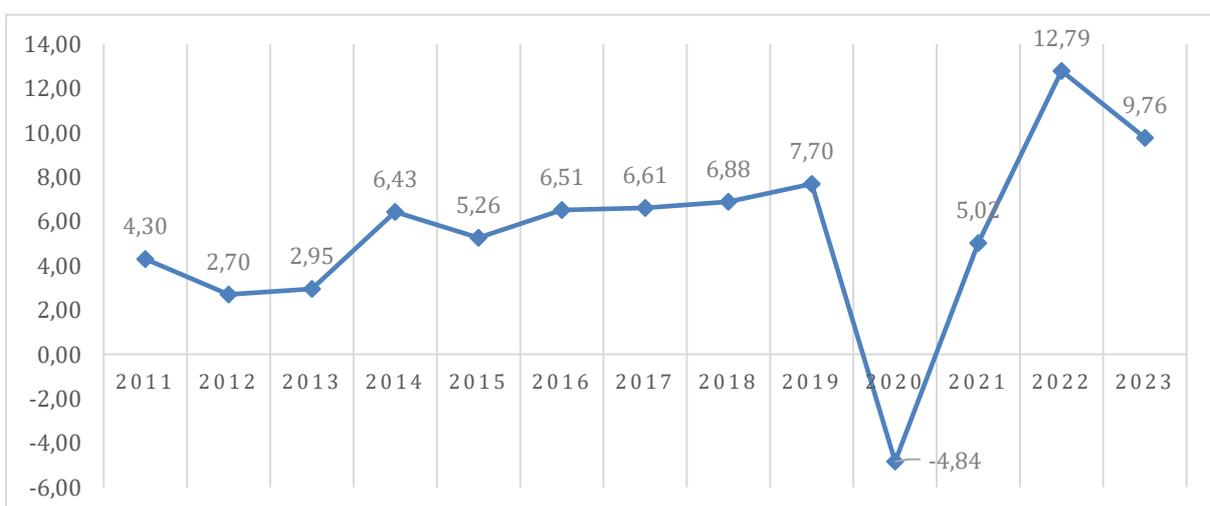
Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Purworejo. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Kinerja sektor pariwisata dapat dilihat dalam PDRB melalui sektor ekonomi yang paling terdampak langsung yaitu Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Berikut merupakan data rasio sektor akomodasi makan dan minum di Kabupaten Purworejo dari tahun 2011-2023.



Gambar 2.67 Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap total PDRB dari tahun 2011 (2,26 persen) hingga tahun 2023 (2,26 persen) tidak menunjukkan kontribusi yang cukup besar namun laju pertumbuhannya pada tahun 2023 menunjukkan posisi yang lebih baik jika dibandingkan tahun awal. Bahkan laju pertumbuhan pada sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Purworejo lebih tinggi jika dibandingkan laju pertumbuhan sektor lainnya yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.68 Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

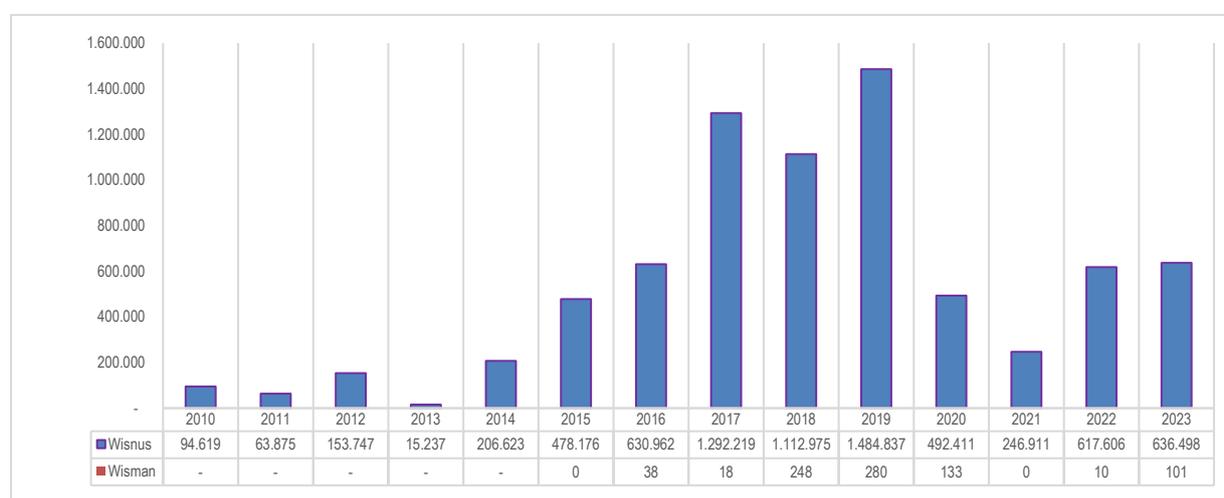
Meskipun demikian, pada tahun 2020, laju pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi cukup dalam yang terpengaruh dari pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata





sebagai salah satu penggerak dari Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak cukup tangguh dalam menghadapi pandemi covid-19. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum yang rendah menunjukkan bahwa peranan sektor pariwisata dalam perekonomian belum signifikan yang disebabkan rendahnya pengeluaran pengunjung wisata pada sektor akomodasi dan makan minum. Selain itu, kunjungan wisata juga didominasi oleh pengunjung dalam daerah/ wisatawan lokal yang relatif kecil multiplier efeknya terhadap sektor akomodasi dan makan minum. Rendahnya pengeluaran pada sektor akomodasi dan makan minum juga ditunjukkan dengan rendahnya tingkat penghunian kamar hotel.

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sektor pariwisata. Berikut data kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-2023.



Gambar 2.69 Kunjungan Wisatawan Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

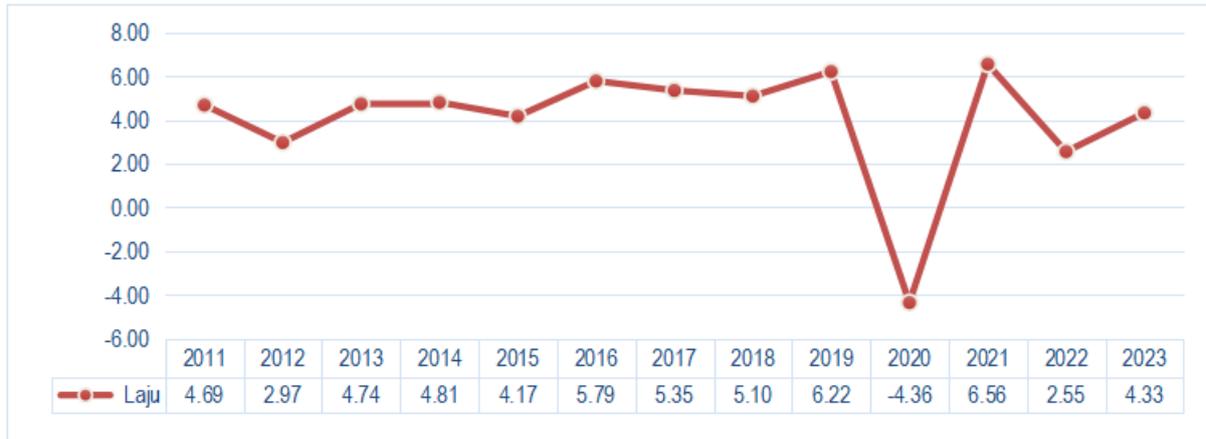
Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 (94.619 wisatawan) hingga tahun 2023 (636.608 wisatawan) relatif meningkat dengan wisatawan terbanyak pada tahun 2019 (1.484.837 wisatawan). Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan wisatawan yang cukup besar di Kabupaten Purworejo. Penurunan wisatawan tersebut disebabkan oleh penutupan beberapa destinasi wisata akibat kebijakan pembatasan kegiatan karena pandemi covid-19. Pada tahun 2023, kunjungan wisatawan kembali meningkat seiring telah terkendalinya pandemi covid-19 di Kabupaten Purworejo. Meskipun demikian, kunjungan wisata didominasi oleh pengunjung dari dalam daerah/ wisatawan lokal yang relatif kecil multiplier efeknya dalam perekonomian. Selain itu, pengunjung wisata mancanegara jumlahnya sangat rendah jika dibandingkan total kunjungan. Rendahnya kunjungan wisatawan dari luar daerah dan mancanegara dapat terjadi karena belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata terutama pada desa-desa wisata, terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas pengelolaan serta penerapan pariwisata berkelanjutan, sarana promosi dan informasi pariwisata yang belum sesuai dengan tren/ perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.





2.3.1.6. Perdagangan

Sektor Perdagangan di Kabupaten Purworejo juga memiliki peranan yang relatif besar dalam membentuk struktur perekonomian dan meningkatkan laju perekonomian. Berikut laju PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023:



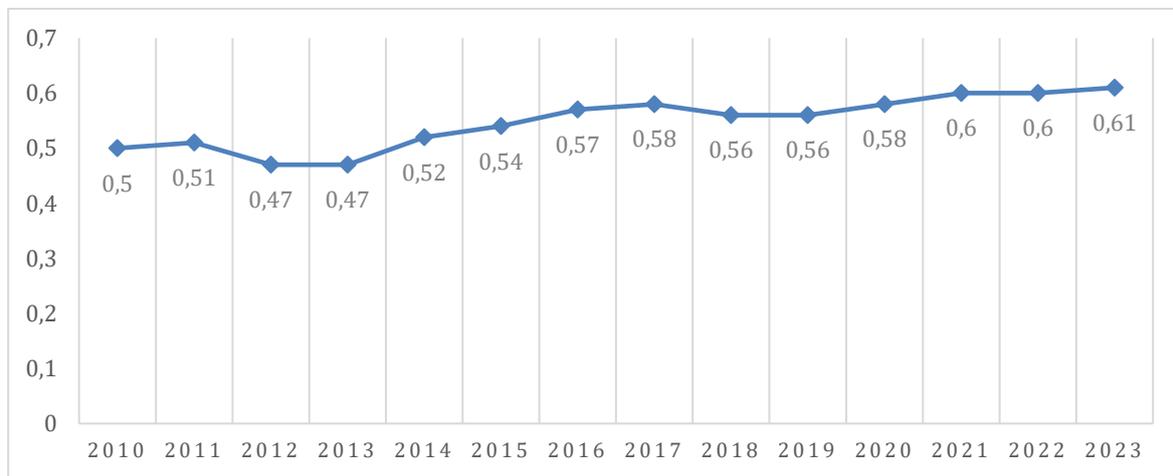
Gambar 2.70 Laju PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Dari tahun 2011-2023 kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo relatif menurun sebesar 1,09 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhannya dari tahun 2011 (4,69 persen) cenderung menurun pada tahun 2023 (4,33 persen). Pada tahun 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan pada sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo. Penurunan tersebut disebabkan oleh kegiatan pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi covid-19. Meskipun demikian pada tahun 2021, sektor ini kembali meningkat cukup pesat karena pada tahun 2021 pemanfaatan platform perdagangan secara online pesat digunakan di Kabupaten Purworejo. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo disebabkan meningkatnya transaksi perdagangan online yang tokonya berada di luar Kabupaten Purworejo, sebagian besar barang yang diperdagangkan merupakan komoditas pertanian, sehingga saat kontribusi sektor pertanian menurun maka akan berpengaruh terhadap kontribusi pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, perlunya mendorong laju sektor perdagangan yang memiliki peranan nomor tiga setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan.

Selain itu, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo, ekonomi Kabupaten Purworejo masih tergerus dengan tingginya nilai impor yang besarnya sampai dengan tahun 2022 masih di atas ekspor Purworejo. Angka ini ditunjukkan dengan data *Trade Balance*.





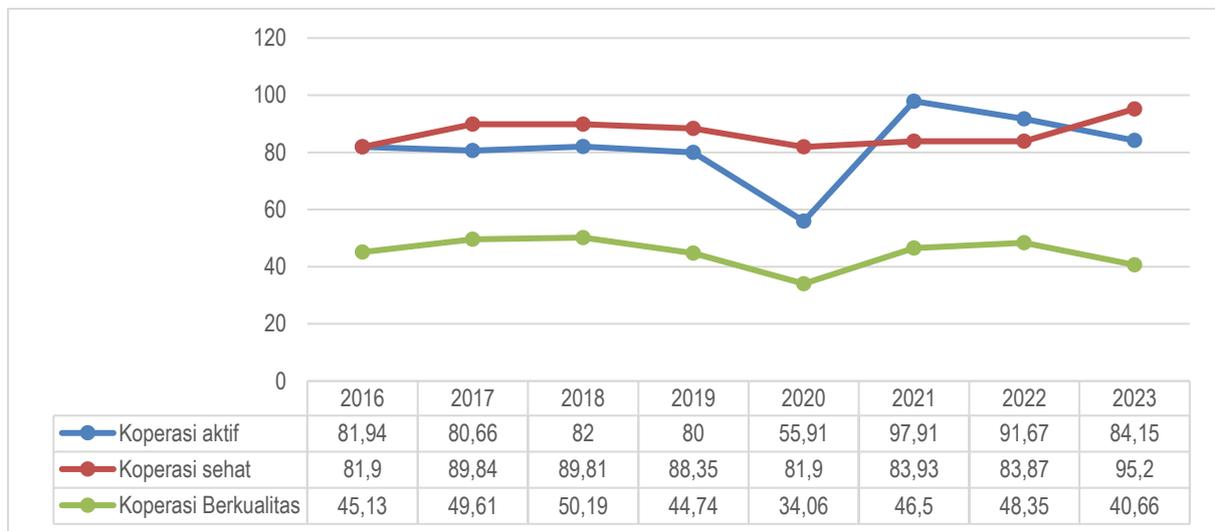
Gambar 2.71 Trade Balance Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Perkembangan *trade balance* Purworejo sejak tahun 2010 (0,5) menunjukkan peningkatan sedikit demi sedikit sampai dengan tahun 2023 (0,61). Semakin nilainya mendekati angka 1 berarti bahwa besaran ekspor semakin meningkat dan mulai mendekati besarnya impor. Hal tersebut juga didukung dengan nilai net ekspor yang selalu bernilai negatif di Kabupaten Purworejo. Nilai net ekspor yang negatif menunjukkan nilai ekspor antardaerah lebih kecil dari nilai impornya, atau dapat dikatakan bahwa perdagangan antardaerah di Kabupaten Purworejo dengan kabupaten atau provinsi lain belum pernah mengalami surplus. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat Purworejo masih sangat bergantung pada barang-barang dari luar Purworejo khususnya produk kebutuhan barang-barang pribadi maupun rumah tangga lainnya. Lebih rendahnya impor barang dibandingkan ekspor barang antar daerah di Kabupaten Purworejo disebabkan nilai barang yang diekspor lebih rendah jika dibandingkan barang yang diimpor. Mayoritas barang yang diekspor oleh Kabupaten Purworejo merupakan bahan mentah (hasil-hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan) sehingga bernilai lebih rendah jika dibandingkan barang-barang yang diimpor.

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Berikut capaian kinerja perkoperasian di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023.





Gambar 2.72 Capaian Kinerja Perkoperasian di Kabupaten Purworejo

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2023 menunjukkan peningkatan meskipun tidak cukup signifikan. Naik turunnya jumlah koperasi yang ada disebabkan adanya koperasi aktif menjadi tidak aktif sehingga dilakukan pembubaran. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif akibat lesunya perekonomian yang disebabkan pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi covid-19. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2021 jumlahnya terus naik hingga tahun 2022, namun turun lagi pada tahun 2023. Manajemen kelembagaan koperasi merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan dan keaktifan koperasi di Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya manajemen kelembagaan koperasi adalah masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan pembiayaan dari sisi internal atau kemampuan anggotanya saja dan belum memanfaatkan akses pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi, terbatasnya kemampuan/ keterampilan SDM perkoperasian, koperasi kalah bersaing dengan badan usaha lainnya, dan rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, sehingga tidak membayar simpanan wajib. Selain itu, menurunnya koperasi yang berkualitas di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh keterbatasan koperasi untuk menjadi konsolidator atau agregator pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usahanya yang disebabkan oleh koperasi yang ada di Kabupaten Purworejo lebih banyak bergerak di bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi salah satunya adalah volume usaha. Peranan volume usaha dalam pengembangan koperasi antara lain membantu menciptakan kemandirian koperasi, sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi, sebagai salah satu kunci keberhasilan koperasi, sebagai salah satu faktor yang berdampak pada aktif atau tidak aktifnya koperasi, serta volume usaha merupakan nilai yang digunakan dalam perhitungan Asset Turn Over. Peran-peran volume usaha tersebut menunjukkan bahwa perkembangan volume usaha sangat berpengaruh pada pengembangan koperasi menjadi koperasi yang berhasil atau gagal terutama dari sisi finansial koperasi. Volume usaha koperasi di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 sampai tahun 2023:





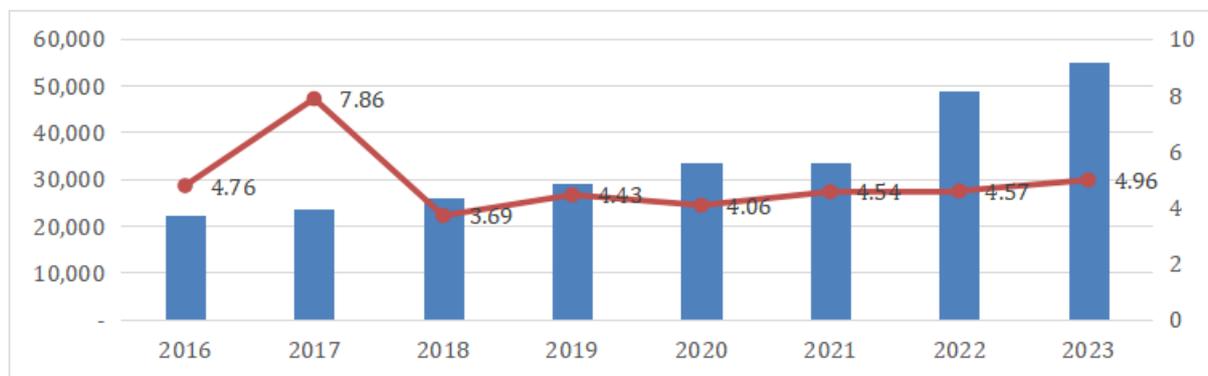
Tabel 2.40 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)	327.181	451.368	295.087
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	19.602.720	21.352.540	23.188.030
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,67	2,11	1,27

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir volume usaha koperasi di Kabupaten Purworejo meningkat. Meskipun meningkat, volume usaha koperasi di Kabupaten Purworejo tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan. Berikut gambaran jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purworejo dan yang UMKM yang meningkat omzetnya.



Gambar 2.73 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2023

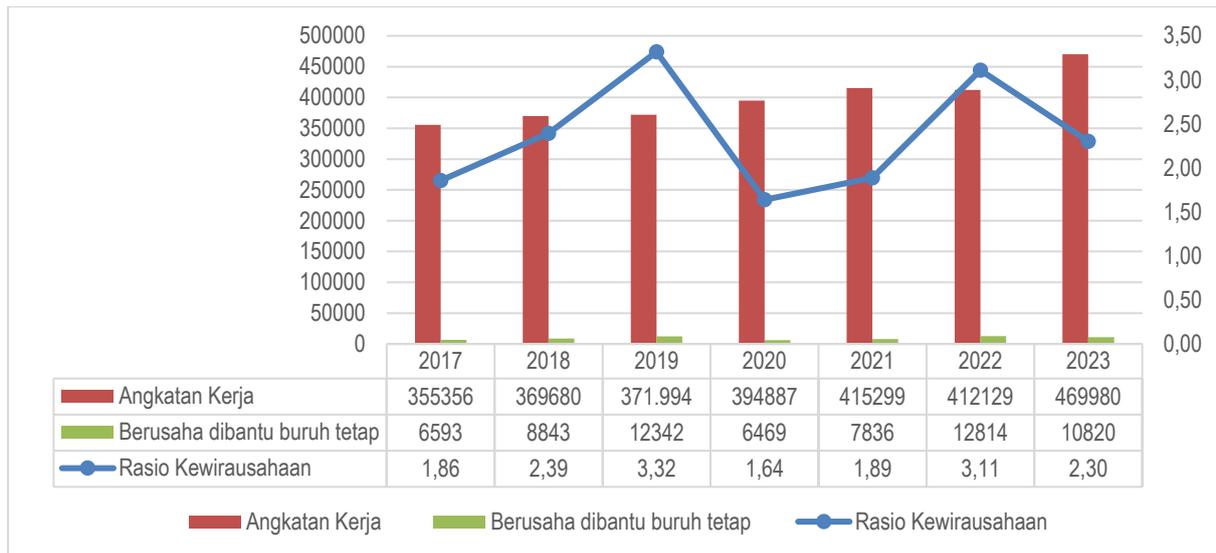
Jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2016-2023. UMKM di Kabupaten Purworejo didominasi oleh UMKM Kuliner dan UMKM Kriya/ Kerajinan. Meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Purworejo cukup besar, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah UMKM yang meningkatkan omzetnya. Hal tersebut disebabkan rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar, kurangnya inovasi produk serta lemahnya jaringan pemasaran, pelaku UMKM masih kesulitan membuka akses pasar, sebagian besar UMKM merupakan usaha informal yang memiliki pekerja berkeahlian rendah dan banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, serta rendahnya penggunaan teknologi dan inovasi





dalam pengembangan usaha. UMKM yang berhasil meningkatkan omzetnya adalah UMKM yang bergerak di bidang perdagangan dan kuliner. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membina UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan omzetnya.

Indikator lain yang dapat menggambarkan urusan koperasi dan UKM adalah rasio kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi. Kewirausahaan atau entrepreneurship akan mendorong inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Berikut data rasio kewirausahaan Kabupaten Purworejo dari tahun 2017 hingga tahun 2023:



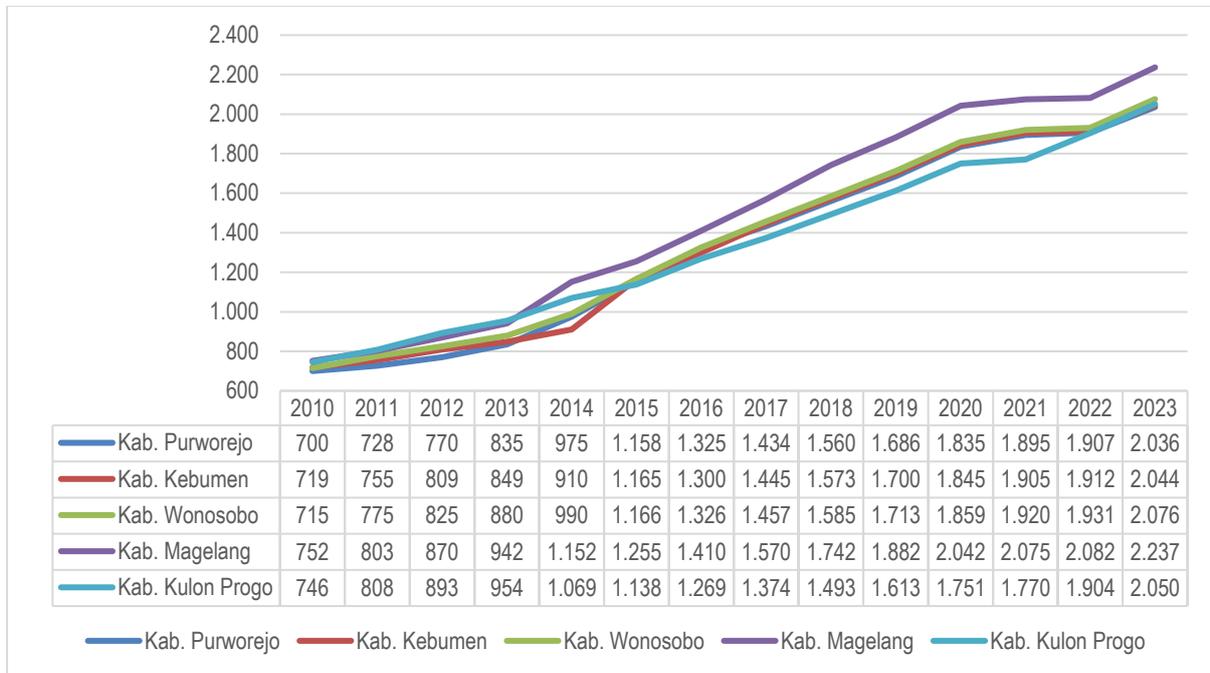
Gambar 2.74 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Jumlah wirausaha di Kabupaten Purworejo dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan rata-rata 14,36 per tahun. Sedangkan rasionya cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Meskipun demikian rasio kewirausahaan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 (2,3 persen) lebih rendah jika dibandingkan rasio kewirausahaan secara nasional yaitu 3,47 persen. Rendahnya wirausaha di Indonesia termasuk Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas wirausaha, dan kendala mengakses modal. Survei Bank Indonesia (BI) 2022 menunjukkan sebagian besar UMKM di Indonesia lebih memilih usahanya tetap berskala kecil dan informal. Sedangkan mengembangkan usaha dan mendaftarkan usaha menjadi formal akan membuka akses ke pinjaman modal maupun insentif pemerintah.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan standar yang ditetapkan pemerintah untuk setiap kabupaten agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Dalam arti lain, UMK adalah nominal upah yang diterima karyawan berdasarkan daerah mereka dipekerjakan, sehingga besaran UMK berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Upah minimum ditetapkan setahun sekali. Grafik berikut ini menunjukkan UMK di Kabupaten Purworejo dan kabupaten sekitarnya, dari tahun 2010 hingga 2023.





Gambar 2.75 Upah Minimum Kabupaten Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (ribu rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara *series*, dapat diamati bahwa keseluruhan daerah mengalami kenaikan UMK, dari tahun 2010 hingga 2023. Kabupaten Purworejo (0,087%) relatif mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Kebumen (0,085%), Kabupaten Wonosobo (0,086%), Kabupaten Kulon Progo (0,081%), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Magelang (0,089%). Hal ini mengindikasikan kinerja investasi Kabupaten Purworejo relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

Hal yang menyesakkan adalah di tahun terakhir (2023), Kabupaten Purworejo menjadi daerah dengan UMK paling rendah (Rp2.035.890,00) dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sempat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo selama kurun 2015-2022, akhirnya disalip di tahun terakhir (Rp2.050.447,00). Tingginya peningkatan UMK Kabupaten Kulon Progo di tahun terakhir disebabkan karena tingginya investasi akomodasi dan makan minum sebagai pendukung dari Yogyakarta International Airport. Di samping itu, Kabupaten Magelang menjadi daerah dengan UMK paling tinggi (Rp2.236.777,00). Hal ini juga tidak luput dari adanya proyek strategis nasional Badan Otorita Borobudur yang didukung peningkatan investasi di sekitarnya. Sebagai kawasan penyangga beberapa pusat perekonomian strategis nasional, Kabupaten Purworejo belum dapat mengambil manfaat sehingga UMK masih rendah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Tabel berikut ini menunjukkan rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo.





Tabel 2.41 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian Komponen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah (juta Rp)	77.649	74.189	84.227	100.654	102.276
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,416	0,398	0,430	0,471	0,441

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2024

Pajak daerah maupun PDRB di Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, di luar kondisi Covid-19. Retara pertumbuhan pajak daerah sebesar 7,55% sementara rerata pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Purworejo sebesar 5,65%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat tren peningkatan pajak daerah terhadap PDRB, meskipun sedikit menurun di tahun terakhir, sebesar 0,441% di tahun terakhir (2023).

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini data pihak ketiga pada BUMD di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.42 Dana Pihak Ketiga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	BUMD	Dana Pihak Ketiga (juta Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank Jateng	917.057	1.008.741	1.225.568	1.053.968	1.007.601
2	PT BKK Purworejo	115.465	113.617	122.118	125.750	126.588
3	PT BKK Jateng Cab. Purworejo	11.251	10.176	10.537	10.612	9.280
4	Bank Purworejo	-	-	-	-	-
5	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun terakhir (2023), tercatat bahwa dana pihak ketiga di Bank Jateng merupakan yang tertinggi, sebesar Rp1.007.601.385.667,00. Sementara itu, pada PT BKK Purworejo terdapat dana pihak ketiga sebesar Rp126.587.594.000,00 dan PT BKK Jateng Cab. Purworejo sebesar 10.612.385.000,00 pada tahun 2023. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan





Rakyat (BPR) Bank Purworejo pada awal tahun 2024, sehingga data mengenai dana pihak ketiga di BPR ini tidak didapatkan.

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini menunjukkan data kredit pada BUMD di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.

Tabel 2.43 Data Kredit Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	BUMD	Data Kredit (juta Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank Jateng	1.026.522	1.116.291	1.162.106	1.258.707	1.325.713
2	PT BKK Purworejo	97.919	88.264	94.626	98.504	93.222
3	PT BKK Jateng Cab. Purworejo	11.251	10.176	10.537	10.612	9.280
4	Bank Purworejo	-	-	-	-	-
5	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Seperti halnya dana pihak ketiga, data kredit di Bank Jateng tercatat terbesar dalam lima tahun terakhir, sebesar Rp1.325.713.398.574,00 pada tahun 2023. Sementara itu, data kredit di PT BKK Purworejo sebesar Rp93.221.830.000,00 dan PT BKK Jateng Cab. Purworejo sebesar Rp9.279.830.000,00. Selaras dengan dana pihak ketiga, data kredit pada Bank Purworejo tidak dapat diperoleh karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo pada awal tahun 2024.

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Berikut ini adalah data ROA pada 4 BUMD di Kabupaten Purworejo.



**Tabel 2.44 Return on Asset (ROA) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023**

No	BUMD	Return on Asset (ROA)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)					
	<i>Total Laba Bersih</i>	-542	175	-2.205	-893	-426
	<i>Total Aset</i>	3.782	6.147	4.810	2.748	2.705
	ROA (%)	-14,35	2,84	-45,83	-32,49	-15,77
2	Perumda Graha Husada Medika					
	<i>Total Laba Bersih</i>	495	512	320	547	718
	<i>Total Aset</i>	5.895	5.928	6.264	6.726	7.065
	ROA (%)	8,40	8,64	5,11	8,14	10,16
3	PDAM Tirta Perwita Sari					
	<i>Total Laba Bersih</i>	3.179	3.277	3.371	3.995	4.831
	<i>Total Aset</i>	33.933	39.893	39.681	42.015	42.442
	ROA (%)	9,37	8,22	8,50	9,51	11,38
4	Bank Purworejo					
	<i>Total Laba Bersih</i>	5.169	3.241	-7.044	501	-19.188
	<i>Total Aset</i>	238.776	277.343	283.695	26.594	7.358
	ROA (%)	2,16	1,17	-2,48	0,25	-9,16
	Rata-Rata Laba Bersih (di luar Bank Purworejo)	1.044	1.321	495	1.216	1.707
	Rata-Rata Jumlah Aset (di luar Bank Purworejo)	14.537	17.323	16.919	17.164	17.404
	Rata-Rata ROA (%)	1,14	6,57	-10,74	-4,95	1,93

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

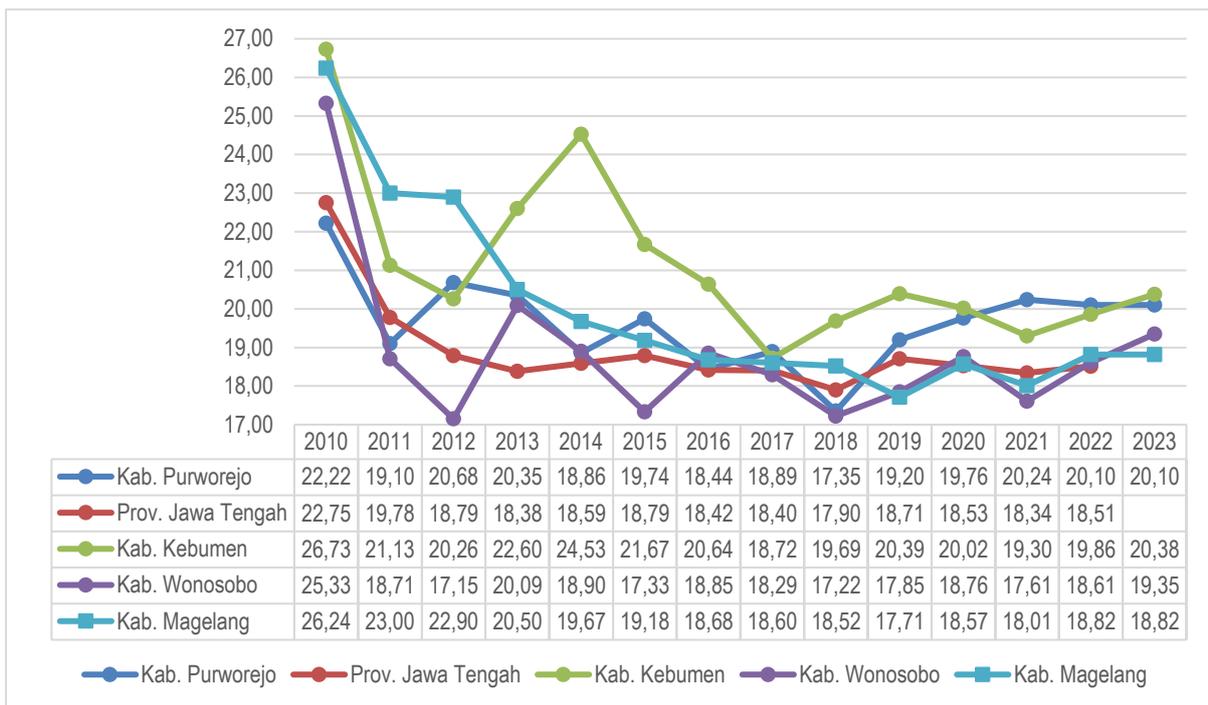
Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sempat mengalami defisit pada 2019 dan puncaknya di 2021, mencapai -Rp2.204.706.174,00. Namun pada dua tahun terakhir, kondisi PDAU mengalami perbaikan. Saat ini PDAU membutuhkan penyertaan modal daerah Kabupaten Purworejo supaya BUMD ini menjadi sehat. Kondisi defisit juga dialami Bank Purworejo, pada tahun terakhir (2023) laba bersih berada pada minus Rp19.188.397.000,00. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo pada awal tahun 2024. Sementara itu, dua BUMD lain yakni Perumda Graha Husada Medika dan PDAM Tirta Perwita Sari berada pada kondisi baik dan ROA-nya relatif selalu mengalami peningkatan. Secara rata-rata, meskipun sempat berada di angka -10,74% di tahun 2021, kondisi ROA BUMD di Kabupaten Purworejo semakin membaik, sebesar 1,93% pada tahun terakhir (2023). Diharapkan ke depan kondisi ROA seluruh BUMD di Kabupaten Purworejo dapat meningkat.

Terdapat data mengenai distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia, terpublikasi oleh BPS. Distribusi pengeluaran menunjukkan





ketimpangan pendapatan dengan mengelompokkan penduduk dalam tiga kelompok yaitu 40% penduduk dengan pendapatan bawah/ rendah, 40% penduduk dengan pendapatan tengah/ sedang, dan 20% penduduk dengan pendapatan atas/ tinggi. Ketimpangan diukur melalui persentase pengeluaran dari kelompok yang berpendapatan 40% terbawah dibandingkan dengan total pengeluaran seluruh penduduk. Jika di bawah 12% maka ketimpangan tinggi, 12%-17% menunjukkan ketimpangan sedang, dan diatas 17% menunjukkan ketimpangan rendah. Berikut distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya.



Gambar 2.76 Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik di atas dari tahun 2010-2023, pengeluaran kelompok penduduk 40% berpendapatan rendah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo maupun kabupaten sekitarnya selalu berada di atas 17%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan daerah ini berada pada tingkat ketimpangan rendah. Kabupaten Purworejo memiliki nilai pada tahun terakhir sebesar 20,10%, lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (18,91%), Kabupaten Wonosobo (19,35%), serta Kabupaten Magelang (18,82%), namun lebih rendah dari Kabupaten Kebumen (20,38%).

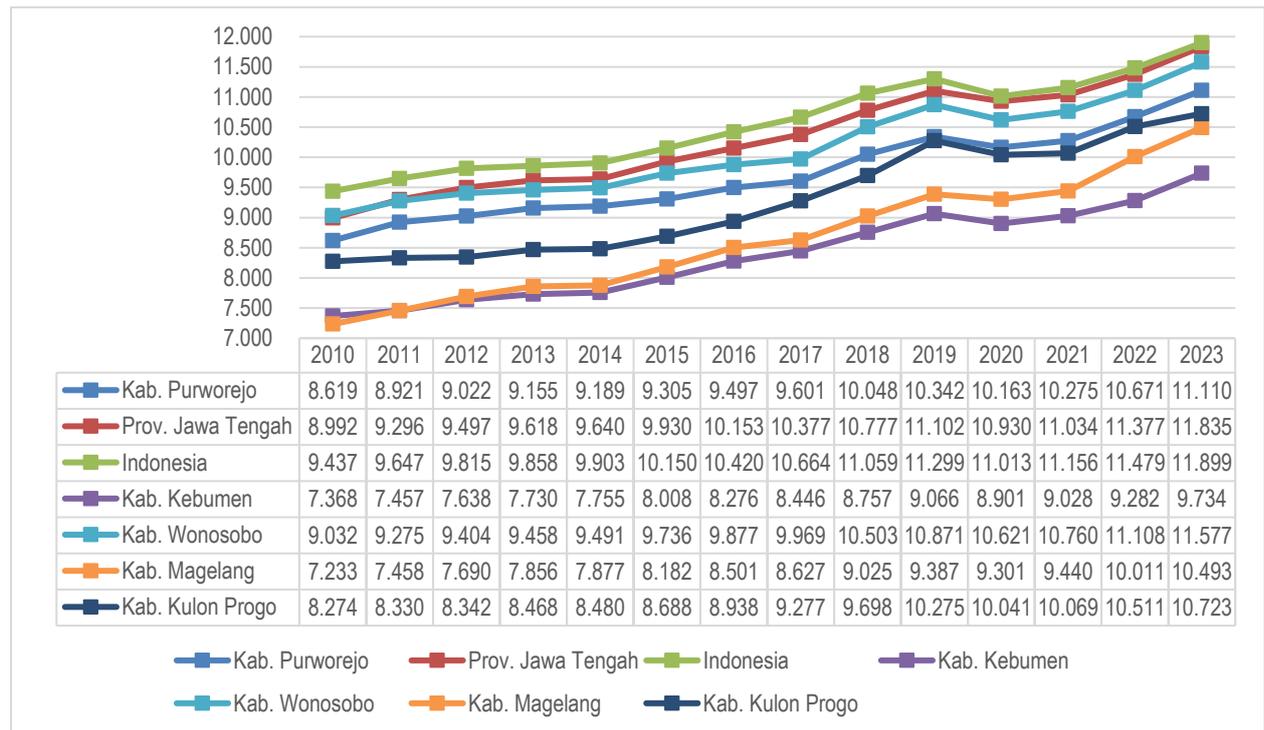
Kondisi tingkat ketimpangan tertinggi rata-rata terjadi pada tahun 2018. Kabupaten Purworejo pada tahun ini, ditunjukkan bahwa distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah berdasarkan Kriteria bank dunia berada pada angka 17,35%, sehingga perlu diantisipasi ke depannya apabila terulang. Namun hal positif terjadi pada kurun waktu 5 tahun setelahnya. Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi ketimpangan yang semakin membaik, dan berada dalam kondisi paling baik dibandingkan dengan daerah lain (kecuali Kebumen) pada tahun terakhir (2023) sebesar





20,10%. Hal ini didorong oleh pembangunan perekonomian Kabupaten Purworejo yang bersifat inklusif.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, serta kabupaten sekitar dapat diamati pada grafik berikut.



Gambar 2.77 Pengeluaran Per Kapita Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2022 (ribu rupiah per orang per tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara *trendline*, Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh daerah pada umumnya mengalami peningkatan pengeluaran per kapita, tertinggi pada tahun terakhir (2023). Penurunan sempat terjadi pada tahun 2020 untuk seluruh daerah, disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19.

Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan daerah lain, secara konsisten pengeluaran per kapitanya berada di rata-rata. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo mencapai 11.110 ribu rupiah per orang per tahun, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (11.835 ribu rupiah per orang per tahun) Indonesia (11.899 ribu rupiah per orang per tahun), serta Kabupaten Wonosobo (11.577 ribu rupiah per orang per tahun), namun lebih tinggi dibandingkan 3 kabupaten lain di sekitarnya (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kulon Progo). Tidak dipungkiri bahwa di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dibandingkan di tingkat regional maupun Indonesia. Hal ini disebabkan karena pola hidup masyarakat yang sederhana dan jauh dari kota metropolitan seperti Jakarta dan juga Semarang.





Hal yang positif dilihat dari perkembangannya, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita selama 13 tahun terakhir di Kabupaten Purworejo (1,99%) lebih tinggi dari Indonesia (1,81%). Hal ini dapat menjadi ukuran bahwa taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Purworejo semakin membaik, berkat dari kebijakan pembangunan di daerah. Namun pertumbuhan Kabupaten Purworejo masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (2,15%).

2.3.1.7. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Dalam perekonomian nasional besaran investasi yang muncul dalam sebuah wilayah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB menunjukkan investasi secara keseluruhan sementara itu dalam pemerintahan yang tercatat dalam data investasi pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun asing. Penanaman modal/ investasi yang meningkat dapat mendorong penambahan kapasitas produksi sehingga terjadi pembukaan lapangan kerja, yang akhirnya berimbas kepada melesatnya konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut data PMTB di Kabupaten Purworejo tahun 2011-2023:

Tabel 2.45 Laju dan Proporsi PMTB Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju PMTB	7,34	8,71	7,84	3,23	3,92	5,46	6,87	6,63	5,05	-6,71	7,28	3,64	3,95
Proporsi PMTB	24,29	25,4	25,44	25,91	26,43	26,13	26,54	27,5	27,88	26,09	26,91	26,39	25,79

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Dari tahun 2011-2023 laju pertumbuhan PMTB terjadi penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi 6,71 persen, disebabkan oleh dampak pandemi yang berpengaruh terhadap nilai investasi. Meskipun pada tahun 2023 telah meningkat, namun jika dibandingkan sebelum terjadinya pandemi, PMTB Kabupaten Purworejo pada saat ini belum mampu kembali pada masa pra pandemi. Sedangkan di sisi kontribusi, pengeluaran untuk kapital (PMTB) di Kabupaten Purworejo berperan cukup besar dimana berada pada posisi ke-2 setelah konsumsi rumah tangga. PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

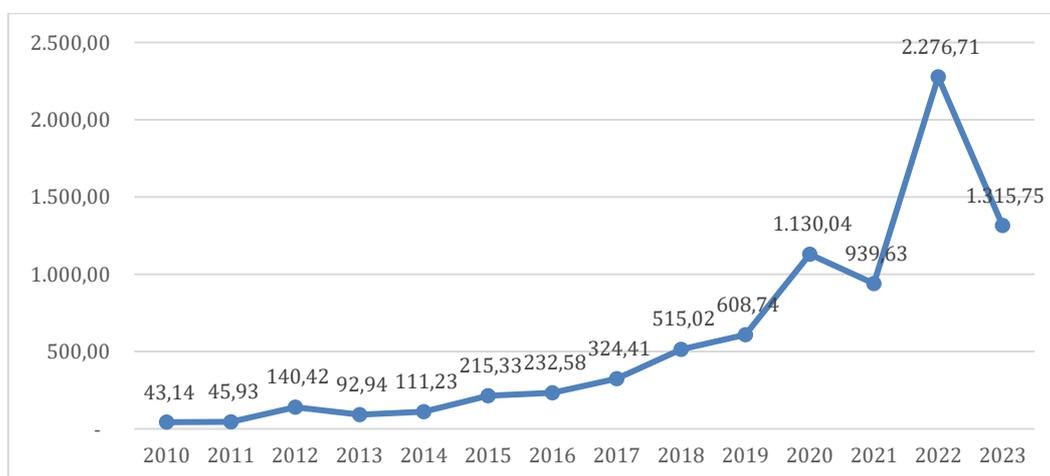
Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah,





meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, stabilitas politik di daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti meningkatnya jaminan kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan prasarana dan sarana dan kebijakan tata ruang daerah yang konsisten. Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041 yang tentunya akan memberikan kepastian hukum di bidang tata ruang.

Selain PMTB, data penanaman modal dapat dilihat melalui realisasi penanaman modal yang dicatat oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Berikut data penanaman modal berdasarkan layanan perizinan berusaha di Kabupaten Purworejo pada tahun 2010-2023:



Gambar 2.78 Realisasi Penanaman Modal (Milyar Rupiah) berdasarkan Layanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa secara perizinan berusaha terjadi peningkatan penanaman modal yang cukup pesat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-2023. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana telah ditetapkannya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan pada usaha mikro untuk dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar telah diubah dimana usaha mikro kriterianya menjadi modal dasar di bawah Rp 1 miliar, dari sebelumnya di bawah Rp 50 juta. Usaha kecil kriterianya adalah mereka yang memiliki modal dasar Rp 1 miliar - Rp 5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 50 juta - Rp 500 juta. Kemudian kriteria modal dasar untuk usaha menengah menjadi Rp 5 miliar - Rp 10 miliar dari sebelumnya hanya Rp 500 juta - Rp 10 miliar. Sementara untuk usaha besar tidak berubah, yakni dengan kriteria modal dasar di atas Rp 10 miliar. Sementara itu, data yang dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Berikut data penanaman modal di Kabupaten Purworejo berdasarkan LKPM.

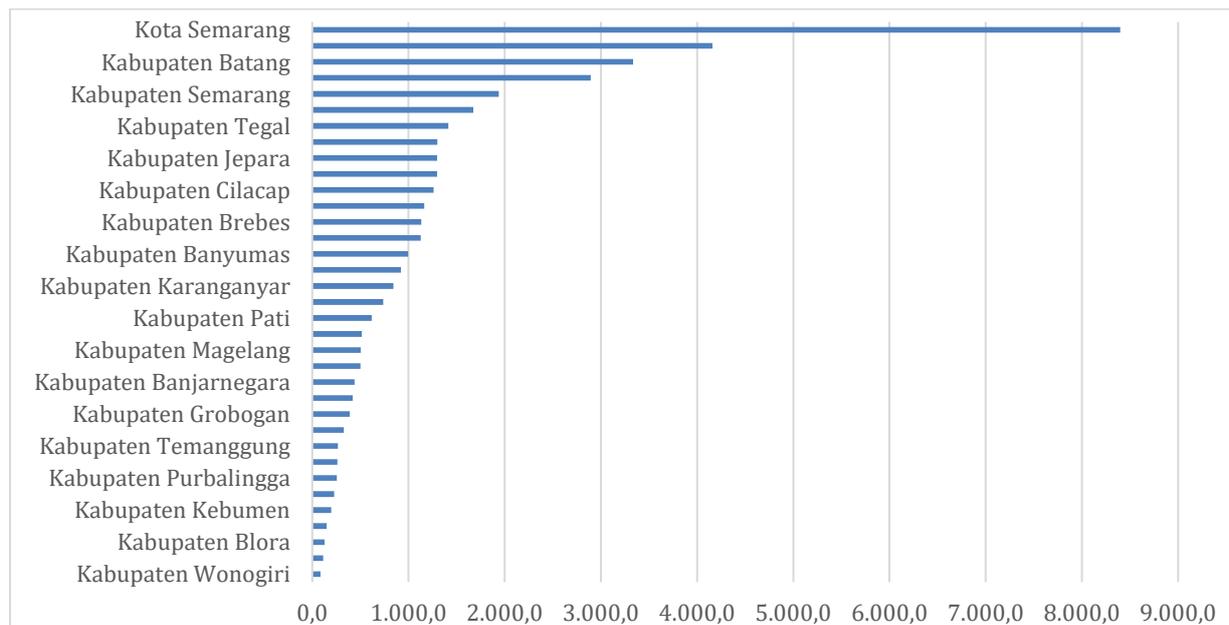


**Tabel 2.46 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023**

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Realisasi PMDN (Juta Rp)	13.941,70	113.205,00	18.337,10	72.488,90	44.815,30	67.572,00	138.975,30
	Jumlah Proyek PMDN	5	17	23	74	126	409	272
2	Realisasi PMA (Juta Rp)	10.579,3	0	201	656,64	972,36	3.667,86	229,40
	Realisasi PMA (USD)	789,5	0	15	45,6	66,6	255,60	15,50
	Jumlah Proyek PMA	4	3	5	7	3	3	4
3	Jumlah Realisasi Penanaman Modal (Juta Rp)	24.521,00	113.205,00	18.538,10	73.145,54	45.787,66	71.239,86	139.204,70
4	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (%)	-	361,67	-83,62	294,57	-37,40	55,59	118,16

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purworejo, 2024

Melihat realisasi investasi menurut Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa terjadi tren yang cukup fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Secara umum terjadi peningkatan realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo dari tahun 2017-2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan 118,16 persen. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanaman modal pada tahun 2023 di Kabupaten Purworejo tergolong rendah. Berikut posisi relatif realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah:

**Gambar 2.79 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 menempati posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan penanaman modal di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha dibawah 1 milyar rupiah. Sedangkan yang





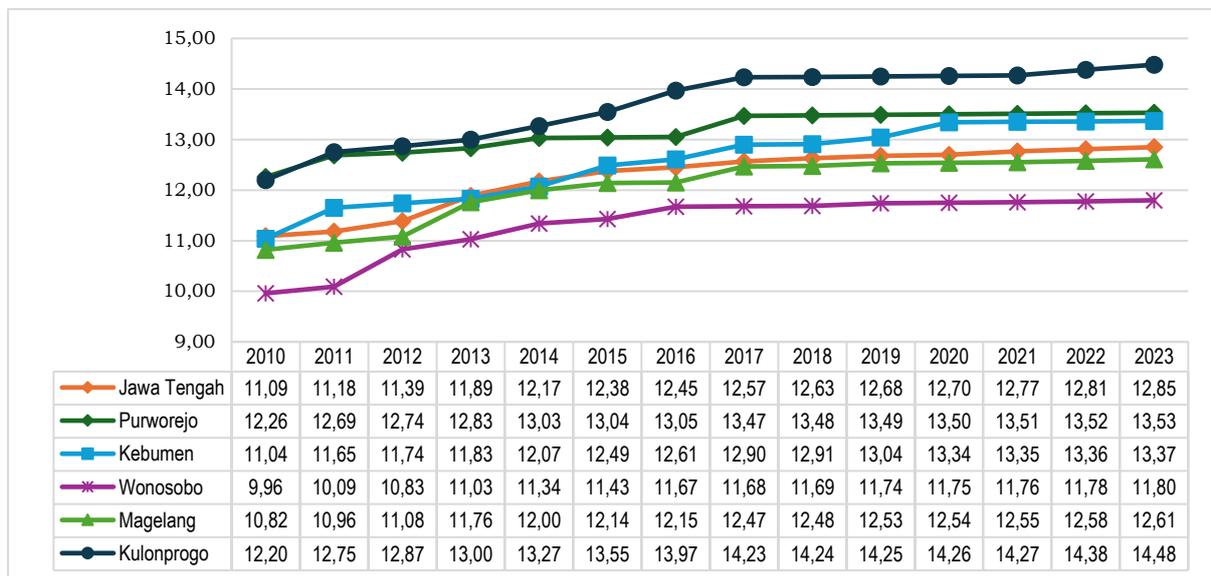
pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM adalah pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Selain itu, hadirnya beberapa Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo maupun sekitarnya seperti Bendungan Bener, Bandara YIA, dan KSPN Borobudur ternyata belum mampu meningkatkan realisasi penanaman modal pada pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang cukup signifikan di Kabupaten Purworejo, promosi investasi yang dilakukan belum efektif, kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung terhadap potensi investasi yang ditawarkan kepada calon investor usaha besar dan menengah, investasi usaha mikro belum disertai dengan orientasi peningkatan produktivitas dan skala usaha. Rendahnya nilai investasi di Kabupaten Purworejo juga memberikan citra buruk karena investor menilai bahwa Kabupaten Purworejo tidak ramah investasi.

Dalam hal perizinan investasi, Kabupaten Purworejo telah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mulai beroperasi pada tahun 2022 dengan menyediakan 118 layanan perizinan secara terpadu. Penyediaan MPP tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam proses perizinan investasi. Meskipun demikian, penyediaan MPP dan hadirnya PSN di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya tidak secara otomatis dapat meningkatkan realisasi penanaman modal jika tidak didukung dengan peningkatan aksesibilitas seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, internet, dan layanan perbankan. Faktor pendukung yang lain adalah kondisi sosial politik yang stabil di daerah, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta sikap masyarakat yang toleran, upah tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, dan pangsa pasar luas.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas.



Gambar 2.80 Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2024)



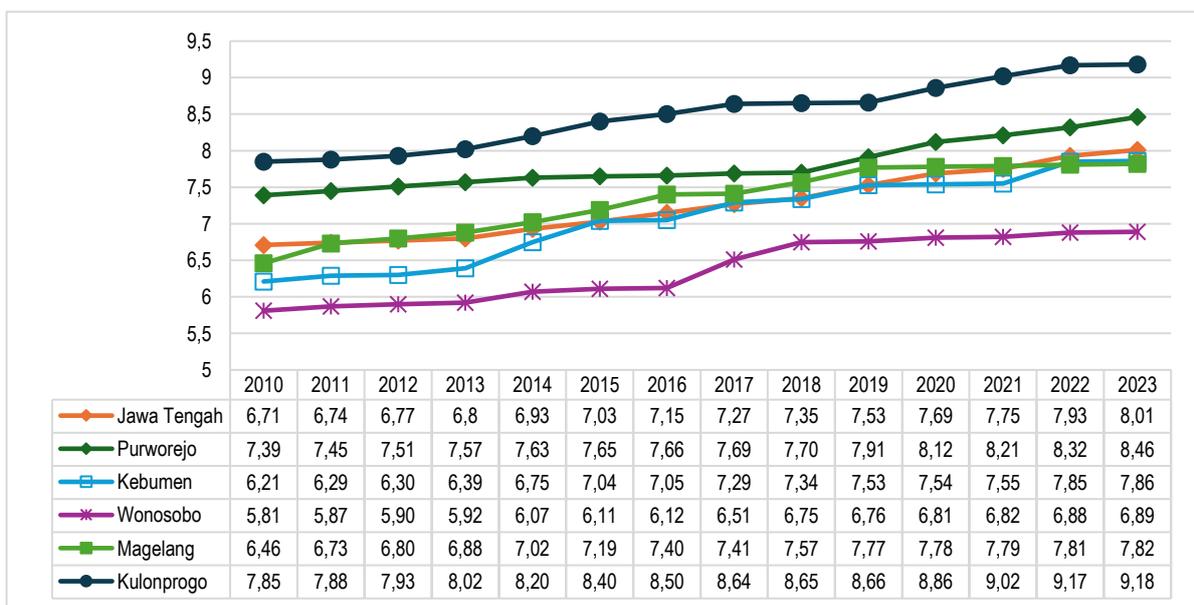


Angka harapan lama sekolah Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 mencapai 13,53 tahun. Rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga 13,53 tahun. Berdasarkan angka tersebut, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau masuk ke perguruan tinggi minimal Diploma 2. Harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo selalu meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin banyak penduduk yang bersekolah dengan capaian kelas yang semakin tinggi.

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, angka harapan lama sekolah Kabupaten Purworejo selalu lebih tinggi dibandingkan HLS Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, dalam kurun waktu tersebut rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Purworejo masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan HLS Provinsi Jawa Tengah. HLS Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar mencapai 13,53 dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo yaitu 11,80 tahun. Namun HLS Kabupaten Purworejo lebih rendah dari HLS Kabupaten Kulonprogo yang sebesar 14,48 tahun. Trend selisih HLS Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2.3.2.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.



Gambar 2.81 Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2023)

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo di tahun 2023 tercatat 8,46 tahun. Hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah menempuh jenjang pendidikan selama 8,46 tahun masa sekolah atau secara rata-rata telah menempuh pendidikan hingga Kelas 2 di Sekolah Menengah Pertama. Penduduk Kabupaten Purworejo diharapkan





mampu menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 selalu meningkat.

Angka Rata-rata Lama Sekolah atau RLS Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2023 juga lebih tinggi dibanding RLS Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya HLS, rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten Purworejo masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan RLS Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Di tahun 2023, RLS Kabupaten Purworejo adalah sebesar 8,46 tahun sedangkan Kabupaten Wonosobo sebesar 6,89 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Purworejo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 8 tahun sementara secara rata-rata penduduk di Kabupaten Wonosobo selama hampir 7 tahun.

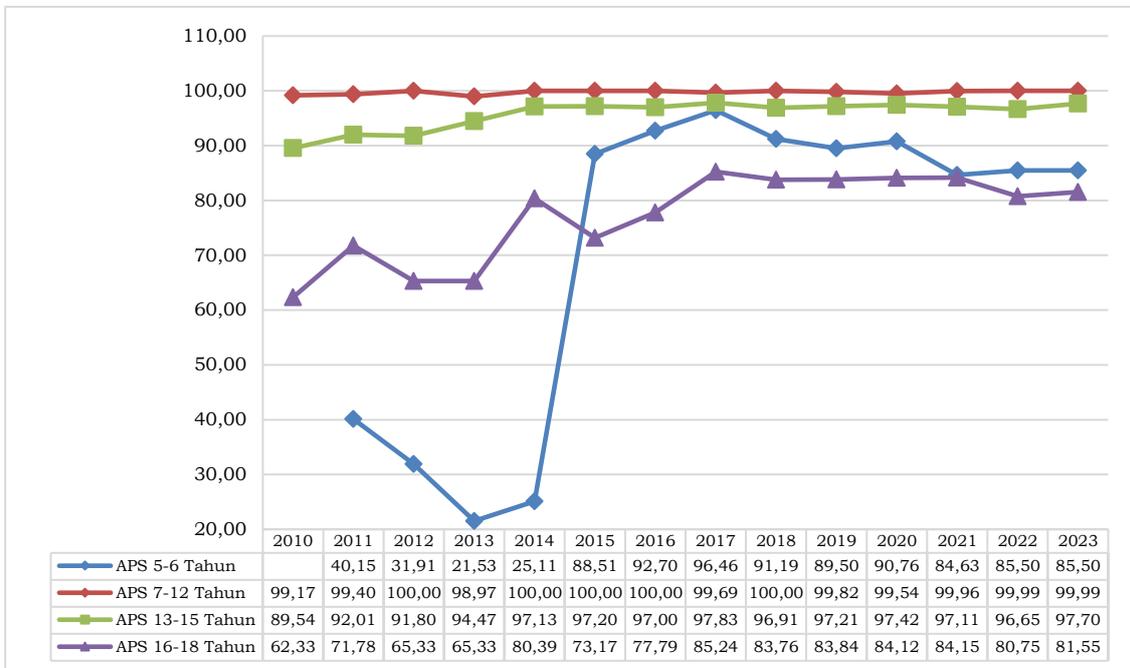
Meskipun begitu, trend selisih HLS Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulonprogo juga semakin lebar. Pada tahun 2023, selisih HLS Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulonprogo mencapai 0,72 dari tahun 2010 sebesar 0,46. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kulonprogo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan semakin tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo.

Pengukuran RLS dilakukan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dan secara *de facto* artinya penduduk yang diukur adalah penduduk yang tinggal di Kabupaten Purworejo, sementara penduduk yang tinggal di kota lain dihitung sebagai penduduk kota lain tersebut. Sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo merantau dan melanjutkan pendidikan tinggi ataupun bekerja setelah lulus sekolah menengah keluar kota seperti ke Yogyakarta, Magelang, Semarang, Jakarta, dan kota-kota lain. Setelah lulus sekolah mereka melanjutkan bekerja di luar kota tersebut dan tidak kembali ke Kabupaten Purworejo. Sedangkan penduduk yang tinggal di Kabupaten Purworejo sebagian besar tidak melanjutkan sekolah dan bekerja pada sektor informal. Hal ini menyebabkan RLS di Kabupaten Purworejo masih di angka 8,32 dan lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Provinsi Jawa Tengah.

2.3.2.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu.





Gambar 2.82 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun, 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah (2024)

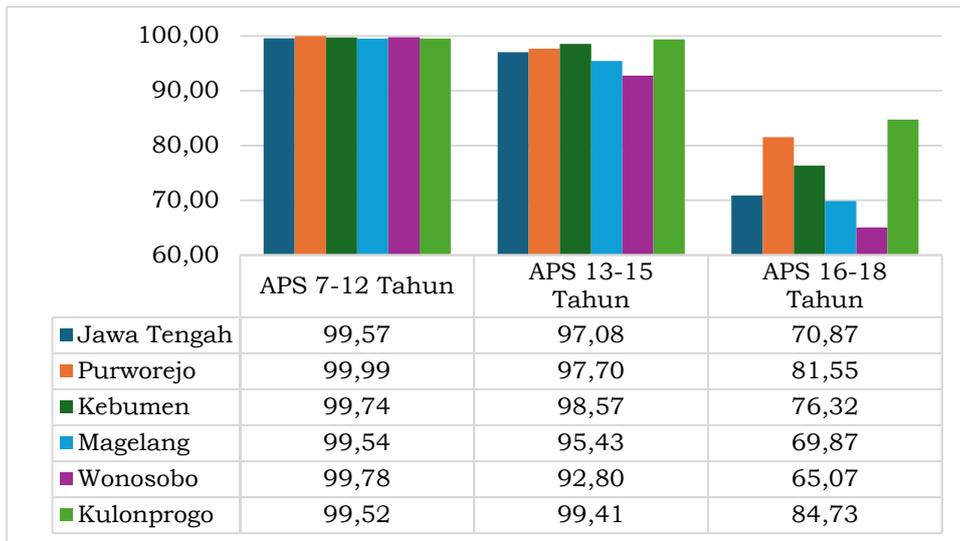
Persentase partisipasi sekolah usia 7-12 tahun pada pendidikan dasar cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan usia 5-6 tahun dalam PAUD dan partisipasi anak usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi masuk SD yang tidak mewajibkan anak harus melalui PAUD terlebih dahulu sehingga tidak optimal. Selain itu mutasi siswa keluar daerah, anak berkebutuhan khusus dan anak yang belajar di pondok non formal yang tidak menjalani pendidikan sesuai standar sehingga tidak terdaftar dalam dapodik.

Secara umum, Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kabupaten Purworejo relatif baik yaitu mendekati 100% artinya hampir seluruh anak berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Dan dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir kurang dari 5% penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun mengenyam pendidikan dasar.

Sedangkan untuk kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolahnya relatif rendah, meskipun dibandingkan dengan tahun 2010 pada tahun 2023 meningkat (19,22%). Namun bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun terakhir APS 16-18 tahun menurun. Banyak penduduk pada kelompok umur tersebut tidak bersekolah karena kurangnya motivasi baik dari anak maupun dari keluarga. Selain itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Purworejo yang cukup luas dan beberapa wilayah berupa pegunungan sehingga anak enggan berangkat sekolah. Banyak anak yang melanjutkan ke pondok dan ada pula yang melanjutkan ke luar Purworejo. Banyak juga yang ber-KTP Purworejo namun tidak berdomisili di Purworejo.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Purworejo tahun 2023 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut.





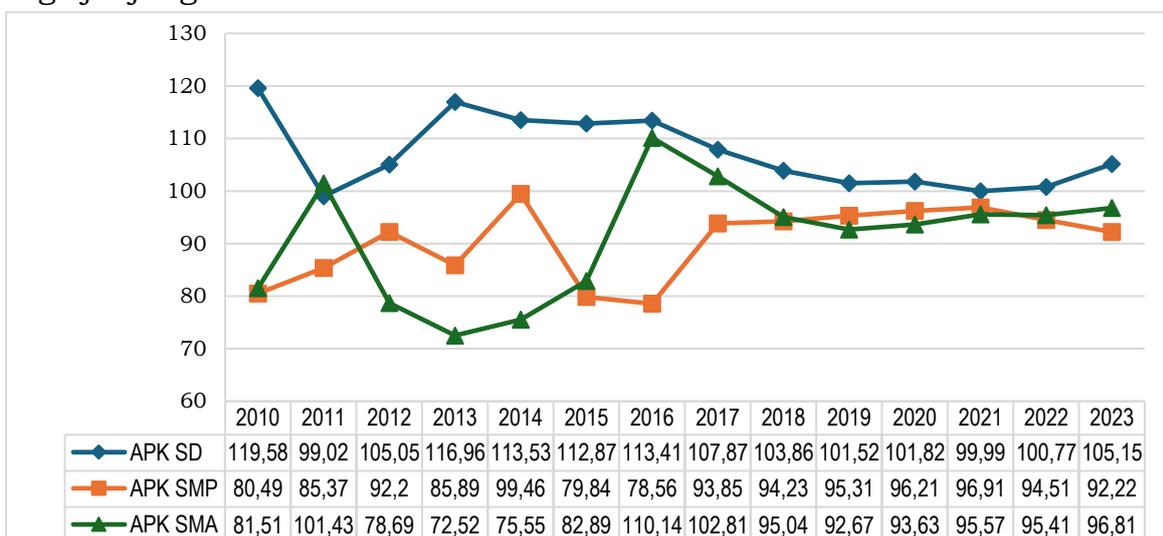
Gambar 2.83 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan grafik tersebut, APS usia 7-12 tahun di Kabupaten Purworejo lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, sementara APS usia 13-15 tahun Kabupaten Kulonprogo lebih unggul, begitu juga untuk APS usia 16-18 tahun. Di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh kabupaten sekitar menunjukkan bahwa APS pada kelompok usia 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal ini menunjukkan motivasi anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga relatif rendah.

2.3.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar, merupakan indikator capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada range jenjang tertentu.



Gambar 2.84 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah (2023)

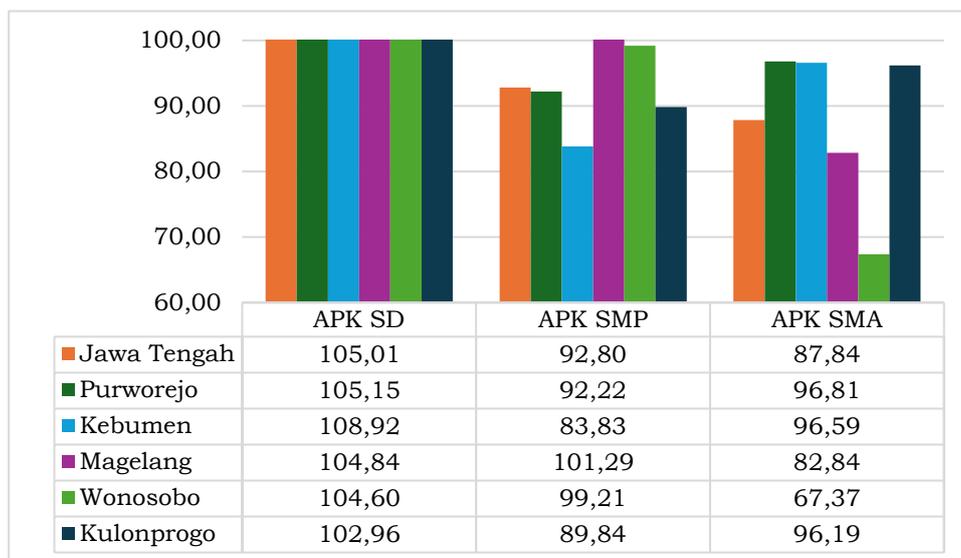




Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2010-2023 APK SD, SMP, SMA bersifat sangat fluktuatif. Pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan motivasi anak. Pada beberapa tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) baik di SD maupun SMA mencapai lebih dari 100 persen yang artinya populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan bisa mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 119,58% dan mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi turun menjadi 105,15%. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. APK SD turun dari tahun 2010 ke tahun 2023 sebesar 14,43% menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penduduk ketika memasuki jenjang SD semakin sesuai dengan umur yang direkomendasikan dan semakin sedikit penduduk yang mengulang pada jenjang ini. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Purworejo tahun 2023 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.85 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

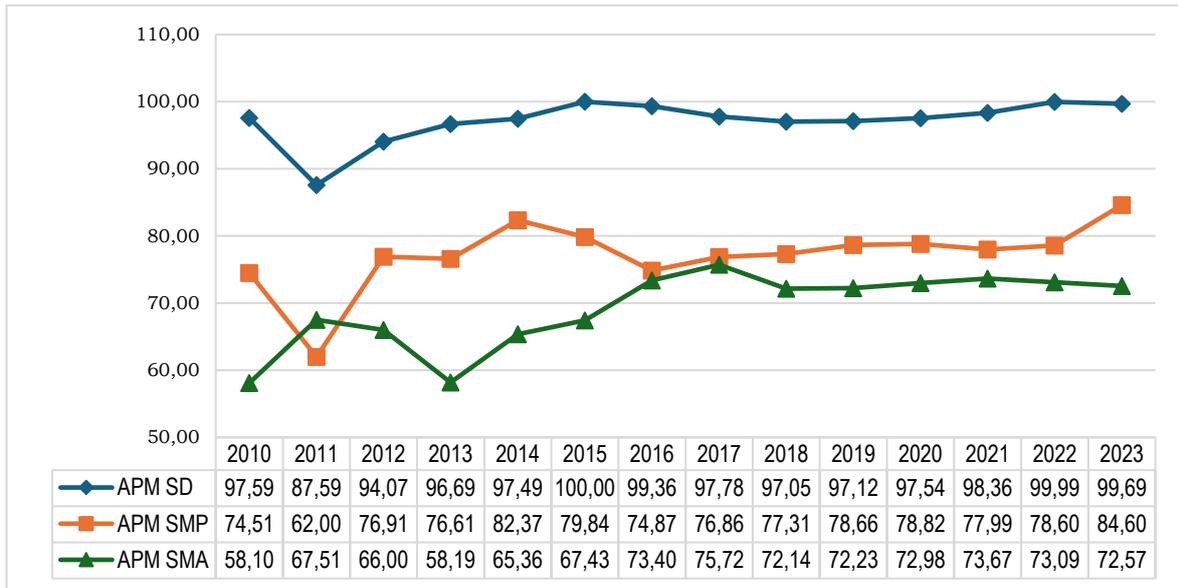
Berdasarkan data di atas, APK SD Kabupaten Purworejo terendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, begitu juga dengan APK SMP yang cenderung rendah, berbeda dengan APK SMA yang lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya partisipasi dan penyebab anak tidak melanjutkan sekolah adalah adanya faktor budaya dan kurangnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan dan kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Berdasarkan APK SD, SMP, SMA tersebut terlihat bahwa masih diperlukan upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan.





2.3.2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu.

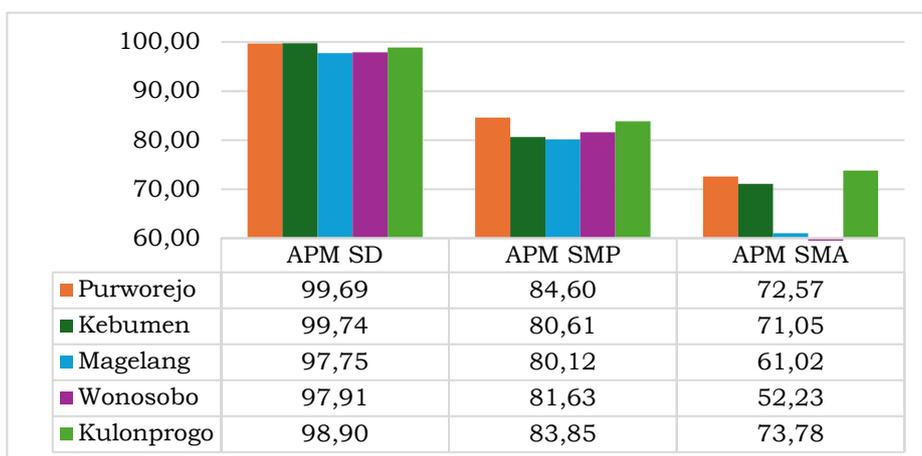


Gambar 2.86 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov.Jawa Tengah (2024)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta didik pada setiap jenjang yang merupakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Namun untuk APK SD dan SMA mengalami penurunan pada tahun 2023. Faktor motivasi anak dan dukungan keluarga dalam mendorong agar anak bersekolah masih menjadi hal utama penyebab anak tidak sekolah di Kabupaten Purworejo.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purworejo tahun 2023 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.87 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)





Dari grafik di atas, meskipun nilai APM SD Kabupaten Purowrejo mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya APM SD Kabupaten Purworejo tahun 2023 mencapai angka tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk dalam melaksanakan pendidikan dasar di Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitar. Namun capaian tersebut belum sesuai dengan target 100%, selain karena motivasi anak hal ini juga dikarenakan terdapat siswa keluar daerah, adanya anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah, dan adanya anak yang bersekolah di pondok sehingga tidak terdata.

Sedangkan untuk APM SMP dan SMA meskipun beranjak naik namun masih tergolong rendah, begitu juga dengan kabupaten sekitarnya yang masih jauh di bawah 100. Berbagai program diluncurkan oleh pemerintah pusat dan didukung oleh pemerintah daerah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan bentuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Program lainnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah dan masih banyaknya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah yaitu tidak ada motivasi dari siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh keharmonisan keluarga, ekonomi keluarga, dan motivasi anak.

Dalam memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah Kemendikbudristek melakukan Asesmen Nasional yang dilakukan setiap tahun. Asesmen Nasional memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional terdiri dari literasi membaca dan numerasi pada jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Literasi Membaca dan Numerasi merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.

Tabel 2.47 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR ASESMEN TINGKAT NASIONAL	NILAI		
		2022	2023	Peningkatan
1	2	3	4	
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	78,80	83,09	4,29
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	85,39	88,72	3,33
3	Numerasi SD/Sederajat	61,74	72,61	10,87
4	Numerasi SMP/Sederajat	65,26	85,25	19,99

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024





Berdasarkan data di atas nilai literasi dan numerasi pada semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Dari rapor pendidikan pada jenjang SD dan SMP, kemampuan literasi membaca lebih tinggi dari kemampuan numerasi, namun kemampuan numerasi mengalami peningkatan yang tinggi dibanding kemampuan literasi. Dalam memaksimalkan kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa di Kabupaten Purworejo masih diperlukan pemetaan dan distribusi SDM pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan, konten pembelajaran yang berkualitas, refleksi dan perbaikan pembelajaran, optimalisasi implementasi program guru penggerak, penyediaan bahan bacaan.

2.3.2.6. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program literasi di Kabupaten Purworejo. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi dan juga meningkat.

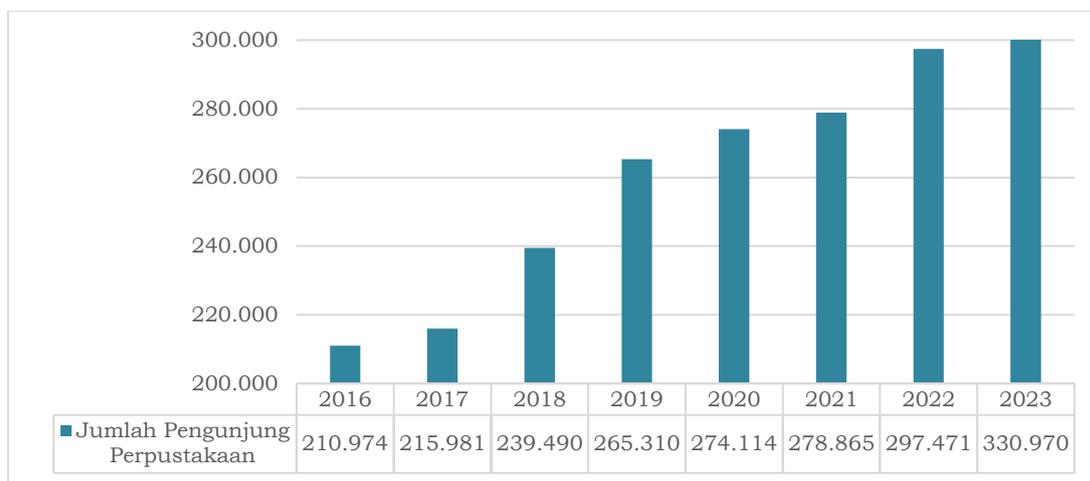
Perpustakaan merupakan sumber informasi yang didalamnya memuat segala hal yang mendukung:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan, literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- 2) Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melalui pembudayaan kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan.
- 3) Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.

Penerapan mutu layanan perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan pemakai dan mendukung layanan informasi. Perpustakaan harus mampu berperan selaku pusat pengetahuan publik di semua lapisan masyarakat. Terkait hal tersebut, dalam upaya mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat, Perpustakaan membuka layanan Pojok Baca dan layanan perpustakaan keliling.

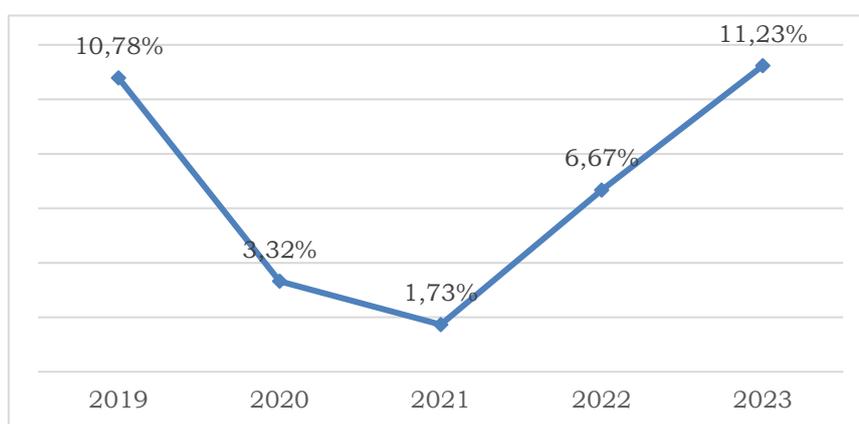
Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Purworejo antara lain dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah perpustakaan yang layak dan jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan salah satu indikator pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun.





Gambar 2.88 Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023

Sumber: *Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2024*



Gambar 2.89 Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Sumber: *Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2024*

Jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 layanan keliling ke Sekolah terhambat dan baru dimulai lagi bulan November 2021 dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM. Namun jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 6,67% sampai pada tahun 2023 menjadi 11,23%. Hal ini didorong oleh bangunan perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo yang baru dan representatif dengan sarana prasarana yang memadai sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Berdasarkan hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan upaya untuk menambah jumlah bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu kurangnya promosi dan sosialisasi akan program-program perpustakaan, beberapa kecamatan mempunyai jarak yang cukup jauh dari perpustakaan, minimnya SDM untuk layanan perpustakaan keliling, dan koleksi *e-book* belum *update* sejak tahun 2019.

Saat ini masih ada perpustakaan, baik di sekolah maupun di instansi dan masyarakat yang belum memiliki tenaga khusus perpustakaan. Petugas yang melayani pemustaka kadang juga memiliki tugas lain sebagai tugas utamanya. Semakin majunya teknologi informasi dan adanya keterbatasan tenaga khusus perpustakaan mendorong perlunya ketersediaan dan





pengolahan data perpustakaan berbasis digital yang memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara mandiri.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur IPLM, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi perpustakaan, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan (Perpusnas, 2023). IPLM Kabupaten Purworejo tahun 2022 adalah 56,98 kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 78,43. Berikut merupakan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2022.

Tabel 2.48 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	
		2022	2023
1	2	3	4
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		56,98	78,43
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0032	1,0000
2	Kecukupan Koleksi	1,5074	0,2626
3	Kecukupan Tenaga Perpustakaan	0,0046	1,0000
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	0,3767	0,0298
5	Perpustakaan ber-SNP	1,6128	0,2275
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kehidupan Perpustakaan	0,0333	1,0000
7	Anggota Perpustakaan	0,4503	1,0000

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Purworejo, 2024

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dalam IPLM ditunjukkan dengan indikator tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dari tabel di atas tingkat pemanfaatan perpustakaan meningkat dari 2022 ke 2023.

Skor TGM tahun 2022 yaitu sebesar 59,80 termasuk dalam kategori sedang. Nilai tingkat gemar membaca masyarakat diukur menggunakan survei/kajian kegiatan membaca masyarakat. Tingkat gemar membaca masyarakat Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Permasalahan lain selain dari beberapa permasalahan di atas, belum semua desa memiliki perpustakaan desa atau pojok baca untuk membangun budaya baca masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di desa.

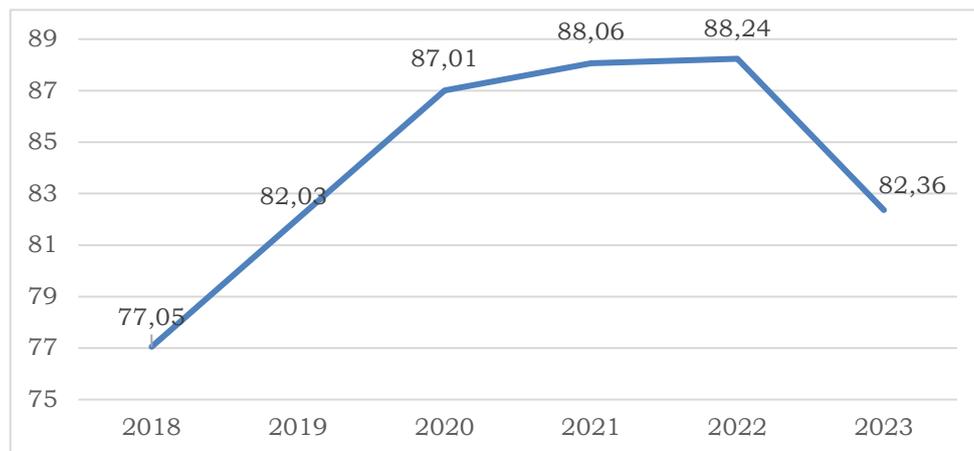
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur atau prasarana wilayah adalah struktur/ fasilitas dasar seperti transportasi, jalan, akses air bersih/ minum, sanitasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat. Terdapat indeks infrastruktur daerah yang merupakan hasil





perhitungan terhadap persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak, persentase pengguna listrik dan kualitas sinyal telepon dan internet di daerah yang dihitung berdasarkan *Principal Component Analysis (PCA)*/ indeks komposit. Berikut indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2023.



Gambar 2.90 Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks)

Sumber: Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2023

Pada kurun waktu tahun 2018-2023, indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,035%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 (+4,98). Namun pada tahun terakhir (2023), terdapat penurunan indeks menjadi 82,36. Lebih lengkap, kondisi infrastruktur daerah per komponen dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.49 Kondisi Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Infrastruktur Daerah	77,05	82,03	87,01	88,06	88,24	82,36
2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	76,46	77,77	78,89	80,01	81,75	63,05
3	Persentase akses air minum layak	89,11	89,33	92,51	95,50	96,86	97,97
4	Persentase akses sanitasi layak	84,70	84,78	85,01	87,53	89,45	95,32
5	Persentase rumah tangga pengguna listrik	N/A	N/A	N/A	90,05	91,01	92,17
6	Persentase pengguna internet dan telepon	N/A	N/A	N/A	80,15	82,95	83,87

Sumber: Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2023

Dapat diamati pada tabel di atas, terutama pada tahun terakhir (2023), terdapat penurunan signifikan indeks infrastruktur daerah. Hal ini disebabkan karena menurunnya persentase jalan dalam kondisi mantap, semula 81,75% (pada tahun 2022) menjadi 63,05% pada tahun terakhir.





Sementara itu, komponen lain seperti persentase akses air minum layak, persentase akses sanitasi layak, persentase ruang tangga pengguna listrik, serta persentase pengguna internet dan telepon mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan prioritas penganggaran pada peningkatan jalan kabupaten sebagai tolok ukur jalan dalam kondisi mantap.

Selama hampir 2 (dua) dekade pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2005-2025, terdapat keberhasilan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Selama periode tersebut, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo dapat dikatakan berjalan dengan pesat, utamanya dalam rangka untuk mendukung konektivitas antar wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Purworejo adalah sepanjang 872,82 km. Persentase panjang jalan kewenangan pusat di Kabupaten Purworejo sebesar 4,43%, jalan kewenangan provinsi 13,56%, dan sisanya 88,01% merupakan kewenangan kabupaten. Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 188.18/482/IX/2016 terdapat 248 (dua ratus empat puluh delapan) ruas jalan kewenangan kabupaten dengan panjang total 769,25 km. Konstruksi permukaan jalan kewenangan kabupaten terbagi dalam aspal, hotmix, batu, cor beton, dan tanah. Selain jalan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten, di Kabupaten Purworejo juga terdapat jalan poros desa. Jalan ini tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Purworejo sepanjang 1.259,931 km. Jalan poros desa menghubungkan antar satu desa dengan desa yang lain di Kabupaten Purworejo.

Kondisi jalan kabupaten semakin membaik selama 5 tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat proporsi jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2018 sebesar 72,21% meningkat menjadi 80,01% di tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 81,75% di tahun 2022. Nilai tersebut melebihi target awal tahun 2022 yaitu sebesar 80,93%. Akan tetapi kondisi jalan kabupaten menurun di tahun 2023 yaitu sebesar 63,05%. Penurunan capaian kondisi jalan ini dikarenakan adanya mutasi jalan di Kabupaten Purworejo. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sedang, rusak ringan, hingga rusak berat di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50 Panjang dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kabupaten berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2023

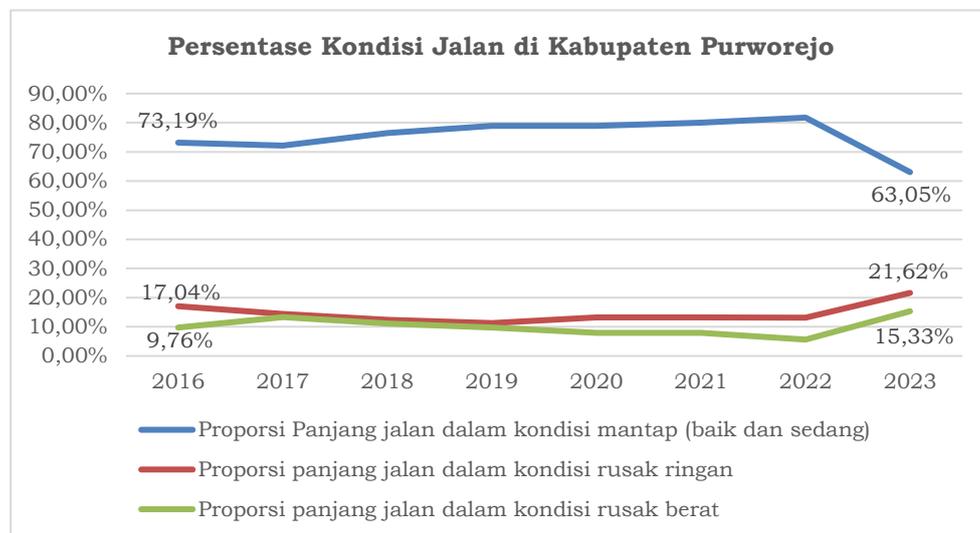
No	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Panjang jalan kondisi baik (km)	432,67	444,46	480,17	500,13	248,00	227,96	214,09	146,22
2.	Panjang jalan kondisi sedang (km)	130,38	110,98	107,98	98,15	358,89	387,51	414,78	331,57





No	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Panjang jalan kondisi rusak ringan (km)	131,10	111,21	95,50	86,74	101,60	94,35	97,74	163,84
4.	Panjang jalan kondisi rusak berat (km)	75,10	102,60	85,60	75,23	60,760	59,44	42,65	116,16
5.	Total Panjang jaringan jalan kabupaten (km)	769,25	769,25	769,25	769,25	769,25	769,25	769,25	757,79
6.	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	73,19 %	72,21%	76,46%	78,94%	78,89%	80,01%	81,75%	63,05%
7.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan	17,04 %	14,45%	12,41%	11,27%	13,20%	13,26%	13,09%	21,62%
8.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak berat	9,76%	13,33%	11,12%	9,78%	7,89%	7,89%	5,62%	15,33%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024



Gambar 2.91 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023

Sumber: DPUPR Purworejo, 2024

Secara umum, persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terjadi peningkatan tiap tahun mulai tahun 2017-2022. Akan tetapi di tahun 2023 terjadi penurunan. Di tahun 2022, persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 81,75% dan di tahun 2023 persentasenya menurun menjadi 63,05%. Hal tersebut disebabkan adanya mutasi jalan diantaranya beberapa ruas jalan poros desa di-upgrade menjadi jalan kabupaten. Jalan tersebut rata-rata dalam kondisi rusak sedang atau rusak berat, sehingga memperburuk capaian jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo. Selain itu tidak adanya pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi jalan kabupaten melalui APBD kabupaten ditengarai menyebabkan capaian kondisi jalan di Kabupaten Purworejo cenderung turun. Sebagian pendanaan APBD digunakan untuk pembiayaan pembangunan jalan poros desa, yang capaiannya tidak mendukung capaian program penyelenggaraan jalan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026.





Dalam upaya meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi bagi para investor, peranan penataan ruang menjadi salah satu hal yang sangat urgen. Lahirnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berkaitan dengan perubahan regulasi dan kebijakan terkait penataan ruang dan izin usaha. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan tujuan utama untuk memudahkan berusaha dan meningkatkan iklim investasi. Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait penataan ruang melibatkan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha. Salah satu instrumen untuk mencapai hal tersebut yaitu KKPR. KKPR bertujuan menyelaraskan kegiatan pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk memastikan aktivitas usaha dan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya KKPR membawa konsep penyelarasan antara kegiatan berusaha, tata ruang dan dampak lingkungan. Dengan mengimplementasikan KKPR, tentunya proses perizinan usaha menjadi lebih efisien, transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan KKPR juga dapat membantu menghindari konflik penggunaan lahan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kemudian memberikan landasan hukum yang lebih rinci terkait implementasi KKPR. Peraturan ini membagi KKPR menjadi beberapa jenis, termasuk KKPR untuk kegiatan berusaha. Selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 memberikan panduan operasional terkait KKPR.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	NA	100%	78,08%	89,35%	89,49%
2	Jumlah KKPR yang sesuai	NA	622	969	277	298
3	Jumlah KKPR yang dikeluarkan	NA	622	1.241	310	333

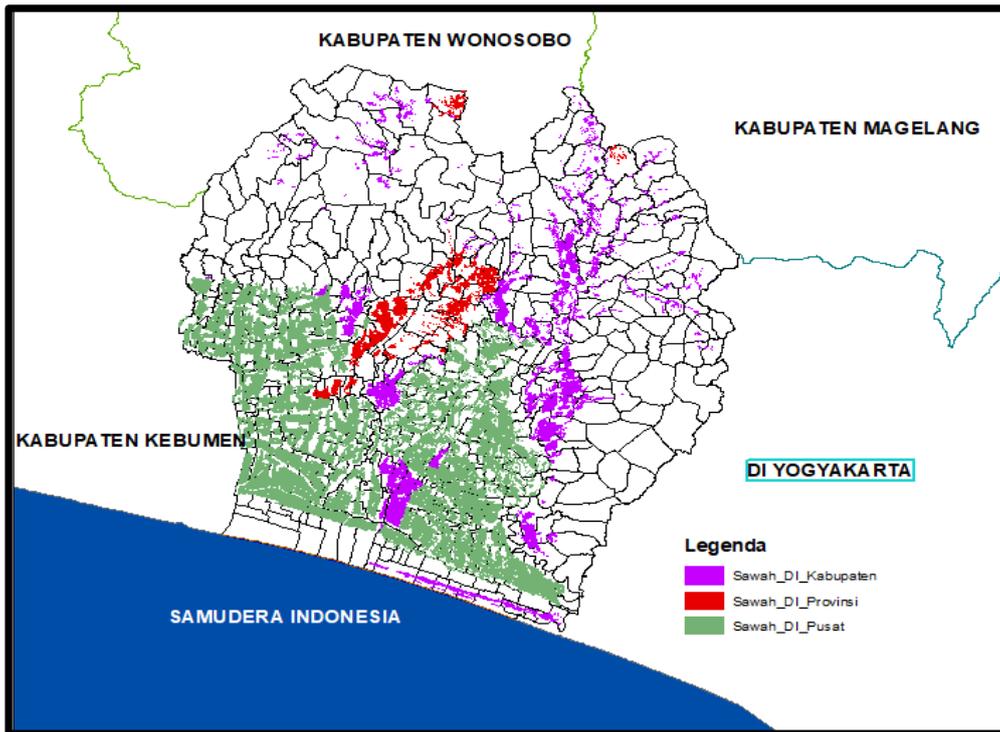
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024, diolah

Dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Kabupaten Purworejo, infrastruktur irigasi merupakan salah satu aspek yang penting. Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan air mutlak diperlukan mengingat semakin terbatasnya ketersediaan air baku. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa luasan daerah irigasi kewenangan pusat sebesar 19.908 ha





meliputi DI Wadaslintang, DI Boro dan DI Kedung Putri; DI kewenangan provinsi seluas 2.840 ha meliputi DI Loning Kragilan dan DI Watujagir dan DI kewenangan kabupaten sebesar 9.470 ha tersebar di 250 daerah irigasi. Berdasarkan data tersebut maka proporsi luasan DI kewenangan pusat sebesar 61,79%; DI kewenangan provinsi 8,81% dan DI kewenangan kabupaten sebesar 29,39%. Peta persebaran DI kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut :

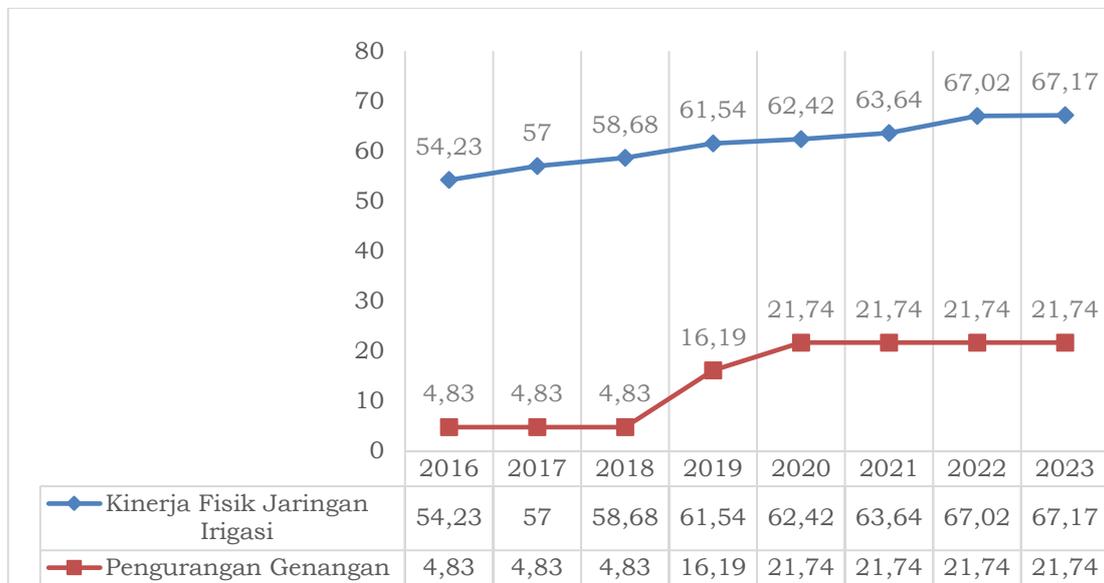


Gambar 2.92 Peta Persebaran DI Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Purworejo, 2024

Selama periode RPJPD 2005-2025, kinerja layanan irigasi di Kabupaten Purworejo semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari capaian saluran irigasi dalam kondisi baik. Capaian saluran irigasi dalam kondisi baik juga berpengaruh terhadap persentase Pengurangan Genangan Air Banjir pada Irigasi Kewenangan Kabupaten. Capaian fisik jaringan irigasi dalam kondisi baik dan pengurangan genangan banjir pada DI kewenangan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :





Gambar 2.93 Persentase Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengurangan Genangan DI Kewenangan Kabupaten Tahun 2016-2023

Sumber: DPUPR Purworejo, 2024

Persentase capaian kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik nilainya selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,23%. Di tahun 2023 nilainya meningkat menjadi 67,17%. Artinya selama kurun waktu 7 tahun terjadi peningkatan capaian sebesar 12,94%, dan ini berarti bahwa rata-rata terjadi peningkatan capaian sebesar 1,85% per tahun.

Peningkatan kinerja jaringan irigasi dalam kondisi baik juga mempunyai korelasi terhadap persentase pengurangan genangan DI kewenangan kabupaten jika DI yang ditangani merupakan daerah irigasi yang merupakan wilayah risiko tinggi terkena genangan. Pada tahun 2016 capaian pengurangan genangan sebesar 4,83%, di tahun 2023 meningkat menjadi 21,74%, artinya terjadi peningkatan sebesar 16,91%. Walaupun pada tahun 2017, 2018, 2022, 2022 dan 2023 capaian pengurangan genangan stagnan. Jika dirata-rata maka capaian pengurangan genangan banjir di DI kewenangan kabupaten sebesar 2,41%.

Salah satu cara mengukur keberhasilan program pengelolaan irigasi adalah melalui pengukuran nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Penilaian IKSI bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem irigasi di suatu Daerah Irigasi secara berkala dan berkesinambungan, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem irigasi. Variabel IKSI saling terkait satu sama lain, apabila terdapat permasalahan pada salah satu bagian dari aset irigasi maka akan mempengaruhi nilai IKSI secara keseluruhan. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015, evaluasi kinerja sistem irigasi menggunakan 6 (enam) variabel, yaitu Prasarana fisik, Produktivitas tanaman, Sarana Penunjang, Organisasi Personalia, Dokumentasi, dan Kondisi Kelembagaan P3A. Variabel-variabel tersebut dinilai pada jaringan utama (primer-sekunder) dan pada jaringan tersier. Gabungan dari nilai jaringan utama dan jaringan tersier menghasilkan nilai IKSI. Berdasarkan hasil penilaian IKSI, terdapat 4 (empat) kategori kinerja sistem irigasi yaitu:

- a. 80 – 100 : kinerja sangat baik
- b. 70 – 79 : kinerja baik





- c. 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- d. < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

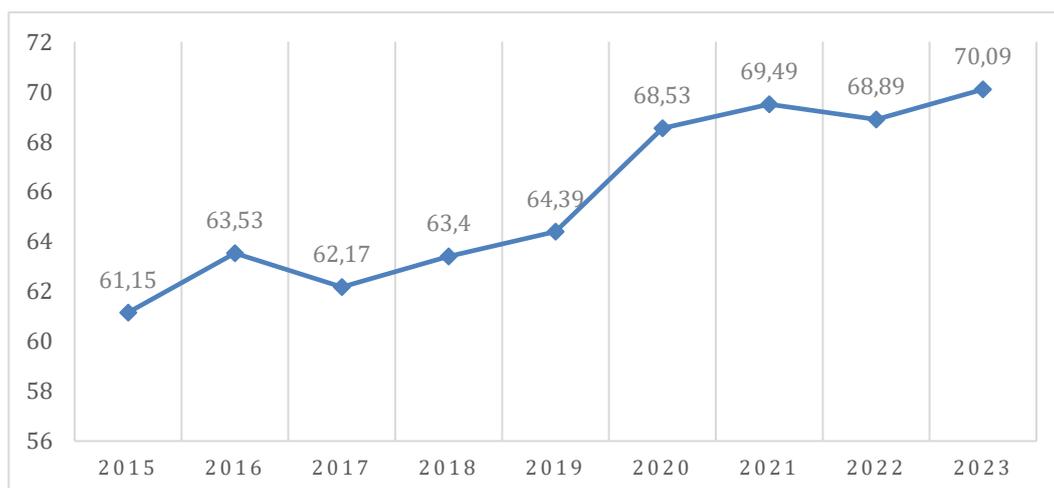
Kategori tersebut menentukan jenis tindakan apa yang akan dilakukan pada daerah irigasi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI), nilai IKSI merupakan gabungan dari nilai IKSI jaringan utama dan nilai IKSI jaringan tersier, dimana bobot IKSI jaringan utama dan IKSI jaringan tersier dibedakan berdasarkan kategori luasan yaitu :

- a. Luas > 1000 ha : IKSI Jaringan Utama 80% dan IKSI Jaringan Tersier 20%
- b. Luas 150 – 1000 ha : IKSI Jaringan Utama 60% dan IKSI Jaringan Tersier 40%
- c. Luas < 150 ha : IKSI Jaringan Utama 60% dan IKSI Jaringan Tersier 40%

Baik IKSI jaringan utama (primer dan sekunder) maupun IKSI jaringan tersier terdiri dari 6 (enam) variabel, dimana masing-masing variabel tersebut juga memiliki bobot tertentu. IKSI jaringan utama terdiri dari 6 (enam) variabel yang dinilai dengan masing-masing bobot sebagai berikut :

- a. Prasarana fisik yang memiliki bobot maksimum (45%)
- b. Produktivitas tanaman yang memiliki bobot maksimum (15%)
- c. Sarana Penunjang yang memiliki bobot maksimum (10%)
- d. Organisasi Personalia yang memiliki bobot maksimum (15%)
- e. Dokumentasi yang memiliki bobot maksimum (5%)
- f. Kondisi Kelembagaan P3A yang memiliki bobot maksimum (10%)

Pada IKSI jaringan utama, variabel dengan bobot paling besar dan paling berpengaruh adalah variabel fisik bangunan yaitu sebesar 45%, sedangkan yang paling kecil adalah variabel dokumentasi yaitu sebesar 5%. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Purworejo periode 2015-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.94 Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

Sumber: DPUPR Purworejo, 2024

Capaian IKSI kabupaten Purworejo tahun 2015-2023 mengalami fluktuatif, akan tetapi mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2015, capaian IKSI sebesar 61,15% meningkat menjadi 70,09% di tahun 2023.





Walaupun sempat terjadi penurunan di tahun 2017 dan 2022, dalam kurun waktu 8 tahun terjadi peningkatan capaian IKSI sebesar 8,94%.

Peningkatan tersebut didorong oleh adanya kolaborasi berbagai pendanaan dan program baik dari Pemerintah Pusat melalui APBN maupun dari APBD. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi banyak dilakukan di Daerah Irigasi kewenangan kabupaten melalui dana APBD. Sedangkan peningkatan/rehabilitasi Daerah Irigasi kewenangan pusat banyak ditangani melalui program-program dari pemerintah pusat misalnya Program *Strategic Irrigation Modernization and Urban Rehabilitation Project* (SIMURP) dan *Irrigation Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP).

Salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan adalah buruknya saluran drainase di badan jalan. Saluran drainase merupakan salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air, sehingga badan jalan tetap kering. Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Terkadang pembuatan drainase sering dilupakan dalam perancangan ruas jalan maupun evaluasi kerusakan jalan. Padahal drainase sangat penting dan tak terpisahkan dari jalan. Drainase sering diabaikan karena dianggap kurang penting dan kurang esensial bagi jalan secara keseluruhan.

Panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang tercantum dalam Masterplan Drainase Perkotaan Purworejo-Kutoarjo adalah sepanjang 247.955 m. Panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2023 adalah 72.053 m, sehingga capaian di tahun 2023 sebesar 29,06%. Walaupun terdapat peningkatan capaian sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 28,70%, akan tetapi persentase capaian saluran drainase dalam kondisi baik tahun 2022 masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 31,23%. Beberapa faktor yang menjadi penghambat capaian drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo diantaranya:

- a. Panjang saluran drainase yang ditangani per tahun tidak sebanding dengan panjang total saluran drainase di Kabupaten Purworejo. Tiap tahun rata-rata pemerintah Kabupaten Purworejo hanya melakukan kegiatan rehabilitasi saluran drainase sepanjang 500-1.500 m. Selebihnya merupakan kegiatan pemeliharaan.
- b. Penanganan saluran drainase tidak ditangani secara total, hanya per titik/spot.
- c. Penanganan drainase tidak dimulai dari sumber permasalahan genangannya, sehingga sering memunculkan genangan baru khususnya pada musim penghujan.
- d. Menurunnya kapasitas saluran drainase karena sedimentasi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sepanjang saluran drainase.



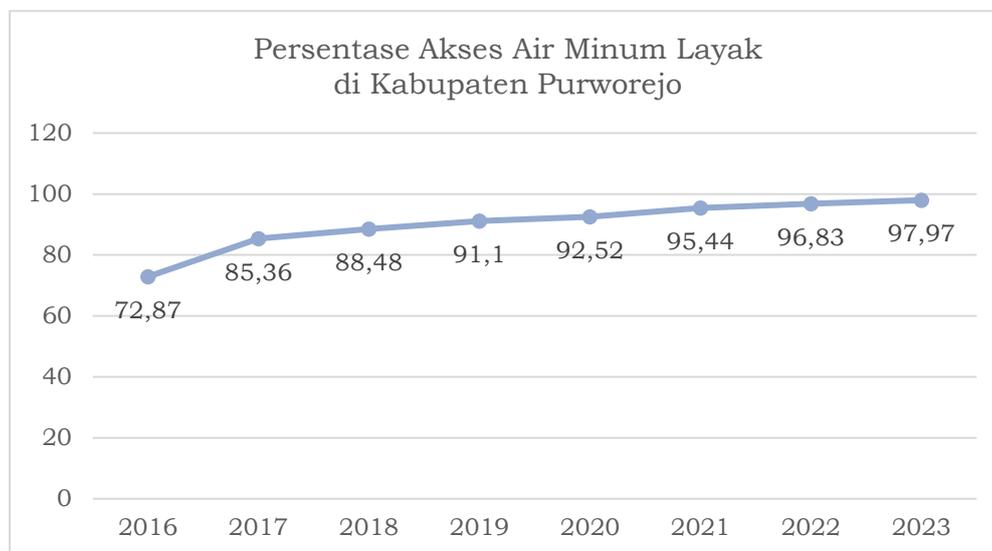


Tabel 2.52 Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	28,01%	28,21%	28,27%	28,70%	29,06%
2	Panjang saluran drainase kondisi baik/ tidak tersumbat pembuangan aliran air	69.452	69.936	70.086	71.165	72,053
3	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	247.955	247.955	247.955	247.955	247.955

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup serta produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dimana diantara sarana dan prasarana dasar tersebut berupa sarana air minum dan sanitasi. Akses air minum layak di Kabupaten Purworejo trennya terus meningkat tiap tahun, walaupun target sebesar 100% belum tercapai. Pada tahun 2016 capaiannya yakni 72,87% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 97,97%.



Gambar 2.95 Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023

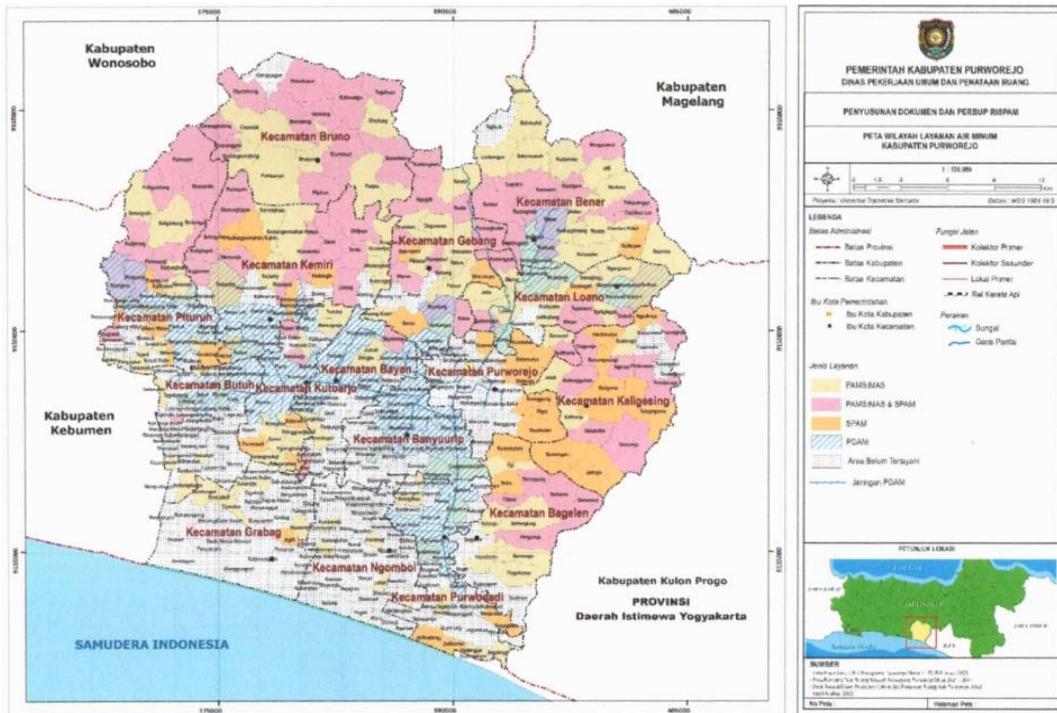
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian tersebut didorong melalui pemenuhan kebutuhan air minum melalui jaringan perpipaan dan non jaringan perpipaan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang belum terlayani PDAM, maka sumber air baku yang mereka pakai untuk pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari berasal dari sumur atau mata air (pengambilan menggunakan selang cacing). Di beberapa wilayah desa juga mendapatkan bantuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan misalnya melalui Program Pamsimas, DAK Air Minum, Hibah Air Minum Perdesaan dan lain-lain. Sedangkan bagi masyarakat wilayah perkotaan selain menggunakan sumur individu, pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari mereka dipenuhi





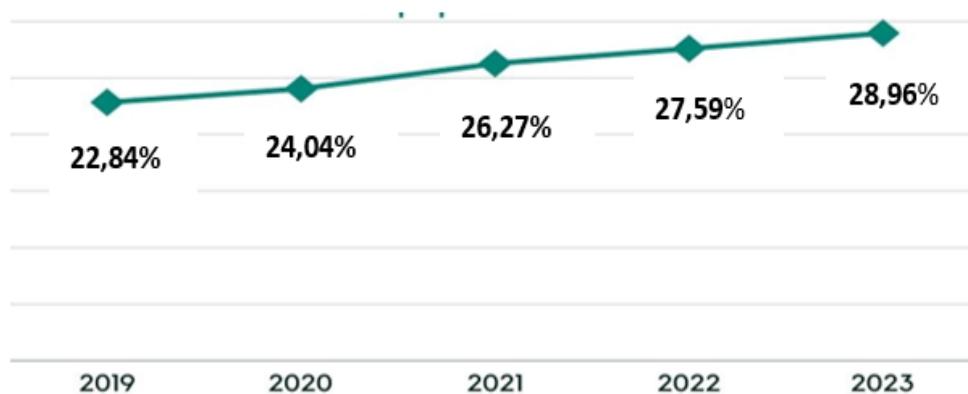
melalui layanan PDAM. Persebaran layanan kebutuhan air minum di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :



Gambar 2.96 Peta Layanan Sebaran Air Minum PDAM

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka terjadi peningkatan tentang standar capaian air minum. Jika semula akses air minum layak dirasa cukup, maka gradenya dinaikkan menjadi akses air minum aman. Akses air minum aman artinya bahwa air minum tersebut harus memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Buku Pedoman Pengukuran Capaian Perumahan dan Permukiman oleh Bappenas 2019). Akses air minum aman Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.97 Capaian Akses Air Minum Aman di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023

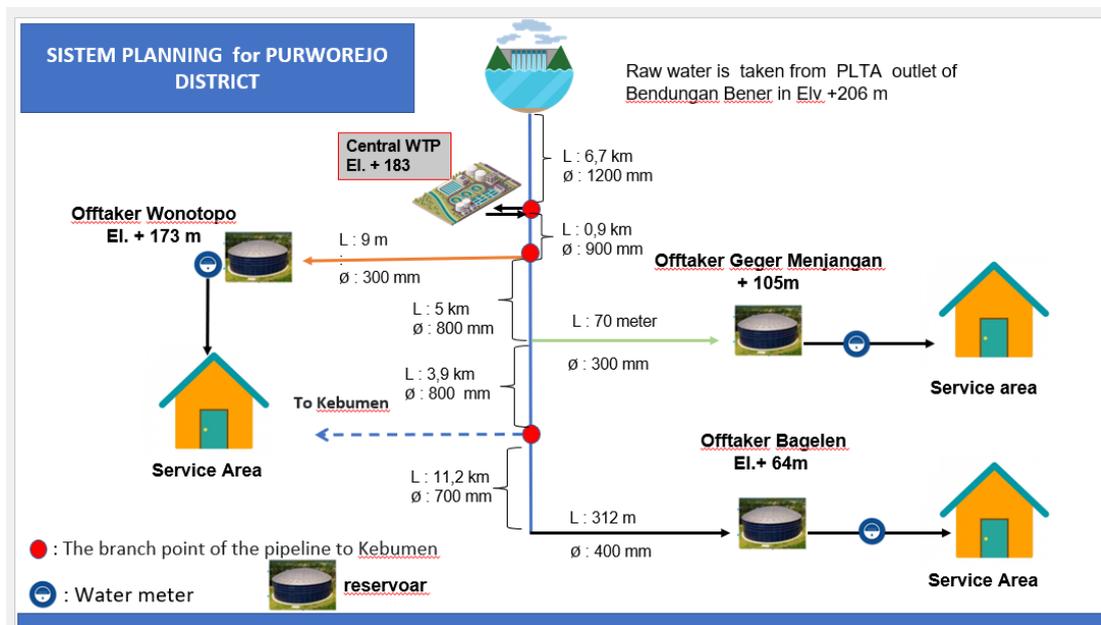
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian akses air minum aman Kabupaten Purworejo banyak ditopang melalui layanan jaringan PDAM dan intervensi program penyediaan SPAM dari Pemerintah. Beberapa kekurangan dari layanan PDAM yaitu





jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Kapasitas air baku yang masih terbatas, sehingga belum dapat melayani seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Selama ini sumber air baku untuk layanan PDAM di Kabupaten Purworejo hanya mengandalkan beberapa mata air yang ada serta beberapa sungai yang melintas di Kabupaten Purworejo. Adanya pembangunan Regional Keburejo yang mengambil air baku dari IPA Jembangan dan IPA Balingasal Kebumen, sedikit banyak telah mendongkrak capaian akses air minum aman di Kabupaten Purworejo. Selain itu diharapkan dengan beroperasinya Bendungan Bener dengan kapasitas 500 lps untuk Kabupaten Purworejo dapat melayani 50.000 SR. Sistem Planning dari Bendungan Bener untuk adalah sebagai berikut:

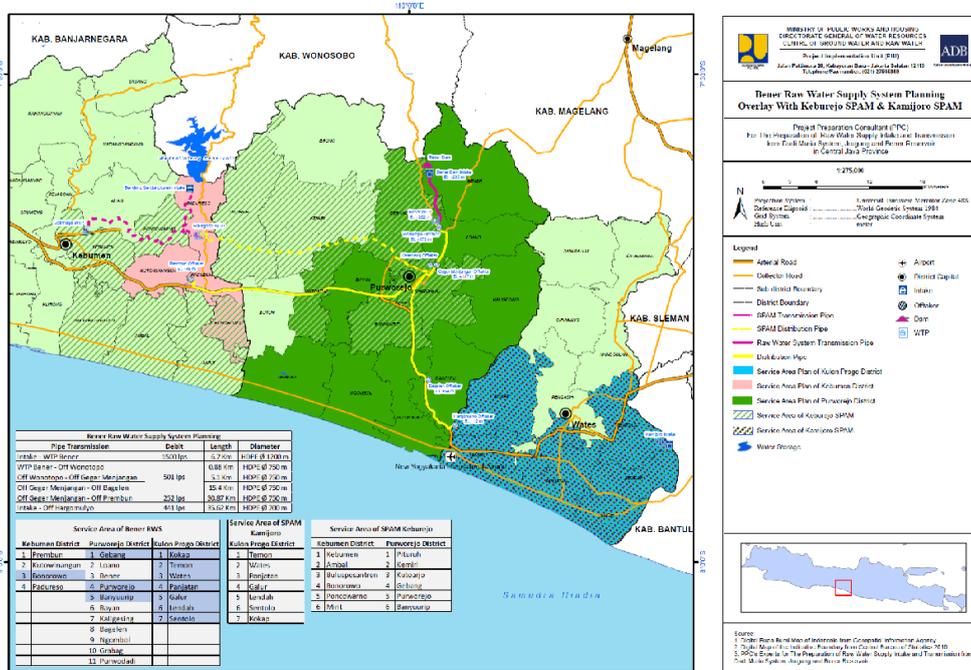


Gambar 2.98 System Planning Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo

Sumber: BBWS Serayu Opak, Yogyakarta, 2024

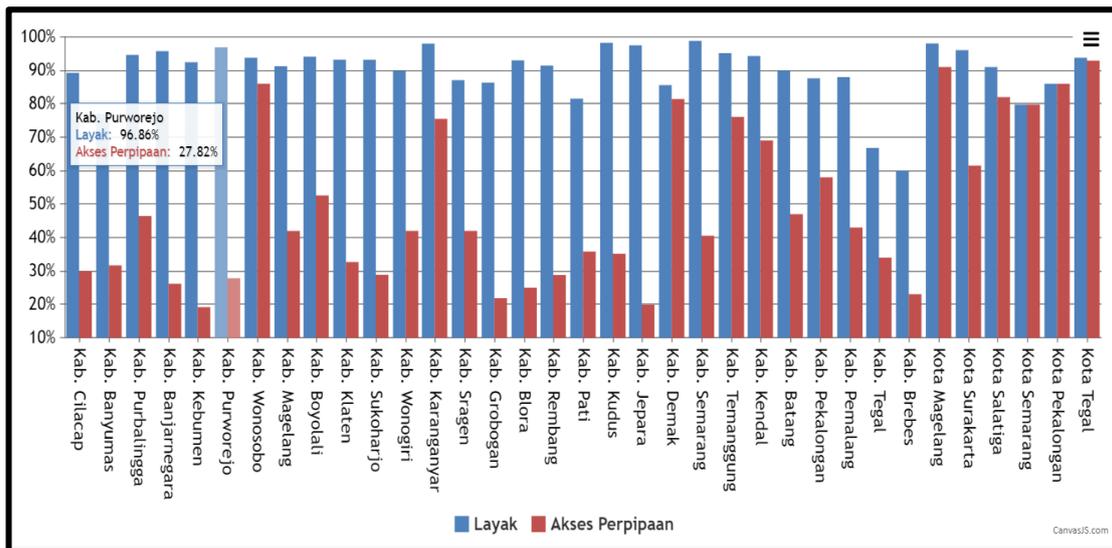
Adapun peta area layanan Bendungan Bener yang dioverlaykan dengan area layanan SPAM Regional Keburejo dan SPAM Regional Kamijoro Kulonprogo adalah sebagai berikut:





Gambar 2.99 Raw Water Supply Bendungan Bener dengan SPAM Regional Keburejo dan SPAM Regional Kamijoro
 Sumber: BBWS Serayu Opak, Yogyakarta, 2024

Jika dilihat secara kewilayahan, capaian akses air minum layak dan akses air minum perpipaan di Kabupaten Purwokerto sudah cukup baik. Capaian akses air minum layak sudah mencapai angka 97,97%. Artinya masih ada gap sebesar 2,03% untuk mencapai target dalam RPJMN maupun RPJMD yaitu sebesar 100% di tahun 2024. Adapun untuk akses air minum perpipaan capaiannya sebesar 27,82%. Artinya masih terdapat gap sebesar 2,18 untuk mencapai target dalam RPJMN yaitu sebesar 30%.



Gambar 2.100 Capaian Akses Air Minum Layak dan Akses Perpipaan di Jawa Tengah Tahun 2023
 Sumber: Dinas PU BMCK Prov Jateng, 2023

Beberapa hal yang menjadi pendorong pesatnya capaian air minum di Kabupaten Purwokerto yaitu adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui Program Pamsimas, Program Hibah Insentif Desa, Program Hibah Air Minum Perdesaan, DAK Air Minum, dan Program Pamsimas APBD. Selain itu masifnya pemasangan Sambungan Rumah (SR) dari PDAM melalui subsidi





pemasangan SR baru ditengarai menjadikan peningkatan capaian air minum yang cukup signifikan. SPAM Regional Keburejo dengan kapasitas sementara 50 liter/detik secara tidak langsung meningkatkan akses air minum layak dan aman bagi masyarakat utamanya di Kecamatan Pituruh, Kemiri, Butuh, Grabag dan Kutoarjo.

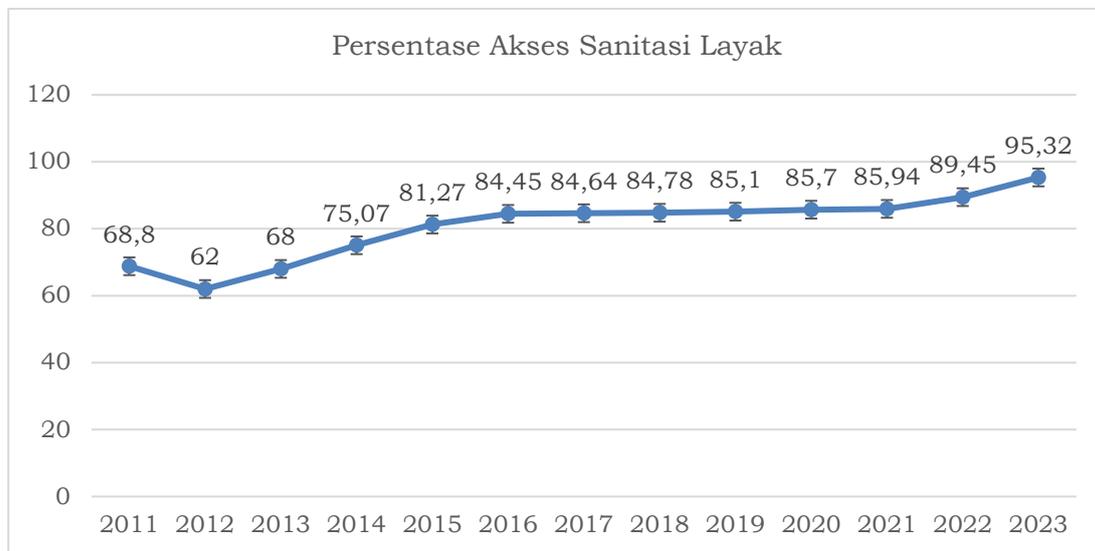
Beberapa isu dalam penyediaan akses air minum di Kabupaten Purworejo diantaranya *idle capacity* secara kualitas dan kuantitas air baku masih terbatas; belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); belum optimalnya tata kelola kelembagaan pengelola SPAM di daerah baik itu BUMD air minum maupun KPSPAM/BPSPAM; belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan SPAM; rendahnya kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dan keterbatasan alokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD serta sumber pendanaan lainnya (KPBU, CSR dan lain-lain).

Berdasarkan amanat RPJPN 2025-2045, tiap rumah tangga di kawasan perkotaan diarahkan untuk menyediakan air siap minum perpipaan yang diukur melalui indikator Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
- b. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*);
- c. Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
- d. Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Hingga tahun 2023 Kabupaten Purworejo belum dapat melaksanakan amanat tersebut karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Purworejo masih menggunakan air minum non perpipaan yang bersumber dari sumur bor/pompa dan sumur terlindungi. Sebagai salah satu infrastruktur layanan dasar yang vital, pelayanan pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat dipenuhi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan target pelayanan air limbah nasional yaitu *universal acces* yang mengamanatkan pelayanan air limbah dapat diakses 100% penduduk. Berikut data capaian akses sanitasi layak Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023.



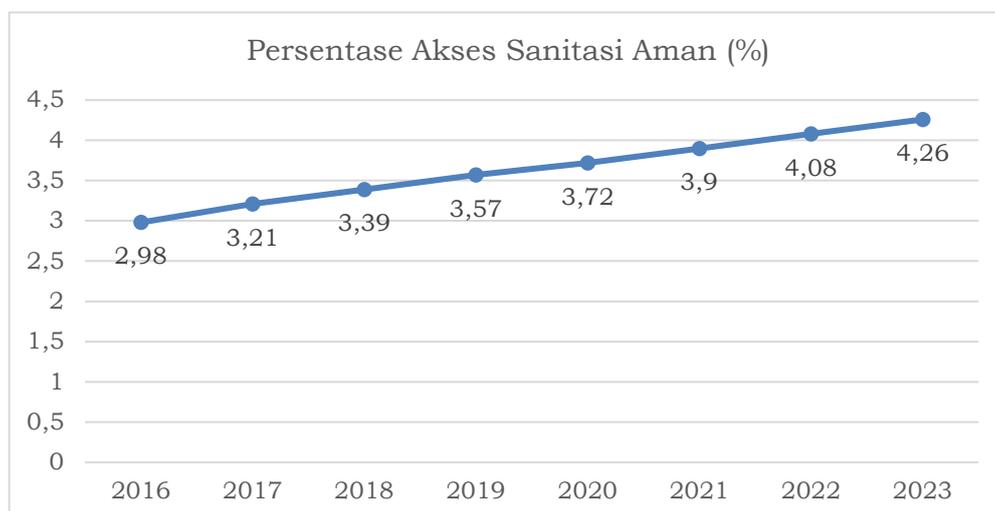


Gambar 2.101 Persentase Capaian Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, capaian akses sanitasi layak masyarakat Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahun. Rata-rata tren peningkatan terbilang masih kecil yaitu sebesar 0,6% pertahun. Capaian tersebut jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, masih jauh dibawah target nasional yakni meningkat 100%.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga meningkatkan grade indikator untuk capaian akses sanitasi. Jika sebelumnya berupa akses sanitasi layak, maka indikatornya meningkat menjadi akses sanitasi aman. Indikator akses sanitasi aman mempertimbangkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T dan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Akan tetapi perhitungan akses sanitasi aman baru diperhitungkan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.



Gambar 2.102 Persentase Capaian Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024





Akses sanitasi aman di Kabupaten Purworejo masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan capaian akses di tingkat provinsi maupun nasional. Hal tersebut disebabkan adanya indikator jumlah rumah tangga yang memiliki Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T). SPALD T kurang sesuai jika diterapkan di Kabupaten Purworejo karena kondisi topografis yang datar. SPALD T hanya sesuai jika diterapkan di wilayah yang beda elevasinya tinggi, sehingga otomatis SPALD T hanya sesuai diterapkan di wilayah pegunungan/perbukitan di Kabupaten Purworejo. Selama ini pembangunan SPALD T di Kabupaten Purworejo dilakukan melalui Program DAK SLBM.

Indikator jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), juga ditengarai menyebabkan akses sanitasi aman di Kabupaten Purworejo masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai kesadaran untuk melakukan penyedotan tinja dalam kurun 5 tahun sekali, dan ditengarai banyak tanki septik individu yang bocor sehingga mencemari lingkungan. Kondisi IPLT Jetis yang kapasitasnya penuh juga menyebabkan akses air minum di Kabupaten Purworejo cenderung rendah. IPLT hanya melayani masyarakat di wilayah perkotaan, belum seluruh masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Secara umum masih rendahnya tingkat cakupan layanan akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Purworejo disebabkan karena belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah, belum optimalnya tata kelola kelembagaan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL), kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah, belum optimalnya pemisahan regulator, operator dan pengawasan pengelolaan sanitasi dan keterbatasan pendanaan pada sektor sanitasi.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jetis.

Kabupaten Purworejo memiliki dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Di tahun 2023 capaian SPM bidang air minum sebesar 97,97% sedangkan capaian SPM bidang air limbah sebesar 95,32%. Hal ini lebih lanjut dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

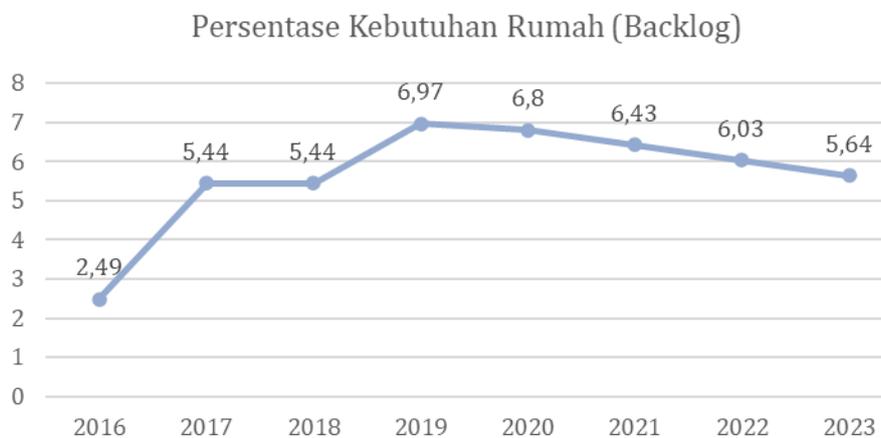
No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5			
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	45,93%	46,25%		96,86%	97,97%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	28,34%	28,23%		89,45%	95,32%

Sumber: DPUPR dan Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024





Sebagaimana yang terjadi di kota/kabupaten lain di Jawa Tengah, penyediaan perumahan menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Purworejo. Kebutuhan akan perumahan baru yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Pemanfaatan lahan di perkotaan semakin mempersulit Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah, karena kenaikan harga tanah menjadi pendongkrak utama kenaikan harga rumah yang sudah naik rata-rata 20% per tahun. Ketidakseimbangan antara *supply and demand* lahan menyebabkan tingginya harga lahan. Hal tersebut menyebabkan masih tingginya angka backlog perumahan di Kabupaten Purworejo. Dalam upaya menurunkan tingginya angka backlog perumahan di Kabupaten Purworejo, pemerintah bekerjasama dengan pihak pengembang (developer) telah melakukan beberapa upaya terobosan, salah satunya melalui kebijakan rumah berimbang (1 rumah mewah, 2 rumah premium dan 3 rumah sederhana/subsidi). Kebijakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menurunkan angka *backlog* perumahan di Kabupaten Purworejo. Dalam 1 (satu) dekade terakhir setidaknya telah terjadi penurunan angka backlog perumahan. Persentase kebutuhan rumah (*backlog* rumah) di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.



Gambar 2.103 Persentase Kebutuhan rumah (*backlog*) Tahun 2016-2023 Di Kabupaten Purworejo

Sumber: Dinperkimtan, Kabupaten Purworejo, 2024

Secara umum angka backlog perumahan di Kabupaten Purworejo semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 angka backlog perumahan di Kabupaten Purworejo berada pada angka 2,49 nilai cenderung naik tiap tahun mencapai angka 6,97% pada tahun 2019. Dengan semakin meningkatnya intervensi program FLPP maupun pembangunan rumah tapak dari pengembang, angka backlog di Kabupaten Purworejo setiap tahun makin menurun dan berada di angka 5,64% di tahun 2023. Sampai dengan akhir tahun 2023 masih terdapat kebutuhan rumah (*backlog*) yang belum terpenuhi sebesar 15.554 unit yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Purworejo.

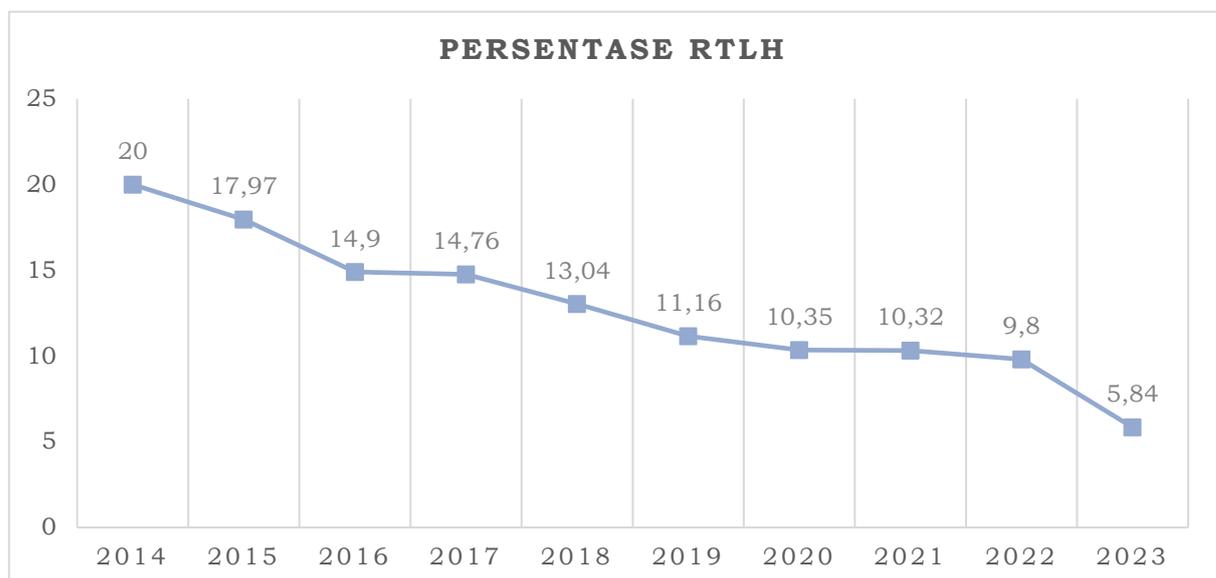
Selain masih tingginya angka backlog perumahan, tingginya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi isu terkait perumahan dan





permukiman di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data BDT 2016, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purworejo sebesar 30.104 unit. Dengan adanya intervensi dari program pemerintah baik melalui Program BPS, maupun rehabilitasi RTLH melalui dana APBD Provinsi (bankeupendes) dan APBD kabupaten, jumlah RTLH dari tahun ke tahun nilainya semakin menurun. Pada tahun 2020, jumlah RTLH di Kabupaten Purworejo sebanyak 20.911 unit dan pada tahun 2022 sebesar 19.805 unit.

Adapun setiap tahun terjadi tren penurunan jumlah RTLH. Pada tahun 2014 persentase RTLH di Kabupaten Purworejo sebesar 20%. Selama 5 tahun, angka tersebut menurun menjadi 11,16% di tahun 2019, dan Kembali turun menjadi 9,8% di tahun 2022. Di tahun 2023, nilainya kembali turun menjadi 5,84%.



Gambar 2.104 Persentase RTLH di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2023

Sumber: Dinperkintan Purworejo, 2024

Berbanding terbalik dengan capaian persentase RTLH, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purworejo meningkat selama enam tahun terakhir. Berikut data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.54 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	90,32%	92,01%	92,87%	93,20%	93,68%	94,16%
2	Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau	233.352	241.508	247.146	251.422	256.958	259.433
3	Jumlah rumah tangga	258.358	262.481	266.110	269.779	274.298	275.534

Sumber: Dinperkintan Kabupaten Purworejo, 2024

Perhitungan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purworejo baru menggunakan kriteria Ketahanan bangunan (*durable housing*) saja, yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan





Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi dua hal, yaitu Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; serta Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

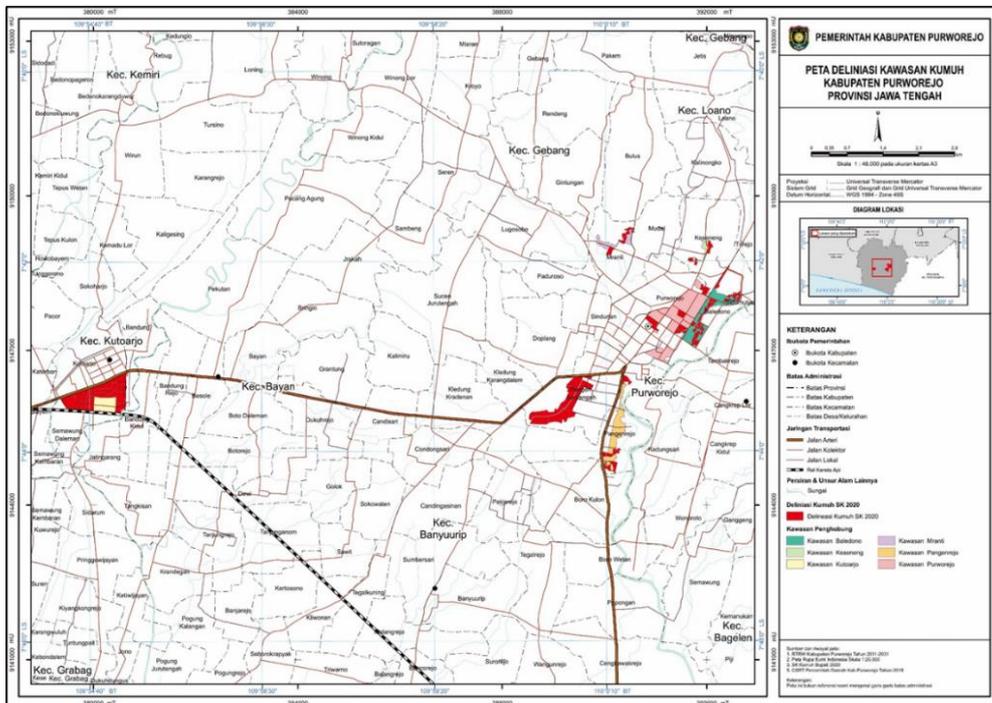
Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini menggunakan empat kriteria yaitu Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$; Memiliki akses air minum layak; serta Memiliki akses sanitasi layak.

Pada tahun 2022 hingga 2023 BPS telah melakukan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yakni pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Salah satu data yang digunakan dalam Penanganan RTLH di Kabupaten Purworejo yaitu data jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data Regsosek, persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo sebesar 63,55% sedangkan Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purworejo sebesar 35,84%.

Selain *backlog* perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni, permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari di Kabupaten Purworejo. Belum optimalnya pemanfaatan lahan serta dominasi hunian tepat terutama di wilayah perkotaan yang menyebabkan harga lahan dan hunian semakin tidak terjangkau memicu terjadinya *urban sprawl*, permukiman kumuh dan permukiman illegal. Semakin mahal dan terbatasnya lahan yang tersedia, menyebabkan masyarakat *peri urban* yang didominasi oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya munculah kawasan kumuh baru, yang biasanya terletak di daerah sempadan sungai, kawasan di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (pasar) dan sempadan rel kereta api.

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan SK Bupati Nomor 160.18/526/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Purworejo, terdapat 126,811 (Seratus dua puluh enam koma delapan ratus sebelas) Ha luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Mranti, Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kelurahan Baledono, Kelurahan Pangerejo dan Kelurahan Keseneng. Berikut peta kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo.





Gambar 2.105 Peta Kawasan Kumuh Di Kabupaten Purworejo
 Sumber: Dokumen RP2KPKPK, 2024

Kawasan kumuh perkotaan Purworejo terdiri dari kawasan kumuh yang ada di Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo. Berikut adalah gambaran dan identifikasi terkait permukiman kumuh perkotaan Purworejo secara lebih rinci.

Tabel 2.55 Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo

No	Nama Desa	Wilayah Mikro Perencanaan	Luas (Ha)
1	2	3	4
Kecamatan Purworejo			
1	Kel Pangenrejo	RT 01 / RW II RT 02 / RW V RT 01, 02/ RW VI	7,899
2	Kel Mranti	RT 03, 04 / RW III	4,390
3	Kel Baledono	RT 02, 03 ,05, 06, 07 / RW IV RT 01, 02, 03, 04 / RW V RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 / RW VII RT 03, 04, 05 / RW VIII	13,504
4	Kel Purworejo	RT 02 / RW I RT 01 / RW IX RT 01,02,03,06 / RW XII RT 02 /RW XIII	10,000
5	Kel Keseneng	RT 01,04/RW I	2,800
6	Kel Pangenjuritengah	RT 01, 02, 03 / RW IV RT 01, 02, 03 / RW V	39,300
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Purworejo			88,13
Kecamatan Kutoarjo			
1	Kel Kutoarjo	RT 01, 02, 03, 04 / RW I RT 01, 02, 03 / RW II RT 01, 02, 03, 04 / RW III RT 01, 02, 03, 04, 05 / RW XI RT 01, 02, 03, 04 / RW XII	48,918
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Kutoarjo			48,918
Total Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo			126,811

Sumber: SK Bupati Nomor 160.18/526/2020





Persentase penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, capaiannya sebesar 34,37% meningkat menjadi 47,07% pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020, ketika capaian luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo sebesar 104,48 ha, karena kurangnya kegiatan pencegahan untuk muncul dan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh baru. Akhirnya pada tahun 2020, luasan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo naik kembali menjadi 126,811 ha dan telah dilegal formalkan dengan menggunakan SK Bupati Purworejo. Pada tahun 2021-2022 terjadi tren peningkatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2021-2022 terdapat intervensi penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo melalui Program Penanganan Kumuh Skala Kawasan yang bersumber dari dana APBN dan sharing APBD. Program ini dapat mengurangi tingkat kekumuhan di Kelurahan Kutoarjo sebesar 46,991 ha. Selain itu intervensi penanganan kumuh melalui sumber dana APBD juga digencarkan oleh Pemkab Purworejo sehingga dapat mengurangi kekumuhan di Kelurahan Purworejo sebesar 9,159 ha; Kelurahan Pangen Juru Tengah 39,3 ha; Kelurahan Baledono 8,75 ha; Kelurahan Mranti 2,923 ha dan Kelurahan Pangenrejo 7,899 ha. Sehingga sisa luasan kumuh di Kabupaten Purworejo sebesar 11,789 ha.

Adapun rincian intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh per kelurahan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56 Rincian Intervensi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh per Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh s/d 2022(Ha)	Intervensi Pengurangan Kumuh Tahun 2023	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2023 (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kutoarjo	Kutoarjo	48,918	46,991	0	1,93
2	Purworejo	Purworejo	10,000	9,159	0	2,325
3	Purworejo	Pangen Juru Tengah	39,300	39,3	0	2,996
4	Purworejo	Baledono	13,504	8,75	0	2,80
5	Purworejo	Keseneng	2,800	0	0	4,831
6	Purworejo	Mranti	4,390	2,923	0	2,996
7	Purworejo	Pangenrejo	7,899	7,899	0	0,841
	TOTAL		126,811	115,02	0	11,789

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo masih rendah diantaranya:

- Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo terkendala pada penanganan kawasan kumuh berdasarkan luasan, dimana kawasan kumuh dengan luas > 15 ha menjadi kewenangan pusat, kawasan kumuh 10 ha-15 ha menjadi kewenangan provinsi dan kawasan kumuh dengan luasan < 10 ha menjadi kewenangan kabupaten.
- Penanganan kumuh dengan menggunakan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN selama ini diintervensi melalui Program Kota Tanpa Kumuh





(KOTAKU) yang hanya terdapat di Kecamatan Kutoarjo, sedangkan Kecamatan Purworejo tidak pernah mendapatkan Program KOTAKU. Selain itu Program KOTAKU di Kabupaten Purworejo sudah berakhir di tahun 2020.

- Selain Program KOTAKU terdapat program lain dari sumber pendanaan APBN untuk penanganan kawasan kumuh yaitu penanganan kumuh skala kawasan dan DAK integrasi. Akan tetapi proses untuk mendapatkannya sangat sulit karena harus berkompetisi dengan ratusan kabupaten/kota di Indonesia, dimana tiap tahun hanya terpilih 10 kabupaten/kota.
- Tidak adanya pendanaan dari APBD Provinsi dalam intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 ha.
- Dalam upaya intervensi penanganan kumuh masih sering terkendala pada aspek legalitas lahan sehingga tidak jadi dilaksanakan, misalnya untuk proses Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*).
- Masyarakat yang tinggal di *slum area* enggan untuk pindah karena mereka sudah merasa nyaman dan secara turun temurun tinggal di permukiman kumuh.

Pengembangan sektor transportasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kabupaten Purworejo, yang mengedepankan sektor wisata dan pertanian. Ini artinya bahwa sektor transportasi harus menjadi bagian dari sektor pertanian dan pariwisata. Keberhasilan pembangunan sektor transportasi bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaannya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo (*impact*).

Keberadaan *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menjadi pemicu tumbuhnya kawasan *aerotropolis* di Jawa Tengah bagian selatan. Rencana jaringan transportasi yang akan dikembangkan di kawasan sekitar YIA (*Border City*) antara lain jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan jaringan jalur kereta api. Rencana jaringan jalan meliputi peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi yang menghubungkan dengan batas Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY; Peningkatan jalan strategis nasional (Jalan Daendels) yang menghubungkan dengan batas Kabupaten Kebumen-Purworejo-Kulonprogo; serta Peningkatan dan pengembangan system jalan lingkungan di seluruh kawasan. Rencana jalur pejalan kaki di Kawasan *Border City* berada pada kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan pejalan kaki seperti pusat perbelanjaan/hiburan, pusat perkantoran, sarana pelayanan umum, perumahan, dan pariwisata. Jalur kereta api yang melewati Kawasan *Border City* yaitu jaringan jalur kereta api antar Kota Surakarta-Kutoarjo dengan salah satu pemberhentian di Stasiun Wojo, Desa





Dadirejo, Kecamatan Bagelen. Rencana jaringan rel kereta api di Kawasan *Border City* yaitu peningkatan kualitas jaringan jalur kereta api dengan mengembangkan simpul-simpul transportasi melalui pendekatan Transit Oriented Development (TOD). Penerapannya dengan merencanakan halte pada area strategis dengan simpul-simpul permukiman, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan kantong parkir sebagai sarana untuk mencapai halte pemberhentian transportasi umum. Kantong parkir disediakan utamanya untuk sepeda demi mendorong penggunaan kendaraan non bermotor dan tercipta kawasan yang walkable dan transit supportive.

Transit Oriented Development (TOD) didukung dengan berbagai potensi ekonomi pada masing-masing kawasan strategis. Beberapa titik kawasan yang akan dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo. *Bus Rapid Transit* (BRT) sebagai angkutan Aglomerasi Purwomanggung koridor Stasiun Kutoarjo-Borobudur mulai beroperasi tahun 2020. Sedangkan *Bus Rapid Transit* (BRT) untuk koridor Kutoarjo-Dieng telah beroperasi sejak tahun 2021. Keberadaan Stasiun Wojo sebagai pemadu antarmoda transportasi kereta api, bus, dan pesawat udara di kawasan perkotaan *Border City* di wilayah Kecamatan Bagelen dan Purwodadi terkait keberadaan *Yogyakarta International Airport* (YIA). Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka masing-masing perkotaan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan amenities perkotaan untuk memenuhi kebutuhan transit. Selain itu pembangunan rel ganda Kutoarjo-Kroya diharapkan meningkatkan akses ke Stasiun Besar Kutoarjo.

Berikut pembahasan per sub urusan yang ada pada Urusan Perhubungan.

1) Rambu

Penyediaan rambu jalan dan RPPJ merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam indikator ketercapaian urusan perhubungan. Rambu jalan dipasang pada daerah rawan kecelakaan, geometris jalan lurus menikung dan halus, serta volume kendaraan ramai akan tetapi belum ada rambu jalan. Sedangkan RPPJ ditempatkan pada jalan pada kawasan strategis yang belum terdapat rambu penunjuk jalan. Berikut data ketersediaan rambu jalan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.57 Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rambu	702	1.232	1.332	1.656	1.881	2.066
2.	Jumlah APILL	67	76	79	86	86	90
3.	Jumlah PJU	8	43	43	3.187	3.911	4.020
No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	
		9	10	11	12	9	
1.	Jumlah rambu	2.281	2.475	2.509	2.583	2.919	
2.	Jumlah APILL	90	99	109	111	111	
3.	Jumlah PJU	4.376	4.486	4.701	4.915	5.027	

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024





Jumlah rambu, APILL, dan PJU di Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, jumlah rambu di Kabupaten Purworejo sebanyak 2.919 buah, jumlah APILL sebanyak 111 buah, dan jumlah PJU sebanyak 5.027 buah.

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan, ketersediaan Alat Pengaman Pengguna Jalan (APPJ) mutlak diperlukan. Selain rambu jalan, marka jalan, APILL dan LPJU yang telah disebutkan di atas, terdapat pula alat pengaman pengguna jalan (APPJ) yang meliputi pagar pengaman jalan (*guard rail*), cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pulau lalu lintas, pita pengaduh, jalur penghentian darurat, serta pembatas lalu lintas. Namun Kabupaten Purworejo belum memiliki semua jenis APPJ tersebut. Berikut data jumlah APPJ di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.58 Ketersediaan Alat Pengaman Pengguna Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah pagar pengaman jalan (<i>guard rail</i>)	380	972	972	1.172	1.172	1.172
2	Jumlah cermin tikungan	8	14	18	28	28	40
3	Jumlah tanda patok tikungan (<i>delineator</i>)	617	617	667	717	717	737
4	Jumlah pita pengaduh	6	6	12	27	27	28
5	Pembatas lalu lintas						
No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	
		9	10	11	12	13	
1	Jumlah pagar pengaman jalan (<i>guard rail</i>)	1.172	1.172	1.228	1.228	1.228	
2	Jumlah cermin tikungan	55	59	59	79	79	
3	Jumlah tanda patok tikungan (<i>delineator</i>)	737	873	873	873	873	
4	Jumlah pita pengaduh	41	41	44	44	44	
5	Pembatas lalu lintas				120	120	

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

APPJ yang dimiliki Kabupaten Purworejo antara lain pagar pengaman jalan (*guard rail*), cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), pita pengaduh, serta pembatas lalu lintas. Di tahun 2023 jumlah pagar pengaman jalan (*guard rail*) sebanyak 1.228 meter, jumlah cermin tikungan sebanyak 79 buah, jumlah tanda patok tikungan (*delineator*) sebanyak 873 buah, jumlah pita pengaduh sebanyak 44 buah, serta jumlah pembatas lalu lintas sebanyak 120 buah.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang





Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *guardrail*, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan.

Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, *guardrail* dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 34,80%. Berikut rincian perhitungannya.

Tabel 2.59 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024
1	2	3
1	Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan	79
2	Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota	227
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	34,80 %

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat 79 ruas jalan kabupaten yang telah dilengkapi kelengkapan jalan seperti rambu jalan, cermin tikungan, PJU, APILL, *Warning Light*, marka, *guardrail*, *delineator*, dan pita penggaduh. Ini berarti masih ada 148 ruas jalan kabupaten lagi yang perlu dilengkapi perlengkapan jalan demi meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

2) Terminal

Untuk menunjang keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang angkutan darat sangat dibutuhkan infrastruktur berupa terminal. Kabupaten Purworejo mempunyai 3 tipe terminal, yaitu Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Kabupaten Purworejo mendapatkan program Revitalisasi Terminal Tipe A secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Terminal Tipe A yang lama berada di Desa Candisari Kecamatan Banyuurip, sedangkan Terminal Tipe A yang baru dibangun di lokasi yang baru, yaitu Jalan Gajah Mada, Kecamatan Banyuurip, berseberangan dengan Mapolres Purworejo atau sekitar 500 meter dari terminal lama (eksisting). Nantinya terminal tipe A lama yang aset tanahnya merupakan milik desa akan dikembalikan kepada pihak desa. Pembangunan terminal tipe A selesai pada akhir tahun 2023. Terminal tipe A ini nantinya berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).





Gambar 2.106 Terminal Tipe A Purworejo

Sumber: Survey Primer, 2024

Selain Terminal Tipe A, Kabupaten Purworejo juga memiliki Terminal Tipe B yang berada di Kalianyar Kutoarjo, dekat dengan Stasiun Kutoarjo. Terminal tipe B berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Selain itu BRT Trans Jateng koridor Kutoarjo-Borobudur juga melakukan pemberangkatan dan mengakhiri perjalanan di Terminal Tipe B Kutoarjo.



Gambar 2.107 Terminal Tipe B Purworejo

Sumber: Survey Primer, 2024

Terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Purworejo berjumlah tiga buah, yaitu Terminal Kongsri, Terminal Non Bus Pasar Kutoarjo, dan Terminal Kutoarjo. Ketiga terminal tersebut masih berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini. Selain tiga terminal tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Purworejo sedang membangun Terminal Tipe C Purwodadi yang berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Terminal Tipe C berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).





Gambar 2.108 Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan)

Sumber: Survey Sekunder, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada penumpang angkutan dalam hal pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan. Ketiga terminal Tipe C di Kabupaten Purworejo sudah berusaha memenuhi pelayanan tersebut, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas keamanan jalan, kantor penjaga terminal, petugas operasional terminal, ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas dan petugas kebersihan, drainase, ketersediaan letak jalur pemberangkatan dan kedatangan, tempat naik/turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

3) Titik Parkir

Kabupaten Purworejo ditargetkan menangani 221 titik parkir berdasarkan dokumen perencanaan di tahun 2023. Kondisi persentase titik parkir yang terlayani selalu membaik dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2023, jumlah titik parkir yang dikelola mencapai 221 titik dari 224 titik parkir yang ada.

Tabel 2.60 Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Titik Parkir yang dikelola	155	160	165	165	172	221
2	Jumlah Titik Parkir	165	165	224	224	224	224

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan kajian Survei Potensi Parkir Kabupaten Purworejo yang telah disusun oleh Dinhub pada tahun 2022, diperoleh data titik parkir yang ada di Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua yaitu tempat khusus parkir dan parkir tepi jalan umum (on street). Terdapat tujuh lokasi yang masuk dalam tempat khusus parkir yaitu Pasar Baledono, Obyek Wisata Goa Seplawan, Gor Jend. Sarwo Edy Wibowo, Pasar Purworejo, Pasar Kutoarjo, RSUD Tjitro Wardoyo, dan Kolam Arta Tirta.





Sedangkan untuk parkir tepi jalan umum (on street) ada 224 titik parkir yang tersebar di wilayah perkotaan Purworejo-Kutoarjo.

4) Angkutan Darat

Untuk menunjang Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mengajukan usulan penyediaan halte di sekolah-sekolah melalui dana APBN. Sehingga di tahun 2020 terdapat tambahan halte sebanyak 6 unit. Data sebaran letak halte di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo

No	Nama Jalan	Jumlah		Keterangan
1	2	3		4
1	Depan PDAM	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
2	Depan RS Permata	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
3	Depan Dinas Pertanian	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
4	Depan Kejaksaan Lama	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
5	Alun-alun KTA	1	Lokasi	APBD 2016
6	Depan SMP N 1 Purworejo	1	Lokasi	APBD 2017
7	Simpang 3 Boro	1	Lokasi	APBD 2017
8	SMPN 26 / DPU	1	Lokasi	APBD 2019
9	SMP 2	1	Lokasi	APBNP 2020
10	SMP 31	1	Lokasi	APBNP 2020
11	SMA 3	1	Lokasi	APBNP 2020
12	RSUD Cokronegoro/AKPER	1	Lokasi	APBNP 2020
13	SMA 2	1	Lokasi	APBNP 2020
14	Kec Bayan / SMP Bayan	1	Lokasi	APBNP 2020
	JUMLAH	14	Lokasi	

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, jumlah angkutan darat relatif tetap. Penurunan jumlah angkutan darat terjadi pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi covid-19. Sedangkan jumlah penumpang angkutan darat dari tahun 2019 hingga 2023 fluktuatif. Di tahun 2023 jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 655.720 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 jumlah penumpang di tiga tahun terakhir lebih rendah dikarenakan banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum

Tabel 2.62 Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah angkutan darat	614	614	589	589	589	589
2	Jumlah penumpang angkutan darat	802.316	842.669	871.759	646.751	633.135	655.720

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024





Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum massal, pada tahun 2020 telah dioperasikan BRT koridor Kutoarjo-Borobudur. Jumlah penumpang cenderung mengalami peningkatan. Jumlah shelter pada tahun 2020 sejumlah 13 unit. Di tahun 2021 ada penambahan *shelter* baik permanen maupun portable untuk meningkatkan pelayanan calon penumpang sebanyak 4 unit, sehingga total shelter berjumlah 17 unit. Penambahan shelter berada di jalan lingkar utara, Sucen, Seren, dan Mranti.

Berikut data jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Pedesaan, dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.63 Jaringan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Pedesaan, dan Angkutan Perbatasan Kabupaten Purworejo

No	Trayek	Jalur
1	2	3
1.	AKAP	Solo-Yogya-Purworejo-Cilacap PP
		Yogya-Purworejo-Cilacap PP
		Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto PP
		Yogya-Purworejo-Purwokerto PP
		Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta PP
		Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta-Bogor PP
		Solo-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Tasikmalaya PP
		Solo-Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Pekanbaru
		Solo-Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung Semarang-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Tasikmalaya-Bandung-Jakarta
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru
		GunungKidul-Yogya-Purworejo-Purwokerto-Jakarta- PP
		Surabaya-Yogya-Purworejo-Jakarta
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru
		Purworejo-Jakarta-Lampung-Jambi-Pekanbaru-Aceh
		Purworejo-Bandung-Lampung
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung-Jakarta-Lampung
		Purworejo-Jakarta-Bogor
		Surabaya- Yogya-Purworejo-Bandung
		Solo- Yogya-Purworejo-Bandung
2	AKDP	Semarang-Purworejo-Purwokerto PP
		Semarang-Purworejo-Cilacap PP
		Purworejo-Magelang PP
		Purworejo-Wonosobo PP
		Purworejo-Kebumen PP
3	Angkutan Perdesaan	Purworejo - Kutoarjo
		Purworejo-Krendetan - Dadirejo
		Purworejo - Kaliboto
		Purworejo - Banyuurip - Sendangsari
		Purworejo - Tegalmiring - Bencorejo
		Kutoarjo - Klepu - Pituruh
		Kutoarjo - Klepu - Pituruh- Kaligitung
		Kutoarjo - Kemiri - Pituruh
		Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Prapaglor
		Kutoarjo - Kedungagung - Wonorejo
		Kutoarjo - Gng Tugel - Winong
		Purworejo - Gintungan - Winong
		Purworejo - Banyuasin
		Purworejo - Kaligesing
		Purworejo - Caok - Tlogorejo
		Purworejo - Somongari - Jatirejo
		Purworejo - Semagung





No	Trayek	Jalur
1	2	3
		Kutoarjo - Kemiri - Bruno
		Cepedak - Bruno - Kemiri - KTA
		Purworejo - Keduren - Sendangsari
		Pundensari - Keduren - Purworejo
		Surorejo - Tegalorejo - Purworejo
		Kutoarjo - Bayan - Piyono - Wingko
		Kutoarjo - Pekutan - Sambeng - Seren
		Kutoarjo - Gebang - Brengkol
		Purworejo - Ngasinan
		Purworejo - Purwodadi - Ngombol
		Purworejo - Purwodadi - Ngombol- Wunut
		Purworejo - Purwodadi - Ngombol-Wonoroto
		Purworejo - Purwodadi - Gesing - Nampurejo
		PWR - Karangduwur - Kemiri - KTA - Andong - Sembaon- Grabag - Purwodadi - Krendetan- Bagelen - Piji - Cangkrep- PWR
		Kutoarjo - Ketawang
		Kutoarjo - Suren - Wareng - Sidomulyo
		Kutoarjo - Grabag - Wunut - Wonoroto
		Purworejo - Jalingkut - Terminal Bus PWR
		Purworejo - Bulus
		Purworejo - Maron - Redin - Kemiri
		Kutoarjo - Kemiri - Kedungpomahan Kulon
		Purworejo - Kaligesing - Goa Seplawan - Pandanrejo
		Purworejo - Krendetan - Tlogokotes- Somorejo
		Purworejo - Krendetan - Bugel
		Purworejo - Bagelen - Haargorojo
		Purworejo - Dewi - Tanjung Anom
		PWR - Perum Boro - Pakisrejo - Bajangrejo
		Purworejo - Jenar - Wingkorejo
		Purworejo - Winong - Sawangan
		Purworejo - Gebang - Tlogosono - Redin
		Purworejo - Bayan - Bringin - Seren
		Purworejo - Sikemplong - Boro Wetan
		Kutoarjo - Kemiri - Pituruh - Kali Glagah
		Kutoarjo - Kaliwatu- Kranggan - Paitan
		Kutoarjo - Loning - Giriloyo
		Purworejo - Ngaran
		Purworejo - Cacaban - Kalitapas
		Purworejo - Ketosari - Sidomukti
		Purworejo - Kaliboto - Kaliwader - Kalitapas
		Purworejo - Purwodadi - Jogoboyo
		Purworejo - Brenggong - Kedunggubah
		Sokoagung - Clapar - Tambakrejo - PWR
		Kutoarjo - Kedungpomahan Wetan
		Sidorejo - Cangkrep - Purworejo
		Kalinongko - Purworejo
		Purworejo - Kalikalong - Rimun
		Wonoroto - Ngombol - Banyuurip - Lengkong - Purworejo
		Pogungrejo - Tangkisan - Bandungkidul - Kutoarjo
		Lingkar Kota
		Terminal Bus - Kolam Renang Artha Tirta
4	Angkutan Perbatasan	Pendowo (Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo) - Kulonprogo PP

Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041 dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 169.18/598/2018 Tentang Jaringan Trayek, Kode Jalur Dan Rute Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada tahun 2024, jumlah trayek yang dilayani di kabupaten sejumlah 61 trayek, sedangkan jumlah kebutuhan trayek di kabupaten adalah 66 trayek.





Untuk Bobot Trayek masuk kategori Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi dikarenakan jumlah lintas rata-rata dalam satu minggu sebanyak 2.528 kali sehingga untuk Bobot angkutan jalan adalah 1.

Dari data di atas maka Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Purworejo dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 2.64 Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Uraian	Tahun
		2024
1	2	3
1.	Jumlah trayek yang dilayani	61
2.	Jumlah kebutuhan trayek	66
3.	Jumlah lintas rata-rata dalam satu minggu	2.528
4.	Bobot angkutan jalan	1
5.	Indeks Konektivitas Wilayah	$\frac{61 \times 1}{66} = 0,92$

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, 2024

5) Angka Kecelakaan

Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas mulai dihitung di tahun 2020. Di tahun 2020 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 12,32%, di tahun 2021 menunjukkan penurunan hingga 8,52% namun naik kembali secara signifikan di tahun 2022 menjadi 11,67%. Di tahun 2023 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo yang dihitung berdasarkan data jumlah kecelakaan di ruas jalan kewenangan kabupaten mencapai angka 6,09%.

Tabel 2.65 Capaian Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	-	12,32%	8,52%	11,67%	6,09%
2.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	576	505	482	688	307
3.	Prediksi jumlah kecelakaan lalu lintas	500	500	500	500	500
4.	Jumlah KBWU yang memiliki KIR	4.177	3.202	3.184	2.698	4.925
5.	Jumlah KBWU	4.500	4.500	4.500	4.120	4.215

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Di Kabupaten Purworejo, kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan angka fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Purworejo, pada tahun 2019 angka kecelakaan di Kabupaten Purworejo sebesar 576 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 505 kasus. Di tahun 2021 menurun kembali menjadi 482 kasus. Tahun 2022 meningkat cukup signifikan menjadi 688 kasus, dan di tahun 2023 turun menjadi 307 kasus. Beberapa faktor yang





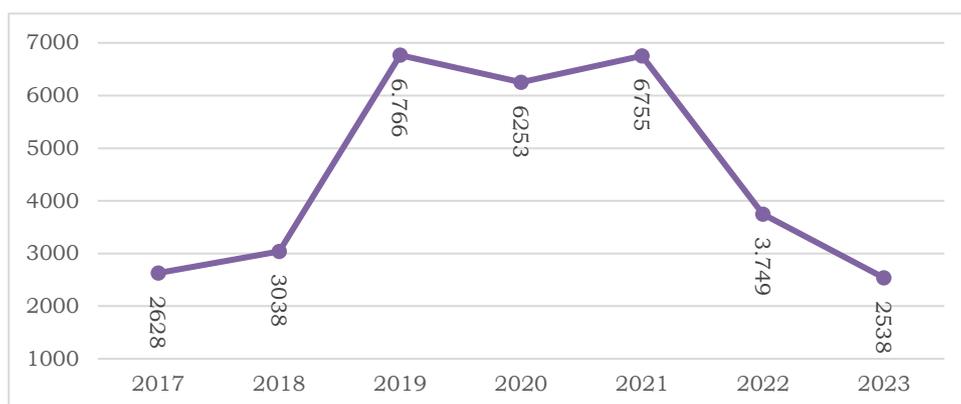
menyebabkan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas selain disebabkan oleh kesalahan pengemudi dan kondisi kendaraan juga disebabkan karena kondisi medan jalan, atau kurangnya rambu jalan, alat pengaman jalan, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sedangkan faktor yang menyebabkan angka kecelakaan turun di tahun 2023 antara lain ketersediaan APJ seperti rambu, APILL, PJU, *Guardrail*, Cermin Tikungan, Delineator, dan Pita Penggaduh di Kabupaten Purworejo yang meningkat dari tahun sebelumnya.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Sebagai daerah yang berkembang, Kabupaten Purworejo membutuhkan banyak investor dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. Oleh karena itu pada subab ini dibahas mengenai iklim investasi yang memiliki beberapa fokus, yakni penegakan Perda, kejadian kebakaran, indeks kerukunan umat beragama, kejadian konflik social, kejadian kejahatan, indeks daya saing daerah, serta layanan perizinan.

2.3.4.1. Penegakan Perda

Penegakan Perda bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Purworejo. Penegakan Perda dilakukan dengan melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan di tingkat Daerah. Penegakan Perda yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo digambarkan dengan adanya kejadian pelanggaran Perda. Hingga tahun 2022 ada 26 Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo. Gambaran pelanggaran terhadap Perda tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.109 Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

(Sumber: Satpol PP Damkar, 2024)

Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2023 jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terjadi dalam jumlah yang besar. Jumlah Peraturan Daerah yang harus ditegakkan sebanyak 23 Perda, dengan jumlah pelanggaran terbanyak di tahun 2019. Lonjakan ini disebabkan oleh adanya Peraturan mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum



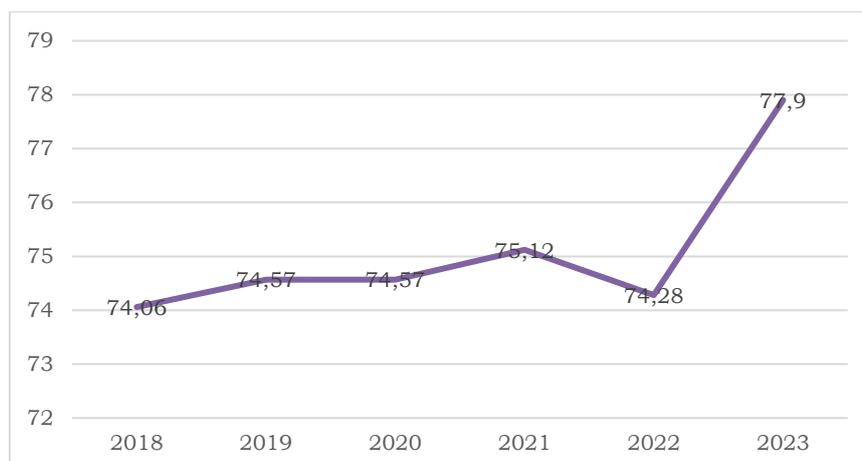


Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang banyak dilanggar. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 jumlah pelanggaran terbesar ada pada pemasangan baliho atau reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Tingginya angka pelanggaran Perda ini menjadi satu permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya perwujudan Ketentraman dan ketertiban umum.

2.3.4.2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah. Kerukunan Umat Beragama dapat diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

IKUB adalah Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



Gambar 2.110 Indeks Kerukunan Umat Beragama Jawa tengah Tahun 2018-2023

Sumber: Kemendikbudristek, 2024

Tahun 2023 IKUB Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 77,90 dengan kategori tinggi. Naik dari tahun sebelumnya di angka 74,28. Dari sisi toleransi hubungan, Jawa Tengah tidak menunjukkan kemunduran. Sebab, berdasarkan penilaian terhadap 10 kota yang paling toleran di Indonesia, 4 kota di Jawa Tengah, yaitu Salatiga, Surakarta, Semarang, dan Magelang termasuk di dalamnya.



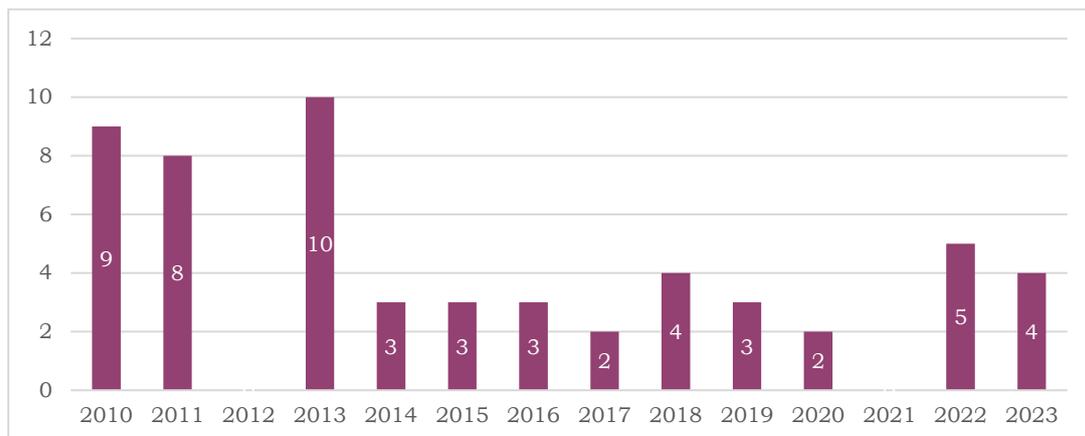


2.3.4.3. Jumlah Kejadian Konflik SARA

SARA berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan, suku, agama, tradisi dan lain sebagainya. Multi budaya dapat menjadi unsur dalam pembentukan negara, dimana hal tersebut dapat menjadi modal budaya (*Capital cultural*) dan kekuatan budaya (*Cultural Power*) yang dapat menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, banyaknya keanekaragaman tersebut dapat juga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam integritas bangsa dan negara. Kategori yang dapat digolongkan menjadi konflik SARA, yaitu:

1. Individual, tindakan dilakukan oleh individu atau satu golongan, bersifat menjatuhkan, menyerang golongan lainnya.
2. Institusional, tindakan dilakukan oleh institusi atau pemerintahan melalui aturan kebijakan yang bersifat diskriminatif antar golongan.
3. Kultural, tindakan yang menyebarkan tradisi atau ide-ide antar golongan yang bersifat diskriminatif

Kabupaten Purworejo tercatat belum pernah mengalami adanya konflik terkait dengan SARA, akan tetapi konflik lain seperti konflik sosial pernah terjadi di Kabupaten Purworejo antara tahun 2010 hingga tahun 2023. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Berikut adalah data jumlah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purworejo:



Gambar 2.111 Konflik Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: Bakesbangpol Kab. Purworejo, 2023

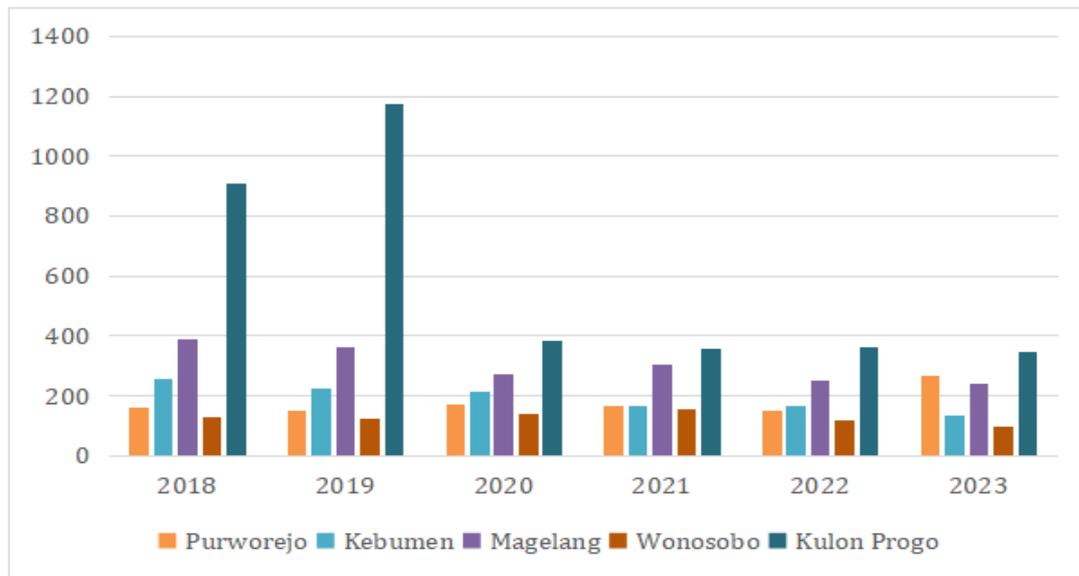
Konflik yang terjadi di Kabupaten Purworejo pada umumnya merupakan konflik yang didasari oleh perbedaan kepentingan yang ada. Konflik kepentingan ini akhirnya memicu munculnya konflik sosial yang dikarenakan kepentingan ini bersifat esensial bagi kelangsungan hidup sehingga kerap menimbulkan gesekan hingga menjadi konflik yang lebih besar. Lonjakan konflik yang terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022 dari 0 menjadi 5 konflik dipicu oleh adanya proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener. Kurangnya ruang untuk membangun dialog dan diskusi antar kepentingan masih sangat minim sehingga muncul pihak lain yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat konflik semakin besar.

Selain gambaran konflik sosial, kondusivitas wilayah juga digambarkan melalui adanya pelanggaran atas kejahatan yang dialami oleh masyarakat. Semakin tinggi angka kejahatan maka menunjukkan daerah





tersebut kurang aman dan nyaman untuk menjadi hunian bagi masyarakat. Berikut adalah data kejadian kejahatan yang dilaporkan tahun 2018 hingga 2023.



Gambar 2.112 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Purworejo dibandingkan daerah sekitarnya Tahun 2018-2023

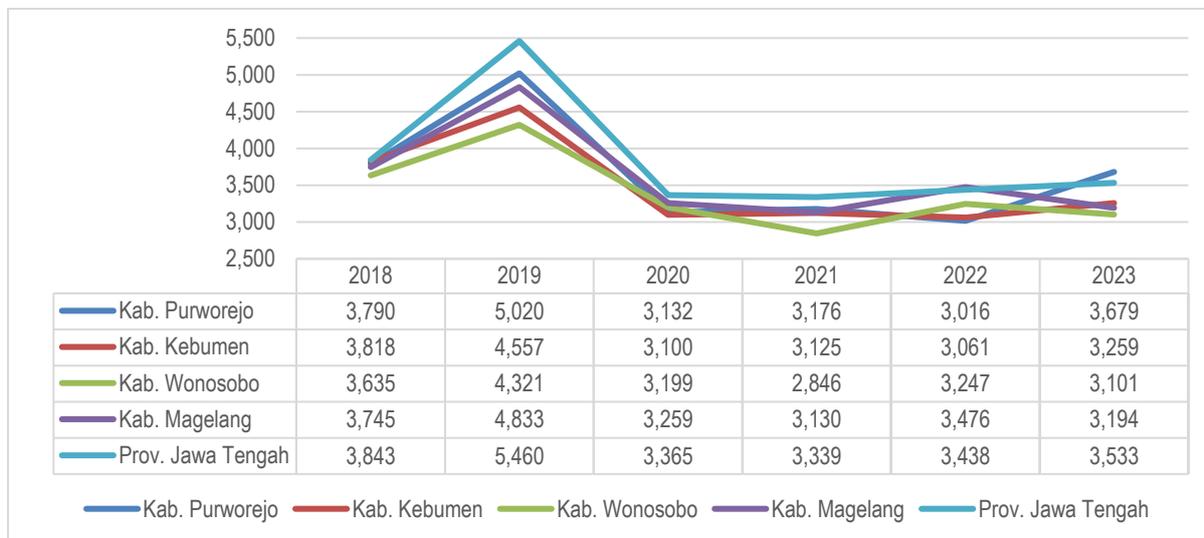
Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, BPS DIY 2023

Jumlah kejahatan di kabupaten purworejo pada tahun 2023 sebanyak 266 meningkat dari tahun 2022 sebanyak 150 kejahatan. Peningkatan jumlah laporan kejahatan ini menunjukkan adanya penurunan kondusifitas wilayah di Kabupaten Purworejo. Angka kejahatan yang meningkat menunjukkan penurunan tingkat keamanan dan kenyamanan wilayah untuk dijadikan hunian bagi masyarakat

2.3.4.4. Indeks Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yakni instrumen pengukuran daya saing pada tingkat daerah. IDSD diukur berdasarkan beberapa aspek, antara lain ekosistem inovasi, faktor penguat (*enabling environment*), sumber daya alam (*human capital*), serta faktor pasar (*market*). Pada perkembangannya, terdapat perbedaan pengukuran IDSD, namun di tahun terakhir (2023), Kabupaten Purworejo memiliki nilai IDSD tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, mencapai 3,679, lebih tinggi dari rata-rata nilai Provinsi Jawa Tengah (3,533). Secara umum Kabupaten Purworejo lebih baik di keempat aspek, dikarenakan tingginya dukungan infrastruktur, ketenagakerjaan, akses keuangan, serta ukuran pasar. Lebih lanjut nilai IDSD Kabupaten Purworejo dan daerah sekitarnya dapat diamati pada gambar berikut.



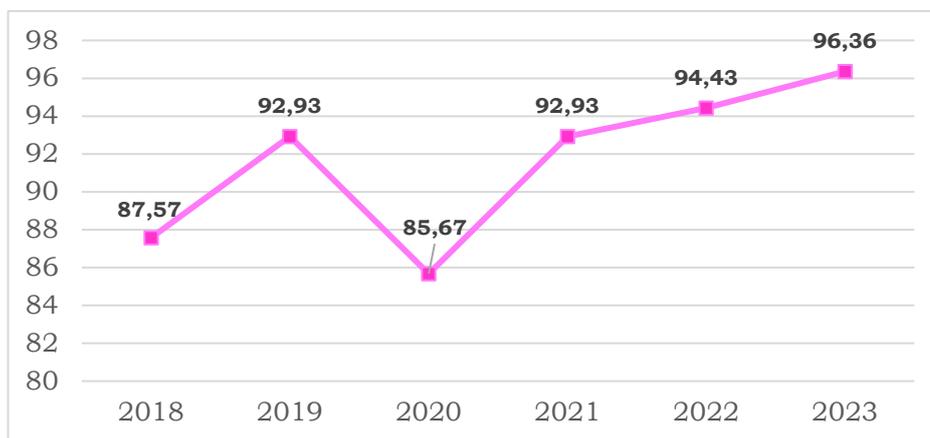


Gambar 2.113 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2018-2023 (%)
 Sumber: Brida Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kondisi daya saing daerah Kabupaten Purworejo relatif tinggi, namun masih dapat ditekankan pada kapasitas inovasi dan pendidikan dan keterampilan. Kabupaten Purworejo perlu mengejar beberapa daerah yang memiliki kategori daya saing sangat tinggi seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, serta Kota Surakarta.

2.3.4.5. Layanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kabupaten Purworejo memberikan layanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berikut ini ialah grafik yang menunjukkan perkembangan IKM terhadap perizinan dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir di DPMPTSP.



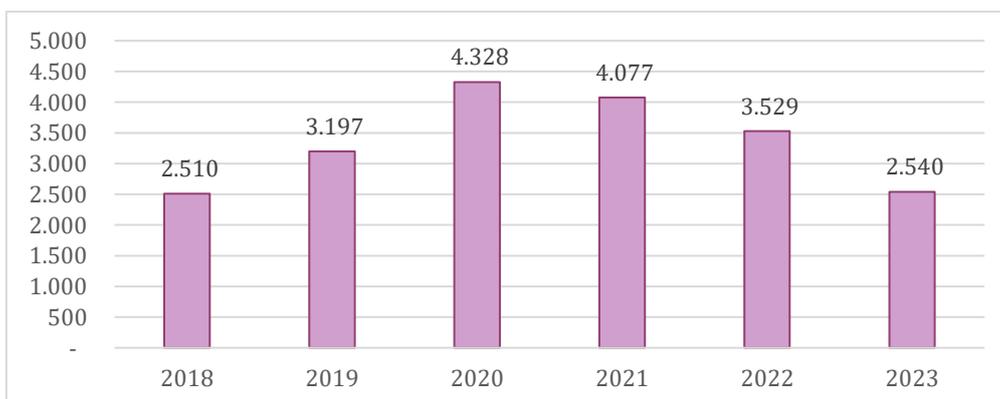
Gambar 2.114 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks)
 Sumber: DPMPTSP Kab. Purworejo, 2024





Saat ini Kabupaten Purworejo telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di kompleks Alun-Alun Kabupaten Purworejo. MPP yang telah diresmikan pada 7 Oktober 2022 ini menjadi salah satu penyebab tingginya IKM pada tahun terakhir (2023) sebesar 96,36. Nilai IKM ini terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. IKM layanan perizinan Kabupaten Purworejo ini lebih tinggi dibandingkan salah satu kabupaten sekitarnya yang memiliki bandara internasional, yakni Kabupaten Kulon Progo (87,00) pada tahun 2022. DPMPTSP Kabupaten Purworejo sempat mendapatkan nilai IKM rendah pada tahun 2020 (85,67) yang disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga pelayanan kurang optimal, kemudian berbenah melalui perbaikan aplikasi Si-IDA (Sistem Perizinan Daring) yang sudah dipayungi regulasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan dalam Jaringan. Si-IDA menjadi bagian dari penghargaan pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2022 oleh Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan terus dioptimalkannya MPP serta Si-IDA, investasi di Kabupaten Purworejo meningkat dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Jumlah izin yang terbit sesuai SOP menjadi salah satu hal yang menunjukkan iklim investasi daerah. Di Kabupaten Purworejo, terdapat 44 jenis izin yang dilayani. Gambar berikut ini menunjukkan jumlah izin yang terbit sesuai SOP selama kurun waktu 2018-2023.



Gambar 2.115 Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP Tahun 2018-2023 (izin)

Sumber: DPMPTSP Kab. Purworejo, 2024

Terjadinya pandemi covid-19 ternyata tidak menyurutkan masyarakat dalam hal mengajukan perizinan (termasuk investasi). Hal ini dibuktikan pada tahun 2020, jumlah izin investasi yang terbit merupakan paling tinggi (4.328 izin) dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun-tahun setelahnya, jumlah perizinan yang terbit menurun, menjadi 4.077 izin pada tahun 2021, 3.529 izin pada tahun 2022, dan 2.540 pada tahun 2023. Menurunnya jumlah izin terbit diakibatkan karena berkurangnya jenis layanan di DPMPTSP, yang sempat mencapai 93 jenis layanan menyusut menjadi 44 jenis layanan saja. Sebagian layanan perizinan dialihkan ke *Online Single Submission* (OSS), salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB pada tahun 2020 yang dikeluarkan sebanyak 903 izin, berkurang pada 2021 (571 izin), dan 0 pada tahun terakhir (2022). Saat ini Si-IDA melayani izin non berusaha, sementara OSS melayani izin berusaha.

Apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya (pada tahun 2022), Kabupaten Kebumen melayani perizinan lebih tinggi tiga kali lipat, sebanyak





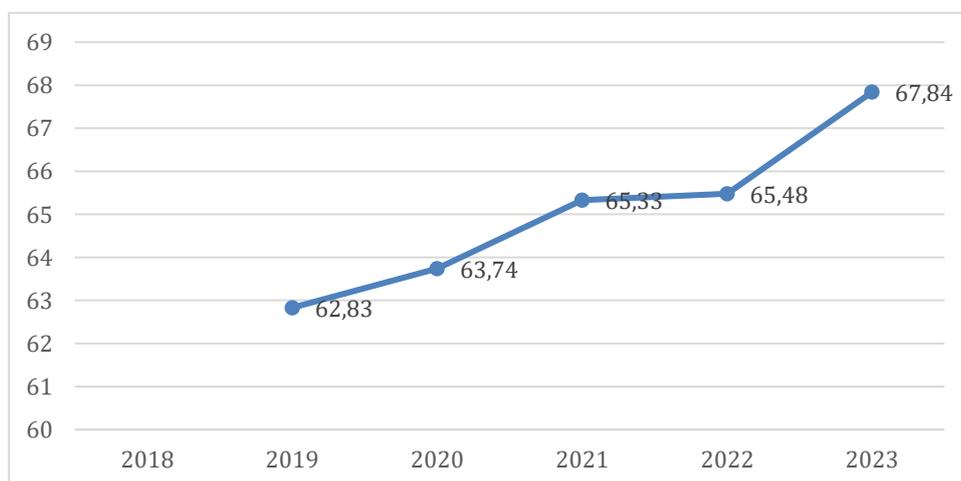
12.024. Kabupaten Kulon Progo juga melayani perizinan hampir dua kali lipat dibandingkan Kabupaten Purworejo, sebanyak 6.836 izin. Perizinan di Kabupaten Purworejo terutama minat mengenai investasi di Kabupaten Purworejo masih dapat ditingkatkan, bercermin dari daerah sekitarnya. Lebih rendahnya jumlah perizinan di Kabupaten Purworejo diakibatkan belum optimalnya kegiatan promosi yang dilaksanakan. Untuk itu, perlu strategi dalam meningkatkan kuantitas peminatan masyarakat dalam hal investasi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Subbab ini akan menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan umum yang menggambarkan kondisi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Purworejo. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan publik yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Secara umum kinerja kinerja tata Kelola pemerintahan Kabupaten Purworejo sebagai penunjang pelayanan umum adalah sebagai berikut:

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yakni untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam Implementasinya Kabupaten Purworejo telah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2019.



Gambar 2.116 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Purworejo, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami peningkatan nilai dari 62,83 menjadi 67,84.



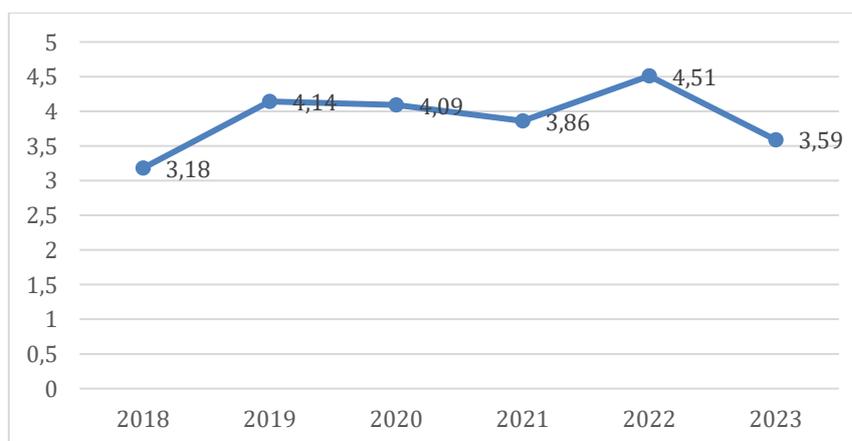


Capaian nilai tersebut masih dalam kategori B (baik). Kabupaten Purworejo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan dalam hal organisasi, tata laksana, regulasi, Sumber Daya Manusia, pengawasan, dan pelayanan publik. Upaya ini dilakukan dengan melakukan perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai IRB.

Reformasi birokrasi ini mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Instansi Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi).



Gambar 2.117 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Indeks pelayanan Publik Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 namun menurun di tahun 2023 dengan angka 3,59. Penilaian pelayanan publik ini dilakukan dengan mengambil sample pada beberapa unit pelayanan di Kabupaten Purworejo dan dikarenakan belum terstandartnya pelayanan antar satu unit dengan unit yang lainnya sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai Indeks Pelayanan Publik dari tahun ke tahun. Perlunya perhatian lebih pada setiap unit pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini menjadi lebih terstandar dan masyarakat dapat langsung merasakan pelayanan publik yang optimal.





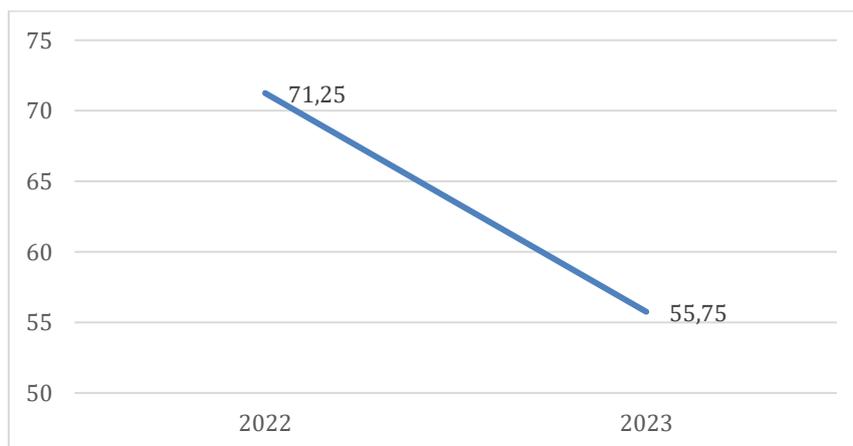
2.4.3. Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu :

1. Memperkuat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi
2. Mendorong regulasi dan deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidu
3. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan
4. Meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah



Gambar 2.118 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, 2024

Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo baru mulai dilakukan pada Tahun 2022, dan berhasil mencapai nilai 71,25. Tetapi pada Tahun 2023 mengalami penurunan nilai menjadi 55,75, hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 tidak ada keikutsertaan pada Diklat Perancang Perundang-undangan sementara ini memberikan kontribusi tinggi terhadap nilai IRH.

2.4.4. Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintasvisi, dan sudut pandang yang





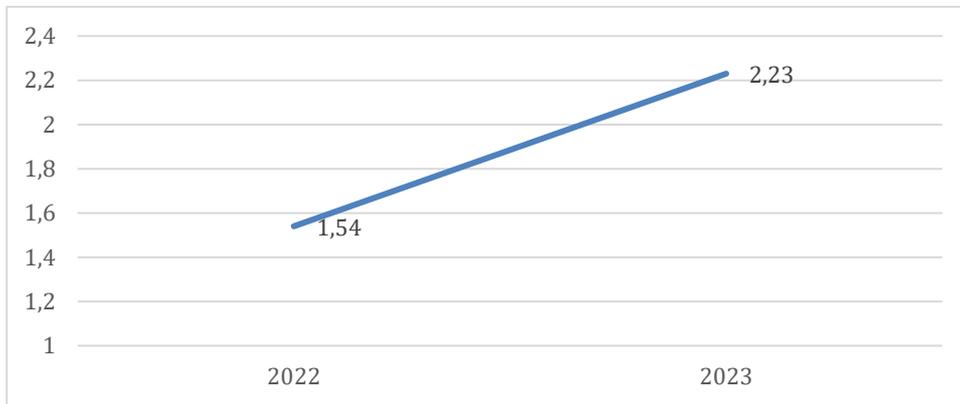
berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kapabilitas Inovasi ini merupakan salah satu pilar dalam komponen penilaian Indeks daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis sejak tahun 2022. IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari Global Competitiveness Index. Masing-masing pilar kemudian diukur dengan sejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standarisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika.

IDSD 2022 mengedepankan konsep pengukuran yang objektif dengan cara menyubstitusi pengukuran yang berdasarkan pada opini dengan proksi data sekunder. IDSD 2022 memiliki empat komponen utama yang diadaptasi dari GCI 2019, yaitu komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*), komponen sumber daya manusia (*human capital*), komponen pasar (*market*), dan komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*). Kapabilitas Inovasi masuk dalam komponen ekosistem Inovasi, Komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Dalam pilar kapabilitas inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Pengaruh faktor kapabilitas inovasi ini memengaruhi daya saing daerah melalui lima prinsip berikut ini

1. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
2. Investasi jangka pendek berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.
3. Kegiatan R&D yang dimaksud adalah kegiatan yang berbasis iptek untuk menghasilkan alternatif solusi prioritas, bukan hanya untuk solusi masalah efisiensi atau produktivitas yang dihadapi, melainkan juga untuk membangun daya saing.
4. R&D berperan penting dalam menumbuhkan kapasitas perusahaan dan masyarakat untuk melakukan inovasi yang berorientasi pada penumbuhan daya saing ekonomi.
5. Pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing dilakukan hingga produk-produk turunannya (hilirisasi). Daerah yang mengembangkan komoditas unggulannya akan memiliki pengetahuan dan status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi-inovasi yang berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.





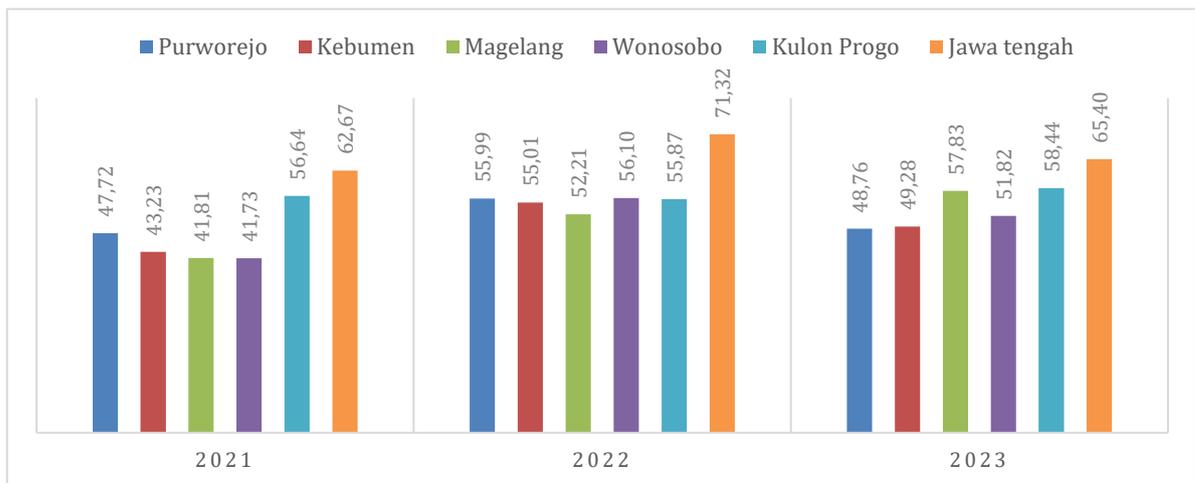
Gambar 2.119 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo tahun 2022-2023

Sumber : Badan Riset Inovasi Nasional, 2024

Capaian kapabilitas inovasi Kabupaten Purworejo dalam dua tahun pengukuran nilainya meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan ini menggambarkan adanya peningkatan keanekaragaman baik dari sisi tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang yang menunjang meningkatnya nilai kapabilitas inovasi.

2.4.5. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.



Gambar 2.120 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo dalam 3 tahun terakhir masuk dalam kategori inovatif. Tahun 2022 nilainya meningkat dari tahun 2021 menduduki peringkat ke 68 se-Indonesia. Akan tetapi menurun pada tahun 2023 pada angka 48,76 hal ini dikarenakan tingkat kematangan inovasi daerah yang belum optimal. Tingkat kematangan inovasi di tinjau dari kriteria yang ditetapkan oleh kemendagri utamanya dari aspek mutu inovasi dan dampak inovasi. Upaya kedepan adalah meningkatkan berbagai kegiatan inovasi daerah dan krenova dengan bekerjasama dengan *stakeholder pentahelix*. Hasil yang dicapai belum merupakan hasil yang maksimal masih





banyak sekali peluang untuk meningkatkan indeks tersebut. Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman.

Kedepannya, pemerintah Kab. Purworejo diharapkan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya dalam menciptakan inovasi daerah. Inovasi yang dapat dilakukan meliputi inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.4.6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

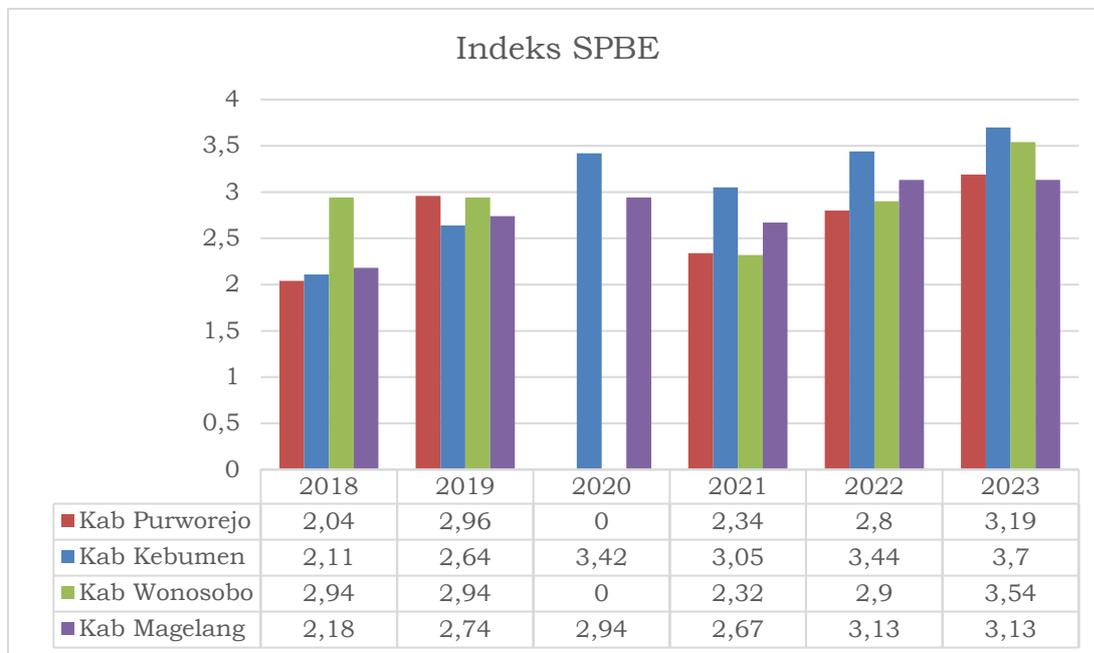
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indeks SPBE mulai dihitung pada tahun 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama dua tahun sejak diterbitkannya Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, tingkat kematangan SPBE masih relatif rendah. Pada tahun 2021, Kementerian PANRB melakukan evaluasi dengan instrumen baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun proses evaluasi SPBE akan diawali dengan melakukan penilaian mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian dengan tahapan penilaian dokumen, wawancara, dan penilaian berbasis online, dimana Kementerian PANRB akan mengoptimalkan peran perguruan tinggi di masing-masing daerah untuk pelaksanaan penilaian dan dapat membantu pembinaan penerapan SPBE di pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.





Gambar 2.121 Indeks SPBE Kabupaten Purworejo dan Daerah Sekitar

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2018-2023

Di tahun 2018 Indeks SPBE Kabupaten Purworejo yaitu 2,04 (cukup), tahun 2019 naik menjadi 2,96 (baik), sedangkan di tahun 2020 KemenPANRB hanya melakukan penilaian SPBE secara *sampling* dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan Kabupaten Purworejo tidak termasuk ke dalam *sampling* tersebut. Tahun 2021 nilai Indeks SPBE turun menjadi 2,34 (cukup) dan di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 2,80 (baik). Tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 3,19 (baik). Untuk tahun 2021, indeks tingkat kematangan SPBE Kabupaten Purworejo lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan adanya perbedaan indikator penilaian yaitu yang tadinya 35 indikator menjadi 47 indikator. Secara substansi sebenarnya bukan mutlak terjadi penurunan nilai, akan tetapi dikarenakan perbedaan indikator penilaian.

2.4.7. Informasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong badan publik, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selaku OPD yang mengelola keterbukaan informasi di daerah juga menyediakan berbagai informasi publik.

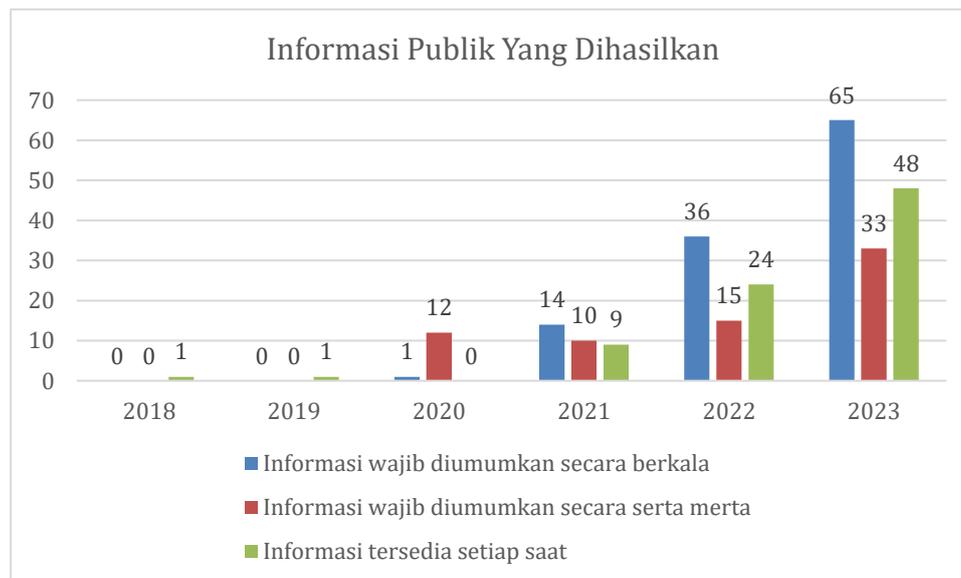
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”), atau





organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.



Gambar 2.122 Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan oleh Pemkab Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo No. 487.22/713/2023 tentang Penetapan Informasi Publik Pemkab Purworejo

Informasi wajib diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2023 informasi wajib diumumkan secara berkala yang telah dikeluarkan sebanyak 65 informasi.

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Hingga tahun 2023 informasi wajib diumumkan secara serta merta yang telah dikeluarkan sebanyak 33 informasi.

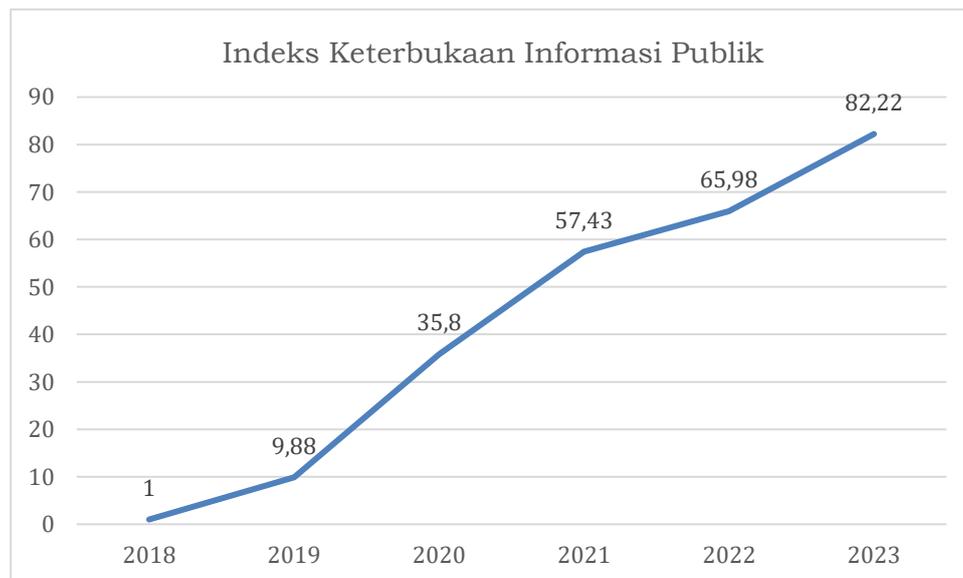
Informasi tersedia setiap saat meliputi Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; serta Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Hingga tahun 2023 informasi tersedia setiap saat yang telah dikeluarkan sebanyak 48 informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, mengharuskan pengetahuan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi faktual, harus terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang





dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Gambaran mengenai perwujudan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.123 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: PPID Prov. Jawa Tengah, 2024

Kabupaten Purworejo saat ini masuk dalam kategori “Menuju Informatif” dengan nilai 82,22. Naik dari tahun 2018 yang masuk dalam kategori tidak informatif. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi menuntut pemerintah harus selalu terbuka informasinya untuk masyarakat, kemudahan akses informasi juga menjadi hal yang mendukung tercapainya nilai ini.

Dalam mendukung *Smart City* keberadaan sinyal dalam komunikasi sangat diperlukan, namun di Kabupaten Purworejo terdapat kendala yang disebabkan oleh *Blank Spot*. *Blank Spot* adalah kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau terjangkau sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Berikut data sebagian wilayah desa yang termasuk dalam *Blank Spot* di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.66 Data Desa Blank Spot di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Desa
1	2	3
1	BAGELEN	DURENSARI
2	BAGELEN	SOMOREJO
3	BAGELEN	TLOGOKOTES
4	BENER	KALITAPAS
5	BENER	KEDUNG PUCANG
6	BENER	NGASINAN
7	BENER	PEKACANGAN
8	BRUNO	BLIMBING
9	BRUNO	BRUNOSARI
10	BRUNO	GIYOMBONG
11	BRUNO	KAMBANGAN
12	BRUNO	KARANGGEDANG
13	BRUNO	PUSPO





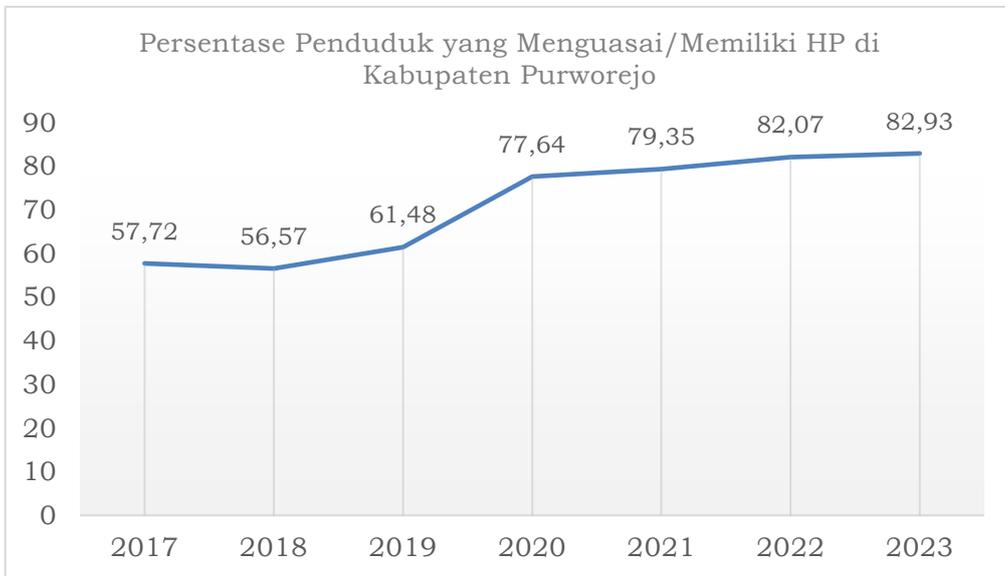
No	Kecamatan	Desa
14	BRUNO	SOMOLETER
15	BUTUH	PANGGELDLANGU
16	GEBANG	KALITENGKEK
17	GEBANG	NGAGLIK
18	KALIGESING	DONOREJO
19	KALIGESING	GUNUNGWANGI
20	KALIGESING	HARDIMULYO
21	KALIGESING	JATIREJO
22	KALIGESING	KALIGONO
23	KALIGESING	NGARAN
24	KALIGESING	PUCUNGROTO
25	KALIGESING	SUDOROGO
26	KALIGESING	TLOGOGUWO
27	KALIGESING	TLOGOREJO
28	KEMIRI	SUKOGELAP
29	KUTOARJO	TUNTUNGPAIT
30	LOANO	KALIGLAGAH
31	LOANO	KALIKALONG
32	LOANO	KEBON GUNUNG
33	LOANO	KEMEJING
34	LOANO	NGARGOSARI
35	LOANO	RIMUN
36	LOANO	TEPANSARI
37	NGOMBOL	SUMBERREJO
38	NGOMBOL	WINGKOSIGROMULYO
39	PITURUH	BRENGKOL
40	PITURUH	KALIGONDANG
41	PITURUH	KALIJERING
42	PITURUH	KARANGANYAR
43	PITURUH	PANGKALAN
44	PITURUH	POLOWANGI
45	PITURUH	SUMBER
46	PURWODADI	SUMBERREJO
47	PURWOREJO	PLIPIR

Sumber: Buku Hasil Survei dan Verifikasi Blank Spot Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, 13 kecamatan masih belum seluruh desanya terjangkau oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Sedangkan 3 kecamatan yang seluruh desanya sudah dijangkau oleh sinyal komunikasi adalah Kecamatan Grabag, Banyuurip, dan Bayan.

Persentase penduduk yang menguasai atau memiliki telepon seluler (HP) di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat menjadi indikator kesiapan masyarakat untuk menuju *Smart City*. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, tingkat kepemilikan/penguasaan telepon seluler di Kabupaten Purworejo cenderung tinggi. Hal ini seharusnya diimbangi dengan penyediaan jaringan telepon dan internet yang memadai.





Gambar 2.124 Persentase Penduduk yang Menguasai atau Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Purworejo

Sumber: Diolah dari Susenas dan Data SDG's Kabupaten Purworejo, 2024

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Transformasi digital mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif dan berdaulat, yaitu terkait regulasi dan institusi, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur digital dan teknologi, keterpaduan data, modal investasi teknologi, serta riset dan inovasi.

Tolok ukur transformasi digital di tingkat daerah dapat diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet. Definisi operasional rumah tangga dengan akses internet yaitu rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Sedangkan formulasi perhitungannya adalah jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%. Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat. Berikut data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	28,92	34,14	44,45	49,27	57,45	71,25	71,35

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

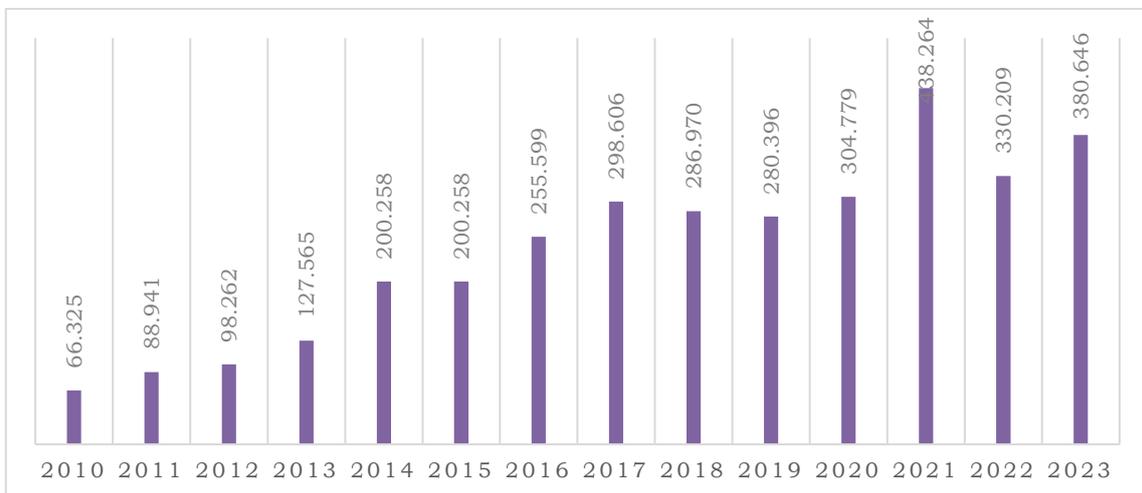
Berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo yang dipublikasikan melalui Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten purworejo dari tahun 2017 hingga tahun 2023, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet selalu meningkat. Penggunaan internet dalam hal ini termasuk *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp*, dll.





2.4.8. Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Data terkait PAD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.



Gambar 2.125 Pendapatan Asli Daerah (milyar) Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023
Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2024

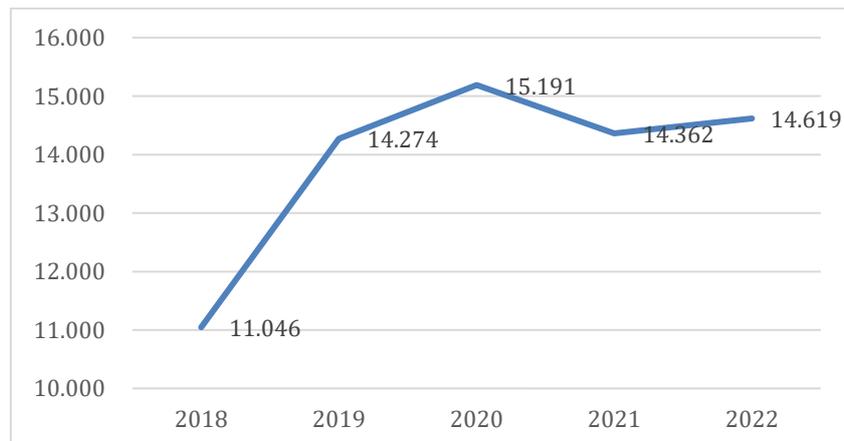
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. PAD Kabupaten Purworejo sempat menurun pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi PAD Kabupaten Purworejo kembali naik di tahun 2020. Tahun 2021 PAD Kabupaten Purworejo mencapai angka tertinggi dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dari BLUD terkait dengan adanya pandemi Covid 19. Turun ditahun 2022 dikarenakan menurunnya pendapatan BLUD dan ada peningkatan di tahun 2023. Permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatn daerah yakni Belum adanya sumber pendanaan lain (non APBD) yang dapat meningkatkan PAD, sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga pendapatan yang bersumber dari pajak ini belum maksimal. Sumber kekayaan daerah belum terkelola secara optimal sehingga masih banyak sumber kekayaan yang belum dapat digali untuk meningkatkan PAD Kabupaten Purworejo.

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi





aset dapat dilihat melalui rincian komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Berikut data terkait pemanfaatan utilisasi aset daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022:



Gambar 2.126 Utilisasi Aset (milyar) Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo 2024

Utilisasi aset daerah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi hal yang sangat penting karena sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.

Opini BPK

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini. Opini dari hasil pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa yang didapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Antara lain Wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini tidak Wajar, dan Pernyataan menolak memberikan Opini. Opini BPK terhadap pemeriksaan keuangan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68 Opini BPK Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2023

No	Uraian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2012. Opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Hal ini dikarenakan Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dianggap telah menyelenggarakan prinsip

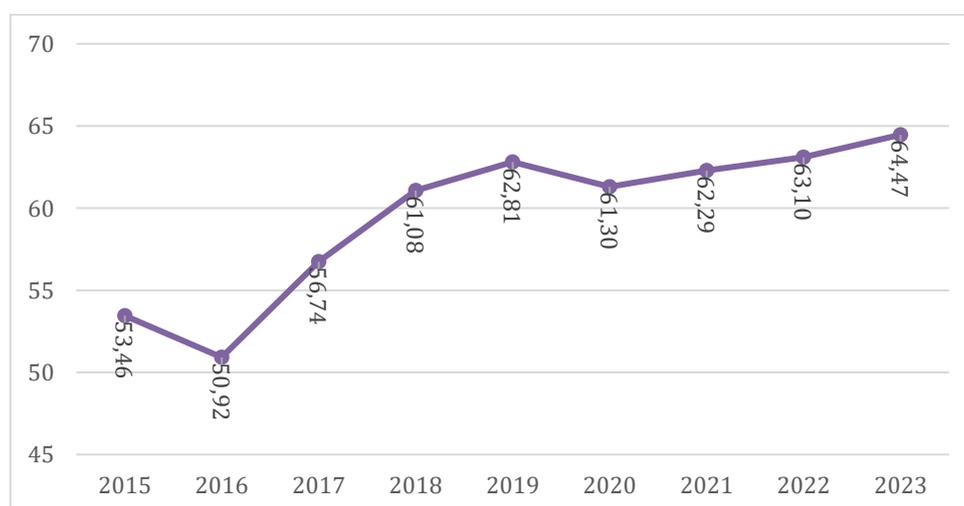




akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.4.9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.



Gambar 2.127 Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan menurun ditahun 2020 dengan score 61,30 pada tahun 2021 kembali meningkat dengan nilai 62,29. Tahun 2023 meningkat menjadi 64,47. Tahun 2023 merupakan capaian tertinggi, masuk dalam kategori B. Peningkatan nilai Sakip Kabupaten Purworejo ini didorong dengan adanya efektifitas dan efisensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Meskipun sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

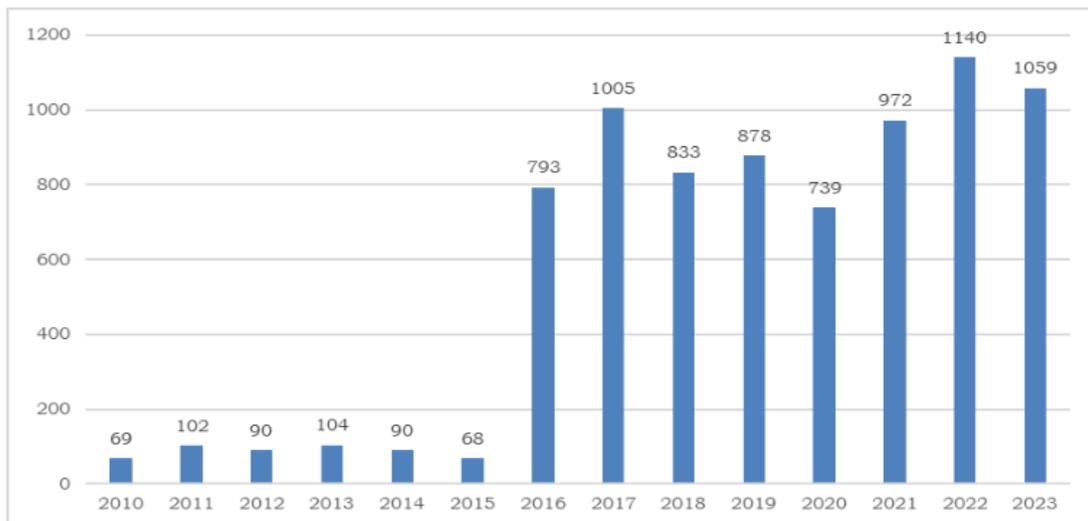
Capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo masih belum optimal hal ini dikarenakan terkendala dalam Linearitas perencanaan hingga pelaporan, Indikator yang ada saat ini belum sinkron dengan sasaran, sehingga perlu dilakukan pencermatan dalam merumuskan indikator. Selain itu kurangnya komitmen dalam manajemen kinerja juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP.





2.4.10. Jenis Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



Gambar 2.128 Jenis Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2023

Dari tahun ketahun jumlah produk hukum yang terfasilitasi meningkat, paling banyak pada tahun 2022 sebanyak 1.140 produk hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan aturan yang telah disesuaikan oleh Kabupaten Purworejo. Proses perhitungan dari manual ke aplikasi membuat lonjakan jumlah produk hukum yang terfasilitasi.

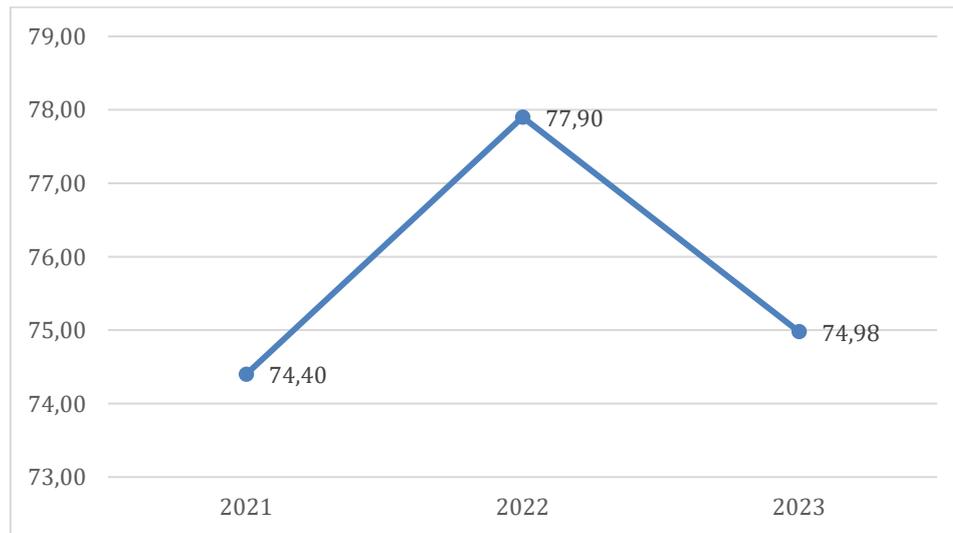
2.4.11. Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Survei ini merupakan salah satu upaya perbaikan dari KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK. Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli 2455 dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra





kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.



Gambar 2.129 Survei Penilaian Integritas Kabupaten Purworejo tahun 2021-2023
 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2023

Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Secara umum, pelaksanaan tugas di Kabupaten Purworejo masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/ pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai. Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Kabupaten Purworejo dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di Kabupaten Purworejo, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Meskipun upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Purworejo sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti.





2.4.12. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks. Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Persentase Desa Mandiri adalah Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut berdasarkan enam dimensi antara lain:

1. Layanan Dasar,
2. Sosial,
3. Ekonomi,
4. Lingkungan,
5. Aksesibilitas, dan
6. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Desa Mandiri Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.

Tabel 2.69 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo 2019 - 2021

Tahun	DESA MANDIRI BERDASARKAN INDEKS DESA (PODES)	
	Jumlah desa	%
2019	1	0,21
2020	1	0,21
2021	1	0,21

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan data dari Kementerian PPN / Bappenas Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa.

Sebelum lahirnya Indeks Desa ini, pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan





intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandirian desa dari tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.70 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo	0,5920	0,6610	0,6764	0,6934	0,7229
2	Mandiri	0	0	0	4	17
3	Maju	28	80	116	160	234
4	Berkembang	219	362	346	305	218
5	Tertinggal	215	27	7	0	0
6	Sangat Tertinggal	7	0	0	0	0
7	Jumlah Desa	469	469	469	469	469

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id>, 2023

IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Status desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan guncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki, dan menentukan tindak lanjut yang tepat. Evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 dilaksanakan secara kualitatif dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada masing-masing misi sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo dalam periode tersebut.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut.





Tabel 2.71 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025

Periode	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	2	3
2006-2010	N/A	N/A
2011-2015	95,39	Sangat Tinggi
2016-2021	91,80	Sangat Tinggi
2021-2026	93,26	Sangat Tinggi
Kinerja RPJPD	93,48	Sangat Tinggi

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat capaian kinerja RPJMD terhadap sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo adalah sebesar 93,48% dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini didasarkan pada capaian indikator kinerja pada seluruh misi dan sasaran pokok RPJPD mulai dari periode II, III, dan IV sedangkan periode I karena tidak memiliki target indikator kinerja secara kuantitatif sehingga tingkat capaiannya tidak dapat diukur (*Not Available*).

Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 meliputi:

A. Visi, Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan

1) Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang

2) Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, untuk:

- Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi
- Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
- Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2025.
- Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

B. Indikator Makro Pembangunan

1) Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk:

- Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat





- Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin
 - 2) Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- C. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- 1) Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah
 - 2) Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana

Subbab ini membahas mengenai tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik. Dinamika kependudukan yang mempertimbangkan proyeksi hingga tahun 2045 harus diperhatikan dalam perencanaan kedepan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan layanan yang perlu dipenuhi, khususnya perihal sarana dan prasarana.

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Data demografi telah disajikan pada subbab sebelumnya. Berdasarkan kondisi demografi, dilakukan analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045. Beberapa hal dapat dijabarkan seperti perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, serta penduduk usia tua. Proyeksi dilakukan dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian ditampilkan jumlah total penduduk per kecamatan, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo.

2.6.1.1. Jumlah Total Penduduk

Kabupaten Purworejo memiliki penduduk sejumlah 788.265 jiwa pada tahun 2023 (Juni). Sebaran penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Purworejo dengan 85.483 jiwa, sementara jumlah penduduk terendah di Kecamatan Bagelen (30.829 jiwa). Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 0,87, pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Bruno (1,66) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,15). Kecamatan Purworejo cukup menarik dikarenakan pusat ibukota namun memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah. Lebih lanjut penduduk per kecamatan beserta proyeksinya dapat diamati pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.72 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo**

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	LPP	1,20	1,17	0,68	0,64	0,49	0,33
2	Ngombol	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	LPP	1,06	1,03	0,70	0,62	0,57	0,33
3	Purwodadi	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	LPP	1,04	1,01	0,71	0,61	0,60	0,40
4	Bagelen	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	LPP	0,46	0,43	0,83	0,49	0,08	-0,01
5	Kaligesing	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	LPP	0,71	0,68	0,77	0,54	0,27	0,07
6	Purworejo	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	LPP	0,15	0,12	0,89	0,43	0,08	0,00
7	Banyuurip	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462
	LPP	0,63	0,60	0,79	0,53	0,27	0,13
8	Bayan	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	LPP	1,00	0,97	0,72	0,60	0,45	0,29
9	Kutoarjo	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	LPP	0,50	0,47	0,82	0,50	0,11	0,04
10	Butuh	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	LPP	0,65	0,62	0,79	0,53	0,21	0,06
11	Pituruh	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	LPP	0,98	0,95	0,72	0,60	0,48	0,32
12	Kemiri	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	LPP	1,23	1,20	0,67	0,65	0,57	0,41
13	Bruno	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	LPP	1,66	1,63	0,58	0,73	0,95	0,73
14	Gebang	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	LPP	0,71	0,67	0,78	0,54	0,37	0,26
15	Loano	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	LPP	0,81	0,78	0,75	0,56	0,42	0,25
16	Bener	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	LPP	1,31	1,28	0,66	0,66	0,62	0,48
Kab. Purworejo		788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
LPP		0,87	0,84	0,74	0,58	0,41	0,26

Keterangan: LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Analisis 2023

Pada tahun 2045, penduduk Kabupaten Purworejo secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 885.646 jiwa atau bertambah 97.361 jiwa dari tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk yang semula 0,87 menurun, terakhir menjadi 0,26 pada tahun 2045. Terdapat daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk minus, yakni Kecamatan Bagelen dengan laju pertumbuhan -0,01 pada tahun 2045. Hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 ini cukup menarik dikarenakan wilayah tersebut berbatasan dengan Bandar Udara YIA. Bukan tidak menutup kemungkinan setelah disusunnya rencana detail tata ruang di sekitar kawasan tersebut, banyak investor dan pendatang di Kecamatan Bagelen sehingga pertumbuhan penduduknya tidak minus. Dengan keberagaman laju pertumbuhan penduduk ini, perencanaan jangka panjang mengenai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana umum (pendidikan, kesehatan, dll) perlu dipertimbangkan dan dianalisis secara seksama.





Pada sisi jumlah, Kecamatan Purworejo tetap memiliki jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2045 dengan penduduk sejumlah 91.901 jiwa. Komposisi penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bagelen (33.335 jiwa).

2.6.1.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk dapat dikategorikan dalam jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2023, penduduk laki-laki Kabupaten Purworejo berjumlah 394.698 jiwa, sementara penduduk perempuan 393.567. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki relatif lebih banyak dengan rasio 100,29. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 0,87, pertumbuhan penduduk laki-laki (0,89) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,86). Di tingkat kecamatan, pertumbuhan penduduk laki-laki tertinggi terdapat di Kecamatan Bruno (1,85) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,15). Selaras dengan hal tersebut, pertumbuhan penduduk perempuan tertinggi di Kecamatan Bruno (1,46) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,16). Proyeksi mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selanjutnya dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	Laki-Laki	25.399	26.001	26.900	27.771	28.403	28.848
	LPP Lk	1,21	1,17	0,68	0,64	0,45	0,31
	Perempuan	25.174	25.771	26.652	27.531	28.264	28.764
	LPP Prp	1,19	1,17	0,67	0,65	0,53	0,35
	Rasio	100,89	100,89	100,93	100,87	100,49	100,29
2	Ngombol	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	Laki-Laki	17.745	18.067	18.744	19.297	19.730	19.977
	LPP Lk	0,93	0,90	0,74	0,58	0,44	0,25
	Perempuan	18.081	18.505	19.139	19.769	20.457	20.872
	LPP Prp	1,19	1,16	0,67	0,65	0,68	0,40
	Rasio	98,14	97,63	97,94	97,61	96,45	95,71
3	Purwodadi	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	Laki-Laki	20.794	21.146	21.951	22.585	23.125	23.519
	LPP Lk	0,87	0,84	0,75	0,57	0,47	0,34
	Perempuan	21.497	22.007	22.759	23.511	24.368	24.932
	LPP Prp	1,21	1,17	0,67	0,65	0,72	0,46
	Rasio	96,73	96,09	96,45	96,06	94,9	94,33
4	Bagelen	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	Laki-Laki	15.267	15.379	16.040	16.426	16.416	16.358
	LPP Lk	0,40	0,37	0,84	0,48	-0,01	-0,07
	Perempuan	15.562	15.714	16.363	16.787	16.935	16.977
	LPP Prp	0,52	0,49	0,81	0,51	0,18	0,05
	Rasio	98,1	97,87	98,03	97,85	96,93	96,35
5	Kaligesing	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	Laki-Laki	16.274	16.496	17.150	17.619	17.806	17.815
	LPP Lk	0,73	0,68	0,78	0,54	0,21	0,01
	Perempuan	16.065	16.286	16.926	17.398	17.690	17.808





No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	LPP Prp	0,70	0,68	0,77	0,55	0,33	0,13
	Rasio	101,3	101,29	101,32	101,27	100,66	100,04
6	Purworejo	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	Laki-Laki	42.359	42.459	44.394	45.349	45.572	45.658
	LPP Lk	0,15	0,12	0,89	0,43	0,10	0,04
	Perempuan	43.124	43.229	45.178	46.184	46.333	46.243
	LPP Prp	0,16	0,12	0,88	0,44	0,06	-0,04
	Rasio	98,23	98,22	98,26	98,19	98,36	98,74
7	Banyuurip	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462
	Laki-Laki	21.634	21.872	22.772	23.361	23.594	23.703
	LPP Lk	0,57	0,55	0,81	0,51	0,20	0,09
	Perempuan	22.317	22.610	23.503	24.154	24.558	24.759
	LPP Prp	0,70	0,65	0,77	0,55	0,33	0,16
	Rasio	96,94	96,74	96,89	96,72	96,08	95,73
8	Bayan	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	Laki-Laki	26.153	26.678	27.651	28.494	29.204	29.683
	LPP Lk	1,02	0,99	0,72	0,60	0,49	0,33
	Perempuan	26.546	27.054	28.040	28.902	29.483	29.855
	LPP Prp	0,99	0,95	0,72	0,61	0,40	0,25
	Rasio	98,52	98,61	98,61	98,59	99,05	99,42
9	Kutoarjo	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	Laki-Laki	31.167	31.389	32.740	33.526	33.574	33.532
	LPP Lk	0,41	0,35	0,84	0,47	0,03	-0,03
	Perempuan	31.699	32.074	33.366	34.265	34.585	34.757
	LPP Prp	0,60	0,59	0,79	0,53	0,19	0,10
	Rasio	98,32	97,86	98,12	97,84	97,08	96,48
10	Butuh	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	Laki-Laki	21.120	21.368	22.237	22.823	23.005	22.974
	LPP Lk	0,63	0,58	0,80	0,52	0,16	-0,03
	Perempuan	21.608	21.891	22.758	23.385	23.702	23.881
	LPP Prp	0,67	0,65	0,78	0,54	0,27	0,15
	Rasio	97,74	97,61	97,71	97,6	97,06	96,2
11	Pituruh	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	Laki-Laki	26.540	27.097	28.070	28.941	29.713	30.279
	LPP Lk	1,09	1,04	0,71	0,61	0,53	0,38
	Perempuan	26.047	26.497	27.491	28.308	28.917	29.289
	LPP Prp	0,87	0,86	0,74	0,59	0,43	0,26
	Rasio	101,89	102,26	102,11	102,24	102,75	103,38
12	Kemiri	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	Laki-Laki	30.471	31.240	32.295	33.367	34.454	35.304
	LPP Lk	1,30	1,25	0,66	0,65	0,64	0,49
	Perempuan	29.801	30.497	31.546	32.580	33.400	33.957
	LPP Prp	1,17	1,15	0,68	0,65	0,50	0,33
	Rasio	102,25	102,44	102,37	102,42	103,16	103,97
13	Bruno	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	Laki-Laki	28.221	29.265	30.084	31.258	32.752	34.021
	LPP Lk	1,85	1,82	0,55	0,77	0,93	0,76
	Perempuan	26.330	27.092	27.945	28.942	30.386	31.476
	LPP Prp	1,46	1,43	0,62	0,70	0,97	0,70
	Rasio	107,18	108,02	107,65	108	107,79	108,09
14	Gebang	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	Laki-Laki	22.431	22.790	23.668	24.341	24.954	25.395
	LPP Lk	0,82	0,79	0,76	0,56	0,50	0,35





No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perempuan	21.789	22.031	22.925	23.536	23.827	24.027
	LPP Prp	0,59	0,55	0,80	0,53	0,25	0,17
	Rasio	102,95	103,45	103,24	103,42	104,73	105,7
15	Loano	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	Laki-Laki	19.603	19.909	20.680	21.265	21.748	22.052
	LPP Lk	0,82	0,77	0,76	0,56	0,45	0,28
	Perempuan	19.288	19.594	20.341	20.931	21.342	21.589
	LPP Prp	0,80	0,79	0,75	0,57	0,39	0,23
	Rasio	101,63	101,61	101,67	101,6	101,9	102,15
16	Bener	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	Laki-Laki	29.520	30.343	31.328	32.408	33.626	34.654
	LPP Lk	1,42	1,37	0,64	0,68	0,74	0,60
	Perempuan	28.639	29.319	30.322	31.323	32.101	32.667
	LPP Prp	1,19	1,17	0,67	0,65	0,49	0,35
	Rasio	103,08	103,49	103,32	103,46	104,75	106,08
	Kab. Purworejo	788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
	Laki-Laki	394.698	401.499	416.704	428.831	437.676	443.774
	LPP Lk	0,89	0,85	0,74	0,57	0,41	0,28
	Perempuan	393.567	400.171	415.254	427.506	436.347	441.852
	LPP Prp	0,86	0,83	0,74	0,58	0,41	0,25
	Rasio	100,29	100,33	100,35	100,31	100,30	100,43

Keterangan:

- LPP Lk = Laju Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki

- LPP Prp = Laju Pertumbuhan Penduduk Perempuan

Sumber: Analisis 2023

Terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki tingkat rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di bawah 100, yakni Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo, serta Kecamatan Butuh. Sementara itu, Kecamatan Bruno memiliki rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan tertinggi, sebesar 107,18. Hingga 20 (dua puluh) tahun ke depan (2045), diproyeksikan penduduk laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan tren yang semakin tinggi jumlah penduduk laki-lakinya terhadap penduduk perempuan. Selisih penduduk laki-laki dan perempuan yang semula 1.131 jiwa pada tahun 2023 melebar menjadi 1.922 jiwa pada tahun proyeksi 2045.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2045 sebesar 0,26. Pertumbuhan penduduk laki-laki (0,28) lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,25). Terdapat kondisi pertumbuhan penduduk laki-laki negatif diproyeksikan terjadi di Kecamatan Bagelen (-0,07), Kecamatan Kutoarjo (-0,03), dan Kecamatan Butuh (-0,03) pada tahun 2045. Pertumbuhan negatif juga diproyeksikan terjadi pada penduduk perempuan di Kecamatan Purwoerjo (-0,04) pada tahun 2045. Dengan tren laju pertumbuhan penduduk yang menurun baik laki-laki maupun perempuan ini, ke depan pemerintah perlu menggalakkan program keluarga berencana supaya pertumbuhan tidak mengalami minus.





2.6.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk dapat dikategorikan berdasarkan kelompok umur, sehingga dapat diketahui perbandingan antara penduduk usia produktif dan usia non produktif. Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo memiliki angka ketergantungan sebesar 46,14 (di bawah 50). Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Purworejo sedang mengalami bonus demografi. Penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun (59.778 jiwa). Di samping itu, hal menarik terlihat pada rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan per rentang usia. Penduduk usia di bawah 44 tahun didominasi oleh laki-laki, sementara penduduk usia di atas usia 44 tahun didominasi perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan kelompok umur tahun 2023 serta proyeksinya hingga tahun 2045 dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purworejo

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-4 tahun	55.399	57.181	56.438	54.448	52.110	50.232
	LPP	2,03	1,58	-0,26	-0,72	-0,88	-0,73
	Laki-Laki	28.279	29.166	28.791	27.784	26.599	25.649
	Perempuan	27.120	28.015	27.647	26.664	25.511	24.583
	Rasio	104,27	104,11	104,14	104,2	104,26	104,34
2	5-9 tahun	51.670	52.309	57.640	56.898	54.897	52.540
	LPP	0,00	0,61	1,94	-0,26	-0,72	-0,88
	Laki-Laki	26.394	26.798	29.388	29.014	28.006	26.812
	Perempuan	25.276	25.511	28.252	27.884	26.891	25.728
	Rasio	104,42	105,04	104,02	104,05	104,15	104,21
3	10-14 tahun	53.828	52.646	52.748	58.119	57.378	55.360
	LPP	-1,35	-1,11	0,04	1,94	-0,26	-0,72
	Laki-Laki	27.421	26.702	27.012	29.622	29.249	28.233
	Perempuan	26.407	25.944	25.736	28.497	28.129	27.127
	Rasio	103,84	102,92	104,96	103,95	103,98	104,08
4	15-19 tahun	57.125	56.119	52.817	52.925	58.311	57.564
	LPP	-0,68	-0,89	-1,21	0,04	1,94	-0,26
	Laki-Laki	29.530	28.912	26.826	27.141	29.763	29.388
	Perempuan	27.595	27.207	25.991	25.784	28.548	28.176
	Rasio	107,01	106,27	103,21	105,26	104,26	104,3
5	20-24 tahun	59.361	58.467	56.275	52.963	53.078	58.473
	LPP	-0,60	-0,76	-0,76	-1,21	0,04	1,94
	Laki-Laki	30.988	30.574	29.302	27.192	27.511	30.168
	Perempuan	28.373	27.893	26.973	25.771	25.567	28.305
	Rasio	109,22	109,61	108,63	105,51	107,6	106,58
6	25-29 tahun	59.778	61.032	59.714	57.480	54.090	54.207
	LPP	1,66	1,04	-0,44	-0,76	-1,22	0,04
	Laki-Laki	31.340	32.097	31.659	30.346	28.162	28.489
	Perempuan	28.438	28.935	28.055	27.134	25.928	25.718
	Rasio	110,20	110,93	112,85	111,84	108,62	110,77
7	30-34 tahun	56.808	58.066	62.357	61.008	58.723	55.264
	LPP	0,70	1,10	1,43	-0,44	-0,76	-1,21
	Laki-Laki	29.227	30.264	32.833	32.380	31.035	28.804
	Perempuan	27.581	27.802	29.524	28.628	27.688	26.460
	Rasio	105,97	108,86	111,21	113,11	112,09	108,86
8	35-39 tahun	53.814	55.752	58.483	62.807	61.455	59.154
	LPP	2,15	1,77	0,96	1,43	-0,44	-0,76
	Laki-Laki	27.145	28.180	30.460	33.048	32.598	31.244
	Perempuan	26.669	27.572	28.023	29.759	28.857	27.910
	Rasio	101,78	102,21	108,7	111,05	112,96	111,95
9	40-44 tahun	50.856	51.353	56.203	58.975	63.340	61.985
	LPP	-0,17	0,49	1,80	0,96	1,43	-0,43
	Laki-Laki	25.537	25.939	28.509	30.818	33.435	32.986
	Perempuan	25.319	25.414	27.694	28.157	29.905	28.999
	Rasio	100,86	102,07	102,94	109,45	111,8	113,75





No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
10	45-49 tahun	51.136	51.258	51.499	56.380	59.172	63.560
	LPP	0,11	0,12	0,09	1,81	0,97	1,43
	Laki-Laki	25.218	25.433	25.948	28.526	30.843	33.469
	Perempuan	25.918	25.825	25.551	27.854	28.329	30.091
	Rasio	97,30	98,48	101,55	102,41	108,87	111,23
11	50-54 tahun	52.363	51.030	50.815	51.086	55.960	58.746
	LPP	-1,51	-1,29	-0,08	0,11	1,82	0,97
	Laki-Laki	25.477	24.871	25.098	25.623	28.184	30.488
	Perempuan	26.886	26.159	25.717	25.463	27.776	28.258
	Rasio	94,76	95,08	97,59	100,63	101,47	107,89
12	55-59 tahun	52.344	52.893	49.974	49.828	50.148	54.979
	LPP	1,38	0,52	-1,14	-0,06	0,13	1,84
	Laki-Laki	25.479	25.620	24.200	24.458	25.004	27.532
	Perempuan	26.865	27.273	25.774	25.370	25.144	27.447
	Rasio	94,84	93,94	93,89	96,41	99,44	100,31
13	60-64 tahun	45.800	47.679	50.684	47.988	47.934	48.309
	LPP	2,25	2,01	1,22	-1,09	-0,02	0,16
	Laki-Laki	22.378	23.125	24.200	22.910	23.211	23.772
	Perempuan	23.422	24.554	26.484	25.078	24.723	24.537
	Rasio	95,54	94,18	91,38	91,35	93,88	96,88
14	65-69 tahun	36.398	39.045	44.075	47.033	44.676	44.731
	LPP	4,13	3,51	2,42	1,30	-1,03	0,02
	Laki-Laki	17.433	18.764	20.853	21.901	20.807	21.148
	Perempuan	18.965	20.281	23.222	25.132	23.869	23.583
	Rasio	91,92	92,52	89,8	87,14	87,17	89,67
15	70-74 tahun	23.981	27.380	34.027	38.684	41.527	39.622
	LPP	6,32	6,63	4,35	2,57	1,42	-0,94
	Laki-Laki	11.028	12.509	15.773	17.635	18.621	17.780
	Perempuan	12.953	14.871	18.254	21.049	22.906	21.842
	Rasio	85,14	84,12	86,41	83,78	81,29	81,4
16	75+ tahun	27.604	29.460	38.209	49.715	61.224	70.900
	LPP	3,08	3,25	5,20	5,26	4,16	2,93
	Laki-Laki	11.824	12.545	15.852	20.433	24.648	27.812
	Perempuan	15.780	16.915	22.357	29.282	36.576	43.088
	Rasio	75,18	74,16	70,9	69,78	67,39	64,55
Kab. Purworejo		788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
Angka Ketergantungan		46,14	47,46	51,59	55,29	55,46	54,76

Keterangan: LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Analisis 2023

Pada tahun 2045, diproyeksikan penduduk Kabupaten Purworejo sebanyak 885.626 jiwa dengan angka ketergantungan 54,76. Angka ketergantungan ini terus meningkat hingga tahun 2040 (mencapai 55,29) lalu sedikit menurun di tahun terakhir (2045). Sebelumnya telah dibahas bahwa laju pertumbuhan penduduk semula 0,86 di tahun 2023, terus menurun hingga 2045 (0,26). Penduduk yang semula dominan pada kelompok umur 25-29 tahun pada 2023, berubah menjadi penduduk dalam kelompok umur 75+ tahun (70.900 jiwa). Hal ini mengindikasikan bahwa struktur piramida Kabupaten Purworejo akan berubah dalam jangka 20-an tahun ke depan. Kondisi penduduk yang saat ini mengalami bonus demografi sudah bergeser strukturnya. Pada tingkat kecamatan, angka ketergantungan dapat diamat pada tabel berikut.



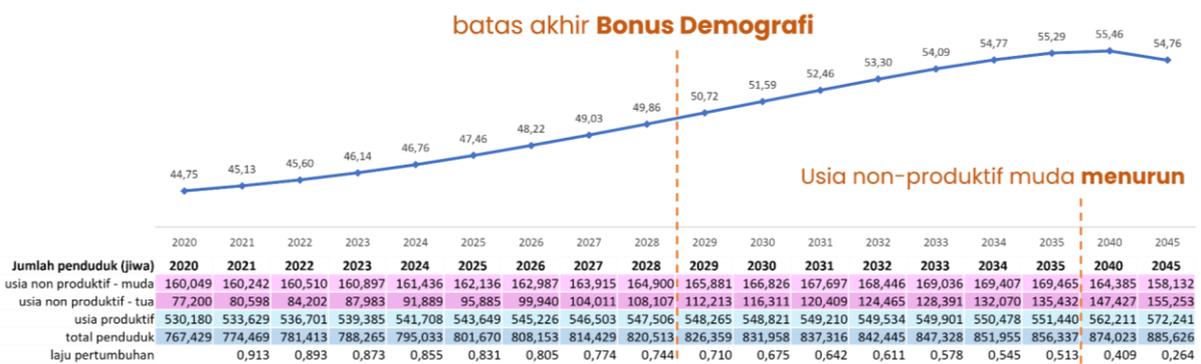
**Tabel 2.75 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Purworejo**

No	Kecamatan	Angka Ketergantungan	Angka Ketergantungan				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	47,79	49,28	53,98	58,09	59,18	59,02
2	Ngombol	49,52	51,05	55,96	60,42	61,97	62,19
3	Purwodadi	46,73	48,08	52,40	56,42	57,43	57,18
4	Bagelen	49,07	50,72	55,84	60,67	61,39	61,25
5	Kaligesing	47,62	49,14	53,89	58,26	58,89	58,56
6	Purworejo	42,64	43,76	47,35	50,53	49,73	48,59
7	Banyuurip	44,55	45,88	50,07	53,86	53,30	52,25
8	Bayan	45,80	47,05	51,03	54,53	54,67	53,94
9	Kutoarjo	44,40	45,66	49,54	52,92	52,07	50,66
10	Butuh	48,91	50,50	55,51	60,02	60,62	60,04
11	Pituruh	47,73	49,26	53,99	58,30	58,75	58,00
12	Kemiri	47,45	48,77	52,90	56,63	57,19	56,72
13	Bruno	47,84	48,82	52,06	54,81	55,14	54,48
14	Gebang	42,94	44,08	47,72	51,00	50,47	49,28
15	Loano	44,95	46,10	49,88	53,28	52,94	52,05
16	Bener	45,60	46,82	50,60	53,90	54,27	53,70
Kab. Purworejo		46,14	47,46	51,59	55,29	55,46	54,76

Sumber: Analisis 2023

Pada tahun 2023, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo mengalami bonus demografi. Pada tahun 2025, terdapat 3 kecamatan yang tidak lagi mengalami bonus demografi, antara lain Kecamatan Ngombol (angka ketergantungan 51,05), Kecamatan Bagelen (angka ketergantungan 50,72), dan Kecamatan Butuh (angka ketergantungan 50,50). Pada tahun 2030, tinggal 4 kecamatan yang masih mengalami bonus demografi, yakni Kecamatan Purworejo (angka ketergantungan 47,35), Kecamatan Kutoarjo (angka ketergantungan 49,54), Kecamatan Gebang (angka ketergantungan 47,72), dan Kecamatan Loano (angka ketergantungan 49,88). Pada tahun 2035, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo tidak lagi mengalami bonus demografi.

Hal yang menarik terjadi pada tahun 2040. Kecamatan Purworejo kembali mengalami bonus demografi karena angka ketergantungan sebesar 49,73. Lalu pada tahun terakhir proyeksi (2045), Kecamatan Gebang juga mengalami bonus demografi kembali (angka ketergantungan 49,28). Secara global di tingkat kabupaten, pada gambar berikut dapat diamati kondisi bonus demografi Kabupaten Purworejo.



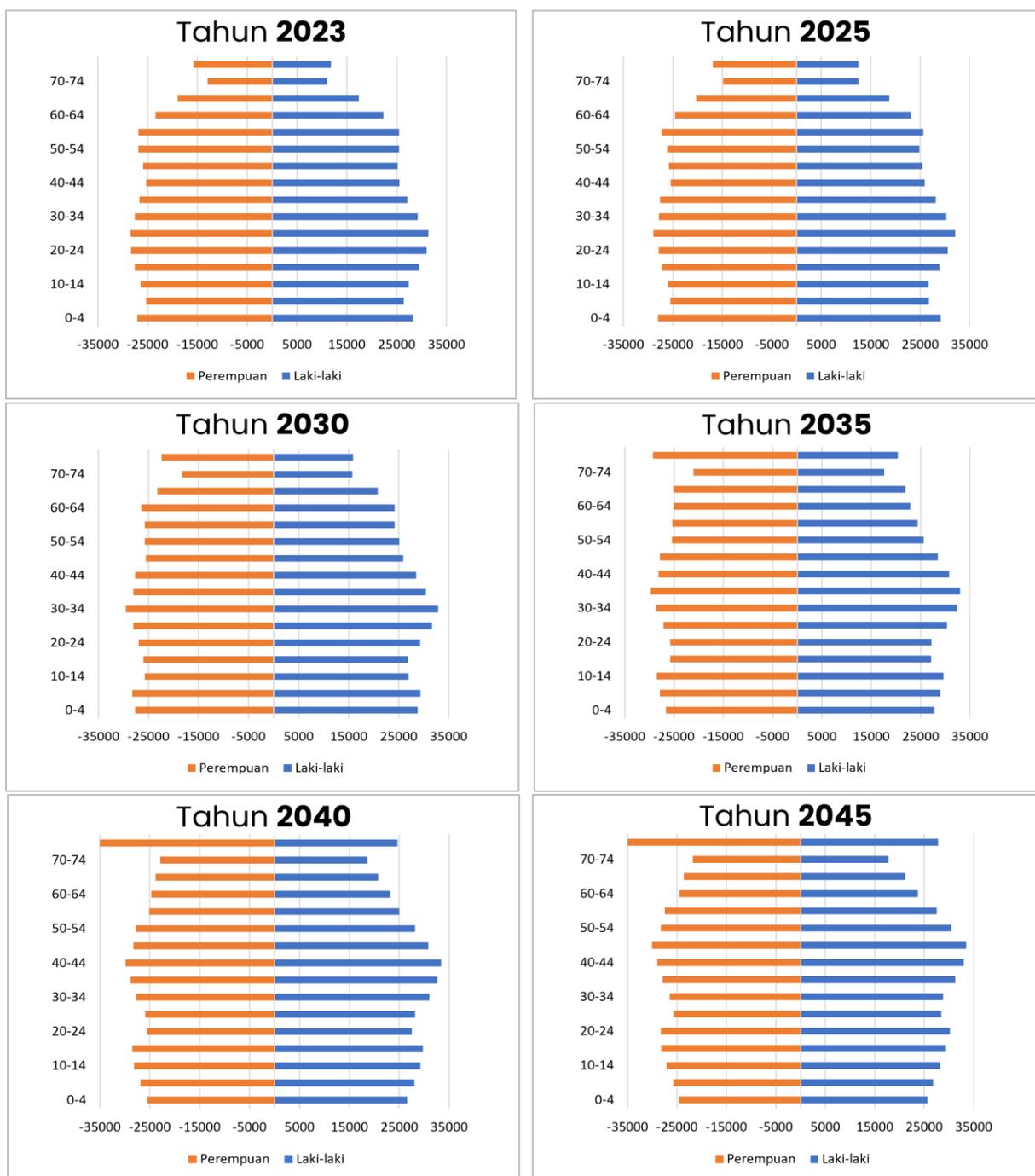
Gambar 2.130 Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purworejo
(Sumber: Analisis, 2023)





Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2020, Kabupaten Purworejo mengalami bonus demografi hingga tahun 2028, kemudian tahun 2029-2045 angka ketergantungan Kabupaten Purworejo berada di atas 50,00 sehingga sudah tidak mengalami bonus demografi. Laju pertumbuhan penduduk terlihat juga semakin menurun, semula 0,913 di tahun 2021 menjadi 0,264 di tahun 2045. Di samping itu, diprediksikan bahwa usia non produktif muda diproyeksikan selalu meningkat hingga 2035, namun pada 2040 dan 2045 sedikit menurun (laju pertumbuhan penduduk sangat rendah). Sementara itu, penduduk usia non produktif usia tua/ lanjut diproyeksikan terus meningkat hingga tahun terakhir proyeksi (2045).

Identifikasi sebaran kelompok umur juga dapat dilakukan dengan pengamatan piramida penduduk. Gambar berikut ini menunjukkan piramida penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2023, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045.



Gambar 2.131 Piramida Penduduk pada Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purworejo
(Sumber: Analisis, 2023)





Pada tahun 2023 dan tahun 2025, penduduk usia produktif lebih mendominasi. Pada tahun 2035, 2040, dan 2045, piramida menunjukkan tingginya penduduk usia di atas 74 tahun yang menunjukkan tren peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Purworejo. Hal ini juga mengindikasikan struktur piramida Kabupaten Purworejo berubah pada tahun 2045. Hal yang menarik, penduduk usia tua diproyeksikan didominasi oleh penduduk perempuan. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun strategi ke depan dalam pelayanan lansia yang baik, khususnya bagi lansia perempuan.

2.6.1.4. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.081,45 km², terbagi dalam 16 (enam belas) kecamatan. Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo yang merupakan kawasan urban memiliki kepadatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1.604 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Kaligesing menjadi daerah dengan kepadatan penduduk terendah, berkisar 413 jiwa/km² pada tahun 2023. Selanjutnya, proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045 dapat diamati pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	Luas (km2)	67,80	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	746	764	790	816	836	850
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	Luas (km2)	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	604	616	639	658	677	689
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	Luas (km2)	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	753	769	796	821	846	863
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	Luas (km2)	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	486	490	511	524	526	525
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	Luas (km2)	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	413	419	435	447	453	455
6	Purworejo						
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	Luas (km2)	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.605	1.609	1.682	1.719	1.726	1.726
7	Banyuurip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	Luas (km2)	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	920	931	969	994	1.008	1.014
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	Luas (km2)	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.180	1.203	1.247	1.285	1.314	1.333
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	Luas (km2)	39,20	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.604	1.619	1.686	1.729	1.739	1.742
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	Luas (km2)	47,21	47,21	47,21	47,21	47,21	47,21
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	905	916	953	979	989	992
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	Luas (km2)	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	591	602	624	643	659	669
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	Luas (km2)	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	584	599	619	639	658	671
13	Bruno						
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	Luas (km2)	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	516	533	549	570	597	620
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	Luas (km2)	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	627	636	661	679	692	701
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	Luas (km2)	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	727	738	767	789	805	816
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	Luas (km2)	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	568	582	602	622	642	657
Kab. Purworejo							
Penduduk (jiwa)		788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
Luas (km2)		1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)		729	741	769	792	808	819

Sumber: Analisis 2023





Setelah dilakukan proyeksi penduduk, Kabupaten Purworejo akan semakin padat, menjadi 819 jiwa/km² pada tahun 2045, meningkat 90 jiwa/km² dari tahun 2023 (semula 729 jiwa/km²). Pada tahun 2045, Kecamatan Kutoarjo (1.742 jiwa/km²) lebih padat dibandingkan dengan Kecamatan Purworejo (1.726 jiwa/km²). Tren penduduk yang semakin meningkat ini perlu diantisipasi dalam 20 tahun ke depan, salah satunya dengan mengatur pola ruang melalui RDTR pada kawasan perkotaan dan kawasan strategis, beberapa di antaranya: kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo (yang telah disusun), kawasan otoritatif Badan Otorita Borobudur, kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandar Udara YIA, kawasan perkotaan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag, kawasan perkotaan Bener sekitar Bendungan Bener, kawasan perkotaan Grabag, kawasan perkotaan Kemiri-Pituruh, serta kawasan perkotaan Bruno.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Setelah didapatkan proyeksi kependudukan Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045, dapat dilakukan analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dan Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Selain itu, penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Dapat dibandingkan antara kondisi eksisting dengan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai wujud dari pelayanan publik, meliputi: rumah/ tempat tinggal dan permukiman, air bersih/ air minum, energi/ listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

2.6.2.1. Rumah/ Tempat Tinggal

Menurut data dari Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, jumlah rumah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebanyak 253.727 unit. Jumlah rumah/ tempat tinggal ini selalu meningkat tiap tahunnya, setidaknya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Jumlah rumah/ tempat tinggal yang semula 228.185 unit di 2018, meningkat 11,19% di tahun terakhir (2023), menjadi 253.727 unit. Berdasarkan SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan, minimal bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga seluas 54m², dengan luas lantai 21-36m².

Tabel 2.77 Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	Rumah (unit)	16.967	17.852	18.466	19.070	19.540	19.866
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	Rumah (unit)	12.554	12.611	13.063	13.471	13.858	14.086





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	Rumah (unit)	14.796	14880	15.417	15.895	16.377	16.708
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	Rumah (unit)	9.818	10.722	11.173	11.453	11.500	11.495
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	Rumah (unit)	9.287	11.304	11.750	12.075	12.240	12.284
6	Purworejo						
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	Rumah (unit)	29.249	29.548	30.887	31.563	31.691	31.690
7	Banyuurip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462
	Rumah (unit)	15.020	15.339	15.957	16.384	16.604	16.711
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	Rumah (unit)	16.947	18.528	19.204	19.792	20.237	20.530
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	Rumah (unit)	21.110	21.884	22.795	23.376	23.503	23.548
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	Rumah (unit)	13.713	14.917	15.516	15.934	16.106	16.157
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	Rumah (unit)	17.366	18.481	19.159	19.741	20.217	20.541
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	Rumah (unit)	19.159	21.289	22.014	22.740	23.398	23.883
13	Bruno						
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	Rumah (unit)	14.312	19.433	20.010	20.759	21.772	22.585
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	Rumah (unit)	14.019	15.456	16.067	16.509	16.821	17.042
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	Rumah (unit)	12.080	13.622	14.145	14.550	14.858	15.048
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	Rumah (unit)	17.331	20.573	21.259	21.976	22.664	23.214
Kab. Purworejo							
Penduduk (jiwa)		788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
Rumah (unit)		253.727	276.438	286.882	295.289	301.387	305.388

Sumber: Analisis 2023

Backlog perumahan adalah kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Didefinisikan bahwa 1 KK diharapkan memiliki 1 rumah. Tabel di atas ini menunjukkan proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal Kabupaten Purworejo per kecamatan hingga tahun 2045. Mendasari proyeksi penduduk hingga tahun 2045, jumlah kepala keluarga atau jumlah kebutuhan rumah Kabupaten





Purworejo mencapai 305.388 unit. Jumlah kebutuhan rumah tertinggi terdapat di Kecamatan Purworejo, sebesar 31.690 unit, sesuai dengan tingginya jumlah penduduk di ibukota kabupaten tersebut.

Pada RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, dalam pola ruang direncanakan kawasan permukiman seluas 28.517,5 ha. Proyeksi rumah pada tahun 2045 sebesar 305.388 unit, artinya luas minimal yang dibutuhkan ialah 1649,1 ha. Hal ini berarti Kabupaten Purworejo masih memiliki lahan luas untuk dilakukan ekspansi permukiman.

2.6.2.2. Air bersih/ Air Minum

Berdasarkan SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan serta SNI 6728.1:2015 tentang penyusunan neraca spasial sumber daya alam bagian 1: sumber daya air, kebutuhan air bersih rumah tangga (domestik) di seluruh kecamatan Kabupaten Purworejo sebagai daerah dalam kategori kota kecil ialah 110 liter/orang/hari. Sementara itu, kebutuhan air untuk komersial dan sosial (toko, gudang, bengkel, sekolah, rumah sakit, hotel, dan sebagainya) sebesar 30% dari total air pemakaian rumah tangga, yakni 33 liter/orang/hari. Secara keseluruhan, kebutuhan air per kapita mencapai 143 liter/orang/hari.

Kondisi eksisting pada tahun 2023 menunjukkan tingkat keterjangkauan air minum Kabupaten Purworejo sebesar 97,92%. Kondisi ini bervariasi di tiap kecamatan. Capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Purwodadi (98,66%), sementara capaian terendah di Kecamatan Gebang (95,80%). Rendahnya akses air minum di Kecamatan Gebang disebabkan adanya wilayah yang kekeringan di musim kemarau, terutama di sekitar perbukitan.

Tabel 2.78 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	Air Minum (L/det)	82,30	85,69	88,63	91,53	93,79	95,35
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	Air Minum (L/det)	58,43	60,53	62,70	64,66	66,51	67,61
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	Air Minum (L/det)	69,06	71,42	74,00	76,29	78,61	80,19
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	Air Minum (L/det)	48,97	51,46	53,63	54,97	55,20	55,17
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	Air Minum (L/det)	52,72	54,26	56,40	57,96	58,75	58,96
6	Purworejo						
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	Air Minum (L/det)	137,39	141,82	148,25	151,50	152,11	152,10
7	Banyuurip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	Air Minum (L/det)	71,18	73,62	76,59	78,64	79,70	80,21
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	Air Minum (L/det)	85,47	88,93	92,17	95,00	97,13	98,54
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	Air Minum (L/det)	102,59	105,04	109,41	112,20	112,81	113,03
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	Air Minum (L/det)	69,57	71,60	74,47	76,48	77,30	77,55
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	Air Minum (L/det)	85,70	88,70	91,96	94,75	97,04	98,59
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	Air Minum (L/det)	98,32	102,18	105,66	109,15	112,31	114,63
13	Bruno						
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	Air Minum (L/det)	88,50	93,28	96,04	99,64	104,50	108,40
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	Air Minum (L/det)	70,11	74,18	77,12	79,24	80,74	81,80
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	Air Minum (L/det)	63,61	65,38	67,89	69,84	71,32	72,23
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	Air Minum (L/det)	94,26	98,75	102,04	105,48	108,78	111,42
Kab. Purworejo							
	Penduduk (jiwa)	788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
	Air Minum (L/det)	1.278,17	1.326,84	1.376,97	1.417,32	1.446,59	1.465,79

Sumber: Analisis 2023

Tabel di atas menunjukkan kondisi pemenuhan air minum tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo dan proyeksi kebutuhannya hingga tahun 2045 mendatang. Diproyeksikan kebutuhan air bersih/ air minum di Kabupaten Purworejo mencapai 1.465,79 liter/detik, meningkat 14,74% dari kondisi eksisting pemenuhan di tahun 2023 (1.277,68 liter/detik). Kecamatan Purworejo menjadi daerah dengan kebutuhan air minum tertinggi pada tahun 2045 (152,10 liter/detik), sementara kebutuhan air minum terendah terdapat di Kecamatan Bagelen (55,17 liter/detik). Perbedaan kebutuhan air di masing-masing kecamatan ini didasari oleh perbedaan jumlah penduduk di tiap-tiap wilayah tersebut.

2.6.2.3. Energi/ Listrik

Konsumsi listrik dibedakan dalam beberapa jenis (bangunan), antara lain: rumah tangga, sosial (tempat ibadah, dll), industri (pengolahan barang mentah menjadi barang jadi), bisnis (toko, dll), dan pemerintah. Berdasarkan data PLN ULP Purworejo dan ULP Kutoarjo, pemakaian listrik secara keseluruhan di Kabupaten Purworejo selama tahun 2022 sebesar 370,72





GWh. Pemakaian listrik ini 59,19% untuk keperluan rumah tangga, selebihnya untuk bangunan sosial, industri, bisnis, pemerintah, dan *loss storm*. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (sejak 2013), terjadi peningkatan pelanggan listrik PLN pemakaian rumah tangga (29,62%). Di samping itu, konsumsi pemakaian listrik rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 31,27%.

Saat ini (tahun 2022), pemenuhan/ pemakaian listrik pada rumah tangga sebesar 370,7 GWh. Apabila dilihat per kapita, konsumsi listrik sebesar 313,88 kWh/kapita pada 2013, meningkat menjadi 470,30 kWh/kapita di tahun terakhir (2022). Kondisi konsumsi listrik Kabupaten Purworejo ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik di tingkat nasional (1.173 kWh/kapita).

Tabel 2.79 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	Listrik (GWh)	18,7	72,5	75,0	77,4	79,3	80,7
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	Listrik (GWh)	13,3	51,2	53,0	54,7	56,3	57,2
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	Listrik (GWh)	15,7	60,4	62,6	64,5	66,5	67,8
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	Listrik (GWh)	11,4	43,5	45,4	46,5	46,7	46,7
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	Listrik (GWh)	12,0	45,9	47,7	49,0	49,7	49,9
6	Purworejo						
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	Listrik (GWh)	31,7	120,0	125,4	128,1	128,7	128,7
7	Banyuurip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462
	Listrik (GWh)	16,3	62,3	64,8	66,5	67,4	67,8
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	Listrik (GWh)	19,5	75,2	78,0	80,4	82,2	83,4
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	Listrik (GWh)	23,3	88,8	92,5	94,9	95,4	95,6
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	Listrik (GWh)	15,8	60,6	63,0	64,7	65,4	65,6
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	Listrik (GWh)	19,5	75,0	77,8	80,1	82,1	83,4
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	Listrik (GWh)	22,3	86,4	89,4	92,3	95,0	97,0
13	Bruno						





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	Listrik (GWh)	20,2	78,9	81,2	84,3	88,4	91,7
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	Listrik (GWh)	16,4	62,7	65,2	67,0	68,3	69,2
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	Listrik (GWh)	14,4	55,3	57,4	59,1	60,3	61,1
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	Listrik (GWh)	21,6	83,5	86,3	89,2	92,0	94,3
Kab. Purworejo							
Penduduk (jiwa)		788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
Listrik (GWh)		370,7	1.122,3	1.165,7	1.198,9	1.223,6	1.239,9

Keterangan: *data sementara

Sumber: Analisis 2023

Merujuk pada RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah menargetkan tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024. Angka ini digunakan sebagai dasar perhitungan standar kebutuhan listrik hingga tahun 2045 mendatang. Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2045, ditargetkan penyediaan listrik dapat memenuhi kebutuhan per kapita di Kabupaten Purworejo, mencapai 1.239,9 GWh. Kebutuhan listrik tertinggi terdapat di Kecamatan Purworejo (128,7 GWh) sementara kebutuhan listrik terendah di Kecamatan Bagelen (46,7 GWh). Sebagai catatan, apabila menggunakan pendekatan *business as usual*, konsumsi listrik Kabupaten Purworejo pada tahun 2045 hanya mencapai 770,5 GWh atau sebesar 870,04 kWh/kapita.

2.6.2.4. Persampahan

Timbulan sampah Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 berdasarkan DLHP mencapai 117.433 ton, meningkat 11,98% dari tahun 2019. Berdasarkan SNI 8632:2018 tentang tata cara perencanaan teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, timbulan sampah yang dihasilkan per orang (di kota kecil, termasuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Purworejo) ialah 2,5 L/orang/hari atau 0,40 kg/orang/hari. Proyeksi timbulan sampah Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045 dapat diamati pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.80 Proyeksi Persampahan Kabupaten Purworejo**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Persampahan				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
Proyeksi Timbunan Sampah (ton)	115.086,69	117.043,82	121.465,87	125.025,20	127.607,36	129.301,40
Jumlah Kebutuhan TPS3R	18	24	34	69	102	135
Jumlah Kebutuhan TPST		-	1	2	3	4

Sumber: Analisis 2023

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbunan sampah yang terolah meliputi penanganan dan pengurangan di tahun 2025 sebanyak 31,48 % dan target timbunan sampah yang terolah di tahun 2045 sebanyak 90 %. Strategi pencapaian target 90 % dengan cara meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan TPS3R dan TPST. Kenaikan kebutuhan TPS3R setiap tahun sebanyak 2 unit berdasarkan hitungan kenaikan pada 2 tahun sebelumnya. Di samping itu, pada periode I dilaksanakan perluasan lahan TPA dan/atau memperkuat infrastruktur TPA. Kebutuhan TPST pada setiap periode sebanyak 1 unit. Total 4 unit dalam kurun waktu antara tahun 2025 sampai dengan 2045. Pertimbangan total 4 unit antara lain :

- 1) Persyaratan teknis TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa luas TPST lebih besar dari 20.000 M2 dengan jarak dari permukiman terdekat minimal 500 M2.
- 2) Jumlah kecamatan di Kabupaten Purworejo sebanyak 16 Kecamatan, sehingga untuk 4 Kecamatan cukup dibangun 1 TPST

2.6.2.5. Sarana Kesehatan

Kabupaten Purworejo saat ini memiliki fasilitas kesehatan berupa 12 rumah sakit, dua diantaranya merupakan RSUD, serta 27 Puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat I di Kabupaten Purworejo berjumlah 52 (klinik pratama, dokter umum, serta Puskesmas yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional), dengan pelayanan tertinggi di Puskesmas Bruno (36.203 peserta), Puskesmas Bener (34.973 peserta), dan Puskesmas Grabag (30.329 peserta). Selanjutnya, pada tabel di bawah ini ditunjukkan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045.

Tabel 2.81 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
1. Rumah Sakit	12	12	12	12	12	12
2. Puskesmas	27	27	27	28	28	29

Sumber: Analisis 2023





Menurut WHO, 1 tempat tidur di rumah sakit dapat menjangkau 1.000 jiwa. Saat ini, dari 12 rumah sakit yang ada di Kabupaten Purworejo, terdapat tempat tidur sebanyak 939 buah. Hal ini mengindikasikan bahwa 1 tempat tidur menjangkau 839 jiwa (memenuhi standar WHO). Hingga tahun 2045, jumlah rumah sakit di Kabupaten Purworejo masih memenuhi layanan, namun secara lokasi relatif berpusat di ibukota kabupaten, dan satu rumah sakit terdapat di Kecamatan Kutoarjo. Akibatnya, kawasan tenggara, barat, atau utara Kabupaten Purworejo dimungkinkan merujuk ke kabupaten sekitar dalam memperoleh sarana kesehatan rawat inap.

Berdasarkan SNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan, Puskesmas dapat melayani minimum 30.000 jiwa. Jika diambil perhitungan minimum, saat ini pelayanan Puskesmas di Kabupaten Purworejo telah memenuhi kebutuhan. Namun pada tahun 2035 perlu penambahan 1 Puskesmas begitu juga pada tahun 2045 perlu penambahan 1 puskesmas untuk melayani penduduk yang diproyeksikan bertambah pada tahun tersebut.

2.6.2.6. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan untuk masyarakat harus dipenuhi dari rentang usia dini, usia sekolah dasar, usia sekolah menengah pertama, hingga usia sekolah menengah atas. Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 memiliki 450 unit TK, 573 SD /sederajat, 108 SMP/ sederajat, serta 72 SMA/ sederajat. Rata-rata jumlah peserta didik di tingkat TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat Kabupaten Purworejo masing-masing sebanyak 14 peserta didik, 20 peserta didik, 32 peserta didik, dan 28 peserta didik.

Menurut Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, jumlah peserta didik paling banyak di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA masing-masing 15 peserta didik, 28 peserta didik, 32 peserta didik, dan 36 peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di tingkat SD/ sederajat dan SMA/ sederajat dapat dilakukan efisiensi, memperhatikan kapasitas maksimal rombongan belajarnya.

Pada sisi rombongan belajar, rata-rata fasilitas TK di Kabupaten Purworejo memiliki 1 rombongan belajar (tiap tingkat), rata-rata fasilitas SD/ sederajat memiliki 1 rombongan belajar (tiap tingkat) yang bisa di-*upscale* hingga 4 rombongan belajar, rata-rata fasilitas SMP/ sederajat memiliki 3 rombongan belajar (tiap tingkat) yang bisa di-*upscale* hingga 11 rombongan belajar, rata-rata fasilitas SMA/ sederajat memiliki 5 rombongan belajar (tiap tingkat) yang bisa di-*upscale* hingga 12 rombongan belajar. Hal ini menunjukkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Purworejo tidak serta merta harus ditambah unitnya, namun banyak yang masih diperbesar kapasitas kelas/ rombongan belajarnya.



**Tabel 2.82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Purworejo**

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	53.552	55.302	56.667	57.612
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.310	1.348	1.486	1.416	1.488	1.528
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.954	3.945	4.151	4.374	4.608	4.849
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.077	2.039	1.954	2.119	2.107	2.146
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.174	2.152	2.004	1.997	1.852	1.753
	TK	22	22	22	22	22	22
	SD/ sederajat	38	23	25	26	27	29
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	1	1	1	1	1	1
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	37.883	39.066	40.187	40.849
	Usia 5-6 th (jiwa)	948	973	1.073	1.019	1.054	1.070
	Usia 7-12 th (jiwa)	2.919	2.902	3.051	3.204	3.476	3.709
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.506	1.472	1.411	1.526	1.580	1.646
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.534	1.512	1.406	1.395	1.286	1.207
	TK	29	29	29	29	29	29
	SD/ sederajat	24	17	18	19	21	22
	SMP/ sederajat	3	3	3	3	3	3
	SMA/ sederajat	1	1	1	1	1	1
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	44.710	46.096	47.493	48.452
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.045	1.074	1.192	1.133	1.173	1.192
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.402	3.384	3.567	3.765	4.094	4.379
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.794	1.756	1.694	1.838	1.910	1.994
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.750	1.727	1.612	1.605	1.485	1.398
	TK	28	28	28	28	28	28
	SD/ sederajat	30	20	21	22	24	26
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	4	4	4	4	4	4
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.403	33.213	33.351	33.335
	Usia 5-6 th (jiwa)	722	731	811	763	785	802
	Usia 7-12 th (jiwa)	2.277	2.233	2.360	2.467	2.550	2.644
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.247	1.204	1.161	1.245	1.220	1.214
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.290	1.256	1.175	1.158	1.067	1.000
	TK	21	21	21	21	21	21
	SD/ sederajat	25	13	14	15	15	16
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	2	2	2	2	2	2
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	34.076	35.017	35.496	35.623
	Usia 5-6 th (jiwa)	775	789	874	826	861	880
	Usia 7-12 th (jiwa)	2.385	2.353	2.485	2.604	2.725	2.844
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.300	1.262	1.214	1.306	1.284	1.290
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.355	1.325	1.237	1.224	1.123	1.054
	TK	22	22	22	22	22	22
	SD/ sederajat	28	14	15	16	16	17
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	1	1	1	1	1	1
6	Purworejo						





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.572	91.533	91.904	91.901
	Usia 5-6 th (jiwa)	2.160	2.180	2.442	2.319	2.398	2.470
	Usia 7-12 th (jiwa)	6.523	6.382	6.832	7.174	7.432	7.717
	Usia 13-15 th (jiwa)	3.490	3.360	3.274	3.534	3.478	3.465
	Usia 16-18 th (jiwa)	3.707	3.597	3.403	3.380	3.163	2.997
	TK	49	49	49	49	49	49
	SD/ sederajat	52	38	41	43	44	46
	SMP/ sederajat	11	11	11	11	11	11
	SMA/ sederajat	17	17	17	17	17	17
7	Banyuwirip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	46.275	47.515	48.152	48.462
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.105	1.126	1.254	1.192	1.244	1.280
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.387	3.345	3.558	3.742	3.921	4.102
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.851	1.799	1.742	1.880	1.856	1.868
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.999	1.958	1.840	1.830	1.694	1.604
	TK	28	28	28	28	28	28
	SD/ sederajat	30	20	21	22	23	24
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	7	7	7	7	7	7
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	55.691	57.396	58.688	59.538
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.433	1.471	1.631	1.561	1.645	1.695
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.284	4.263	4.517	4.769	5.034	5.296
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.223	2.175	2.097	2.280	2.258	2.297
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.321	2.289	2.142	2.142	1.971	1.870
	TK	32	32	32	32	32	32
	SD/ sederajat	33	25	27	28	29	29
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	4	4	4	4	4	4
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	66.106	67.791	68.158	68.289
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.636	1.662	1.854	1.765	1.829	1.883
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.924	4.849	5.169	5.437	5.655	5.898
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.614	2.532	2.456	2.657	2.618	2.625
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.778	2.713	2.554	2.543	2.364	2.239
	TK	39	39	39	39	39	39
	SD/ sederajat	46	29	31	32	34	35
	SMP/ sederajat	11	11	11	11	11	11
	SMA/ sederajat	13	13	13	13	13	13
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.995	46.208	46.707	46.855
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.091	1.110	1.230	1.164	1.211	1.240
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.357	3.310	3.500	3.661	3.818	3.979
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.743	1.691	1.629	1.755	1.726	1.733
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.781	1.741	1.627	1.611	1.479	1.389
	TK	30	30	30	30	30	30
	SD/ sederajat	36	20	21	22	23	24
	SMP/ sederajat	5	5	5	5	5	5
	SMA/ sederajat	3	3	3	3	3	3
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	55.561	57.249	58.630	59.568
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.331	1.364	1.509	1.438	1.510	1.549
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.053	4.025	4.251	4.480	4.723	4.964





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.145	2.096	2.017	2.185	2.163	2.197
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.229	2.196	2.049	2.042	1.873	1.770
	TK	24	24	24	24	24	24
	SD/ sederajat	43	24	25	27	28	30
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	4	4	4	4	4	4
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	63.841	65.947	67.855	69.261
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.636	1.686	1.863	1.784	1.874	1.927
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.943	4.936	5.205	5.501	5.823	6.153
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.475	2.430	2.336	2.549	2.557	2.626
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.415	2.391	2.228	2.229	2.067	1.959
	TK	26	26	26	26	26	26
	SD/ sederajat	48	29	31	33	35	37
	SMP/ sederajat	9	9	9	9	9	9
	SMA/ sederajat	3	3	3	3	3	3
13	Bruno						
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	58.029	60.200	63.138	65.497
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.668	1.740	1.931	1.869	1.941	1.986
	Usia 7-12 th (jiwa)	5.150	5.203	5.507	5.902	6.557	7.169
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.703	2.687	2.595	2.861	3.089	3.320
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.714	2.721	2.547	2.578	2.467	2.359
	TK	25	25	25	25	25	25
	SD/ sederajat	38	29	29	29	29	29
	SMP/ sederajat	6	6	6	6	6	6
	SMA/ sederajat	2	2	2	2	2	2
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	46.593	47.877	48.781	49.422
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.155	1.180	1.316	1.258	1.311	1.349
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.453	3.419	3.648	3.855	4.067	4.285
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.889	1.840	1.785	1.936	1.926	1.955
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.082	2.043	1.925	1.925	1.785	1.695
	TK	21	21	21	21	21	21
	SD/ sederajat	34	20	22	23	24	26
	SMP/ sederajat	9	9	9	9	9	9
	SMA/ sederajat	5	5	5	5	5	5
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	41.021	42.196	43.089	43.640
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.059	1.083	1.205	1.152	1.208	1.244
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.158	3.133	3.332	3.517	3.710	3.903
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.689	1.648	1.594	1.729	1.715	1.740
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.820	1.789	1.681	1.679	1.553	1.473
	TK	21	21	21	21	21	21
	SD/ sederajat	26	19	20	21	22	23
	SMP/ sederajat	5	5	5	5	5	5
	SMA/ sederajat	3	3	3	3	3	3
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	61.650	63.731	65.726	67.322
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.603	1.654	1.829	1.758	1.851	1.910
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.718	4.722	4.991	5.288	5.606	5.936
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.353	2.315	2.227	2.437	2.446	2.519
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.360	2.342	2.186	2.194	2.034	1.934
	TK	33	33	33	33	33	33





No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8
	SD/ sederajat	42	28	30	30	30	30
	SMP/ sederajat	7	7	7	7	7	7
	SMA/ sederajat	2	2	2	2	2	2
Kab. Purworejo							
	Penduduk (jiwa)	788.265	801.670	831.958	856.337	874.023	885.626
	Usia 5-6 th (jiwa)	20.677	21.171	23.500	22.417	23.383	24.005
	Usia 7-12 th (jiwa)	62.887	62.404	66.124	69.740	73.799	77.827
	Usia 13-15 th (jiwa)	33.099	32.307	31.188	33.838	33.931	34.634
	Usia 16-18 th (jiwa)	34.308	33.752	31.615	31.532	29.264	27.699
	TK (unit)	450	450	450	450	450	450
	SD/ sederajat (unit)	573	368	391	408	424	443
	SMP/ sederajat (unit)	108	108	108	108	108	108
	SMA/ sederajat (unit)	72	72	72	72	72	72

Sumber: Analisis 2023

Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dilakukan di tiap kecamatan berdasarkan rentang umur. Menurut Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sarana TK secara umum menjangkau penduduk usia 5-6 tahun, sarana SD/ sederajat menjangkau penduduk usia 7-12 tahun, sarana SMP/ sederajat menjangkau usia 13-15 tahun, sementara sarana SMA/ sederajat menjangkau usia 16-18 tahun.

Berdasarkan proyeksi rentang usia dengan memanfaatkan data BPS serta menggunakan metode Sprague, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo usia 5-6 tahun pada tahun 2045 sebanyak 24.005 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 77.828 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 34.634 jiwa, dan usia 16-18 tahun sebanyak 27.699 jiwa. Pada tahun 2045, diproyeksikan kebutuhan TK masih 450 unit, kebutuhan SMP/ sederajat masih 108 unit, kebutuhan SMA/ sederajat masih 72 unit, namun kebutuhan SD/ sederajat dapat diefisiensi dari jumlah eksisting, maksimal pada 443 unit di tahun 2045. Keseluruhan fasilitas SD/ sederajat di masing-masing kecamatan dapat ditinjau kembali pelayanannya dan dapat dilakukan *regrouping* sekolah. Secara umum setidaknya jumlah sarana SD/ sederajat sama dengan jumlah TK, yakni 450 unit.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional yang bersinggungan langsung dengan pengembangan di Kabupaten Purworejo adalah rencana terkait pembangunan jalan tol trase Cilacap-Yogyakarta. Selain itu wilayah Kabupaten Purworejo juga termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Serayu-Bogowonto yang merupakan WS Strategis Nasional. Sedangkan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional yang bersinggungan langsung dengan





pengembangan di Kabupaten Purworejo adalah Penetapan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Wilayah Kabupaten Purworejo masuk dalam Kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017.

Selain itu pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. Program/Kegiatan di Kabupaten Purworejo antara lain Pembangunan *Ringroad* Timur Purworejo, Peningkatan Jalan Tumbakanyar-Banyuasin-Sedayu-Pagerharjo-Batas DIY, Peningkatan Jalan Banyuasin-Tridadi-Pucungroto-Batas DIY, Pembangunan SPAM Regional Keburejo (JDU), Pembangunan IKK SPAM Bagelen, serta Pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo yaitu Pembangunan Bendungan Bener. Bendungan Bener berfungsi untuk mengairi lahan irigasi, menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri ketiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA).

2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah Jawa

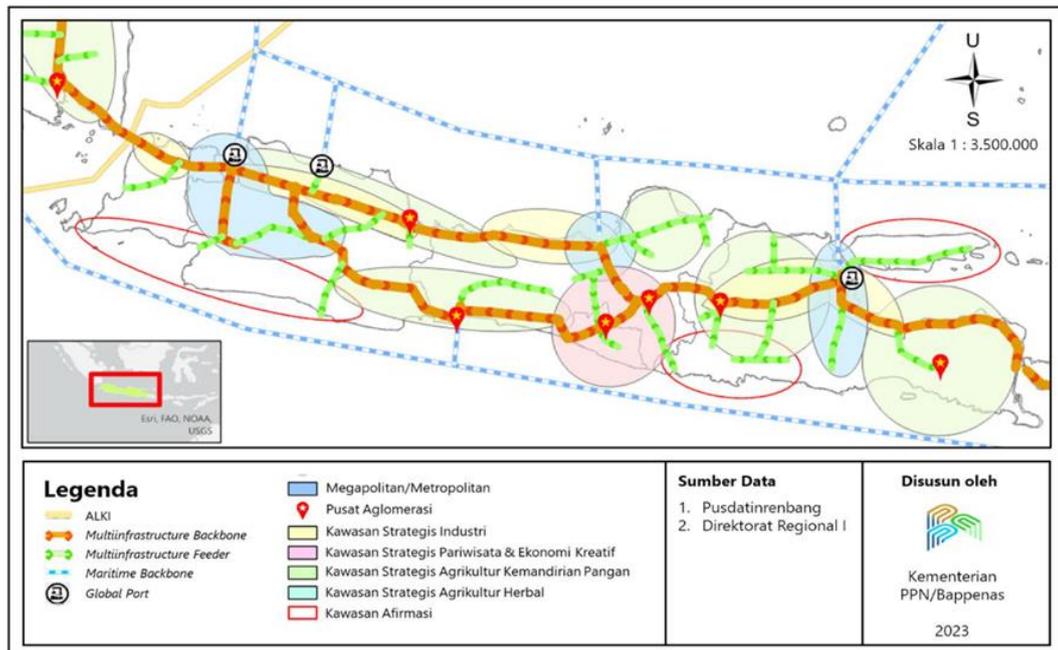
Berdasarkan Dokumen RPJPN 2025-2045, Pulau Jawa diarahkan menjadi wilayah **“Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”**, melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan;
3. Percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan





- digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;
5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.



Gambar 2.132 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Jawa

Sumber: RPJPN 2025-2045

Wilayah Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Aksesibilitas dan kemajuan teknologi menjadikan pariwisata sebagai salah satu potensi utama Wilayah Jawa. Provinsi Jawa Tengah dalam konstelasi wilayah Jawa memiliki peran sebagai penumpu ketahanan pangan dan rantai industri nasional. Kabupaten Purworejo memiliki peran pada pengembangan **Kawasan Strategis Agrikultural Kemandirian Pangan** dan **Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**. Kondisi geografis dan sosiologis Kabupaten Purworejo yang beragam dari dataran tinggi hingga dataran rendah memiliki potensi besar bagi pengembangan agrobisnis dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah sehingga mempunyai peran sebagai pusat agrikultur kemandirian pangan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah Jawa Tengah

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah Jawa Tengah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

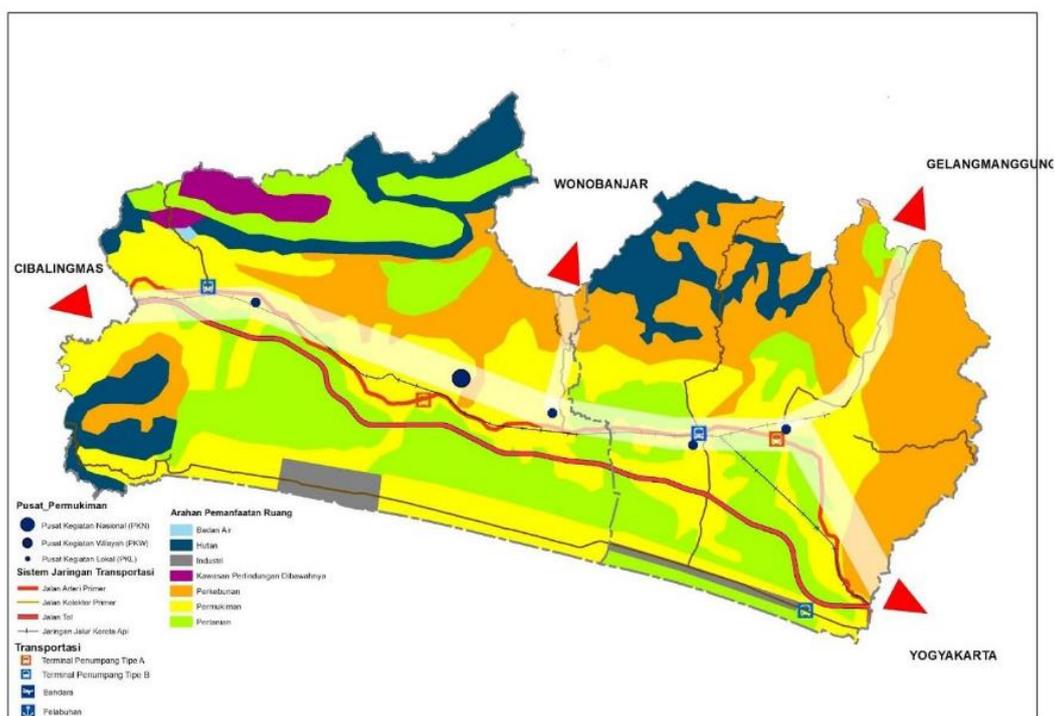




untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsapur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, **WP Keburejo**, serta WP Cibalingmas.

WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo yang diarahkan pengembangannya pada perwujudan perkotaan Kebumen sebagai pusat kegiatan wilayah serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang dan koridor wisata pantai-Geopark Karangsambung Karangbolong-KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.



Gambar 2.133 Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo

Sumber: RPJPN 2025-2045





2.7.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Dokumen Review RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 tujuan penataan ruang Kabupaten adalah untuk Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang **Berdaya Saing** Bertumpu pada Sektor **Pariwisata, Industri** dan **Pertanian** yang **Aman, Nyaman, Produktif** dan **Berkelanjutan**.

Sedangkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah
- b. Pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup
- c. Pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan
- d. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan
- e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang tersebut ditetapkan strategi penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah yang meliputi:
 - a. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi pusat kegiatan wilayah;
 - b. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
 - c. Meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
 - d. Meningkatkan dan memperluas layanan jaringan telekomunikasi;
 - e. Meningkatkan dan memperluas layanan jaringan sumber daya air secara terpadu;
 - f. Meningkatkan cakupan pelayanan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem perpipaan dan bukan perpipaan;
 - g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. Meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan wilayah melalui pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
 - i. Meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana melalui pengembangan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana di seluruh kecamatan secara terpadu; dan
 - j. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.
2. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi:





- a. Membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup;
 - b. Mengembalikan kondisi Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - c. Mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan pengisian kembali;
 - d. Membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dan sekitarnya agar selaras dengan karakteristiknya; dan
 - e. Membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
3. Strategi pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industri, dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang meliputi:
- a. Mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Mengembangkan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah;
 - c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - d. Mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku produk lokal pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan (agroindustri);
 - e. Mengembangkan kawasan permukiman layak huni;
 - f. Melestarikan kawasan hutan produksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
 - g. Mengembangkan kawasan perkebunan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Mengembangkan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sesuai; dan
 - i. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
4. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan yang meliputi:
- a. Optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya pada masing-masing kawasan; dan
 - d. Mengarahkan kegiatan tambang di wilayah pertambangan di luar kawasan lindung, pertanian berkelanjutan, permukiman dan kawasan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan tinggi.
5. Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur; dan
 - b. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag.

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana, dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain struktur ruang yang sudah





terbentuk saat ini, ketersediaan dan rencana pengembangan jaringan prasarana, serta potensi wilayah.

Struktur ruang yang ada saat ini di Kabupaten Purworejo terbentuk oleh kegiatan-kegiatan dan jaringan prasarana wilayah utama, antara lain:

- Pusat pemerintahan Kabupaten yang berlokasi di pusat kawasan perkotaan Purworejo;
- Pusat perekonomian, perdagangan, dan jasa serta pusat berbagai macam fasilitas layanan masyarakat (pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan, dan lain-lain) di kawasan perkotaan Purworejo dan Kutoarjo;
- Pusat kegiatan agrobisnis di kawasan agropolitan yang terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Kutoarjo;
- Pusat –pusat permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- Jalan arteri primer, kolektor primer, serta jalan strategis nasional yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dengan Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen;
- Sungai induk Bogowonto, Cokroyasan, dan Wawar yang melewati wilayah Kabupaten Purworejo di sebelah barat, tengah dan timur sebelum berakhir di Samudera Hindia.

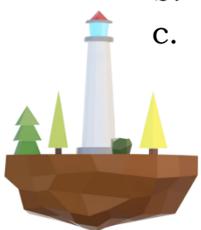
Kegiatan-kegiatan di dua kawasan perkotaan yaitu Purworejo dan Kutoarjo berkembang pesat tidak hanya skala kabupaten tetapi juga telah berkembang skala layanannya menjadi skala regional, mencakup antara lain Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang. Hal tersebut membuat adanya dua kutub pertumbuhan yang besarnya hampir seimbang dan karena jaraknya terpisah cukup jauh, kurang lebih 10 km, maka kesan yang tercipta seakan-akan kawasan perkotaan Kutoarjo terpisah/berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari Kabupaten Purworejo. Untuk itu ke depan diperlukan strategi khusus yaitu dengan pengembangan aglomerasi untuk mendekatkan/menyatukan kedua kutub pertumbuhan tersebut. Di samping itu, perlu adanya penerapan konsep *multiple nuclei* dengan meningkatkan skala layanan dari pusat-pusat pertumbuhan yang saat ini skala layanannya sudah mencapai beberapa kecamatan dan memiliki potensi/kekhasan tersendiri menjadi skala layanan kabupaten untuk pemerataan pembangunan wilayah.

Sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten dan pusat - pusat lain didalam wilayah Kabupaten. Pusat-pusat lain yang ada dalam sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Penentuan sistem perkotaan ini dapat mengatur agar kawasan perdesaan dapat berkembang secara mandiri dengan batasan tertentu sehingga masyarakat dapat terjangkau pelayanan secara merata.

PKL di Kabupaten Purworejo meliputi kawasan Perkotaan Purworejo dan kawasan Perkotaan Kutoarjo. Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Purworejo-Kutoarjo.

PPK di Kabupaten Purworejo meliputi:

- a. PPK Grabag;
- b. PPK Purwodadi;
- c. PPK Kemiri-Pituruh;





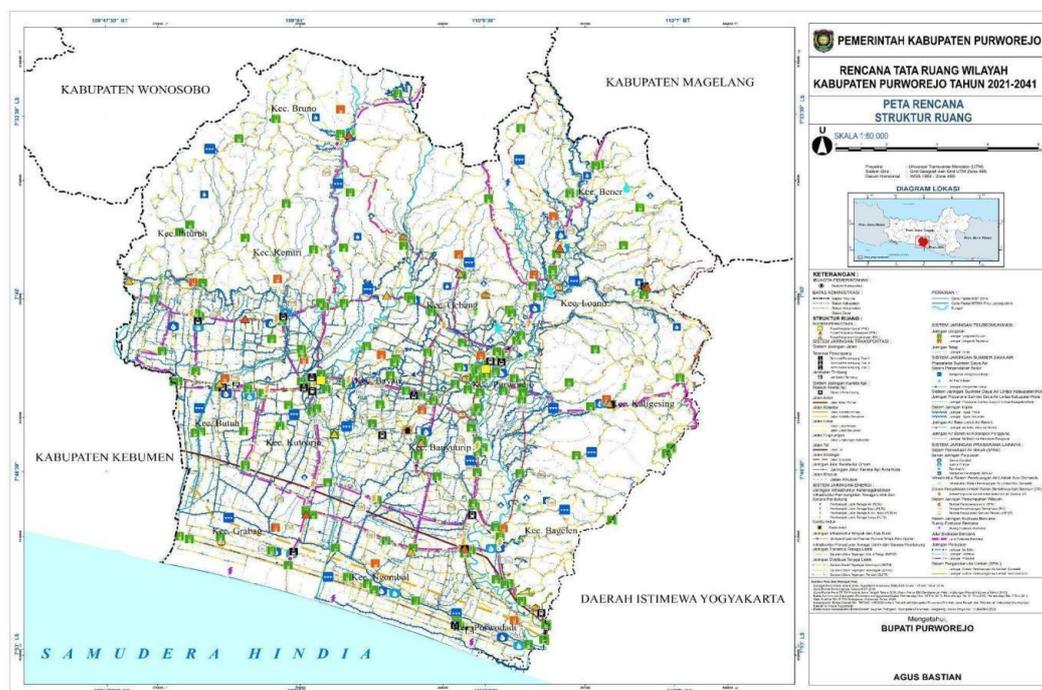
- d. PPK Bruno;
- e. PPK Bener; dan
- f. PPK Banyuasin.

PPL di Kabupaten Purworejo meliputi:

- a. Desa Ngombol di Kecamatan Ngombol;
- b. Desa Kaligono di Kecamatan Kaligesing;
- c. Desa Banyuurip di Kecamatan Banyuurip;
- d. Desa Krandegan di Kecamatan Bayan;
- e. Desa Butuh di Kecamatan Butuh;
- f. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh;
- g. Desa Winong di Kecamatan Kemiri; dan
- h. Desa Gebang di Kecamatan Gebang.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.



Gambar 2.134 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya. Selain perencanaan pola ruang kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya, juga diperlukan perencanaan pola ruang kawasan ketentuan khusus berupa Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Resapan Air, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dan Kawasan





Sempadan. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan tata ruang sangat diperlukan memperhatikan kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air guna mendukung keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tata ruang Kabupaten Purworejo yang tangguh.

Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut serta kondisi perwilayahan yang ada, maka kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi:

- Kawasan konservasi;
- Kawasan cagar budaya; dan
- Kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan Peruntukan Budi Daya

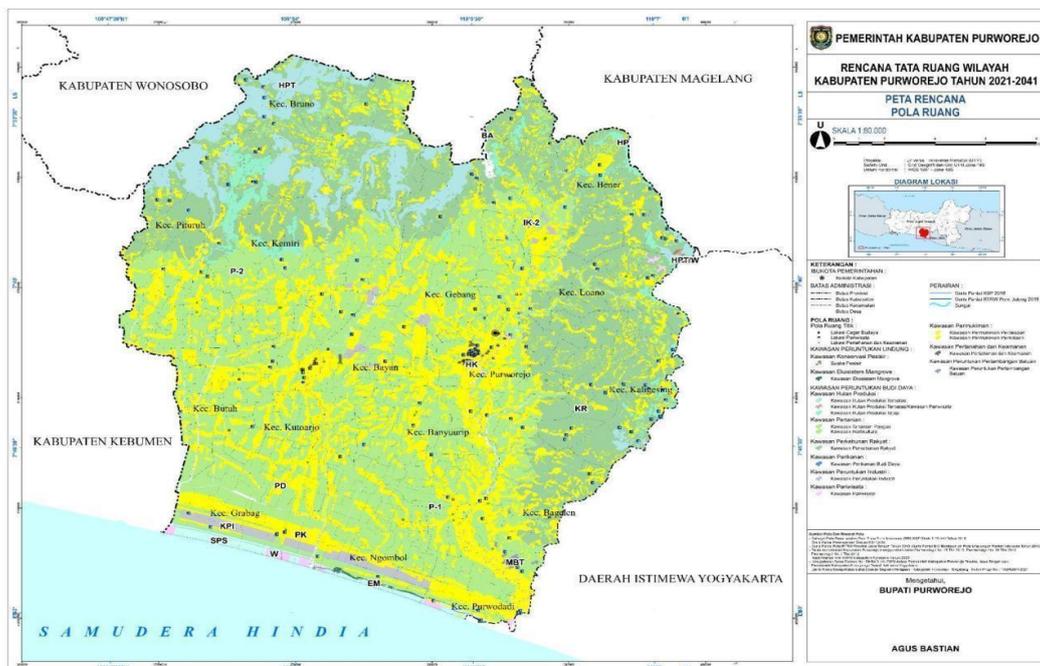
Pola ruang kawasan budi daya direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan kawasan budi daya juga diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Purworejo dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budi daya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Ketentuan Khusus

Kawasan ketentuan khusus adalah kawasan yang di-*overlay* dengan peruntukan di dalam pola ruang, Kawasan ketentuan khusus dalam materi teknis penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pola ruang. Kawasan ini bertujuan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kawasan ketentuan khusus yang dimaksud berupa Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Resapan Air, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dan Kawasan Sempadan. Urgensi dari lima kawasan ketentuan khusus tersebut guna mewujudkan tata ruang Kabupaten Purworejo yang berkelanjutan dan tangguh. Kaitannya dalam rencana pola ruang, kelima kawasan ketentuan khusus ini melekat dalam rencana pola ruang sehingga dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya melekat pengaturan perihal kawasan ketentuan khusus.





Gambar 2.135 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

C. Rencana Strategis Wilayah Kabupaten Purworejo

Kawasan strategis merupakan kawasan yang pengembangannya diprioritaskan dibandingkan dengan kawasan yang lain. Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu sesuai pertimbangan aspek strategis daerah. Meskipun kawasan strategis menjadi prioritas untuk dikembangkan, perencanaannya harus memperhatikan batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan.

Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Purworejo.

Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten Purworejo terbagi 2 yaitu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Kabupaten Purworejo yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya. Kawasan strategis ini merupakan salah satu dari kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya milik Provinsi Jawa Tengah.





Dalam Kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng, terdapat beberapa kawasan pariwisata skala regional yang meliputi Kawasan Pariwisata Borobudur-Mendut-Pawon-Magelang Kota, Kawasan Pariwisata Prambanan-Klaten Kota, Kawasan Pariwisata Merapi-Merbabu, Kawasan Karst Karangsembung Kebumen, Kawasan Pariwisata Dieng dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Purworejo dan sekitarnya, serta Kawasan Pariwisata Kledung Pass dan sekitarnya.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purworejo yang sedang dikembangkan untuk mendukung Pariwisata Borobudur berada di Kawasan Bukit Menoreh. Bukit Menoreh merupakan bukit yang berada di bagian timur hingga utara Kabupaten Purworejo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari bukit ini kita dapat menikmati pemandangan yang menghadap ke Candi Borobudur secara langsung dari jarak jauh. Beberapa obyek wisata sudah dikembangkan di bukit ini salah satunya Gunung Kunir Benowo.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Purworejo berkembang tidak hanya berdasarkan potensi dari dalam kabupaten sendiri seperti adanya proyek strategis nasional dan potensi lainnya, tetapi juga dari adanya perkembangan sekitar luar wilayah kabupaten. Kawasan strategis kabupaten yang dikembangkan berdasarkan potensinya antara lain Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dan Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur. Sedangkan Kawasan Strategis yang berkembang berdasarkan adanya perkembangan luar wilayah adalah Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) sekitar Bandara *Yogyakarta Internasional Airport* (YIA).

1. Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur

Kawasan sekitar Badan Otorita Borobudur merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis dari kawasan sekitar kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur seluas 4.138,23 (empat ribu seratus tiga puluh delapan koma dua tiga) hektar yang mencakup Kecamatan Bener, Kecamatan Loano, dan Kecamatan Kaligesing. Kawasan strategis ini menjadi satu kesatuan dengan kawasan sekitar yang berada di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo DIY.

Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur merupakan kawasan pariwisata eksklusif yang bernuansa alam. Pengembangan kawasan ini menggunakan konsep *culture and adventure eco-tourism* dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan keramahan pada alam. Peruntukan tanah dalam kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan dan fasilitasnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Perda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten di sekitar Kawasan Borobudur.

Pada Bulan Februari 2019 Menteri Pariwisata, Arif Yahya meresmikan 2 (dua) obyek pariwisata di Kabupaten Purworejo yaitu





Glamour Camping (Glamping) D'Loano dan Pasar Digital Menoreh di Kecamatan Sedayu. Kedua pariwisata ini merupakan konsep pariwisata baru di Kabupaten Purworejo. Tema yang diusung dari pariwisata ini adalah nuansa alami sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan yang berasal dari kota-kota besar. Keduanya adalah hasil kerja sama antara Badan Otorita Borobudur dengan Perhutani.

Obyek wisata *Glamping D'Loano* merupakan obyek wisata yang berupa wisata alam dengan konsep penginapan berupa tenda *camping*. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap mulai dari pelayanan informasi wisata, restoran semi-*outdoor*, *outdoor* cinema, toilet umum, hingga spot-spot foto menarik. Wisatawan yang berkunjung di obyek wisata ini dapat melihat Candi Borobudur secara langsung dari jarak yang jauh.

Pasar Digital Menoreh adalah perwujudan dari atraksi pariwisata sekaligus untuk mempopulerkan wisata *Glamping D'Loano*. Lokasi obyek wisata ini dapat ditempuh sekitar 20 menit dari wisata glamping. Wisata yang ditawarkan dari Pasar Digital Menoreh adalah wisata kuliner dan belanja yang berasal dari UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) warga sekitar.

2. Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandara Yogyakarta International Airport

Lokasi Kabupaten Purworejo yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai pintu gerbang masuk dan keluar Provinsi Jawa Tengah. Adanya pembangunan bandara baru di Yogyakarta tentu semakin mempengaruhi perkembangan Kabupaten Purworejo karena lokasi pembangunan yang sangat dekat dengan lokasi dibangunnya bandara. Bandara baru yang berkelas internasional ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan perkotaan kabupaten. Dengan dikembangkannya *border city* ini diharapkan akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.

Konsep yang akan dikembangkan untuk *border city* di Kabupaten Purworejo adalah Permukiman, Pariwisata, Perdagangan, dan Jasa. Permukiman akan diarahkan sebagai perkotaan dimana memiliki kepadatan tinggi dengan dilengkapi dengan sektor perdagangan dan jasa. Lokasi *border city* juga dekat dengan pantai, sehingga pengembangan pariwisata dengan dikuatkannya akses dari bandara.

Kawasan strategis di sekitar Bandara YIA merupakan kawasan seluas 2.946,77 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Bagelen. Adapun desa yang direncanakan meliputi Desa Jogoboyo, Desa Karanganyar, Desa Gedangan, Desa Jatikontal, Desa Jogoresan, Desa Watukuro, Desa Karang Sari, Desa Sidoharjo, Desa Kebonsari, Desa Banjarsari, Desa Dadirejo, Desa Bapangsari, dan Desa Krendetan.

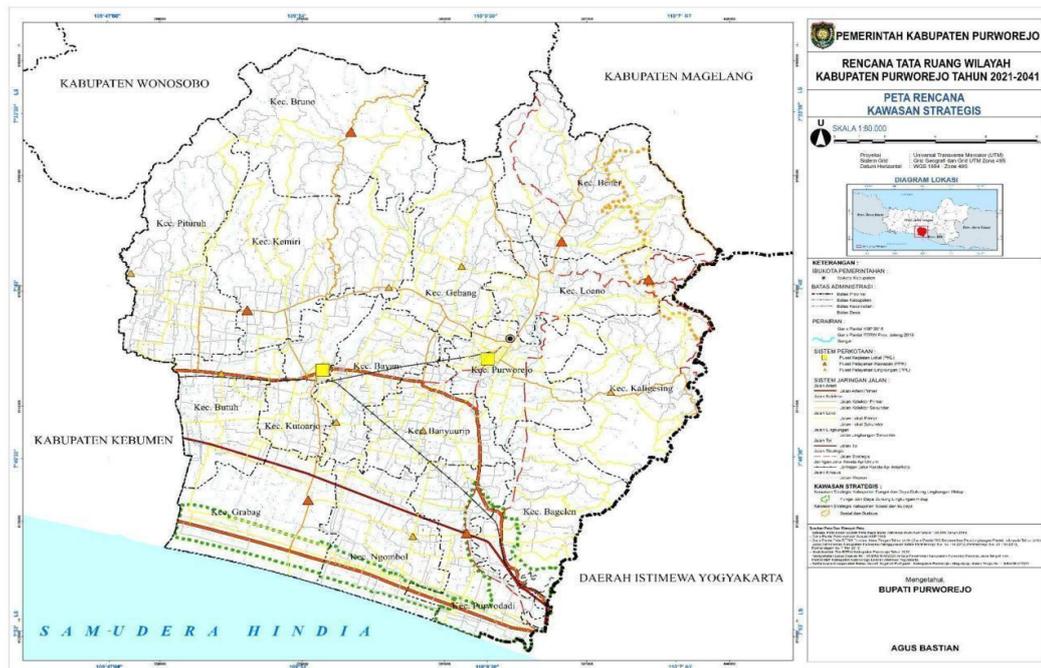
3. Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag

Berdasarkan lokasinya, ketiga kecamatan tersebut berada di sisi selatan Kabupaten Purworejo, dimana wilayahnya dilalui oleh Jalan Jalur





Lintas Selatan. Dengan pertimbangan tersebut, maka aksesibilitas menuju luar kota atau luar provinsi sangat mudah sehingga kawasan ini sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Pengembangan di lokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian baik bagi wilayah maupun masyarakat. Kawasan ini juga direncanakan agar dapat diintegrasikan dengan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Yogyakarta untuk pendistribusian produk industri hingga luar pulau maupun luar negeri. Kawasan strategis ini dikembangkan seluas 1.329,14 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan koma satu empat) Hektar.



Gambar 2.136 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Purworejo
Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Untuk operasionalisasi tata ruang di kawasan perkotaan dan kawasan strategis, maka disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Purworejo meliputi:

- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan tema ekonomi;
- Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur dengan tema sosial budaya;
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan (*border city*) sekitar Bandar Udara Yogyakarta *International Airport* dengan tema lingkungan hidup;
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag dengan tema lingkungan hidup;
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bener dan Sekitar Bendungan Bener dengan tema sosial budaya;
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grabag dengan tema lingkungan hidup;
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kemiri-Pituruh dengan tema ekonomi; dan
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bruno dengan tema ekonomi.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo yang harus direspons di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045. Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan analisis data yang telah disajikan di bab II. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo merupakan hasil analisis tabulasi silang antara permasalahan, isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045. Berikut permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Purworejo.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan definisi dari Bappenas, Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan menyerukan upaya bersama (kolaborasi) guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh untuk manusia dan planet. Agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup (Bappenas, 2023). Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan sebagai pendukung. Elemen-elemen ini saling terkait dan semuanya sangat penting untuk kesejahteraan diri individu dan masyarakat.

3.1.1. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Aspek Pembangunan

Permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan berdasarkan 4 (empat) aspek pembangunan: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.





3.1.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek geografi dan demografi, dijabarkan permasalahan pada sisi geografi dan pada sisi demografi. Pada sisi geografi, terdapat permasalahan mengenai tingginya risiko bencana dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sementara pada sisi demografi, terdapat potensi berupa bonus demografi (bukan permasalahan).

a. Geografi

1) Tingginya Risiko Bencana

Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang secara geografis memiliki multi ancaman bencana. Berdasarkan perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-7 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan kelas risiko sedang. Hal ini menjadi permasalahan di Kabupaten Purworejo. Terdapat beberapa faktor penyebabnya, antara lain rendahnya manajemen risiko bencana, kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang masih rendah, serta potensi kebakaran yang masih tinggi. Mengenai manajemen risiko bencana, Purworejo merupakan daerah yang secara geografisnya dapat terjadi multi ancaman bencana alam. Kemudian, dokumen pendukung dan sarana prasarana pengendali bencana yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan daerah yang secara geografis memiliki tingkat bahaya tinggi. Selanjutnya, belum ada data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi. Di samping itu pada sisi kapasitas, belum optimalnya kegiatan sosialisasi maupun pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana karena wilayah rawan bencana yang cukup banyak di Kabupaten Purworejo, kegiatan mitigasi terhadap bencana, serta penyediaan sarpras penanggulangan bencana. Di sisi lain pada sisi kebakaran, sosialisasi akan bahaya kebakaran dan cara mengatasi kebakaran yang paling efektif belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, serta semakin tingginya permintaan akan permukiman oleh masyarakat perkotaan yang tidak diimbangi oleh penyediaan lahan permukiman menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran.

2) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purworejo memiliki permasalahan mengenai menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pencemaran air dan udara, menurunnya kualitas tutupan lahan, belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah terpadu, serta belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada sisi air,





terdapat kebiasaan dan kapasitas masyarakat di pinggiran sungai yang membuang limbah ke sungai, belum optimalnya pemantauan dan pengendalian air permukaan, serta pengelolaan limbah domestik belum optimal. Pada sisi udara, masih rendahnya pengendalian polusi dari industri manufaktur melalui skema sirkular, belum optimalnya pengendalian emisi kendaraan bermotor, sistem angkutan massal yang menurun kualitas, kuantitas dan keandalan, serta masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Pada sisi tutupan lahan, terdapat masalah formal berkurangnya luasan tutupan hutan dan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Pada sisi pengelolaan sampah, belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat, masih kurangnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah, terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, masih rendahnya penegakan hukum dalam pelanggaran pembuangan sampah dan limbah, serta belum optimalnya dalam pengembangan ekonomi sirkular sampah. Pada sisi perubahan iklim, masih rendahnya manajemen risiko perubahan iklim, serta Kabupaten Purworejo belum menerapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim menjadi ancaman 20 (dua puluh) tahun ke depan. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana prasarana, pangan, air, dan energi. Daya dukung pangan dan daya dukung air diperkirakan menurun, sementara emisi gas rumah kaca dan timbulan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah spesifik cenderung meningkat, sejalan dengan peningkatan kegiatan masyarakat.

b. Demografi

Pada sisi demografi, tidak dijabarkan mengenai permasalahan pembangunan. Pada tahun 2023 didapatkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki bonus demografi. Hal ini juga dijelaskan pada sub bab analisis proyeksi kependudukan, bahwa bonus demografi Kabupaten Purworejo diprediksikan akan terjadi hingga tahun 2028. Melalui proyeksi kependudukan ini, dapat direncanakan kebutuhan sarana dan prasarana hingga tahun 2045 mendatang.

3.1.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, dibahas permasalahan pada sisi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Pada sisi kesejahteraan ekonomi terdapat permasalahan mengenai ketimpangan





rendah tidak diiringi dengan angka kemiskinan yang rendah. Sementara pada sisi kesejahteraan sosial budaya, terdapat permasalahan mengenai kualitas kesehatan masyarakat serta rendahnya kualitas lingkungan sosial masyarakat.

a. Kesejahteraan Ekonomi

1) Ketimpangan Rendah Tidak Diiringi dengan Angka Kemiskinan yang Rendah

Kabupaten Purworejo memiliki kondisi kemiskinan yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Namun, di sisi lain ketimpangan di Kabupaten Purworejo lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain pengeluaran per kapita yang masih rendah, mayoritas penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan, pendapatan per kapita masyarakat yang rendah, serta rendahnya *skill* (keterampilan) masyarakat dalam mengakses kehidupan layak.

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

1) Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pada kesejahteraan sosial budaya, terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya kualitas pelayanan ibu, bayi dan balita, masih tingginya jumlah balita stunting dan gizi buruk, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, belum optimalnya upaya deteksi dini dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, belum optimalnya sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pangan, gizi, dan pola asuh.

2) Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Sosial Masyarakat

Kabupaten Purworejo juga mengalami permasalahan mengenai masih rendahnya kualitas lingkungan sosial masyarakat. Terdapat beberapa indikasi terjadinya permasalahan ini, antara lain mengenai gender, kebudayaan, kepemudaan, dan sosial. Di Kabupaten Purworejo masih tinggi jumlah pernikahan anak, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta diikuti dengan rendahnya penerapan kebijakan responsif gender. Di samping itu, belum optimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan juga menjadi penyebabnya.





Selanjutnya, kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan masih rendah, serta masih rendahnya upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi. Pada sisi kepemudaan, terjadinya peningkatan pemuda yang mengalami masalah kesehatan.

3.1.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah, dijelaskan permasalahan pada sisi daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah, serta daya saing iklim investasi.

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Beberapa hal yang merupakan permasalahan pada sisi daya saing ekonomi daerah yakni pertumbuhan sektor potensial (pertanian) belum optimal, sektor industri pengolahan belum mampu mengakselerasi sektor primer, belum signifikannya kontribusi sektor akomodasi makan minum sebagai katalisator pembangunan, menurunnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian, rendahnya investasi dan penciptaan ekosistem untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbatas, akses dan kesempatan kerja terbatas, serta belum optimalnya ketahanan pangan (bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau) masyarakat.

1) Pertumbuhan Sektor Potensial (Pertanian) Belum Optimal

Kabupaten Purworejo memiliki sektor potensial berupa pertanian. Namun, sektor potensial ini belum optimal pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian, produksi sektor pertanian yang cenderung stagnan, alih fungsi lahan pertanian menjadi budidaya lainnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian, berkurangnya daya dukung lahan pertanian, skala usaha pertanian tidak sebanding dengan skala ekonominya, perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, lambannya regenerasi petani, keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dalam mengadopsi teknologi, lemahnya kelembagaan petani, serta belum optimalnya modernisasi peralatan dan mesin pertanian.

2) Sektor Industri Pengolahan Belum Mampu Mengakselerasi Sektor Primer

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo dinilai belum mampu mengakselerasi sektor primer. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yakni rendahnya produktivitas industri agro, industri agro yang berkembang didominasi industri agro berskala kecil atau rumah tangga, belum berkembangnya kemitraan antara agroindustri skala besar dan





sedang dengan agroindustri skala kecil dan rumah tangga, industri agro mayoritas masih menggunakan teknologi dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya, keterbatasan kemampuan IKM dalam peningkatan kualitas produksi, manajemen usaha, dan pemasaran produk, lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir (*backward dan forward linkages*), serta belum optimalnya dukungan kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri dalam pengembangan produk, peningkatan produktivitas, dan inovasi teknologi.

3) Belum Signifikannya Kontribusi Sektor Akomodasi Makan Minum sebagai Katalisator Pembangunan

Sektor pariwisata didekati pada sektor akomodasi makan minum. Sektor ini dinilai belum signifikan kontribusinya sebagai katalisator pembangunan. Terdapat beberapa hal yang mengakibatkannya, antara lain rendahnya pengeluaran wisatawan di lokasi wisata sehingga kurang berkontribusi pada pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum, kunjungan wisata didominasi oleh pengunjung dari dalam daerah/wisatawan lokal yang relatif kecil multiplier effect-nya dalam perekonomian, belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata terutama pada desa-desa wisata, terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas pengelolaan serta penerapan pariwisata berkelanjutan, serta sarana promosi dan informasi pariwisata yang belum sesuai dengan tren teknologi informasi dan komunikasi.

4) Menurunnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam Perekonomian

Kabupaten Purworejo memiliki permasalahan pada menurunnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena meningkatnya transaksi perdagangan online yang bersumber dari luar wilayah Kabupaten Purworejo, barang yang diperdagangkan di Kabupaten Purworejo sebagian besar berupa komoditas pertanian sehingga apabila kontribusi sektor pertanian menurun, maka berpengaruh pula pada kontribusi sektor perdagangan, nilai barang yang diekspor ke luar Purworejo lebih rendah dibandingkan barang yang diimpor, pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Purworejo cukup besar yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya, keterbatasan koperasi untuk menjadi konsolidator/agregator pelaku usaha mikro dalam meningkatkan skala usahanya, serta penerapan penggunaan produk lokal belum optimal.





5) Rendahnya Investasi serta Penciptaan Ekosistem untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masih Terbatas

Penanaman modal atau investasi menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yakni kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung terhadap potensi investasi yang ditawarkan kepada calon investor usaha besar dan menengah, investasi didominasi oleh usaha mikro yang tidak wajib lapor dalam kegiatan penanaman modal (LKPM), investasi usaha mikro yang belum disertai orientasi peningkatan produktivitas dan skala usaha, serta rendahnya nilai investasi memberikan citra buruk karena investor menilai bahwa Kabupaten Purworejo tidak ramah investasi. Penciptaan ekosistem untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi juga dinilai masih terbatas. Hal ini disebabkan karena regulasi yang belum mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian untuk mengakselerasi (efisiensi pasar, iklim investasi yang kondusif, kreativitas dan inovasi masyarakat, transformasi digital).

6) Akses dan Kesempatan Kerja Terbatas

Terbatasnya akses dan kesempatan kerja menjadi salah satu permasalahan dalam daya saing sumber daya manusia. Hal ini terjadi akibat dari pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru relatif berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja, *mismatched* (ketidaksesuaian antara *supply* and *demand*)/ tidak sesuainya kualifikasi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, penduduk bekerja didominasi oleh *low skilled workers* dimana rentan terhadap otomatisasi pada era reformasi teknologi, serta tingginya pengangguran pada penduduk usia pemuda (15-30 tahun).

7) Belum Optimalnya Ketahanan Pangan (Bergizi, Aman, Bermutu, Beragam, dan Terjangkau) Masyarakat

Terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya ketahanan pangan (bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau) masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih adanya desa rentan/ rawan pangan, harga pangan rentan mengalami fluktuasi, keterbatasan akses terhadap pangan terutama keterbatasan daya beli karena kemiskinan, serta menurunnya ketersediaan dan daya dukung pangan. Di samping itu, terdapat penurunan daya dukung pangan dan peningkatan alih fungsi lahan. Kinerja sistem irigasi yang belum optimal juga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Kabupaten Purworejo.





b. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan yang terjadi pada sisi daya saing sumber daya manusia yakni belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat.

1) Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Terjadi permasalahan mengenai bidang pendidikan, yakni belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan, serta masih rendahnya tingkat gemar membaca masyarakat.

c. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Terdapat beberapa permasalahan pada daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah, antara lain konektivitas wilayah belum optimal, kinerja sistem irigasi belum optimal, belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang, belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, akses air minum aman masih rendah, akses sanitasi aman masih rendah, belum optimalnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, sistem transportasi belum terintegrasi, belum optimalnya sarana dan prasarana LLAJ, serta belum seluruh wilayah terlayani jaringan internet (masih terdapat wilayah *blank spot*).

1) Konektivitas wilayah belum optimal

Terdapat permasalahan mengenai konektivitas wilayah yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena persebaran infrastruktur jalan dan jembatan yang belum merata, serta belum adanya kajian terkait rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan yang seharusnya ada.

2) Belum Optimalnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang

Kabupaten Purworejo memiliki permasalahan mengenai belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, belum adanya aturan terhadap pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang, serta masih rendahnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan aturan penataan ruang. Di samping itu, distribusi penduduk Kabupaten Purworejo tidak merata, dengan kepadatan terpusat di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk harus disertai dengan upaya penyebaran penduduk yang merata, tidak terpusat hanya di perkotaan. Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan penyediaan infrastruktur perkotaan akan





menurunkan kualitas lingkungan perkotaan dan tumbuhnya permukiman kumuh.

3) Kinerja Sistem Irigasi Belum Optimal

Pada sistem irigasi, kinerja sistem irigasi di Kabupaten Purworejo dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: keterbatasan pendanaan untuk kegiatan peningkatan/rehabilitasi maupun operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, belum terintegrasinya pembangunan bendungan, jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier dalam satu sistem Daerah Irigasi (DI) sehingga air baku tidak sampai ke lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (permukiman, perdagangan, industri kecil, dll), belum adanya peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola irigasi, belum optimalnya kinerja Unit Pengelola Irigasi (UPI) Kabupaten Purworejo, masih banyaknya P3A/GP3A/IP3A/FP3A yang tidak aktif, serta belum adanya updating data base secara rutin.

4) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Hal ini disebabkan karena belum adanya masterplan drainase skala kabupaten (*masterplan* yang tersedia baru kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Kawasan *Border City*), belum seluruh jalan kewenangan kabupaten dilengkapi oleh drainase (rasio antara panjang jalan dan drainase terlalu tinggi), serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan drainase.

5) Akses Air Minum Aman Masih Rendah

Akses air minum aman di Kabupaten Purworejo dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya serapan jaringan perpipaan disebabkan masyarakat menggunakannya hanya sebagai cadangan, masyarakat kurang peduli dengan standar kualitas air, ketersediaan air baku terutama pada musim kemarau makin terbatas, berkurangnya daerah tangkapan air (*catchment area*) yang mengakibatkan debit air baku berkurang, tingginya pencemaran air di badan air yang masuk ke sumber-sumber air baku, rendahnya kapasitas pengelola SPAM (Pembina KPSPAM dan PDAM), serta rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPAM.\





6) Akses Sanitasi Aman Masih Rendah

Terdapat permasalahan mengenai rendahnya akses sanitasi aman. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain IPLT Jetis belum layak secara teknis untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo disamping itu daya tampung IPLT Jetis sudah *over capacity*, area layanan mobil sedot tinja milik Pemerintah Kabupaten Purworejo masih terbatas di wilayah perkotaan, sedangkan untuk mobil sedot tinja milik swasta jumlahnya cukup banyak namun cakupan pelayanannya belum diketahui pasti, belum adanya Sistem Penyediaan Air Limbah Terpusat Skala Kota (SPAL-T), masyarakat sekitar sungai masih sering membuang limbah (grey water dan black water) ke badan sungai, belum optimalnya penerapan PHBS, serta keterbatasan dukungan regulasi dan dokumen perencanaan sektor sanitasi (Dokumen EHRA, SSK Sanitasi, Masterplan Air Limbah, dll).

7) Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Purworejo memiliki permasalahan mengenai belum optimalnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya yakni masih adanya kawasan kumuh di kawasan perkotaan, masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di permukiman perkotaan maupun pedesaan, masih banyaknya backlog perumahan, masih tingginya rumah yang berada di negatif list, serta masih banyaknya perumahan yang belum dilengkapi oleh PSU.

8) Sistem Transportasi Belum Terintegrasi serta Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana LLAJ

Terdapat permasalahan mengenai sistem transportasi belum terintegrasi serta belum optimalnya sarana dan prasarana LLAJ. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya koneksi antar moda transportasi, belum ada kebijakan daerah (Perbup) yang mengatur tentang sistem transportasi seperti Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah, serta belum ada sinkronisasi antara pembangunan jalan dan penyediaan alat perlengkapan jalan.

10) Belum Seluruh Wilayah Kabupaten Purworejo Terlayani Jaringan Internet (Masih terdapat Wilayah *Blank Spot*)

Terakhir, Kabupaten Purworejo memiliki permasalahan mengenai belum seluruh wilayah Kabupaten Purworejo terlayani jaringan internet





(masih terdapat wilayah *blank spot*). Hal ini disebabkan karena belum meratanya ketersediaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berfungsi memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Pada sisi daya saing iklim investasi,

1) Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif

Kabupaten Purworejo memiliki permasalahan mengenai stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang belum kondusif. Hal ini disebabkan karena tingginya angka pelanggaran Perda, serta masih adanya konflik sosial.

2) Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan

Terdapat permasalahan mengenai perizinan, yakni belum optimalnya pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan tertinggi terjadi pada tahun 2020, kemudian selalu menurun hingga tahun terakhir (2023). Di samping karena banyaknya pelayanan perizinan yang dialihkan ke *Online Single Submission* (OSS), kuantitas perizinan yang semakin berkurang juga disebabkan karena belum optimalnya promosi yang dilaksanakan.

3.1.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, terdapat beberapa permasalahan, antara lain mengenai implementasi reformasi birokrasi, transformasi digital, serta pengelolaan keuangan daerah.

1) Belum Optimalnya dalam Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Pada sisi reformasi birokrasi, terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansial belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, kualitas pengendalian internal perlu ditingkatkan, pelayanan publik prima belum merata, Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal, kualitas data hasil survei kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan, belum optimalnya implementasi sistem merit, peningkatan kompetensi dan kinerja ASN belum optimal, penerapan akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa.

2) Transformasi Digital Belum Sepenuhnya Dilakukan





Terdapat permasalahan mengenai transformasi digital yang belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini terdapat beberapa penyebab, antara lain rendahnya penerapan manajemen SPBE, penggunaan *e-procurement* masih rendah, belum semua arsip didigitalisasi melalui proses otentikasi arsip, semakin berkembangnya teknologi namun tidak diikuti dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, belum optimalnya kepemilikan identitas kependudukan digital untuk menunjang pemanfaatan *single identity number*, serta keterbukaan informasi publik yang belum optimal.

3) Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Optimal

Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor yang mengakibatkannya antara lain capaian WTP belum berkorelasi dengan kinerja pembangunan daerah, kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya (non APBD), ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan, rendahnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran, serta kondisi keuangan daerah, pengelolaan dan pemungutan retribusi belum optimal, belum optimalnya utilisasi aset daerah, serta masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama.

3.1.2. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Dimensi Pembangunan

Permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 dirumuskan menggunakan metode analisis akar penyebab atau *root cause analysis* (RCA). Analisis akar masalah dipetakan dengan mengadopsi konsep analisis kebijakan publik yang disampaikan William Dunn. Menurut Dunn (2019) kebijakan publik harus dimulai dengan pemetaan atau strukturisasi masalah. Masalah tersebut memiliki tiga tingkatan yang berbeda, yaitu masalah meta (*meta problem*), masalah substantif (*substantive problem*) dan masalah formal (*formal problem*). Meta masalah adalah masalah di tingkat makro, masalah substantif adalah masalah di tingkat meso, sedangkan masalah formal adalah masalah di tingkat mikro. Berbagai konsep dan metode tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan permasalahan pembangunan melalui riset untuk pemetaan masalah jangka panjang Kabupaten Purworejo. Deskripsi pemetaan permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten





Purworejo dapat dicermati sebagai berikut. Permasalahan pembangunan jangka panjang berdasarkan dimensi dibagi atas rumpun manusia (*people*), lingkungan hidup (*planet*), kemakmuran (*prosperity*), dan pemerintahan (*management*). Deskripsi lebih detail tentang permasalahan pembangunan jangka panjang berdasarkan dimensi pada masalah meta, masalah substantif, dan masalah formal dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Dimensi Pembangunan

Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)	
Manusia (<i>People</i>)	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat	Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat	Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan	
			Masih rendahnya tingkat gemar membaca masyarakat	
			Belum optimalnya kualitas pelayanan ibu, bayi dan balita	
		Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	Masih tingginya jumlah balita stunting dan gizi buruk	
			Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat	
			Belum optimalnya upaya deteksi dini dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	
			Belum optimalnya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	
			Belum optimalnya sistem layanan kesehatan primer dan rujukan	
			Peningkatan laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga	
			Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pangan, gizi, dan pola asuh.	
			Masih rendahnya kualitas lingkungan sosial masyarakat	Masih tingginya jumlah pernikahan anak
				Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
				Masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender
		Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan		
		Kurangnya kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan		
Masih rendahnya upaya pendataan, pengembangan, dan				





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
			pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi
			Meningkatnya pemuda yang mengalami masalah kesehatan
Lingkungan Hidup (<i>Planet</i>)	Keterpaduan infrastruktur wilayah	Konektivitas wilayah belum optimal	Persebaran infrastruktur jalan dan jembatan yang belum merata
		Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Belum adanya masterplan drainase skala kabupaten (<i>Masterplan</i> yang tersedia baru kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Kawasan <i>Border City</i>)
			Belum seluruh jalan kewenangan kabupaten dilengkapi oleh drainase (rasio antara panjang jalan dan drainase terlalu tinggi)
		Akses air minum aman masih rendah	Rendahnya serapan jaringan perpipaan disebabkan masyarakat menggunakannya hanya sebagai cadangan
			Ketersediaan air baku terutama pada musim kemarau makin terbatas
			Berkurangnya daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) yang mengakibatkan debit air baku berkurang
			Tingginya pencemaran air di badan air yang masuk ke sumber-sumber air baku
			Rendahnya kapasitas pengelola SPAM (Pembina KPSPAM dan PDAM)
		Akses sanitasi aman masih rendah	IPLT Jetis belum layak secara teknis untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo disamping itu daya tampung IPLT Jetis sudah <i>over capacity</i>
Area layanan mobil sedot tinja milik Pemerintah Kabupaten Purworejo masih terbatas di wilayah perkotaan, sedangkan untuk mobil sedot tinja milik swasta jumlahnya cukup banyak namun cakupan pelayanannya belum diketahui pasti			
Belum adanya Sistem Penyediaan Air Limbah Terpusat Skala Kota (SPAL-T)			





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
			Keterbatasan dukungan regulasi dan dokumen perencanaan sektor sanitasi (Dokumen EHRA, SSK Sanitasi, Masterplan Air Limbah, dll)
		Kinerja sistem irigasi belum optimal	Belum terintegrasinya pembangunan bendungan, jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier dalam satu sistem Daerah Irigasi (DI) sehingga air baku tidak sampai ke lahan pertanian
			Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (permukiman, perdagangan, industri kecil, dll)
			Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola irigasi
			Belum optimalnya kinerja Unit Pengelola Irigasi (UPI) Kabupaten Purworejo
			Masih banyaknya P3A/ GP3A/ IP3A/ FP3A yang tidak aktif
			Belum adanya <i>updating</i> data base secara rutin
		Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
			Belum adanya aturan terhadap pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang
			Masih rendahnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan aturan penataan ruang
		Belum seluruh wilayah Kabupaten Purworejo terlayani jaringan internet (masih terdapat wilayah blank spot)	Belum meratanya ketersediaan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) yang berfungsi memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator
		Sistem transportasi belum terintegrasi	Belum optimalnya koneksi antar moda transportasi
		Belum optimalnya sarana dan prasarana LLAJ	Belum ada kebijakan daerah yang mengatur tentang sistem transportasi seperti Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
			Belum terpenuhinya alat perlengkapan jalan di semua ruas jalan kewenangan kabupaten
		Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Masih adanya kawasan kumuh di kawasan perkotaan
			Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di permukiman perkotaan maupun pedesaan
			Masih banyaknya <i>backlog</i> perumahan
			Masih tingginya rumah yang berada di <i>negatif list</i>
			Masih banyaknya perumahan yang belum dilengkapi oleh PSU
	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran air	Kebiasaan dan kapasitas masyarakat di pinggiran sungai yang membuang limbah ke sungai
			Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian air permukaan
			Pengelolaan limbah domestik Belum optimal
		Meningkatnya pencemaran udara	Masih rendahnya pengendalian polusi dari industri manufaktur melalui skema sirkular
			Belum optimalnya pengendalian emisi kendaraan bermotor
			Sistem angkutan massal yang menurun kualitas, kuantitas dan keandalan
			Masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil
		Menurunnya kualitas tutupan lahan	Berkurangnya luasan tutupan hutan
			Alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah terpadu	Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat
			Masih kurangnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah
			Terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah
			Masih rendahnya penegakan hukum dalam pelanggaran pembuangan sampah dan limbah





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
			Belum optimalnya dalam pengembangan ekonomi sirkular sampah
		Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Masih rendahnya manajemen risiko perubahan iklim
			Kabupaten Purworejo belum menerapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
	Tingginya risiko bencana	Rendahnya manajemen risiko bencana	Purworejo merupakan daerah yang secara geografisnya dapat terjadi multi ancaman bencana alam
			Dokumen pendukung dan sarana prasarana pengendali bencana yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan daerah yang secara geografis memiliki tingkat bahaya tinggi
			Belum ada data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi
		Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi maupun pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana karena wilayah rawan bencana yang cukup banyak di Kabupaten Purworejo
			Belum optimalnya kegiatan mitigasi terhadap bencana
			Belum optimalnya penyediaan sarpras penanggulangan bencana
		Potensi kebakaran masih tinggi	Sosialisasi akan bahaya kebakaran dan cara mengatasi kebakaran yang paling efektif belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat
Semakin tingginya permintaan akan permukiman oleh masyarakat perkotaan yang tidak diimbangi oleh penyediaan lahan permukiman menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran			
Kemakmuran (Prosperity)	Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan sektor potensial (pertanian) belum optimal	Rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian
			Produksi sektor pertanian yang cenderung stagnan
			Alih fungsi lahan pertanian menjadi budidaya lainnya yang tidak diimbangi dengan





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
			peningkatan produktivitas pertanian
			Berkurangnya daya dukung lahan pertanian
			Skala usaha pertanian tidak sebanding dengan skala ekonominya
			Perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam
			Lambannya regenerasi petani
			Keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dalam mengadopsi teknologi
			Lemahnya kelembagaan petani
			Belum optimalnya modernisasi peralatan dan mesin pertanian
		Sektor industri pengolahan belum mampu mengakselerasi sektor primer	Rendahnya produktivitas industri agro
			Industri agro yang berkembang didominasi industri agro berskala kecil atau rumah tangga
			Belum berkembangnya kemitraan antara agroindustri skala besar dan sedang dengan agroindustri skala kecil dan rumah tangga
			Industri agro mayoritas masih menggunakan teknologi dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya
			Keterbatasan kemampuan IKM dalam peningkatan kualitas produksi, manajemen usaha, dan pemasaran produk
			Lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir (<i>backward</i> dan <i>forward linkages</i>)
			Belum optimalnya dukungan kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri dalam pengembangan produk, peningkatan produktivitas, dan inovasi teknologi
			Belum signifikannya kontribusi Sektor Akomodasi
		Rendahnya pengeluaran wisatawan di lokasi wisata sehingga kurang berkontribusi pada pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)		
		Makan Minum sebagai katalisator pembangunan	Kunjungan wisata didominasi oleh pengunjung dari dalam daerah/ wisatawan lokal yang relatif kecil <i>multiplier effect</i> -nya dalam perekonomian		
			Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata terutama pada desa-desa wisata		
			Terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas pengelolaan serta penerapan pariwisata berkelanjutan		
			Sarana promosi dan informasi pariwisata yang belum sesuai dengan tren teknologi informasi dan komunikasi		
		Menurunnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian			Meningkatnya transaksi perdagangan <i>online</i> yang bersumber dari luar wilayah Kabupaten Purworejo
					Barang yang diperdagangkan di Kabupaten Purworejo sebagian besar berupa komoditas pertanian sehingga apabila kontribusi sektor pertanian menurun, maka berpengaruh pula pada kontribusi sektor perdagangan
					Nilai barang yang diekspor ke luar Purworejo lebih rendah dibandingkan barang yang diimpor
					Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Purworejo cukup besar yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya
					Keterbatasan koperasi untuk menjadi konsolidator/agregator pelaku usaha mikro dalam meningkatkan skala usahanya
					Penerapan penggunaan produk lokal belum optimal
		Rendahnya investasi			Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung terhadap potensi investasi yang ditawarkan kepada calon investor usaha besar dan menengah
					Investasi didominasi oleh usaha mikro yang tidak wajib lapor dalam kegiatan penanaman modal (LKPM)





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
			Investasi usaha mikro yang belum disertai orientasi peningkatan produktivitas dan skala usaha
			Rendahnya nilai investasi memberikan citra buruk karena investor menilai bahwa Kabupaten Purworejo tidak ramah investasi
		Penciptaan ekosistem untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbatas	Regulasi yang belum mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian untuk mengakselerasi (efisiensi pasar, iklim investasi yang kondusif, kreativitas dan inovasi masyarakat, transformasi digital)
		Ketimpangan rendah tidak diiringi dengan angka kemiskinan yang rendah	Pengeluaran per kapita yang masih rendah
			Mayoritas penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan
			Pendapatan per kapita masyarakat yang rendah
		Akses dan kesempatan kerja terbatas	Rendahnya <i>skill</i> (keterampilan) masyarakat dalam mengakses kehidupan layak
			Pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru relatif berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja
			<i>Mismatched</i> (ketidaksesuaian antara <i>supply and demand</i>) / tidak sesuai kualifikasi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
			Penduduk bekerja didominasi oleh <i>low skilled workers</i> dimana rentan terhadap otomatisasi pada era reformasi teknologi
		Belum optimalnya ketahanan pangan (bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau) masyarakat	Tingginya pengangguran pada penduduk usia pemuda (15-30 tahun)
			Masih adanya desa rentan/ rawan pangan
			Harga pangan rentan mengalami fluktuasi
			Keterbatasan akses terhadap pangan terutama keterbatasan daya beli karena kemiskinan
	Menurunnya ketersediaan dan daya dukung pangan		





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
Pemerintahan (<i>Management</i>)	Tata kelola pemerintahan yang belum <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan	Rendahnya penerapan manajemen SPBE
			Penggunaan <i>e procurement</i> masih rendah
			Belum semua arsip didigitalisasi melalui proses otentikasi arsip
			Semakin berkembangnya teknologi namun tidak diikuti dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
			Belum optimalnya kepemilikan identitas kependudukan digital untuk menunjang pemanfaatan <i>single identity number</i>
		Keterbukaan informasi publik belum optimal	
		Belum optimalnya dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansial belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
			Kualitas pengendalian internal perlu ditingkatkan
			Pelayanan publik prima belum merata
			Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal
			Kualitas data hasil survey kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya pelayanan perizinan
			Belum optimalnya implementasi sistem merit
			Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN belum optimal
			Penerapan akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan
Masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa			
Pengelolaan keuangan	Capaian WTP belum berkorelasi dengan kinerja pembangunan daerah		





Dimensi Pembangunan	Masalah (Meta)	Masalah (Substantif)	Masalah (Formal)
		daerah belum optimal	Kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya (non APBD)
			Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
			Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan
			Rendahnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran, serta kondisi keuangan daerah
			Pengelolaan dan pemungutan retribusi belum optimal
			Belum optimalnya utilisasi aset daerah
			Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama
		Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif	Tingginya angka pelanggaran Perda
			Masih adanya konflik sosial

Permasalahan rumpun pembangunan sumber daya manusia yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo adalah belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas lingkungan sosial masyarakat. Permasalahan pembangunan jangka panjang yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo di rumpun dukungan infrastruktur adalah keterpaduan infrastruktur wilayah. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti pemenuhan infrastruktur dasar, pemenuhan infrastruktur perhubungan, pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur telekomunikasi, serta penataan ruang. Permasalahan pembangunan jangka panjang di rumpun lingkungan hidup yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti meningkatnya pencemaran air, meningkatnya pencemaran udara, menurunnya kualitas tutupan lahan, belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah terpadu, serta belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan





permasalahan pembangunan jangka panjang di rumpun kebencanaan adalah tingginya risiko bencana. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti rendahnya manajemen risiko bencana, kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah, serta potensi kebakaran masih tinggi. Permasalahan pembangunan jangka panjang yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo di rumpun pembangunan ekonomi adalah belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor potensial (pertanian dalam arti luas) belum optimal, sektor industri pengolahan belum mampu mengakselerasi sektor primer (pertanian), belum signifikannya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum sebagai katalisator pembangunan, menurunnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian, rendahnya investasi, penciptaan ekosistem untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbatas, ketimpangan pendapatan yang rendah tidak diiringi dengan angka kemiskinan yang rendah, akses dan kesempatan kerja terbatas, dan belum optimalnya ketahanan pangan (bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau) masyarakat. Permasalahan pembangunan jangka panjang yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo di rumpun pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan yang belum *agile*, adaptif dan kolaboratif. Permasalahan ini berhubungan dengan beberapa faktor penentu seperti reformasi birokrasi, profesionalitas ASN, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memadai, sistem akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang adaptif serta pengelolaan keuangan daerah.

Telah dilakukan penelaahan permasalahan berdasarkan aspek pembangunan serta permasalahan (meta, substantif, dan formal) berdasarkan dimensi pembangunan. Dari kedua metode identifikasi tersebut, dapat ditentukan inti masalah. Tabel berikut ini menunjukkan inti masalah yang terjadi di Kabupaten Purworejo dalam jangka panjang.

Tabel 3.2. Inti Masalah Jangka Panjang Kabupaten Purworejo

No	Permasalahan berdasarkan Aspek Pembangunan	Permasalahan (Substantif) berdasarkan Dimensi Pembangunan	Inti Masalah
A	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Tingginya risiko bencana	Rendahnya manajemen risiko bencana	1. Tingginya risiko bencana





No	Permasalahan berdasarkan Aspek Pembangunan	Permasalahan (Substantif) berdasarkan Dimensi Pembangunan	Inti Masalah
		Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah	
		Potensi kebakaran masih tinggi	
2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran air	2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya pencemaran udara	
		Menurunnya kualitas tutupan lahan	
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah terpadu	
		Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Ketimpangan rendah tidak diiringi dengan angka kemiskinan yang rendah	Ketimpangan rendah tidak diiringi dengan angka kemiskinan yang rendah	3. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah (1)
2	Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	4. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat (1)
3	Masih rendahnya kualitas lingkungan sosial masyarakat	Masih rendahnya kualitas lingkungan sosial masyarakat	
C	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Pertumbuhan sektor potensial (pertanian) belum optimal	Pertumbuhan sektor potensial (pertanian) belum optimal	3. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah (2)
2	Sektor industri pengolahan belum mampu akselerasi sektor primer	Sektor industri pengolahan belum mampu akselerasi sektor primer	
3	Belum signifikannya kontribusi sektor akomodasi makan minum sebagai katalisator pembangunan	belum signifikannya kontribusi sektor akomodasi makan minum sebagai katalisator pembangunan	
4	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian	





No	Permasalahan berdasarkan Aspek Pembangunan	Permasalahan (Substantif) berdasarkan Dimensi Pembangunan	Inti Masalah
5	Rendahnya investasi serta penciptaan ekosistem untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbatas	Rendahnya investasi	
		Penciptaan ekosistem untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbatas	
6	Akses dan Kesempatan Kerja Terbatas	Akses dan kesempatan kerja terbatas	
7	Belum optimalnya ketahanan pangan (bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau) masyarakat	Belum optimalnya ketahanan pangan (bergizi, aman, bermutu, beragam, dan terjangkau) masyarakat	
8	Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat	Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat	
9	Konektivitas wilayah belum optimal	Konektivitas wilayah belum optimal	5. Keterpaduan infrastruktur wilayah
10	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	
11	Kinerja sistem irigasi belum optimal	Kinerja sistem irigasi belum optimal	
12	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
13	Akses air minum aman masih rendah	Akses air minum aman masih rendah	
14	Akses sanitasi aman masih rendah	Akses sanitasi aman masih rendah	
15	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	
16	Sistem transportasi belum terintegrasi serta belum optimalnya sarana dan prasarana LLAJ	Sistem transportasi belum terintegrasi	
		Belum optimalnya sarana dan prasarana LLAJ	
17	Belum seluruh wilayah Kabupaten Purworejo	Belum seluruh wilayah Kabupaten Purworejo terlayani	





No	Permasalahan berdasarkan Aspek Pembangunan	Permasalahan (Substantif) berdasarkan Dimensi Pembangunan	Inti Masalah
	terlayani jaringan internet (masih terdapat wilayah <i>blank spot</i>)	jaringan internet (masih terdapat wilayah <i>blank spot</i>)	
18	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif	6. Tata kelola pemerintahan yang belum <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif (1)
19	Belum optimalnya dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi	Belum optimalnya dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi	
D	Aspek Pelayanan Umum		
1	Belum optimalnya dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi	Belum optimalnya dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi	6. Tata kelola pemerintahan yang belum <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif (2)
2	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan	
3	Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	

Dari penyandingan permasalahan berdasarkan aspek pembangunan dan permasalahan (substantif) berdasarkan dimensi pembangunan pada tabel di atas, didapatkan 6 (enam) inti masalah, antara lain:

- a. Tingginya risiko bencana,
- b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
- c. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah,
- d. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
- e. Keterpaduan infrastruktur wilayah, dan
- f. Tata kelola pemerintahan yang belum *agile*, adaptif, dan kolaboratif.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis daerah disusun dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di level global, nasional, regional, dan lokal guna mencapai suatu perencanaan yang menyeluruh dan perumusan kebijakan yang sinergi antara pusat dan daerah.

3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah memetakan tantangan skala global yang semakin kompleks dengan





perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Perubahan global tersebut memberikan transformasi berskala masif dalam jangka waktu panjang, yang utamanya disebabkan oleh kemajuan teknologi digital termasuk di dalamnya perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Identifikasi isu strategis global dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo merujuk pada laporan riset *Roland Berger Trend Compendium* dianalisis menggunakan *Roland Berger Trend Compendium 2050* yang dirilis oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023 yang telah mengidentifikasi tren-tren yang akan berpengaruh terhadap perkembangan dunia pada tahun 2050, yang selanjutnya disebut sebagai *megatrend*, yaitu perkembangan jangka panjang yang mempunyai dampak di level global. Keenam megatren yang telah dipublikasikan oleh The Roland Berger Institute selanjutnya diadopsi dalam megatren Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dengan penjabaran lebih rinci sebagai berikut.

1) **Manusia dan Masyarakat**

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan pada dasarnya merupakan fokus dari megatren karena manusia berperan sebagai penggerak sekaligus penerima dampak dari adanya perubahan secara global. Dengan demikian, fokus perkembangan manusia dan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari demografi dan kependudukan, melainkan juga pada peningkatan kapasitas manusia untuk dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. Megatren Manusia dan Masyarakat terbagi ke dalam 4 (empat) subtren yang meliputi:

- a) **Populasi.** Isu strategis global yang terdapat pada subtren populasi adalah tren penurunan angka kelahiran yang mengakibatkan pertumbuhan populasi dunia akan sedikit mengalami perlambatan dalam beberapa dekade mendatang, sehingga dikhawatirkan masyarakat akan menua karena rendahnya angka kelahiran di banyak negara industri. Meskipun jumlah penduduk di sebagian besar negara maju mengalami penurunan, namun banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan pesat.
- b) **Migrasi.** Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain baik di dalam satu negara maupun antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan pasti akan terus berkembang menilik dari kemudahan aksesibilitas dan transportasi. Hal ini berkorelasi negatif





dengan tingginya emisi yang dikeluarkan sehingga perubahan iklim berpotensi semakin memburuk.

- c) **Pendidikan dan Tenaga Kerja.** Selaras dengan kondisi lambatnya pertumbuhan penduduk yang menjadikan dunia dihuni oleh populasi tua, menjadikan kurangnya pekerja yang terampil karena faktor usia. Namun isu ini dapat lebih bisa diatasi oleh negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan penduduk cenderung lebih pesat, sehingga dihuni oleh anak-anak muda yang lebih terampil dari sisi pendidikan dan ketenagakerjaan.
- d) **Nilai-nilai.** Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus terjadi secara besar-besaran di seluruh belahan dunia, meskipun deklarasi HAM dari PBB sudah dideklarasikan sejak lama. Perkembangan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan semakin banyak orang dari seluruh negara menyampaikan informasi dan berita secara lebih cepat dan tanpa batas. Isu terkait sebaran berita palsu, propaganda, maupun kontrol untuk penindasan suatu kelompok tertentu akan semakin mudah untuk dilakukan sehingga diperlukan antisipasi secara akurat.

2) Politik dan Pemerintahan

Kebijakan skala global memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penyelesaian permasalahan global, mulai dari isu iklim, konflik sosial, serta perekonomian global. Koordinasi secara menyeluruh menjadi tantangan yang semakin besar karena para pemegang kebijakan di level global seringkali masih mengedepankan kepentingan masing-masing dan belum mampu menjadi mitra satu sama lain. Terdapat 3 (tiga) sub tren dalam megatren politik dan pemerintahan dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) **Risiko Global.** Isu-isu global seperti perubahan iklim, bencana alam, konflik sosial-politik, serta perekonomian dunia dan perdagangan dunia menjadi tantangan utama yang perlu dikoordinasikan bersama melalui kebijakan global antar pemangku kepentingan.
- b) **Geopolitik.** Situasi geopolitik dunia telah menjadi isu sejak lama dan masih terus diwarnai dengan ketegangan antar negara-negara besar. Sejak terjadinya Perang Dunia, negara-negara demokrasi di Barat semakin menunjukkan persatuan namun dalam dekade ke depannya, diperkirakan persaingan antar berbagai negara akan terus meningkat.





c) **Masa Depan Demokrasi.** Jumlah negara demokrasi liberal telah menurun di seluruh dunia sejak satu dekade terakhir, sementara negara otokrasi semakin meningkat. Ketidakpuasan masyarakat dengan sistem demokrasi di negara mereka menyebabkan kembalinya beberapa negara menggunakan sistem otokrasi. Sistem otokrasi ini dapat menjadi tantangan yang mengancam adanya dominasi antar blok yang berpengaruh besar dalam penentuan kebijakan global secara menyeluruh.

3) **Lingkungan dan Sumber Daya**

Perubahan iklim dan pencemaran lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya memiliki kaitan erat dalam upaya pelestarian lingkungan yang layak huni. Sebab lingkungan yang tidak layak untuk dihuni akan berpotensi mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang di planet bumi. Terdapat 3 (tiga) subtren dalam megatren ini dengan rincian sebagai berikut.

a) **Perubahan Iklim dan Polusi.** Berdasarkan hasil konsensus diantara para ilmuwan dunia, emisi gas rumah kaca harus dibatasi dengan cepat apabila pemanasan global ingin dibatasi pada suhu 1,5-2°C. Meskipun demikian, kebijakan global yang mengarah pada netralitas iklim pada tahun 2050 masih sangat jauh dari implementasi global. Di samping ancaman perubahan iklim, ancaman polusi baik polusi darat, air, maupun udara masih menjadi ancaman besar jika tidak segera diselesaikan.

b) **Keanekaragaman Hayati.** Keanekaragaman hayati sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam rantai perekonomian, seperti paus sebagai penyimpan CO₂ dan lebah yang menyebarkan serbuk di bidang pertanian. Perhatian dalam keberlangsungan keanekaragaman hayati yang mengalami penurunan menjadi ancaman yang sangat besar tidak hanya dalam menjaga kelestarian lingkungan, melainkan juga dalam keberlangsungan kehidupan manusia.

c) **Sumber Daya dan Bahan Baku.** Bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama yang jika tidak segera diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, akan menjadi ancaman besar pada tahun 2050. Bahan baku kehidupan seperti air dan pangan juga harus dijamin efisiensi rantai pasokan dan konsumsi dan





ditingkatkan produktivitasnya, sehingga meminimalisir adanya ketergantungan atau monopoli oleh satu pihak tertentu.

4) **Ekonomi dan Bisnis**

Penataan ulang rantai nilai, pergeseran pusat kekuatan ekonomi, dan peralihan produksi energi ke arah keberlanjutan menyebabkan perekonomian dunia saat ini sedang mengalami transformasi secara menyeluruh. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat hutang negara-negara di dunia yang tinggi sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan jangka panjang ke depan. Terdapat 4 (empat) subtren dalam megatren ini sebagai berikut.

- a) **Perdagangan Global dan Rantai Nilai.** Adanya globalisasi setelah krisis keuangan yang melanda pada tahun 2008-2009 menjadikan pertumbuhan perdagangan global yang jauh lebih cepat dibanding PDB global. Namun dengan melambatnya globalisasi saat ini akibat adanya pembatasan perdagangan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19, porsi nilai tambah produk ekspor dalam negeri meningkat namun nilai rantai global mengalami tekanan akibat masalah pengiriman. Perluasan basis pemasok dapat menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh guna menghindari ketergantungan sepihak.
- b) **Pergeseran Kekuasaan.** Pada tahun 2050, Tiongkok diprediksi akan menjadi peringkat 1 dalam peringkat perekonomian global dengan PDB yang jauh lebih besar, mengalahkan AS yang menjadi nomor 1 pada saat ini. Hal ini dipicu oleh adanya perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, sebuah asosiasi yang terdiri dari 15 negara di Asia-Pasifik, yang berpotensi untuk mengalihkan kekuatan ekonomi ke wilayah negara berkembang. Senada dengan hal tersebut, India yang saat ini berada pada peringkat ke-5, diprediksi akan naik menjadi peringkat ke-3. Sementara Indonesia diprediksi naik menjadi peringkat ke-5, setelah Jerman dan Jepang.
- c) **Transformasi Energi.** Aktivitas perekonomian global tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam produksi energi dan penggunaan energi sehingga juga memiliki dampak dalam netralitas iklim. Merupakan tantangan yang cukup besar pada periode pembangunan jangka panjang ke depannya karena investasi yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi CO2 harus meningkat lebih dari 3 kali lipat pada tahun-tahun mendatang.





d) Tantangan Hutang. Dampak dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian global menjadikan tingkat hutang pemerintah dan swasta semakin meningkat tajam

5) Teknologi dan Inovasi

Perkembangan jaman yang pesat selalu didorong oleh kemajuan teknologi yang diterapkan dalam segala bidang pembangunan. Kecerdasan buatan yang mendasari pada hubungan manusia dengan mesin mengharuskan disusunnya pertimbangan yang akurat terhadap peluang dan tantangan yang mungkin akan muncul. Terdapat 3 (tiga) subtren dari megatren teknologi dan inovasi dengan penjelasan berikut.

a) Nilai Inovasi. Negara maju, besar, dan kaya memiliki korelasi positif dengan penerapan inovasi dalam pemerintahannya. Seringkali negara-negara tersebut memberikan investasi yang sangat besar pada teknologi masa depan guna mempertahankan keunggulannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang karena kurangnya sumber daya penelitian yang memadai.

b) Teknologi Terdepan. Teknologi terdepan (*frontier technology*) dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat dan memiliki posisi penting bagi banyak sektor ekonomi. Beberapa teknologi yang termasuk ke dalam teknologi terdepan antara lain kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), nanoteknologi, dan kemampuan menciptakan energi baru terbarukan. Negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat menempati posisi atas pada subtren ini. Hal ini menjadi isu dan tantangan yang perlu dipersiapkan oleh negara-negara berkembang.

c) Manusia dan Mesin. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara perlahan menggantikan tugas manusia karena AI akan mampu melaksanakan semua tugas lebih baik daripada manusia dalam waktu kurang lebih 40 (empat puluh) tahun terakhir. Kemampuan AI yang meningkat secara eksponensial meningkatkan harapan untuk penyelesaian tantangan global seperti perubahan iklim dan penyakit tertentu. Namun demikian, tercipta isu dan tantangan yang perlu dipersiapkan seperti hilangnya pekerjaan manusia karena tergantikan oleh mesin yang menyebabkan meningkatnya pengangguran, hilangnya kendali manusia atas proses sesuatu, serta ancaman terhadap keamanan dan kemanusiaan secara menyeluruh.





6) Kesehatan dan Perawatan

Layanan kesehatan merupakan hal mendasar yang sangat penting secara global karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Pandemi Covid-19 yang telah menjatuhkan banyak korban jiwa merupakan salah satu contoh kasus yang semakin menegaskan pentingnya layanan kesehatan dan perawatan. Tantangan untuk meningkatkan inovasi medis dan sistem perawatan yang efektif, efisien, serta terjangkau menjadi salah satu megatren untuk pembangunan jangka panjang ke depannya yang terbagi ke dalam 3 subtren dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) **Tantangan Kesehatan Global.** Beberapa tantangan kesehatan global yang perlu dipersiapkan antara lain peningkatan layanan kesehatan di negara-negara berkembang, menjamin layanan kesehatan di daerah konflik dan rawan konflik, serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim dari sisi kesehatan.
- b) **Perawatan Kesehatan Masa Depan.** Ilmu kesehatan seperti kedokteran, teknologi medis, dan farmasi memiliki banyak tantangan untuk selalu dikembangkan sehingga diperlukan penyiapan sumber daya baik keuangan maupun sumber daya manusia.
- c) **Pengasuhan.** Kondisi dunia yang lebih didominasi oleh usia tua memberikan tantangan untuk peningkatan pelayanan bagi lansia. Hal ini tidak hanya terbatas pada negara maju saja, melainkan juga negara-negara berkembang karena pengasuhan secara menyeluruh tidak hanya terbatas pada penduduk usia tua melainkan juga anak-anak dan usia muda.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang memiliki visi: Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Isu strategis nasional dalam periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.





1) **Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Persaingan Global yang Semakin Meningkat**

Total Factor Productivity (TFP) Indonesia yang mencerminkan rata-rata produktivitas menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,66 dalam kurun waktu tahun 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas SDM terutama SDM perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, ketertinggalan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta lemahnya kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Berikutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Rendahnya pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

2) **Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)**

IPTEKIN berperan penting dalam meningkatkan daya saing nasional melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Indonesia masih rendah disebabkan diantaranya karena lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28% dari PDB pada tahun 2020. Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM peneliti masih belum memadai yang terbukti dari jumlah peneliti riset dan inovasi hanya sejumlah 388 per satu juta penduduk. Hal ini tidak mencerminkan komitmen pemerintah pada peningkatan aspek IPTEKIN meskipun IPTEKIN memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

3) **Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah**

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang terus mengalami penurunan disebabkan akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset





dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Di samping itu, rendahnya produktivitas sektor pertanian disebabkan oleh rendahnya regenerasi petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata disebabkan oleh terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang masih rendah. Selain itu, preferensi pasar mengalami perubahan dan disrupsi terkait teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Potensi ekonomi kreatif juga belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Inovasi dalam pengembangan produk juga masih belum optimal dan tidak didukung oleh komersialisasi yang belum terbentuk sehingga menyebabkan terbatasnya akses ke pasar internasional.

5) Belum Optimalnya Pemanfaatan Ekonomi Laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga PDB kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60%. Pemanfaatan ekonomi laut belum diterapkan optimal karena belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu, rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya riset dan teknologi kelautan.

6) Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Meskipun berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, UMKM dan koperasi berkontribusi relatif lebih rendah pada perekonomian. Tantangan dalam pengembangan UMKM dan koperasi diantaranya adalah rendahnya keahlian pekerja (*low-skilled workers*)





yang dimiliki oleh sektor ini serta lebih banyak bergerak pada sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Di samping dari sisi sumber daya manusia, terdapat permasalahan dari sisi rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, serta rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

7) Produktivitas Tenaga Kerja Relatif Tertinggal

Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah sehingga menyebabkan rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, juga terdapat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

8) Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Berkelanjutan

Penerapan energi fosil yang masih tinggi menjadi salah satu hambatan dalam penerapan ekonomi hijau yang mengancam keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pencemaran air, tanah, dan udara yang semakin meningkat akibat aktivitas pembangunan yang tidak bertanggungjawab juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam seharusnya juga tidak merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta maraknya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

9) Terbatasnya Infrastruktur dan Literasi Digital

Kapasitas dan kapabilitas Indonesia dalam penerapan literasi digital belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK yang meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan kapasitas *data center*, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Dari sisi permintaan, terdapat tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang





belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.

10) Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik

Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik menyebabkan terbatasnya keterkaitan ekonomi antar wilayah. Hal ini disebabkan akibat pusat-pusat pertumbuhan yang lebih banyak berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata terutama di luar Pulau Jawa. Integrasi ekonomi domestik yang terbatas ini juga terjadi di wilayah perkotaan yang cenderung kaku karena keterbatasan hubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan pembangunan pada satu titik tertentu sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

11) Akses dan Kualitas yang Belum Merata di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial

Bonus demografi yang akan dialami Indonesia selama menyongsong Indonesia Emas 2045 perlu dioptimalkan sebagai salah satu aspek utama penentu keberhasilan. Namun, selama rentang tahun 2005 hingga 2022, kualitas sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin rendah, terutama dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pembangunan sektor kesehatan dari waktu ke waktu dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Transisi demografi juga mengakibatkan perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan yang dihasilkan, seperti adanya pola penyakit baru yang mungkin terjadi di masyarakat. Saat ini, kondisi yang terjadi adalah belum meratanya akses dan kualitas kesehatan, adanya ketimpangan pada akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan belum adaptifnya sektor kesehatan pada perkembangan teknologi, serta belum optimalnya inovasi pembiayaan kesehatan.

Sektor kedua yang berpengaruh besar pada sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama ketika berupaya mengoptimalkan





bonus demografi. Dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan, seperti layanan pendidikan yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di ranah global, dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai pasar tenaga kerja. Layanan pendidikan yang belum merata juga dikarenakan oleh disparitas partisipasi pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi yang tinggi. Kemudian kualitas pendidikan dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan persebaran guru yang tidak merata. Pada tataran yang lebih tinggi, nilai-nilai Pancasila juga belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, padahal hal itu mampu menjadi modal dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Berbagai kondisi tersebut kemudian secara tidak langsung menciptakan ekosistem pembelajaran yang kurang optimal, sehingga penduduk yang berpartisipasi di sektor pendidikan menjadi sumber daya yang kurang berkualitas dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait sumber daya manusia adalah perlindungan sosial. Isu perlindungan sosial menjadi krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan berubah dan ditandai dengan bertambahnya rasio ketergantungan nasional. Oleh karena itu, isu terkait sarana prasarana maupun kebutuhan lain untuk kelompok lansia penting untuk diantisipasi sejak saat ini agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan kedepannya.

Tata kelola menjadi kunci dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola dapat mengintervensi melalui diadakannya kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

12) Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada segi tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa hal yang belum dapat dioptimalkan hingga saat ini, seperti adanya regulasi yang berlebih dan ditambah dengan rendahnya kualitas regulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya regulasi tumpang tindih pada skala nasional maupun daerah. Selain itu kelembagaan instansi publik selama ini





masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan timbulnya ego sektoral dalam kerangka hubungan pemerintah. Tata kelola yang terkait proses bisnis juga belum mampu mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, sehingga dipandang tidak adaptif dan terkotak-kotakkan, serta menimbulkan inefisiensi. Pada problematika yang lebih tinggi, terjadi pula masalah kurang meratanya manajemen talenta di seluruh kementerian/lembaga/daerah, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, rendahnya budaya dan etos kerja, serta kuatnya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta juga semakin rumit akibat adanya kerentanan yang dihadapi ASN terhadap intervensi politik. Meskipun pemerintah diminta untuk terbuka dalam proses penyelenggaraan kebijakan, namun selama ini prinsip keterbukaan yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Masalah tata kelola yang terjadi pada internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada keluaran yang dihasilkan, seperti belum meratanya kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat, dan transformasi digital di tingkat pemerintahan dihadapkan masalah mendasar, seperti infrastruktur. Kurang optimalnya keluaran yang diterima masyarakat kemudian menurunkan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

13) Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Sistem hukum yang dijalankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa masalah strategis di bidang hukum yang harus dibenahi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset tindak pidana, masih tingginya potensi pelanggaran HAM, serta lemahnya pengawasan di internal maupun eksternal institusi penegak hukum.

14) Demokratisasi Belum Optimal

Demokratisasi secara harfiah dimaknai sebagai suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ternyata belum mampu merealisasikan dengan optimal, misalnya saja demokrasi pada





aspek politik terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural, seperti pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Secara tidak langsung, hal itu menimbulkan adanya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers, kurangnya kebebasan sipil, dan semakin meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Beberapa hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

15) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Hasil dari pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi pada tahun 1999 cukup signifikan, namun juga disertai dengan ketimpangan antara Jawa sebagai pusat pembangunan (*Java centris*) dan luar Jawa yang kurang mendapat perhatian. Ketimpangan hadir dalam berbagai bentuk, seperti tidak meratanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, terbatasnya anggaran pemerintah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Kesenjangan antara juga hadir melalui masalah pertanahan, salah satunya adalah terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Memang secara eksplisit, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah kebutuhannya. Salah satunya terkait infrastruktur konektivitas domestik dan global, terutama di laut dan udara. Hal itu dikarenakan belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional.

Masalah kesenjangan antara Jawa dan Pulau Jawa perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama ketika adanya potensi kerentanan keamanan nasional dalam menghadapi kompleksitas ancaman gangguan serta terdapat peningkatan isu geopolitik kawasan di daerah perbatasan.





3.2.3. Isu Strategis Regional

Isu strategis regional merujuk pada isu strategis Provinsi Jawa Tengah. Pada perspektif jangka panjang, isu strategis Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

1) **Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektorsektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi





desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2) **Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan**

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/ wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/ alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antar waktu antar wilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

3) **Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat





khususnya kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan khusus perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Penataan prasarana transportasi dan fasilitas publik juga berkaitan dengan upaya membangun gaya hidup sehat masyarakat dengan menempatkan fasilitas publik pada jarak jangkauan yang sesuai untuk mendorong masyarakat bergerak aktif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi layak, energi listrik, dan transportasi.

4) Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini berkaitan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestariannya. Pengendalian kerusakan lingkungan serta kapasitas mitigasi struktural dan nonstruktural masih menjadi isu yang perlu diprioritaskan. Pengetahuan lokal dan kebiasaan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kebencanaan juga menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk mitigasi dan adaptasi.

5) Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan





menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial.

6) Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jatidiri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.





7) Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme koreksi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

3.2.4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis Pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo disusun dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab*) yang dikombinasikan dengan konsep *dynamic governance*. Konsep *dynamic governance* digunakan agar isu strategis Kabupaten Purworejo yang dirumuskan menjadi isu strategis yang adaptif dan dinamis, sesuai dengan isu di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal. *Dynamic governance* menyatakan bahwa sebuah perencanaan harus dibangun dengan tiga perspektif, yaitu memiliki pandangan ke depan (*think ahead*), memperhatikan sekitar (*think across*) dan memperhitungkan capaian atau hasil evaluasi perencanaan jangka panjang pada periode sebelumnya (*think again*). Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo juga disusun berdasarkan instrumen yang digunakan sebagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain adalah 1) dimensi sumber daya manusia (*people*), 2) dimensi kesejahteraan (*prosperity*), 3) dimensi lingkungan (*planet*) yang didalamnya juga terdapat infrastruktur kewilayahan dan kebencanaan 4) dimensi tata Kelola pemerintahan (*management*). Isu strategis RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 dapat dijabarkan sebagai berikut.





Tabel 3.3. Tabulasi Silang (Crosstab) Isu Strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	People	People & Society (Manusia & Masyarakat)	Populasi, Migrasi, Pendidikan dan Tenaga Kerja, Nilai-Nilai	Menurunnya angka kelahiran, pertumbuhan populasi dunia akan sedikit terlambat dalam beberapa dekade mendatang. Afrika pertumbuhan terkuat, Eropa menyusut. Asia terpadat (India, Cina, Nigeria, AS, Pakistan) masyarakat menua karena rendahnya angka kelahiran di banyak negara industri.	1. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) 2. Terbatasnya Infrastruktur dan Literasi Digital	5. Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 6. Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jatidiri Masyarakat		(2) Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia terutama dari aspek pendidikan dan kesehatan (3) Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan belum adanya dukungan hukum yang adil, inklusif dan berbasis kesetaraan gender	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia & Lingkungan Sosial Masyarakat
		Health & Care (Kesehatan & Perawatan)	Tantangan Kesehatan Global, Perawatan Kesehatan Masa Depan, Pengasuhan	Tantangan untuk meningkatkan inovasi medis dan sistem perawatan yang efektif, efisien, serta terjangkau.	3. Akses dan Kualitas yang Belum Merata di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial					
2	Planet	Environment & Resources (Lingkungan & Sumber daya)	Perubahan Iklim dan Polusi	Terdapat konsensus para ilmuwan jika pemanasan global akan dibatasi pada 1,5-2C, emisi gas rumah kaca harus dikurangi dengan cepat. Namun netralitas iklim pada tahun 2020 masih	4. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	4. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana		(4) Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	2. Lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat	2. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup 3. Tingginya Risiko Bencana





No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
				jauh dari implementasi global. Selain perubahan iklim, terdapat permasalahan polusi seperti asap knalpot dan sampah plastik.						
			Keanekaragaman Hayati	Penurunan keanekaragaman hayati.						
			Sumber Daya dan Bahan Baku	bahan bakar fosil masih menjadi konsumsi energi terbesar kecuali ada perubahan global dalam kebijakan energi. Terkait air, fokusnya pada peningkatan efisiensi rantai pasokan dan konsumsi. Terkait pangan, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bahna mentah lainnya hanya ditemukan di sedikit negara sehingga da ketergantungan yang kuat pda pengguna akhir.						





No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		<i>Technology & Innovation</i> (Teknologi dan Inovasi)	Nilai Inovasi, Teknologi Terdepan, Manusia dan Mesin,	Kemajuan teknologi yang diterapkan dalam segala bidang pembangunan, seperti kecerdasan buatan mendasari hubungan manusia dengan mesin, mengharuskan disusunnya pertimbangan yang akurat terhadap peluang dan tantangan yang mungkin akan muncul.		3. Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			3. Pemerataan Infrastruktur	4. Belum Terpadunya Infrastruktur Wilayah
3	<i>Prosperity</i>	<i>Economic & Business</i> (Ekonomi & Bisnis)	Perdagangan Global dan Rantai Nilai	Sebelum krisis keuangan tahun 2008/2009, pertumbuhan perdagangan global jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB global – globalisasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sejak krisis keuangan, tingkat pertumbuhan kedua negara hampir sama. Globalisasi telah melambat, sebagian disebabkan oleh meningkatnya pembatasan perdagangan. Porsi nilai tambah produk	5. Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Persaingan Global yang Semakin Meningkat 6. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah 7. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata 8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Ekonomi Laut 9. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada	1. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	1. Rencana Pembangunan Double Track Jalan Kereta Api Purworejo-Kroya 2. Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) 3. Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) 4. Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur 5. Pengembangan Kawasan Pariwisata	(1) Belum optimalnya ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adaptif serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan	4. Peningkatan pendapatan daerah 5. Pengembangan dan pemanfaatan sektor pertanian	5. Belum Optimalnya Produktivitas dan Kondisi Inklusivitas Perekonomian Daerah





No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
				<p>ekspor dalam negeri meningkat, sementara rantai nilai global mengalami tekanan tambahan akibat masalah pengiriman setelah pandemi Covid-19. Banyak negara dan perusahaan mencari jalan keluar dari krisis saat ini dengan memperluas basis pemasok mereka untuk menghindari ketergantungan sepihak.</p>	<p>Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi</p> <p>10. Produktivitas Tenaga Kerja Relatif Tertinggal</p> <p>11. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Berkelanjutan</p> <p>12. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik</p>		<p>Badan Otorita Borobudur (BOB)</p> <p>6. Pembangunan Bendungan Bener</p>			
			Pergeseran Kekuasaan	<p>Tiongkok dan India sudah menduduki peringkat ke-2 dan ke-5 dalam peringkat perekonomian global. Pada tahun 2050, Tiongkok akan menjadi nomor satu, dengan PDB yang jauh lebih besar dibandingkan AS, sementara India akan menjadi nomor tiga. Indonesia naik ke peringkat 10 besar menjadi peringkat ke-6 pada tahun 2050, di belakang Jerman dan Jepang. Perjanjian perdagangan seperti</p>						



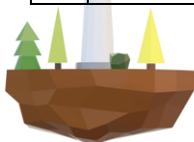


No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
				<p>Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, sebuah asosiasi yang terdiri dari 15 negara di Asia-Pasifik, mengalihkan kekuatan ekonomi ke wilayah-wilayah berkembang.</p>						
			Transformasi Energi	<p>Produksi energi dan penggunaan energi memberikan pengaruh terbesar pada transformasi ekonomi dan masyarakat menuju netralitas iklim. Upaya besar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2050. Investasi saat ini untuk mengurangi emisi CO2 harus meningkat lebih dari tiga kali lipat di tahun-tahun mendatang – dengan total lebih dari 4 triliun dolar AS per tahun di seluruh dunia.</p>						
			Tantangan Hutang	<p>Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan tingkat utang</p>						





No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
				pemerintah dan swasta yang sudah tinggi semakin meningkat. Perang di Ukraina dan investasi dalam rekonstruksi semakin meningkatkan utang negara-negara donor.						
4	Management	Politics & Governance (Politik dan Pemerintahan)	Risiko Global	Perubahan iklim, bencana alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati berada di urutan teratas daftar risiko global pada dekade mendatang. Namun menurut banyak ahli, risiko ekonomi dan geopolitik akan mendominasi dalam jangka pendek. Penilaian risiko berbeda dari satu negara ke negara lain.	13. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal 14. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah 15. Demokratisasi Belum Optimal	7. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis		(5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan berbasis sistem informasi dan penegakan hukum	6. Penegakan hukum	6. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Agile, Adaptif, dan Kolaboratif
			Geopolitik	Bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina, situasi geopolitik dunia diwarnai oleh ketegangan antar pemain kunci. Sejak awal perang, negara-negara demokrasi di Barat semakin						





No	Dimensi Konsep Pemb Berkelanjutan	Isu Strategis Global			Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Jawa Tengah	Isu Strategis Kab. Purworejo			
							Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Evaluasi RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
				bersatu. Perkembangan geopolitik di masa depan tidak pasti, namun persaingan antara berbagai aktor diperkirakan akan terus berlanjut atau bahkan meningkat.						
			Masa Depan Demokrasi	Dalam dekade terakhir, jumlah negara demokrasi liberal telah menurun di seluruh dunia, sementara jumlah negara otokrasi meningkat. Di negara-negara demokrasi, ketidakpuasan masyarakat terhadap bentuk pemerintahan seperti ini telah meningkat selama hampir 20 tahun, meskipun terdapat perbedaan yang jelas dalam perbandingan antar negara.						





1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Masyarakat

Pembangunan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial. Kemajuan pembangunan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia terus membaik dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rata-rata meningkat sebesar 0,64 per tahun sejak tahun 2010 sebesar 68,16% menjadi 74,35% di tahun 2023. Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Meskipun semua dimensi mengalami peningkatan, namun capaian tersebut belum optimal dan masih terdapat banyak permasalahan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat adalah belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat, dan masih rendahnya kualitas lingkungan sosial masyarakat. Kualitas sosial masyarakat ditinjau dari kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, kerukunan umat beragama, pemajuan kebudayaan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat adalah layanan pendidikan seperti sarana prasarana pendidikan, fasilitas pembelajaran yang belum memadai, dan distribusi guru profesional dengan kompetensi tinggi yang masih terbatas dan belum merata. Selain itu, kurangnya akses pendidikan inklusi untuk disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Sebaran layanan dan fasilitas pendidikan diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat. Permasalahan di sektor pendidikan lainnya adalah masih rendahnya tingkat gemar membaca dan budaya literasi digital di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perpustakaan dan belum semua desa optimal dalam pengelolaan perpustakaan atau pojok baca di desa sehingga budaya membaca dan literasi digital belum bersifat masif di masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa belum mendukung dalam





meningkatkan literasi digital. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Kecepatan itu harus diimbangi dengan keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta beradaptasi. Tantangan besarnya adalah bagaimana kita memanfaatkannya dengan melihat banyaknya usia produktif di Kabupaten Purworejo.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo. Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat dapat dilihat pada kualitas pelayanan ibu, bayi, dan balita, tingginya jumlah balita stunting dan gizi buruk. Selain itu juga rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang kemudian menyebabkan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular. Belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini dan penanganan penyakit menular dan tidak menular terutama pada penyakit AIDS, Tuberculosis, dan Malaria. Belum optimalnya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya sistem layanan kesehatan primer dan rujukan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, dan terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pangan dan gizi, serta pola asuh.

Di Kabupaten Purworejo dalam 12 tahun terakhir tercatat masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita dengan jumlah yang fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kehamilan resiko tinggi, frekuensi kunjungan ibu hamil yang kurang, masih terdapat persalinan di non fasilitas kesehatan, gerakan sayang ibu dan anak yang belum maksimal, berat badan bayi saat lahir rendah, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak. Selain itu, di beberapa kondisi ibu hamil tidak mendapat dukungan dalam pengambilan keputusan mengenai kehamilan dan persalinan yang aman, nyaman.

Prevalensi stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Purworejo juga masih tinggi dan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya cakupan ASI eksklusif, belum semua balita ditimbang dan dipantau berat badan dan tinggi badannya, kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, pemberdayaan keluarga masih kurang serta





masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang beresiko melahirkan bayi stunting, lingkungan yang kurang mendukung seperti belum memiliki jamban sehat, perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya.

Sistem layanan kesehatan primer dan rujukan di Kabupaten Purworejo yang belum optimal terutama melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan resiko terjadinya pandemi serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan. Di Kabupaten Purworejo belum memiliki regulasi terkait dengan sistem layanan kesehatan primer, terbatasnya layanan kesehatan untuk lansia (layanan geriatri) pada sistem kesehatan rujukan, SDM kesehatan belum sesuai kebutuhan dari sisi jumlah dan jenis ketenagaan.

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Semakin banyak usia tua dan semakin sedikit usia produktif kedepannya. Di Kabupaten Purworejo jumlah pemuda yang mengalami masalah kesehatan juga mengalami peningkatan. Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang juga diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

Dalam kaitannya dengan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo belum memberikan kontribusi dalam pembangunan. Masih perlu dioptimalkan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial. Upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi masih rendah dan perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kualitas lingkungan sosial masyarakat di Kabupaten Purworejo juga masih menjadi perhatian dalam pembangunan. Peran dan fungsi keluarga belum optimal. Peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat yang harus diwujudkan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keluarga merupakan unit





sosial terkecil di masyarakat mempunyai peran pertama dan utama dalam menentukan kualitas hidup setiap anggota keluarga. Nilai-nilai kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dikenalkan melalui keluarga untuk diinternalisasikan dalam masyarakat. Kemudian pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif. Di Kabupaten Purworejo jumlah pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan juga meningkat, penerapan kebijakan responsif gender yang masih rendah, serta belum optimalnya pemberdayaan perempuan desa dalam pembangunan.

2) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari bagaimana kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang masih menunjukkan kondisi baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo perlu dikelola dengan baik. Manajemen lingkungan hidup menjadi kunci keberlangsungan wilayah yang baik agar dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya kolaborasi antar pihak di Kabupaten Purworejo, agar keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup dapat terwujud dengan baik.

Pelanggaran lingkungan hidup menjadi permasalahan yang perlu untuk terus dicegah, tata kelola perizinan untuk mengelola dampak kerusakan lingkungan perlu terus untuk dilakukan. Kualitas udara di Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penggunaan kendaraan dan industri manufaktur yang menggunakan bahan bakar fosil sehingga meningkatkan polusi udara. Alih fungsi lahan juga terjadi pada kawasan pertanian yang berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Alih fungsi kawasan lahan hijau menyebabkan tutupan vegetasi di Kabupaten Purworejo terus menurun. Semakin kecilnya tutupan vegetasi di Kabupaten Purworejo menyebabkan menurunnya ketersediaan air baku dan air bersih di Kabupaten Purworejo, sehingga perlu adanya upaya konservasi sumber daya air. Di samping itu pencemaran air sungai juga terus terjadi di Kabupaten Purworejo mengingat Kabupaten Purworejo merupakan daerah hilir sungai dan belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga dan





industri, serta diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang limbah ke sungai.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Purworejo juga masih menemukan kendala karena kapasitas TPA yang telah melebihi kapasitas, belum optimalnya pengelolaan sampah domestik di masyarakat, kurangnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah, serta terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah. Selain itu permasalahan lingkungan di Kabupaten Purworejo yang juga menjadi permasalahan global yaitu terkait perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan intensitas emisi gas rumah kaca yang menyelubungi bumi sehingga menyebabkan suhu meningkat. Saat ini Kabupaten Purworejo belum menerapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

3) Tingginya Risiko Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Tahun 2023, Kabupaten Purworejo berada pada peringkat lima di Jawa Tengah dan peringkat 190 nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang memiliki banyak variasi bentang alam seperti pantai, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, yang membutuhkan pengelolaan yang optimal, selain itu manajemen risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah.

Rendahnya manajemen risiko bencana disebabkan oleh beberapa hal yaitu dokumen pendukung dan sarana prasarana pengendali bencana yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan daerah yang secara geografis memiliki tingkat bahaya tinggi serta belum ada data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi. Sedangkan rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana disebabkan oleh belum optimalnya kegiatan sosialisasi maupun pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana karena wilayah rawan bencana yang cukup banyak di Kabupaten Purworejo, belum optimalnya kegiatan mitigasi terhadap bencana, serta belum optimalnya penyediaan sarpras penanggulangan bencana seperti *Early Warning System/EWS*, Perahu Evakuasi dll.

Selain itu tingginya risiko bencana juga disebabkan oleh potensi kebakaran di Kabupaten Purworejo yang masih tinggi. Sosialisasi akan bahaya kebakaran dan cara mengatasi kebakaran yang paling efektif





belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Di samping itu, semakin tingginya permintaan akan permukiman oleh masyarakat perkotaan yang tidak diimbangi oleh penyediaan lahan permukiman menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran.

4) **Belum Terpadunya Infrastruktur Wilayah**

Infrastruktur wilayah merupakan faktor pendukung yang menunjang keberhasilan seluruh sektor yang ada di Kabupaten Purworejo, sehingga ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah harus dikelola dengan baik. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo diarahkan untuk mendukung perekonomian, pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan dan pedesaan), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup untuk meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah sinergitas perencanaan yang mendukung aktivitas ekonomi, potensi wilayah dan kearifan lokal, rencana tata ruang wilayah, dan tata kelola kelembagaan namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam pengembangan keterpaduan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah diperlukan kolaborasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Selain itu juga dibutuhkan identifikasi profil kawasan strategis dan profil infrastruktur, review rencana pengembangan kawasan serta kebutuhan pengembangan keterpaduan infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang untuk mendukung pengembangan wilayah.

Infrastruktur dasar yang sangat mempengaruhi keberlangsungan mobilitas dan aksesibilitas di Kabupaten Purworejo adalah ketersediaan jaringan jalan dan jembatan. Permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah beberapa jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kawasan di Kabupaten Purworejo masih perlu ditingkatkan, direhabilitasi, ataupun pembangunan baru agar aksesibilitas masyarakat lebih baik dan nyaman. Ketersediaan jaringan jalan harus dilengkapi dengan fasilitas perhubungan, terutama angkutan massal yang saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, sehingga





volume kendaraan pribadi semakin tinggi. Selain itu sistem transportasi di Kabupaten Purworejo belum terintegrasi dengan baik.

Perlengkapan jaringan jalan yang tidak bisa ditinggalkan salah satunya drainase yang menampung air permukaan untuk mencegah adanya genangan dan menyebabkan banjir. Selain sebagai pelengkap jaringan jalan, saluran drainase juga perlu dibangun untuk melengkapi kawasan permukiman warga untuk mencegah banjir. Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo masih seluas 126.811 Ha dan perlu penanganan. Pengelolaan kawasan kumuh dan pemenuhan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diintervensi demi tercapainya kesejahteraan. Ketersediaan air minum dan sanitasi permukiman untuk masyarakat, domestik maupun komunal juga perlu dikelola dengan baik, mengingat kebiasaan masyarakat masih bergantung dengan sungai untuk buang air besar sembarangan, dan berakibat pada pencemaran dan penyakit jika tidak dikelola dan dihentikan.

Infrastruktur pendukung perekonomian yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi menjadi infrastruktur penting untuk mendukung produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah. Namun karena keterbatasan sumber daya air terutama saat musim kemarau, sehingga menyebabkan keterbatasan panen karena ketersediaan air tidak dapat memenuhi kebutuhan kawasan pertanian. Pengelolaan daerah tangkapan air dan sumber air perlu dijaga keberlanjutannya sebagai bentuk usaha memenuhi kebutuhan air untuk mendukung produktivitas pertanian.

5) Belum Optimalnya Produktivitas dan Kondisi Inklusivitas Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sarana dalam meraih kesejahteraan dan menjadi salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah juga ditentukan dari kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya kemampuan menekan kesenjangan antar golongan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan





masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi inklusif adalah produktivitas. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan sistem ekonomi suatu daerah membutuhkan peningkatan produktivitas. Produktivitas mendorong suatu daerah berdaya saing tinggi dengan tingkat produksi yang efektif dan efisien serta tenaga kerja yang produktif. Produktivitas yang ideal di suatu daerah akan meningkatkan daya saing sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mutu kehidupan/kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Perekonomian di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 hingga tahun 2023 cenderung meningkat dengan laju pada kisaran 4-5 persen per tahun. Penurunan terjadi saat pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun menurun pada saat pandemi covid-19, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang lebih baik jika dibanding nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan cenderung meningkat, namun kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyisakan beberapa permasalahan yaitu masih tingginya angka kemiskinan serta akses dan kesempatan kerja terbatas sehingga menyebabkan pengangguran.

Secara struktur, perekonomian di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini juga merupakan sektor basis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar namun angka kontribusi yang cenderung menurun dan laju yang cukup rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purworejo cenderung stagnan. Sedangkan sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder yang memiliki kontribusi cukup besar dan laju pertumbuhan cukup besar juga tidak mampu mengakselerasi sektor primernya, yang artinya industri pengolahan di Kabupaten Purworejo menggunakan bahan baku dari luar Purworejo. Sektor perdagangan dan jasa yang juga berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian juga turut mengalami penurunan kontribusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa barang yang diperdagangkan di Kabupaten Purworejo mayoritas





merupakan hasil-hasil pertanian sehingga saat kontribusi sektor pertanian menurun diikuti dengan penurunan kontribusi pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor pariwisata yang dalam hal ini direpresentasikan dengan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum belum signifikan perannya sebagai katalisator pembangunan. Hal tersebut disebabkan rendahnya pengeluaran wisatawan dan kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan lokal yang relatif kecil pengeluarannya.

Disamping itu, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan direpresentasikan dengan indeks gini. Indeks gini di Kabupaten Purworejo semakin meningkat pada tahun 2005 hingga 2025, walaupun indeks gini Kabupaten Purworejo masih dalam kategori moderat. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang menurun pada periode 2005 hingga 2025. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo diukur melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Rendahnya ketimpangan di Kabupaten Purworejo yang tidak diikuti rendahnya angka kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga selanjutnya juga diikuti dengan penurunan pengangguran. Namun, angka pengangguran di Kabupaten Purworejo fluktuatif cenderung meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Disamping itu, tingkat pengangguran pemuda di Kabupaten Purworejo juga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran secara umum.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Purworejo selanjutnya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya kualitas sumber daya manusianya yang direpresentasikan melalui indikator IPM. Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif di Kabupaten Purworejo.





6) Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Agile, Adaptif, dan Kolaboratif

Perkembangan dunia yang begitu pesat menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Digitalisasi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat terutama daerah dengan kondisi geografisnya luas seperti Kabupaten Purworejo, digitalisasi merupakan cara terbaik yang mampu mengintegrasikan pelayanan publik ke depan. Pemanfaatan teknologi dapat dioptimalkan selaras dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, permasalahan seperti masih rendahnya penerapan manajemen SPBE, Belum optimalnya kepemilikan identitas kependudukan digital untuk menunjang pemanfaatan single identity number, dan Keterbukaan informasi publik belum optimal kedepannya akan dapat diatasi dengan adanya upaya transformasi digital ini.

Birokrasi dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat melalui implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berdampak. Kedepan desain birokrasi harus lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam periode RPJPD sebelumnya, Pemerintah kabupaten purworejo telah melakukan tata kelola pemerintahan yang cukup baik ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai reformasi birokrasi. Meskipun demikian, beberapa komponen reformasi birokrasi perlu perbaikan dan peningkatan, profesionalitas ASN dan sistem merit, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan profesionalitas ASN dan sistem merit dalam rangka penguatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai, serta respon atas kebijakan reformasi birokrasi aktual seperti perubahan ke dalam jabatan fungsional, sistem kerja baru yang semakin sederhana, dan reformasi birokrasi tematik. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja di level pemerintah daerah dan perangkat daerah sehingga mampu menciptakan manajemen kinerja yang baik melalui berkaitan kinerja organisasi dengan individu dan memperkuat crosscutting antar perangkat daerah.





Terlaksananya pemerintahan sangat dibutuhkan Pengelolaan keuangan daerah yang baik. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel Masih adanya masalah Kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya, Rendahnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran, serta kondisi keuangan daerah, Belum optimalnya utilisasi aset daerah, dan Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDes Bersama sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

Masih adanya pelanggaran peraturan kepala daerah, konflik sosial, dan kejadian kejahatan menunjukkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengurangi kondusifitas wilayah dan pada gilirannya menurunkan daya saing daerah. kondusifitas daerah ini bertujuan untuk mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan pemerintahan yang *agile*, adaptif serta kolaboratif. *Agile* yang berarti lincah, pemerintah diharapkan mampu merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Didukung dengan tata kelola adaptif, tata kelola yang mampu menyesuaikan dan responsif dalam berbagai situasi apapun baik normal maupun tidak normal, tata kelola yang adaptif di tengah terjadinya banyak perubahan, disrupti atau kondisi VUCA. tata kelola Adaptif ditunjang dengan kepemimpinan yang adaptif maka pemerintah akan dapat lebih banyak mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan serta melakukan perubahan dalam pelayanan seperti yang didambakan masyarakat. Selain itu, diperlukan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang semula berorientasi pada bekerja sendiri menjadi bekerjasama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dapat disebut juga dengan *collaborative governance*. Kolaborasi ini diperlukan adanya sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap suatu permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media yang disebut dengan kolaborasi





pentahelix. beberapa elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif ini antara lain kepemimpinan, ketergantungan satu dengan yang lain, insentif yang jelas, proses pembuatan kebijakan, sumber daya yang dimiliki serta sistem kolaborasi program pembangunan, dan terakhir ialah dampak yang dihasilkan. Reformasi birokrasi kedepan yang diharapkan berdampak ini harus mampu diturunkan sampai ke tingkat pemerintahan desa. Desa merupakan ujung tombak dalam pelayanan publik sehingga keterlibatan pemerintah desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat daerah menjadi fokus ke depan. Pemerintah desa diharapkan lebih profesional dan responsif terhadap tuntutan Masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah.

3.3. Tantangan Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung bagi Pembangunan Daerah

Perubahan iklim menjadi fenomena pemanasan global dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Sedangkan kerentanan terhadap perubahan adalah sebuah konsep yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan manusia atau ekosistem akan terkena dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta sosial-ekonomi. Untuk mendukung pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Dirjen Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES.





Tabel 3.4. Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Tingkat Kerentanan (Desa)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
		1	2	3	4	5	
1	Bagelen			17			17
2	Banyuurip			27			27
3	Bayan			26			26
4	Bener		1	27			28
5	Bruno			18			18
6	Butuh			41			41
7	Gebang			25			25
8	Grabag			32			32
9	Kaligesing		1	20			21
10	Kemiri			40			40
11	Kutoarjo			27			27
12	Loano		1	19		1	21
13	Ngombol			57			57
14	Pituruh			47		2	49
15	Purwodadi			40			40
16	Purworejo			25			25
Kab. Purworejo			3	488		3	494

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

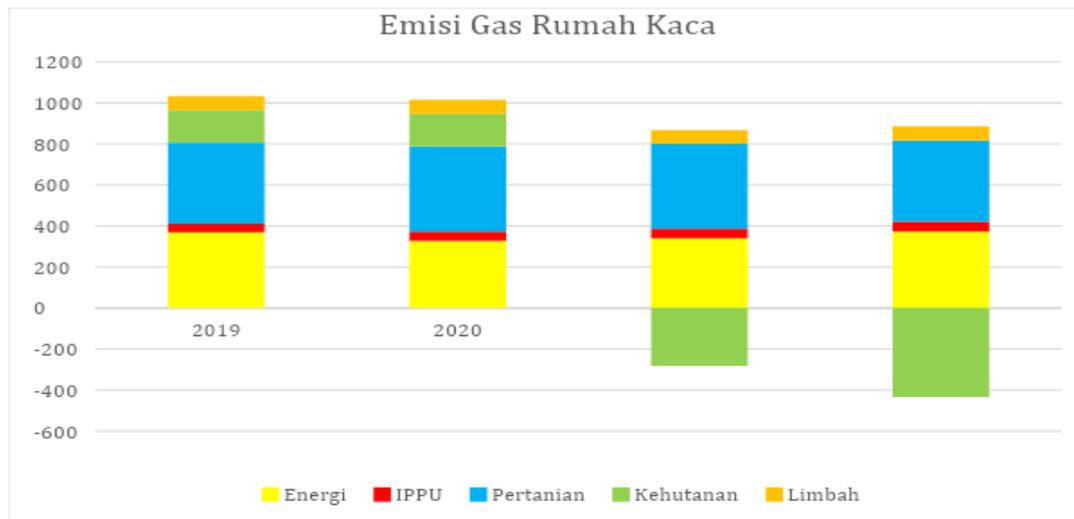
Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar (98,78%) desa di Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerentanan sedang terhadap perubahan iklim, sebagian lagi berada pada tingkat kerentanan rendah (3 desa) dan tingkat kerentanan sangat tinggi (3 desa). Desa-desa yang berada pada tingkat kerentanan sangat tinggi perubahan iklim di Kabupaten Purworejo perlu diwaspadai untuk mengantisipasi bencana yang dapat terjadi, tidak hanya meningkatkan kewaspadaan di dua desa dengan kerentanan sangat tinggi, diperlukan komitmen kewaspadaan untuk seluruh desa-desa di Kabupaten Purworejo.

Isu perubahan iklim juga menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca.





Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan. Berikut ditampilkan grafik tren emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022.



Gambar 3.1 Grafik Tren Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kab, Purworejo Tahun 2019 – 2022

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Tabel 3.5. Proporsi Sektor Emisi GRK di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2022

No	Jenis Emisi	2019	2020	2021	2022	Total
1	Energi	368,26	328,07	340,87	372,45	1.409,65
2	IPPU	43,24	44,89	46,55	49,35	184,03
3	Pertanian	393,95	415,73	412,87	394,84	1.617,39
4	Kehutanan	159,54	158,48	-282,35	-433,67	-398
5	Limbah	69,12	68,25	67,12	63,31	267,8
Total		1.034,11	1.015,42	585,06	446,28	3.080,87

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

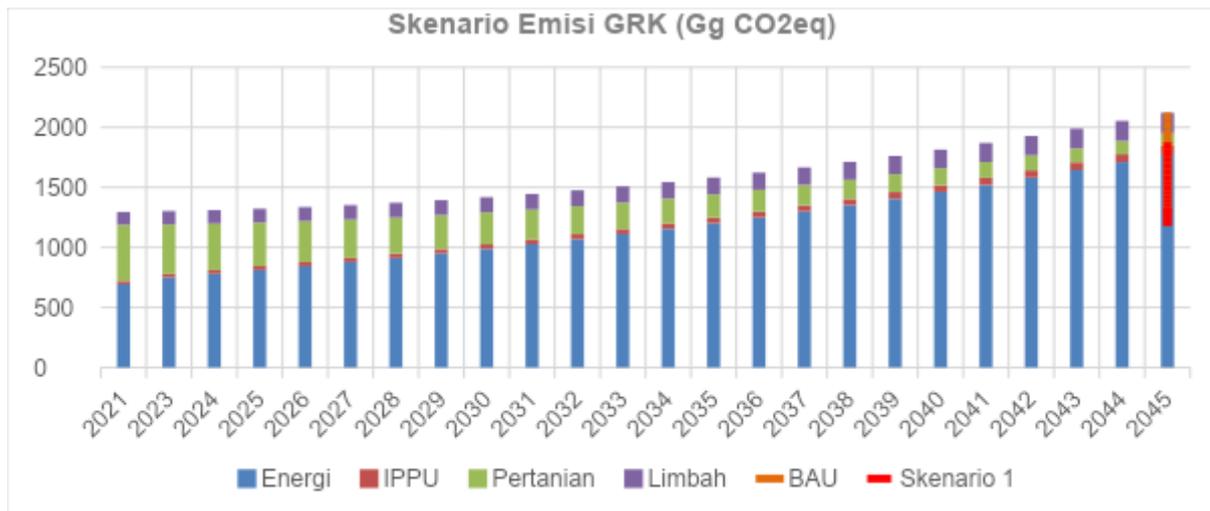
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022 mencapai 21.107,95 Gg CO₂eq yang didominasi oleh sektor pertanian sebesar 95,7% dari total emisi GRK Kabupaten Purworejo. Peningkatan emisi GRK tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan emisi di sektor pertanian, mengingat kegiatan pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Purworejo. Sementara itu emisi dari sektor AFOLU juga berkontribusi tinggi terhadap emisi di Kabupaten Purworejo dengan kontribusi sebesar 110,18 Gg CO₂eq, sektor AFOLU yang paling dominan di Kabupaten Purworejo berupa kegiatan pertanian. Meskipun secara tren untuk sektor AFOLU mengalami tren turun karena adanya penurunan luasan sawah dan kegiatan pertanian. Dari sektor limbah dalam kurun waktu 2018-2021 terjadi tren naik, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan jumlah timbulan sampah maupun limbah cair domestik.

Perhitungan skenario emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Purworejo didasarkan pada data tren emisi GRK pada signsmart KLHK yang terdiri dari beberapa sektor penyumbang emisi seperti energi, IPPU,





pertanian, dan limbah. Adapun hasil proyeksi tingkat emisi GRK di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2. Skenario Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2045

Upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan tren emisi GRK di Kabupaten Purworejo melalui upaya sebagai berikut. 1. Mendorong penghematan energi yang berasal dari energi fosil dengan menggunakan transportasi publik serta penggunaan alat-alat yang hemat energi. 2. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi utama seperti penggunaan biogas yang berasal dari biogas ternak asal masyarakat dan EBT yang memiliki potensi besar di Kabupaten Purworejo. 3. Implementasi manajemen energi pada bangunan gedung-gedung pemerintahan 4. Mengembangkan unit pengelolaan pupuk organik 5. Efisiensi energi sektor industri melalui pemberian intensif dengan upaya konservasi energi oleh perusahaan.

Selain perubahan iklim, kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Kelangkaan ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dunia, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif. Selain itu krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk dan juga ketersediaan lahan pertanian yang dikendalikan melalui RTRW Kabupaten Purworejo, diperkirakan daya dukung pangan pada tahun 2045 masih tersedia dengan rasio sebesar 2,35, namun jika





dibandingkan dengan tahun 2022 turun sebesar 15,16 persen, selain itu daya dukung lahan dan air juga semakin menurun dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Hal tersebut diperparah dengan adanya dampak dari perubahan iklim yang berakibat meningkatnya serangan hama, penyakit, dan kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi Kabupaten Purworejo khususnya pada sektor ketersediaan dan keterjangkauan atau akses pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan.

Tabel 3.6. Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Kabupaten Purworejo Tahun 2030 dan 2045

Uraian	2022	2030	2045
Air			
Ketersediaan Air WS (Wilayah Sungai) (m3/tahun)	1.347.542.673	1.344.760.733,08	1.340.155.448,82
Kebutuhan Air Domestik (m3/tahun)	67.241.405	72.080.117,57	78.073.476,48
Kebutuhan Air Pertanian (m3/tahun)	898.595.858	885.240.597,17	885.240.597,17
Kebutuhan Air Total (Domestik+Pertanian) (m3/tahun)	965.837.263	957.320.714,74	963.314.073,66
Selisih (m3/tahun)	381.705.410	387.440.018	376.841.375
Status	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Daya Dukung Air WS	1,4	1,4	1,39
Pangan			
Ketersediaan (Ton/Tahun)	162.802,00	159.974,19	159.974,19
Kebutuhan (Ton/Tahun)	58.680,58	62.903,25	68.133,46
Selisih (Ton/Tahun)	104.121,42	97.070,94	91.840,73
Status	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Daya Dukung Pangan	2,77	2,54	2,35





BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045. Visi dan misi ini disusun secara teknokratik dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo sebagaimana telah dirangkum dalam bab III. Visi menggambarkan suatu kondisi jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjadi bentuk upaya jangka panjang yang harus ditempuh untuk mendukung pencapaian visi pembangunan. Berikut merupakan visi dan misi Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045

4.1. Visi Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Kabupaten Purworejo 2025-2045 disusun berdasarkan visi jangka panjang nasional, yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berikut adalah visi jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025 hingga 2045:

**“Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing”
(Pejuang)**

Akronim ‘Pejuang’ menggambarkan banyaknya pahlawan dan tokoh nasional yang lahir di Kabupaten Purworejo. Di samping itu, sosok Pejuang menggambarkan seseorang yang tidak mudah putus asa, konsisten dalam





mencapai tujuan yang ditargetkan, bekerja tanpa pamrih dan memperlihatkan dirinya berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Jiwa dan semangat pejuang yang diwariskan oleh beberapa tokoh pejuang dan pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Purworejo menjadi landasan sikap bersama untuk mewujudkan Purworejo yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing pada tahun 2045.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 tersebut memiliki beberapa pokok visi sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Penyusunan Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Maju	Kondisi ekonomi yang inklusif dan kolaboratif, melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovatif, serta penyediaan <i>smart infrastructure</i> .
	Sejahtera	Kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, serta tercukupi kebutuhan dasarnya bagi semua kalangan.
	Berkelanjutan	Kondisi lingkungan yang lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, infrastruktur yang terintegrasi dan dapat memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan keberlangsungan generasi yang akan datang.
	Berdaya Saing	Kondisi memiliki kekuatan dan keunggulan komparatif wilayah (ekosistem inovasi, <i>enabling environment</i> , sumber daya manusia, dan <i>market</i>).

Maju berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi ekonomi yang produktif dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovatif, serta diiringi dengan penyediaan *smart infrastructure*. Kondisi perekonomian daerah yang inklusif menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Purworejo tidak hanya sekedar tumbuh dengan cepat, namun juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan melalui perluasan akses dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan pengembangan kinerja sektor unggulan dan potensial daerah dengan dukungan peningkatan produktivitas dan daya saing. Untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif, diperlukan penciptaan struktur ekonomi yang produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, dan berkelanjutan. Aspek inovasi dengan pemanfaatan teknologi, hilirisasi sumber daya alam, dan penyediaan *smart infrastructure*





juga menjadi aspek penting dalam perwujudan perekonomian Kabupaten Purworejo yang inklusif dan produktif.

Sejahtera berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, serta tercukupi kebutuhan dasarnya bagi semua kalangan.

Berkelanjutan berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki lingkungan yang lestari. Pembangunan di Kabupaten Purworejo secara umum menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Proses pembangunan memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri, dengan kata lain pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Pembangunan berkelanjutan didukung oleh kondisi infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian di Kabupaten Purworejo.

Berdaya Saing berarti bahwa kondisi Kabupaten Purworejo yang memiliki kekuatan dan keunggulan produktivitas wilayah (ekosistem inovasi, *enabling environment*, sumber daya manusia, dan market). Secara umum berdaya saing berarti sebuah entitas mampu tumbuh dan berkembang secara normal berhadapan dengan entitas-entitas lainnya. Lebih dari itu entitas tersebut berhasil bertahan dan tumbuh dengan optimal karena keunggulan-keunggulannya. Ketahanan atau resiliensi tersebut adalah kemampuan dalam menghadapi hambatan dari dalam serta tantangan dari luar serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimilikinya, yang akan terwujud dalam produktivitas wilayah. Produktivitas wilayah tersebut harus didukung adanya 4 aspek yaitu:

1. Ekosistem Inovasi

Ekosistem inovasi adalah jaringan ekosistem dimana terdapat berbagai pihak yang berperan terhadap tumbuh kembangnya inovasi, terdiri dari 3 pilar yaitu dinamika bisnis, kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi.





2. *Enabling Environment*

Enabling Environment atau lingkungan pendukung ini adalah lingkungan yang mendukung adanya daya saing suatu daerah, meliputi 3 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur dan perekonomian daerah.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia ini meliputi 2 pilar, yaitu kesehatan serta pendidikan dan keterampilan.

4. *Market/ Pasar*

Market atau pasar dalam hal ini meliputi 5 pilar, yaitu efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan dan ukuran pasar (ukuran pasar ini terdiri dari pasar lokal maupun pasar ekspor, makin besar ukuran pasarnya kemungkinan produktivitas wilayah itu tinggi. Ukuran pasar lokal bisa didekati dengan jumlah penduduk, artinya target pasar utama produk-produk daerah itu adalah pasar lokal/penduduk daerah itu sendiri, mengoptimalkan pasar lokal, kemudian akan lebih unggul lagi apabila bisa merambah pasar ekspor).

Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dapat disandingkan dengan Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 serta Visi RPJPN Tahun 2025-2045. Tabel berikut ini menunjukkan penyandingan visi disertai dengan masing-masing pokok-pokok/ kata kuncinya.

Tabel 4.2. Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045
Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing
Kata Kunci Visi		
Negara Nusantara	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional	Purworejo
Maju	Maju	Maju
Maju	Sejahtera; Berbudaya	Sejahtera
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
Maju	Maju	Berdaya Saing

Kabupaten Purworejo mengambil kata ‘maju’ dalam visinya. Hal ini sesuai dengan adanya kata ‘maju’ di tingkat provinsi dan nasional. Kata ‘sejahtera’ Kabupaten Purworejo diambil dari visi Provinsi Jawa Tengah. Kata ‘maju’ dan ‘sejahtera’ ini juga menjadi dua kata teratas dalam penjarangan masukan/ kuesioner di masyarakat. Selanjutnya, kata ‘berkelanjutan’ selaras dengan provinsi dan nasional. Terakhir, kata ‘berdaya saing’





merupakan kata unik yang membedakan dengan provinsi dan nasional, berasal dari kuesioner masyarakat, serta Evaluasi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025. Pokok-pokok/ kata kunci visi Kabupaten Purworejo telah selaras dan memiliki keterkaitan guna mendukung pencapaian visi di level provinsi maupun nasional.

Visi Kabupaten Purworejo dicerminkan dari lima sasaran visi, diukur melalui tujuh indikator. Kelima sasaran visi ini akan menunjukkan ketercapaian dari Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing. Tabel berikut ini menunjukkan sasaran visi Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.3. Sasaran Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
1	Terwujudnya perekonomian daerah yang produktif dan inklusif	1. PDRB Per Kapita	Rp Juta	31,56	55,86	86,23	116,60	153,05
		2. Tingkat Kemiskinan	%	9,04 – 10,22	8,30 – 7,30	5,88 – 4,88	3,45 – 2,45	0,00 – 0,53
		3. Rasio Gini	Angka	0,335	0,331	0,326	0,321	0,315
2	Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat	4. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,96	76,31	78,36	80,43	82,92
3	Terwujudnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, keterpaduan infrastruktur wilayah, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i>	5. Indeks Infra-struktur Daerah	Angka	50,18	57,72	65,92	74,10	82,86
		6. Penurunan Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	133.264,42	2.523.294,51	5.510.832,13	8.498.369,75	12.083.414,89
4	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,95	71,16	73,92	76,68	80,00

Tujuh indikator yang merupakan penjabaran dari empat sasaran visi Kabupaten Purworejo 2025-2045 ini diharapkan membaik dan dapat





mewujudkan Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing pada tahun 2045.

Kabupaten Purworejo memiliki 4 (empat) sasaran visi. Keempat sasaran visi tersebut mendukung 5 (lima) sasaran visi jangka panjang di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah penyelarasan sasaran visi Kabupaten Purworejo dengan Provinsi Jawa Tengah beserta indikator-indikatornya.

Tabel 4.4. Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Purworejo	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita	Terwujudnya perekonomian daerah yang produktif dan inklusif	1. PDRB Per Kapita
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		-
		Kontribusi PDRB Sektor Industri		-
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan		2. Tingkat Kemiskinan
		Rasio Gini		3. Rasio Gini
		Kontribusi PDRB Provinsi		-
5	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat	4. Indeks Pembangunan Manusia
3	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	-	Terwujudnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, keterpaduan infrastruktur wilayah, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i>	5. Indeks Infrastruktur Daerah
		Penurunan Intensitas Emisi GRK		6. Penurunan Emisi GRK
4	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	7. Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran visi pertama “Terwujudnya perekonomian daerah yang produktif dan inklusif” Kabupaten Purworejo mendukung sasaran visi





pertama “Peningkatan pendapatan per kapita” dan kedua “Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan” di Provinsi Jawa Tengah. Sasaran visi ini didukung indikator PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan, serta Rasio Gini. Selanjutnya, sasaran visi kedua “Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat” kedua Kabupaten Purworejo selaras dengan sasaran visi kelima di Provinsi Jawa Tengah, yakni “Peningkatan daya saing sumber daya manusia”. Sasaran visi ketiga Kabupaten Purworejo yakni “Terwujudnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, keterpaduan infrastruktur wilayah, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*” selaras dengan sasaran visi ketiga Provinsi Jawa Tengah, “Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*”. Terakhir, sasaran visi “Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif” selaras dengan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah yang keempat, yakni “Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat”.

4.2. Misi Daerah

Misi merupakan rumusan umum yang menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan guna mendukung pencapaian visi. Rumusan misi dapat membantu lebih jelas dalam penggambaran visi yang ingin dicapai serta menguraikan secara lebih detail langkah yang harus diambil. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berikut adalah misi RPJPD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045.

Tabel 4.5. Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Misi ini disusun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo yang disertai penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan dukungan utama





No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
				terhadap ketahanan pangan regional.
2	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat		Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat	Misi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Purworejo serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
3	Belum terpadunya infrastruktur wilayah		Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	Misi ini disusun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah baik pada kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
4	Menurunnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi keberlanjutan hidup manusia disertai dengan peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengelola risiko bencana.
5	Tingginya risiko bencana			
6	Tata kelola pemerintahan yang belum <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif		Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih cepat tanggap dalam menghadapi tantangan dan kondisi lingkungan yang dinamis serta mampu bersinergi dengan banyak pihak.

Misi 1: Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah yang Mendukung Ketahanan Pangan

Misi meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan merupakan sebuah misi yang disusun untuk merespon isu strategis dan dimensi pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi. Perekonomian yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif, diperlukan penciptaan struktur ekonomi yang produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu





sektor tertentu, dan berkelanjutan. Peran sektor pertanian sebagai sektor primer di Kabupaten Purworejo yang cukup saat ini menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian perlu didukung dengan sektor-sektor sekunder maupun tersier. Industri pengolahan sebagai sektor sekunder harus mampu memberi nilai tambah (*value added*) pada produk-produk sektor primer. Sejalan dengan itu, sektor jasa juga harus mampu menjadi katalisator bagi sektor primer dan sektor sekunder di Kabupaten Purworejo. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Purworejo harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, dalam perwujudan perekonomian daerah yang inklusif juga perlu didorong perluasan akses dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu didukung dengan penerapan ekonomi hijau guna efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi tanpa merusak lingkungan. Penerapan ekonomi hijau ditujukan agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Produktivitas dan inklusivitas perekonomian Kabupaten Purworejo ini didorong untuk dapat mendukung ketahanan pangan di tingkat regional, sesuai dengan karakteristik geografis potensi pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah bagian selatan.

Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Lingkungan Sosial, dan Budaya Masyarakat

Misi meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat merupakan misi yang disusun untuk merespon isu strategis dan permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh yang berkualitas. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi digital untuk membangun manusia yang cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing. Pendidikan merupakan salah satu investasi pemerintah dalam membangun daerah. Peningkatan lingkungan sosial dan budaya masyarakat diwujudkan melalui peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan individu yang tangguh, peningkatan upaya pemajuan





kebudayaan dalam memberikan kontribusi pada pembangunan, peningkatan kerukunan umat beragama dan kohesivitas sosial, peningkatan pembangunan yang responsif gender, serta peningkatan kebudayaan masyarakat.

Misi 3: Meningkatkan Pemerataan, Aksesibilitas, Konektivitas, serta Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Misi meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah merupakan misi yang disusun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah baik pada kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah penting untuk dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan keterpaduan, setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, tapi juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten.

Pembangunan infrastruktur dasar menjadi program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu dilakukan melalui penguatan konektivitas antar wilayah, guna memperkuat kinerja perekonomian domestik dan sektor riil, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan, maka diperlukan tercapainya kondisi konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Misi meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan misi yang disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi keberlanjutan hidup manusia disertai dengan peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengelola risiko bencana. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas air, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan. Lingkungan hidup yang berkualitas dicirikan oleh





keadaan dan kondisi unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi (*interactive*), saling ketergantungan hidup satu dengan yang lainnya (*interdependency*), hubungan antar unsur atau komponen lingkungan yang harmonis (*harmony*), selaras, berkemampuan untuk bertahan hidup dalam keberagaman (*diversity*), seluruh unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing (*utility*), informasi aktual (*current information*) yang muncul dari peristiwa lingkungan hidup yang dapat dikembangkan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup, dan keadaan atau kondisi-kondisi ini harus diupayakan untuk dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainability*). Misi diarahkan pada regenerasi ekosistem melalui akselerasi peningkatan pengelolaan dan pencadangan sumber daya alam, *mainstreaming* teknologi hijau dan rendah emisi sebagai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim.

Ketahanan terhadap bencana juga menjadi hal penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketahanan bencana adalah kapasitas atau kemampuan sebuah wilayah untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari bencana serta dampak ikutannya. Untuk mewujudkan ketahanan bencana, penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.

Misi 5: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Adaptif, dan Kolaboratif

Misi mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih cepat tanggap dalam menghadapi tantangan dan kondisi lingkungan yang dinamis serta mampu bersinergi dengan banyak pihak. Pemerintahan yang lincah diharapkan mampu merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Didukung dengan kepemimpinan yang adaptif, maka pemerintah akan dapat lebih banyak mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan serta melakukan perubahan dalam pelayanan seperti yang didambakan masyarakat. Selain itu, diperlukan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang semula berorientasi pada bekerja sendiri menjadi





bekerjasama secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dapat disebut juga dengan *collaborative governance*. Kolaborasi ini diperlukan adanya sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap suatu permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media yang disebut dengan kolaborasi *pentahelix*.

Misi Kabupaten Purworejo dapat disandingkan dengan misi di tingkat provinsi dan nasional. Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 memiliki lima misi, mendukung pada enam misi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, serta mendukung terhadap delapan misi dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Tabel berikut ini menunjukkan keterkaitan misi di tingkat Kabupaten Purworejo, provinsi, dan nasional.

Tabel 4.6. Penyeragaman Misi RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Misi RPJPN Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	Misi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045
2. Transformasi Ekonomi	2. Transformasi Ekonomi	1. Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah yang Mendukung Ketahanan Pangan
1. Transformasi Sosial	1. Transformasi Sosial	2. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Lingkungan Sosial, dan Budaya Masyarakat
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pemerataan, Aksesibilitas, Konektivitas, serta Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
8. Kesenambungan Pembangunan	8. Kesenambungan Pembangunan	
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
3. Transformasi Tata Kelola	3. Transformasi Tata Kelola	5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang <i>Agile</i> , Adaptif, dan Kolaboratif
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	

Misi pertama Kabupaten Purworejo mendukung misi “Transformasi Ekonomi” di tingkat nasional dan provinsi. Misi kedua Kabupaten Purworejo mendukung dua misi “Transformasi Sosial” dan “Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” di tingkat nasional dan provinsi. Misi ketiga Kabupaten





Purworejo mendukung misi “Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan” serta “Kestinambungan Pembangunan” di tingkat nasional dan provinsi. Misi keempat Kabupaten Purworejo mendukung misi “Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan” di tingkat nasional dan provinsi. Sementara itu, misi kelima Kabupaten Purworejo mendukung misi “Transformasi Tata Kelola” di tingkat nasional dan provinsi, misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” di tingkat nasional, serta misi “Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi, Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah” di Provinsi Jawa Tengah. Seluruh misi Kabupaten Purworejo telah selaras dan memiliki keterkaitan guna mendukung pencapaian misi di level provinsi maupun nasional.





BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini berisi tentang arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo. Arah kebijakan akan memandu penyusunan tema rencana lima tahunan, sedangkan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang akan memandu untuk menyusun indikator makro dan/ atau indikator kinerja kunci daerah di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan dibagi atas arah kebijakan umum (tema) dan arah kebijakan per periode, sementara sasaran pokok dirinci dalam arah pembangunan serta arah kebijakan pada arah pembangunan.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 disusun sebagai acuan bagi penyusunan tema lima tahunan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo. Arah kebijakan rencana Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 untuk Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata berdasarkan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan juga disusun dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang disampaikan oleh Walt Whitman Rostow. Rostow menyampaikan bahwa tahapan pembangunan dapat dijalankan melalui beberapa tahapan, seperti *precondition to take off* (prasyarat lepas landas), *take-off* (lepas landas), *drive to maturity* (gerakan ke arah kedewasaan) dan *the age of high mass consumption* (konsumsi massal yang tinggi). Tahapan pembangunan yang disampaikan Rostow tersebut tidak diadopsi secara langsung, namun disesuaikan dengan konteks dan cita-cita jangka panjang Kabupaten Purworejo ke depan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah (Lampiran





Permendagri No. 86 Tahun 2017). Berikut adalah arah kebijakan umum/ tema rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan Umum RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Visi	Arah Kebijakan Umum (Tema)			
	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Memperkokoh Pembangunan Berdaya Saing	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing

Periode lima tahunan pertama Kabupaten Purworejo diharapkan dapat tercipta “Penguatan Fondasi Pembangunan”. Periode kedua diharapkan terjadi “Akselerasi Pembangunan”. Periode lima tahunan ketiga Kabupaten Purworejo diharapkan mampu “Memperkokoh Pembangunan Berdaya Saing”. Kemudian, di akhir periode atau tahun 2045, diharapkan tercapai “Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing”. Periode dan arah kebijakan umum/ tema RPJPD Kabupaten Purworejo ini telah diselaraskan dengan periode dan tema di Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN

Periode	Tema RPJMN	Tema RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Tema RPJPD Kabupaten Purworejo
Periode I 2025-2029	Penguatan Fondasi Transformasi	Penguatan Landasan Transformasi	Penguatan Fondasi Pembangunan
Periode II 2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Pembangunan
Periode III 2035-2039	Ekspansi Global	Pemantapan Transformasi	Memperkokoh Pembangunan Berdaya Saing
Periode IV 2040-2045	Perwujudan Indonesia Emas	Perwujudan Visi	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing

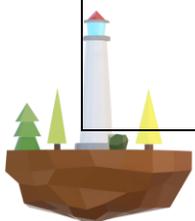
Pada periode pertama (2025-2029), tema Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional berfokus pada “fondasi” atau “landasan”. Pada periode kedua (2030-2034), tema diarahkan pada “akselerasi”. Pada periode ketiga (2035-2039), tema Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada “memperkokoh” atau “pemantapan”, sementara nasional pada “ekspansi”. Lalu pada periode terakhir (2040-2045), tema diarahkan pada perwujudan visi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan arah kebijakan pada masing-masing misi Kabupaten Purworejo 20 (dua puluh) tahun ke depan.





Tabel 5.3. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Memperkokoh Pembangunan Berdaya Saing	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing
	Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Percepatan upaya peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Pemantapan upaya peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	Perwujudan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan
	Misi 2: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat	Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial budaya yang terintegrasi	Percepatan pembangunan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial budaya	Pemantapan lingkungan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya yang berkualitas	Perwujudan SDM yang berdaya saing dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh yang berkualitas
	Misi 3: Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan menggunakan prinsip keterpaduan dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi	Memantapkan kualitas infrastruktur wilayah serta aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi	Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkarakter serta memperkuat interaksi desa-kota	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat ketahanan ekologi dan manajemen risiko sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan ekologi sebagai modal pembangunan	Mewujudkan ketangguhan lingkungan dan masyarakat yang adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berketahanan
	Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile,	Membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi	Mengembangkan tata kelola pemerintah yang profesional	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif dan kolaboratif





Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	adaptif, dan kolaboratif		dan penuh integritas		

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa masing-masing misi Kabupaten Purworejo memiliki arah kebijakan. Arah kebijakan tiap misi pada periode lima tahunan pertama diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan. Arah kebijakan tiap misi pada periode kedua diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan. Arah kebijakan masing-masing misi pada periode ketiga diharapkan dapat memperkuat pembangunan berdaya saing. Sementara itu, arah kebijakan masing-masing misi pada periode keempat diharapkan mampu menciptakan Purworejo maju, sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode I (2025-2029): Penguatan Fondasi Pembangunan

Arah kebijakan lima tahun pertama (2025-2029) ini terfokus pada penguatan fondasi pembangunan Kabupaten Purworejo. Upaya kebijakan jangka menengah yang harus dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan;
2. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial budaya yang terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan menggunakan prinsip keterpaduan dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi;
4. Memperkuat ketahanan ekologi dan manajemen risiko sebagai landasan dan modal dasar pembangunan; dan
5. Membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode II (2030-2034): Akselerasi Pembangunan

Arah kebijakan lima tahun kedua (2030-2034) Kabupaten Purworejo terfokus pada percepatan pembangunan. Upaya kebijakan jangka menengah yang harus dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Percepatan upaya peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan;
2. Percepatan pembangunan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial budaya;
3. Memantapkan kualitas infrastruktur wilayah serta aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi;





4. Memantapkan ketahanan ekologi sebagai modal pembangunan; dan
5. Mengembangkan tata kelola pemerintah yang profesional dan penuh integritas.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode III (2035-2039): Memperkokoh Pembangunan Berdaya Saing

Arah kebijakan lima tahun ketiga (2035-2039) ini terfokus pada upaya Kabupaten Purworejo untuk memperkokoh pembangunan berdaya saing yaitu dengan:

1. Pemantapan upaya peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan;
2. Pemantapan lingkungan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya yang berkualitas;
3. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkarakter serta memperkuat interaksi desa-kota;
4. Mewujudkan ketangguhan lingkungan dan masyarakat yang adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan; dan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode IV (2040-2045): Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing

Arah kebijakan lima tahun keempat (2040-2045) ini terfokus pada mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi daerah yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui:

1. Perwujudan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan;
2. Perwujudan SDM yang berdaya saing dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh yang berkualitas;
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berketahanan; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *agile*, adaptif dan kolaboratif.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan penjabaran dari 5 (lima) misi jangka panjang Kabupaten Purworejo. Misi Kabupaten Purworejo di-*breakdown* ke dalam 5 (lima) sasaran pokok. Penyusunan sasaran pokok jangka panjang ini telah memperhatikan sasaran pokok di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tabel berikut ini menunjukkan sasaran pokok Kabupaten Purworejo dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.



**Tabel 5.4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Sasaran Pokok
Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan
	Misi 2: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
	Misi 3: Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	3. Meningkatnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah
	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
	Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif

Sasaran pokok (5) Kabupaten Purworejo dalam jangka panjang antara lain: 1) Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan, 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera, 3) Meningkatnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah, 4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta 5) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif. Sasaran pokok selanjutnya dijabarkan dalam arah pembangunan. Arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan dari nasional antara lain: CJ01) Kesehatan Untuk Semua; CJ02) Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif; CJ03) Perlindungan Sosial yang Adaptif; CJ04) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; CJ05) Penerapan Ekonomi Hijau; CJ06) Transformasi Digital; CJ07) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; CJ08) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; CJ09) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif; CJ10) Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial; CJ11) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; CJ12) Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah; CJ13) Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter; CJ14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; CJ15) Lingkungan Hidup Berkualitas; CJ16) Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; serta CJ17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tabel berikut ini menunjukkan perumusan arah pembangunan Kabupaten Purworejo 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan memperhatikan arah pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.



**Tabel 5.5. Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045**

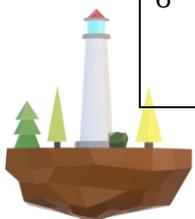
Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah
			2. Kemandirian Pangan
	Misi 2: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera	3. Kesehatan Untuk Semua
			4. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif
			5. Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Misi 3: Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	3. Meningkatnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	7. Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana, serta Lingkungan Hidup Berkualitas	
Misi 5: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	8. Tata Kelola yang Agile, Adaptif, dan Kolaboratif	
		9. Transformasi Digital	
		10. Ketenteraman dan Ketertiban	

Terdapat 10 (sepuluh) arah pembangunan di Kabupaten Purworejo, antara lain: Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah; kemandirian pangan; kesehatan untuk semua; pendidikan berkualitas secara inklusif; pemajuan kebudayaan; keluarga berkualitas; kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas; tata kelola yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif; transformasi digital; serta ketenteraman dan ketertiban. Tabel berikut ini menunjukkan keselarasan antara sasaran pokok dan arah pembangunan di Kabupaten Purworejo dengan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.6. Penyeragaman Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah



No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Purworejo	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing inklusif	CJ01. Kesehatan Untuk Semua	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera (1)	3. Kesehatan Untuk Semua
		CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		4. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif
		CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah (1)
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah (2)	1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah(2)
		CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau		
		CJ06. Transformasi Digital	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif (1)	9. Transformasi Digital
		CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah (3)	1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah (3)
		CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	3. Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah (1)	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (1)
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif (2)	8. Tata Kelola yang <i>Agile</i> , Adaptif, dan Kolaboratif (1)
4	Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah	CJ10. Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif (3)	10. Ketenteraman dan Ketertiban
		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah (4)	1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah (4)
		CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif (4)	8. Tata Kelola yang <i>Agile</i> , Adaptif, dan Kolaboratif (2)
5	Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera (2)	5. Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		
6	Terwujudnya ketahanan sumber daya alam,	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (1)	7. Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana,





No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Purworejo	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
	lingkungan hidup, dan bencana			serta Lingkungan Hidup Berkualitas (1)
		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah (1)	2. Kemandirian Pangan
			3. Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah (2)	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (2)
		CJ17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (2)	7. Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana, serta Lingkungan Hidup Berkualitas (2)

Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 (enam) sasaran pokok, sementara Kabupaten Purworejo memiliki 5 (lima) sasaran pokok. Sasaran pokok pertama Provinsi Jawa Tengah selaras dengan sasaran pokok pertama dan kedua Kabupaten Purworejo. Sasaran pokok kedua Provinsi Jawa Tengah selaras dengan sasaran pokok pertama, ketiga, dan kelima Kabupaten Purworejo. Sasaran pokok ketiga Provinsi Jawa Tengah selaras dengan sasaran pokok kelima Kabupaten Purworejo. Sasaran pokok keempat Provinsi Jawa Tengah selaras dengan sasaran pokok pertama dan kelima Kabupaten Purworejo. Sasaran pokok kelima Provinsi Jawa Tengah selaras dengan sasaran pokok kedua Kabupaten Purworejo. Sasaran pokok keenam Provinsi Jawa Tengah selaras dengan sasaran pokok pertama, ketiga, dan keempat Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah memiliki 17 (tujuh belas) arah pembangunan, sementara Kabupaten Purworejo memiliki 10 (sepuluh). Arah pembangunan pertama Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan ketiga Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan kedua Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan keempat Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan ketiga Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan pertama Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan keempat dan kelima Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan pertama Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan keenam Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan kelima Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan ketujuh Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan pertama Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan kedelapan





Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan ketiga Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan kesembilan Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan kelima Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan kesebelas Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan pertama Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan kedua belas Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan kelima Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan ketiga belas dan keempat belas Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan kedua Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan kelima belas Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan keempat Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan keenam belas Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan pertama dan ketiga Kabupaten Purworejo. Arah pembangunan ketujuh belas Provinsi Jawa Tengah selaras dengan arah pembangunan keempat Kabupaten Purworejo.

Arah pembangunan Kabupaten Purworejo yang dirumuskan telah diselaraskan dengan arah pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo memiliki 10 (sepuluh) arah pembangunan: Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah; kemandirian pangan; kesehatan untuk semua; pendidikan berkualitas secara inklusif; pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas; tata kelola yang agile, adaptif, dan kolaboratif; transformasi digital; dan ketentraman dan ketertiban. Kesepuluh arah pembangunan ini perlu dicapai dan diukur melalui 56 (lima puluh enam) indikator utama pembangunan yang seragam di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Tabel berikut ini menunjukkan target-target indikator utama pembangunan pada tiap periode yang telah disusun berdasarkan *trend*, baseline tahun terakhir (2023), maupun tahun 2025.





Tabel 5.7. Indikator Utama Pembangunan dan Target per Periode RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline (2025)	Target P I	Target P II	Target P III	Target P IV
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah	1	Tingkat Kemiskinan	%	9,04 – 10,22	8,30 – 7,30	5,88 – 4,88	3,45 – 2,45	0,00 – 0,53
	36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	2,97 – 2,57	2,64 – 2,24	2,30 – 2,10	1,76 – 1,46
	35	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,56	55,86	86,23	116,60	153,05
	56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,36	22,56	24,06	25,56	27,36
	38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	43,60	47,43	51,27	55,87
	26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,01	4,48	5,06	5,64	6,34
	27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,85	5,05	7,80	10,55	13,85
	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,3	21,04	21,97	22,9	24,02
	24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,81	3,71	4,61	5,50	6,40
	25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	265	312	371	430	500
	29	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	27,32	27,96	28,59	29,23
	34	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,30	2,40	2,60	2,80	3,00
2. Kemandirian Pangan	3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	85,21	86,38	87,55	88,72	89,89
	2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	12,50	10,23	7,96	5,69	3,42
	45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	70,99	72,79	75,05	77,30	80,00
3. Kesehatan untuk Semua	4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,55	77,09	78,64	80,18	81,72
	5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5	4	3	2	1
	6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	18,87	16,11	12,66	9,21	5,07
	7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
	8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	91,25	92,50	93,75	95,00





Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline (2025)	Target P I	Target P II	Target P III	Target P IV	
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	96,34	96,97	97,76	98,55	99,50	
4. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):							
		a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	66,80	69,16	72,11	75,05	78,59	
		b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	80,62	83,51	87,12	90,73	95,06	
		c. Numerasi SD/ Sederajat	%	52,28	58,57	66,43	74,29	83,72	
			d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	70,62	74,33	78,97	83,61	89,17
	11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,62	10,27	10,91	11,56	12,20	
	12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	14,52	15,01	15,51	16,00	
	13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,39	9,02	9,80	10,59	11,53	
	14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	87,06	89,29	92,08	94,87	98,21	
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,06	0,58	1,10	1,62	2,14		
5. Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	73,03	75,14	77,25	79,35	81,46	
	16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	29,90	33,03	36,94	40,86	45,55	
	17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	58.489	59.791	61.419	63.047	65.000	
	18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	34,64	36,22	38,19	40,16	42,53	
	21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	67,95	71,68	75,40	79,12	
	22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,33	0,30	0,26	0,22	0,18	
	37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,07	69,05	73,03	77,00	80,98	
6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai	41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	66,53	71,15	75,77	80,38	85,00	





Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline (2025)	Target P I	Target P II	Target P III	Target P IV
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Pusat Pertumbuhan Ekonomi	42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	39,21	43,61	48,02	52,42	56,83
	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	71,85	72,84	74,08	75,31	76,8
	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	76,32	84,22	92,11	100,00
	44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	34,85	51,47	68,08	84,70	100,00
	43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	22,84	38,88	54,92	70,96	87,00
	37	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	30,00	42,00	57,00	72,00	90,00
7. Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana, serta Lingkungan Hidup Berkualitas	49	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2eq	133.264,42	2.523.294,51	5.510.832,13	8.498.369,75	12.083.414,89
	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76,21	76,43	76,65	76,92
	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	124,57	116,94	109,30	101,67	94,03
8. Tata Kelola yang Agile, Adaptif, dan Kolaboratif	50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,95	71,16	73,92	76,68	80,00
	51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	58,86	65,09	72,88	80,66	90,00
	54	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,61	80,68	84,75	88,82	92,89
	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,72	0,70	0,69	0,67
	32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,33	5,42	5,54	5,66	5,80
	33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,87	5,96	6,08	6,20	6,34
	28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	4,34	6,62	9,47	12,31	15,73
	35	Persentase Desa Mandiri	%	0,43	2,56	4,90	7,25	9,59
9. Transformasi Digital	53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,73	4,05	4,37	4,68	5,00
	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00
10. Ketenteraman dan Ketertiban	20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0





Seluruh indikator utama pembangunan (56) pada tabel di atas merupakan ukuran atas ketercapaian dan dukungan terhadap arah pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional di masing-masing periode RPJPD. Pada arah pembangunan Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah, terdapat 13 (tiga belas) indikator utama pembangunan, yakni Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten, Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Rasio Kewirausahaan Daerah, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, Disparitas Harga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, serta Kapabilitas Inovasi. Pada arah pembangunan kemandirian pangan terdapat 3 (tiga) indikator utama pembangunan: Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten. Pada arah pembangunan kesehatan untuk semua, terdapat 6 (enam) indikator utama pembangunan, antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Jumlah Kasus Kematian Ibu, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita, Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*), Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*), dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pada arah pembangunan pendidikan berkualitas secara inklusif, terdapat 6 (enam) indikator utama pembangunan, yakni Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): Literasi Membaca SD/ Sederajat, Literasi Membaca SMP/ Sederajat, Numerasi SD/ Sederajat, Numerasi SMP/ Sederajat; Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun; Harapan Lama Sekolah; Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi; Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun; serta Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan. Pada arah pembangunan pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, dirumuskan 7 (tujuh) indikator utama pembangunan, yakni Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan, Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan, Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, Persentase Kelompok





Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir, Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pada arah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terdapat 7 (tujuh) indikator utama pembangunan: Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten, Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, dan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah. Pada arah pembangunan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas terdapat 3 (tiga) indikator utama pembangunan, yakni Penurunan Emisi GRK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Risiko Bencana (IRB). Pada arah pembangunan tata kelola yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif dirumuskan 9 (sembilan) indikator utama pembangunan: Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Integritas Nasional, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, *Return on Asset* (ROA) BUMD, Persentase Desa Mandiri, dan Indeks Pelayanan Publik. Pada arah pembangunan transformasi digital, terdapat 1 (satu) indikator utama pembangunan, yakni Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terakhir, pada arah pembangunan ketenteraman dan ketertiban, dirumuskan 1 (satu) indikator utama pembangunan, yakni Jumlah Kejadian Konflik SARA. Seluruh indikator utama pembangunan ini dirumuskan *baseline* (2025) dan targetnya per masing-masing periode: Periode I (2025-2029), Periode II (2030-2034), Periode III (2035-2039), serta Periode IV (2040-2045).

Selanjutnya, arah pembangunan dirinci per periode melalui arah kebijakan pada arah pembangunan. Arah kebijakan pada arah pembangunan ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan transformasi daerah yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional





Tahun 2025-2045. Tabel berikut ini menunjukkan arah kebijakan pada arah pembangunan per periode RPJPD Kabupaten Purworejo.

Tabel 5.8. Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	1. Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah	Peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah	Percepatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah	Pemantapan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah	Perwujudan perekonomian daerah yang produktif dan inklusif
		Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas industri yang inklusif	Percepatan untuk peningkatan produktivitas industri yang inklusif	Pemantapan produktivitas industri yang inklusif	Perwujudan industri yang inklusif
		Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas pariwisata yang inklusif	Percepatan upaya peningkatan produktivitas pariwisata yang inklusif	Pemantapan produktivitas pariwisata yang inklusif	Perwujudan pariwisata yang inklusif
		Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas perdagangan yang inklusif	Percepatan upaya peningkatan produktivitas perdagangan yang inklusif	Pemantapan produktivitas perdagangan yang inklusif	Perwujudan perdagangan yang inklusif
		Penguatan landasan untuk terbentuknya ekosistem investasi yang kondusif	Percepatan upaya peningkatan kondusivitas ekosistem investasi daerah	Pemantapan kondusivitas ekosistem investasi daerah	Perwujudan ekosistem investasi daerah yang kondusif
		Penguatan landasan untuk terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang efektif	Percepatan upaya terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang efektif	Pemantapan ekosistem riset dan inovasi yang efektif	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi yang efektif
	2. Kemandirian Pangan	Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas pertanian yang inklusif	Percepatan upaya peningkatan produktivitas pertanian yang inklusif	Pemantapan produktivitas pertanian yang inklusif	Perwujudan pertanian yang inklusif
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan	3. Kesehatan untuk Semua	Pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Percepatan peningkatan sistem layanan kesehatan yang tangguh dan responsif.	Pemantapan kualitas layanan kesehatan yang tangguh dan responsif.	Perwujudan kesehatan yang tangguh dan responsif





Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera	4. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	Pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata.	Percepatan peningkatan sistem pelayanan dasar pendidikan yang inklusif	Pemantapan kualitas pelayanan dasar pendidikan yang inklusif.	Perwujudan pendidikan yang unggul dan berdaya saing
	5. Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat.	Percepatan peningkatan kualitas lingkungan sosial budaya yang maju dan berkarakter	Pemantapan kualitas lingkungan sosial budaya yang maju dan berkarakter	Perwujudan lingkungan sosial yang maju dan berbudaya
3. Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas infrastruktur wilayah yang merata untuk mendukung konektivitas transportasi antar moda dan antar wilayah dengan berbasis layanan infrastruktur digital	Penguatan infrastruktur wilayah serta infrastruktur digital yang merata menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi	Pemantapan infrastruktur wilayah serta infrastruktur digital yang merata dengan memperkuat interaksi wilayah perkotaan - perdesaan	Perwujudan pembangunan berkelanjutan dengan infrastruktur wilayah dan infrastruktur digital yang merata baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
		Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang meliputi air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah)	Penguatan infrastruktur pelayanan dasar permukiman untuk mewujudkan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat	Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar permukiman untuk mewujudkan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat	Perwujudan permukiman layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang baik dan kolaboratif
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	7. Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana, serta Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi serta peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien	Penguatan ketahanan ekologi melalui penciptaan iklim yang kondusif serta pengelolaan sumber daya air yang efisien	Pemantapan ketahanan ekologi melalui penciptaan iklim yang kondusif serta pengelolaan sumber daya air yang efisien guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai modal pembangunan
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana serta	Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana	Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana	Perwujudan daerah dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana yang





Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		kolaborasi antar pemangku kepentingan			tinggi dan kolaboratif
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	8. Tata Kelola yang Agile, Adaptif, dan Kolaboratif	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Pemantapan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah yang agile dan kolaboratif
		Peningkatan pelayanan publik	Pelayanan publik yang adaptif	Pelayanan publik yang kolaboratif	Perwujudan pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif
	9. Transformasi Digital	Peningkatan digitalisasi pemerintahan	Digitalisasi pemerintahan yang adaptif	Digitalisasi pemerintahan yang kolaboratif	Perwujudan digitalisasi pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif
	10. Ketenteraman dan Ketertiban	Penurunan kejadian kejahatan	Percepatan kohesi sosial	Pemantapan kohesi sosial	Perwujudan kohesi sosial yang aman dan tertib

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa arah pembangunan Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah dirinci dalam 6 (enam) arah kebijakan. Arah pembangunan kemandirian pangan; kesehatan untuk semua; pendidikan berkualitas secara inklusif; serta pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif masing-masing dijabarkan dalam 1 (satu) arah kebijakan. Arah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas; dan tata kelola yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif masing-masing dirinci dalam 2 (dua) arah kebijakan. Arah pembangunan transformasi digital dijelaskan dalam 1 (satu) arah kebijakan. Terakhir, arah pembangunan ketenteraman dan ketertiban dijelaskan dalam 1 (satu) arah kebijakan.

5.2.1. Arah Pembangunan 1: Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah

Dalam RPJPD Kabupaten Purworejo periode 2025-2045, pembangunan akan diarahkan pada produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah. Produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah merupakan pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan





mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan ekonomi harus difokuskan pada sektor sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan arah pembangunan ini meliputi 1) Tingkat Kemiskinan, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten, 4) Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia, 5) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 6) Rasio Kewirausahaan Daerah, 7) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, 8) Rasio PDRB Industri Pengolahan, 9) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, 10) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, 11) Disparitas Harga, 12) Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan 13) Kapabilitas Inovasi. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Arah pembangunan ini difokuskan pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di samping itu, tingkat kemiskinan diharapkan dapat mencapai 0,00-0,53% pada tahun 2045 melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin/ rentan.

5.2.2. Arah Pembangunan 2: Kemandirian Pangan

Sektor pertanian dalam arti luas menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Purworejo yang sampai dua puluh tahun ke depan masih akan menjadi unggulan untuk menopang perekonomian daerah. Sektor pertanian yang saat ini masih fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Kebijakan peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan penting dalam membangun perekonomian daerah yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian terutama petani/nelayan. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan arah pembangunan ini meliputi 1) Indeks Ketahanan Pangan (IKP), 2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), dan 3) Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten. Pada arah pembangunan ini diharapkan dapat diterapkan ekonomi biru. Ekonomi biru menjadi strategi yang





menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem.

5.2.3. Arah Pembangunan 3: Kesehatan untuk Semua

Arah pembangunan kesehatan untuk semua dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas secara merata dan berkeadilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan dan daya saing seluruh masyarakat bagi pencapaian tujuan pembangunan.

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk pada seluruh siklus kehidupan, di seluruh wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pelayanan kesehatan yang inklusif akan dicapai dengan memenuhi ketersediaan sumberdaya kesehatan, pelaksanaan upaya kesehatan yang komprehensif, penyiapan regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, penerapan teknologi dan inovasi bidang kesehatan, menciptakan ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan.

Pembangunan kesehatan difokuskan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

Arah pembangunan kesehatan untuk semua mendukung sasaran visi kedua, misi kedua, serta sasaran pokok kedua. Pada periode pertama (2025-2029), diharapkan terjadi pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang





terjangkau dan berkualitas. Pada periode kedua (2030-2034), diharapkan tercipta percepatan peningkatan sistem layanan kesehatan yang tangguh dan responsif. Pada periode ketiga (2035-2040), diharapkan tercipta pemantapan kualitas layanan kesehatan yang tangguh dan responsif. Terakhir pada periode keempat (2040-2045), diharapkan tercapai Perwujudan kesehatan yang tangguh dan responsif. Arah kebijakan pada arah pembangunan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) indikator utama pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan arah pembangunan ini meliputi 1) Usia Harapan Hidup (UHH), 2) Jumlah Kasus Kematian Ibu, 3) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita, 4) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*), 5) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*), dan 6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

5.2.4. Arah Pembangunan 4: Pendidikan Berkualitas secara Inklusif

Pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Meningkatnya derajat pendidikan penduduk mampu menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*).

Arah pembangunan pendidikan berkualitas secara inklusif difokuskan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, penguatan kurikulum pendidikan, penguatan prestasi peserta didik, pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Arah pembangunan pendidikan berkualitas secara inklusif mendukung sasaran visi kedua, misi kedua, serta sasaran pokok kedua. Pada periode pertama (2025-2029), diharapkan terjadi pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata. Pada periode kedua (2030-2034), diharapkan tercipta percepatan peningkatan sistem pelayanan dasar pendidikan yang inklusif. Pada periode ketiga (2035-2040), diharapkan tercipta pemantapan kualitas pelayanan dasar pendidikan yang inklusif. Terakhir pada periode keempat (2040-2045), diharapkan tercapai





Perwujudan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Arah kebijakan pada arah pembangunan ini dilaksanakan melalui 6 (enam) indikator utama pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan arah pembangunan ini meliputi 1) Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): a) Literasi Membaca SD/ Sederajat, b) Literasi Membaca SMP/ Sederajat, c) Numerasi SD/ Sederajat, d) Numerasi SMP/ Sederajat; 2) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun; 3) Harapan Lama Sekolah; 4) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi; 5) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun; 6) serta Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

5.2.5. Arah Pembangunan 5: Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dimaksudkan untuk memantapkan ketahanan sosial budaya dengan memperkuat individu laki-laki maupun perempuan, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan tahan terhadap perubahan zaman. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai modal pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan. Pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Seluruh lapisan masyarakat diarahkan untuk lebih berdaya dan memiliki peran dalam pembangunan sehingga diarahkan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Arah pembangunan pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif mendukung sasaran visi kedua, misi kedua, serta sasaran pokok kedua. Pada periode pertama (2025-2029),





diharapkan terjadi penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat. Pada periode kedua (2030-2034), diharapkan tercipta percepatan peningkatan kualitas lingkungan sosial budaya yang maju dan berkarakter. Pada periode ketiga (2035-2040), diharapkan tercipta pemantapan kualitas lingkungan sosial budaya yang maju dan berkarakter. Terakhir pada periode keempat (2040-2045), diharapkan tercapai perwujudan lingkungan sosial yang maju dan berbudaya. Arah kebijakan pada arah pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) indikator utama pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan arah pembangunan ini meliputi 1) Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan, 2) Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan, 3) Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, 4) Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir. 5) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), 6) Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 7) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

5.2.6. Arah Pembangunan 6: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting dalam mewujudkan infrastruktur yang merata dan terpadu, yang merupakan landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterhubungan antara kedua wilayah ini memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem infrastruktur yang holistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di perkotaan, infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan mencakup jaringan transportasi yang efisien dan akses yang memadai. Di sisi lain, perdesaan membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung sektor-sektor vital seperti pertanian dan pariwisata. Membangun infrastruktur yang merata dan terpadu di wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Purworejo dapat meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas antar wilayah, meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Indikator untuk mencapai keberhasilan ini meliputi 1) Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten, 2) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten, 3) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet,





4) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 5) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian, 6) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, 7) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah.

5.2.7. Arah Pembangunan 7: Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana, serta Lingkungan Hidup Berkualitas

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim penting untuk diperhatikan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, gelombang pasang dan tsunami tidak dapat dihindari dan dapat terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan iklim, sementara aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan dapat memperburuk dampaknya. Oleh karenanya, mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga tentang membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim. Indikator utama pembangunan pada arah pembangunan ini meliputi: 1) Penurunan emisi GRK, 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dan 3) Indeks Risiko Bencana (IRB).

5.2.8. Arah Pembangunan 8: Tata Kelola yang Agile, Adaptif, dan Kolaboratif

Arah pembangunan tata kelola yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif mendukung sasaran visi keempat, misi kelima, serta sasaran pokok kelima. Pada periode pertama (2025-2029), diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah serta peningkatan pelayanan publik. Pada periode kedua (2030-2034), diharapkan tercipta penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan pelayanan publik yang adaptif. Pada periode ketiga (2035-2040), diharapkan tercipta pemantapan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan pelayanan publik yang kolaboratif. Terakhir pada periode keempat (2040-2045), diharapkan tercapai perwujudan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah yang *agile* dan kolaboratif, serta pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif. Arah kebijakan pada arah pembangunan ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) indikator utama pembangunan. Pada arah pembangunan ini diharapkan pemerintah daerah dapat menggali potensi dan memanfaatkan alternatif pembiayaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih kolaboratif. Di samping itu, dalam rangka peningkatan desa mandiri, diarahkan





pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

5.2.9. Arah Pembangunan 9: Transformasi Digital

Arah pembangunan transformasi digital menjadi bagian penting sebagai roda akselerasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *agile*, adaptif, dan kolaboratif. Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang diarahkan pada indikator utama pembangunan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.2.10. Arah Pembangunan 10: Ketenteraman dan Ketertiban

Arah pembangunan ketenteraman dan ketertiban mendukung sasaran visi keempat, misi kelima, serta sasaran pokok kelima. Pada periode pertama (2025-2029), diharapkan terjadi penurunan kejadian kejahatan. Pada periode kedua (2030-2034), diharapkan tercipta percepatan kohesi sosial. Pada periode ketiga (2035-2040), diharapkan tercipta pemantapan pemantapan kohesi sosial. Terakhir pada periode keempat (2040-2045), diharapkan terwujud kohesi sosial yang aman dan tertib. Arah kebijakan pada arah pembangunan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) indikator utama pembangunan, yakni jumlah kejadian konflik SARA.

Sebanyak 56 (lima puluh enam) indikator utama pembangunan yang merupakan penjabaran dari 1 (satu) visi, 4 (empat) sasaran visi, 5 (lima) misi, 5 (lima) sasaran pokok, serta 10 (sepuluh) arah pembangunan tersebut diharapkan menjadi pedoman setiap perumusan perencanaan daerah ke depan. Hal ini untuk memastikan sinergitas antara dokumen perencanaan, dari perencanaan jangka panjang ke dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Sinergitas antar dokumen perencanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan penyelarasan isu strategis, visi, sasaran visi, indikator sasaran visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan pada arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan.





Tabel 5.9. Penyeragaman Isu Strategis, Visi, Sasaran Visi, Indikator Sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
1. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang produktif dan inklusif	1. PDRB Per Kapita 2. Tingkat Kemiskinan 3. Rasio Gini	1. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	<p>Periode I: Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan</p> <p>Periode II: Percepatan upaya peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan</p> <p>Periode III: Pemantapan upaya peningkatan produktivitas dan inklusivitas</p>	1. Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan	1. Produktivitas dan Inklusivitas Ekonomi Daerah	<p>Periode I: Peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah</p>	1	Tingkat Kemiskinan
								<p>Periode II: Percepatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah</p>	36	Tingkat Pengangguran Terbuka
								<p>Periode III: Pemantapan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah</p>	35	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten
								<p>Periode IV: Perwujudan perekonomian daerah yang produktif dan inklusif</p>	56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia
								<p>Periode I: Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas industri yang inklusif</p>	38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
									26	Rasio Kewirausahaan Daerah
									27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan								





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
					<p>perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan</p> <p>Periode IV: Perwujudan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah yang mendukung ketahanan pangan</p>			<p>Periode II: Percepatan untuk peningkatan produktivitas industri yang inklusif</p> <p>Periode III: Pemantapan produktivitas industri yang inklusif</p> <p>Periode IV: Perwujudan industri yang inklusif</p>		
								<p>Periode I: Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas pariwisata yang inklusif</p>	24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
								<p>Periode II: Percepatan upaya peningkatan produktivitas pariwisata yang inklusif</p> <p>Periode III: Pemantapan produktivitas pariwisata yang inklusif</p> <p>Periode IV: Perwujudan pariwisata yang inklusif</p>	25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
								<p>Periode I: Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas perdagangan yang inklusif</p> <p>Periode II: Percepatan upaya peningkatan produktivitas perdagangan yang inklusif</p> <p>Periode III: Pemantapan produktivitas perdagangan yang inklusif</p> <p>Periode IV: perwujudan perdagangan yang inklusif</p>	29	Disparitas Harga
								<p>Periode I: Penguatan landasan untuk terbentuknya ekosistem investasi yang kondusif</p> <p>Periode II: Percepatan upaya peningkatan kondusifitas ekosistem investasi daerah</p> <p>Periode III:</p>	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
								<p>Pemantapan kondusifitas ekosistem investasi daerah</p> <p>Periode IV: Perwujudan ekosistem investasi daerah yang kondusif</p>		
								<p>Periode I: Penguatan landasan untuk terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang efektif</p> <p>Periode II: Percepatan upaya terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang efektif</p> <p>Periode III: Pemantapan ekosistem riset dan inovasi yang efektif</p> <p>Periode IV: Perwujudan ekosistem riset dan inovasi yang efektif</p>	34	Kapabilitas Inovasi
							2. Kemandirian Pangan	<p>Periode I: Penguatan landasan untuk peningkatan produktivitas pertanian yang inklusif</p> <p>Periode II:</p>	3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
								<p>Periode II:</p>	2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
								Percepatan upaya peningkatan produktivitas pertanian yang inklusif Periode III: Pemantapan produktivitas pertanian yang inklusif Periode IV: Perwujudan pertanian yang inklusif	45	(Prevalence of Undernourishment) Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat		2. Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat	4. Indeks Pembangunan Manusia	2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat	Periode I: Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial budaya yang terintegrasi Periode II: Percepatan pembangunan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial budaya Periode III: Pemantapan lingkungan pendidikan,	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera	3. Kesehatan Untuk Semua	Periode I: Pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang terjangkau dan berkualitas Periode II: Percepatan peningkatan sistem layanan kesehatan yang tangguh dan responsif. Periode III: Pemantapan kualitas layanan kesehatan yang tangguh dan responsif. Periode IV: Pemantapan kesehatan yang tangguh dan responsif	4	Usia Harapan Hidup (UHH)
									5	Jumlah Kasus Kematian Ibu
									6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita
									7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
									8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)
9	Cakupan Kepesertaan									





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
					kesehatan dan sosial budaya yang berkualitas					Jaminan Kesehatan Nasional
					Periode IV: Perwujudan SDM yang berdaya saing dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh yang berkualitas				10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):
								Periode I: Pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata.		a. Literasi Membaca SD/ Sederajat
								Periode II: Percepatan peningkatan sistem pelayanan dasar pendidikan yang inklusif		b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat
								Periode III: Pemantapan kualitas pelayanan dasar pendidikan yang inklusif.		c. Numerasi SD/ Sederajat
								Periode IV: Perwujudan pendidikan yang unggul dan berdaya saing		d. Numerasi SMP/ Sederajat
									11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
									12	Harapan Lama Sekolah
									13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
										Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
									14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun
									19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan
						5. Pemajuan Kebudayaan, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		<p>Periode I: Penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat.</p> <p>Periode II: Percepatan peningkatan kualitas lingkungan sosial budaya yang maju dan berkarakter</p> <p>Periode III: Pemantapan kualitas lingkungan sosial budaya yang maju dan berkarakter</p> <p>Periode IV: Perwujudan lingkungan sosial yang maju dan berbudaya</p>	15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusuta makan Kebudayaan
									16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan
									17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah
									18	Persentase Kelompok Kesenian yang





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
										Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir
									21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
									22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
									37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
3. Belum terpadunya infrastruktur wilayah		3. Terwujudnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, keterpaduan infrastruktur wilayah, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i>	5. Indeks Infrastruktur Daerah	3. Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	Periode I: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan menggunakan prinsip keterpaduan dalam rangka menciptakan aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan	3. Meningkatnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Periode I: Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas infrastruktur wilayah yang merata untuk mendukung konektivitas transportasi antar moda dan antar wilayah dengan berbasis layanan infrastruktur digital Periode II: Penguatan infrastruktur wilayah serta infrastruktur digital yang merata menuju	41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten
									42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten
									39	Persentase Rumah Tangga





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
					<p>penggerak ekonomi</p> <p>Periode II: Memantapkan kualitas infrastruktur wilayah serta aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi</p> <p>Periode III: Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkarakter serta memperkuat interaksi desa-kota</p> <p>Periode IV: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan</p>			<p>pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi</p> <p>Periode III: Pemantapan infrastruktur wilayah serta infrastruktur digital yang merata dengan memperkuat interaksi wilayah perkotaan - perdesaan</p> <p>Periode IV: Perwujudan pembangunan berkelanjutan dengan infrastruktur wilayah dan infrastruktur digital yang merata baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi</p>		dengan Akses Internet
								<p>Periode I: Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang meliputi air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah)</p> <p>Periode II: Penguatan infrastruktur pelayanan dasar</p>	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
									44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
									43	Rumah Tangga





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
								permukiman untuk mewujudkan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat Periode III: Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar permukiman untuk mewujudkan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat Periode IV: Perwujudan permukiman layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang baik dan kolaboratif	37	dengan Akses Sanitasi Aman Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah
4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup			6. Penurunan Emisi GRK	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Periode I: Memperkuat ketahanan ekologi dan manajemen risiko sebagai landasan dan modal dasar pembangunan Periode II: Memantapkan ketahanan ekologi sebagai	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	7. Resiliensi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana, serta Lingkungan Hidup Berkualitas	Periode I: Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi serta peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien Periode II: Penguatan ketahanan ekologi melalui penciptaan iklim yang kondusif serta	49	Penurunan Emisi GRK
									46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
					<p>modal pembangunan</p> <p>Periode III: Mewujudkan ketangguhan lingkungan dan masyarakat yang adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan</p> <p>Periode IV: Mewujudkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berketahanan</p>			<p>pengelolaan sumber daya air yang efisien</p> <p>Periode III: Pemantapan ketahanan ekologi melalui penciptaan iklim yang kondusif serta pengelolaan sumber daya air yang efisien guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas</p> <p>Periode IV: Perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai modal pembangunan</p>		
5. Tingginya risiko bencana								<p>Periode I: Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana serta kolaborasi antar pemangku kepentingan</p> <p>Periode II: Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana</p> <p>Periode III: Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana</p> <p>Periode IV:</p>	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
								Perwujudan daerah dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana yang tinggi dan kolaboratif		
6. Tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif		4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	7. Indeks Reformasi Birokrasi	5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	<p>Periode I: Membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi</p> <p>Periode II: Mengembangkan tata kelola pemerintah yang profesional dan penuh Integritas</p> <p>Periode III: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif</p> <p>Periode IV: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i>,</p>	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang <i>agile</i> , adaptif, dan kolaboratif	8. Tata Kelola yang <i>Agile</i> , Adaptif, dan Kolaboratif	<p>Periode I: Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Periode II: Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Periode III: Pemantapan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Periode IV: Perwujudan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah yang <i>agile</i> dan kolaboratif</p>	50	Indeks Reformasi Birokrasi
									51	Indeks Reformasi Hukum
									54	Indeks Integritas Nasional
									31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
									32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB
									33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB
									28	<i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD
35	Persentase Desa Mandiri									





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
					adaptif dan kolaboratif			<p>Periode I: Peningkatan pelayanan publik</p> <p>Periode II: Pelayanan publik yang adaptif</p> <p>Periode III: Pelayanan publik yang kolaboratif</p> <p>Periode IV: Perwujudan pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif</p>	53	Indeks Pelayanan Publik
							9. Transformasi Digital	<p>Periode I: Peningkatan digitalisasi pemerintahan</p> <p>Periode II: Digitalisasi pemerintahan yang adaptif</p> <p>Periode III: Digitalisasi pemerintahan yang kolaboratif</p> <p>Periode IV: Perwujudan digitalisasi pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif</p>	52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
							10. Ketenteraman dan Ketertiban	<p>Periode I: Penurunan kejadian kejahatan</p>	20	Jumlah Kejadian Konflik SARA





Isu Strategis	Visi	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan pada Arah Pembangunan	No IUP	Indikator Utama Pembangunan (IUP)
								<p>Periode II: Percepatan kohesi sosial</p> <p>Periode III: Pemantapan kohesi sosial</p> <p>Periode IV: Perwujudan kohesi sosial yang aman dan tertib</p>		





BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dan arahan bagi segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, dan
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo.

Guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, maka dalam penyusunannya memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas,
2. Kerangka pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi:
 - a. pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan
 - b. pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko,





3. Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, Lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya,
4. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta
5. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik perluasan sumber pembiayaan maupun optimalisasi peran pengelolaan keuangan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota juga peran aktif segenap *stakeholder* pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Purworejo dua puluh tahun ke depan. Harapan ke depan, dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045 “Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berdaya Saing” akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

BUPATI PURWOREJO,

ttd

YULI HASTUTI

